

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat tersusun. RPJMD ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Dairi selama masa 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) termasuk juga Pemerintahan Desa dalam penyusunan RPJMDes, sehingga kemajuan Kabupaten Dairi yang kita cintai ini dapat meningkat pada masa-masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan DPRD Kabupaten Dairi beserta semua pihak yang telah terlibat dan memberikan sumbang saran dalam penyusunan RPJMD ini.

Njuah-juah, Mejuah-juah, Horas.

Sidikalang, 8 November 2019

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografis.....	II-1
2.2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-17
2.2.1.4 Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi	II-35
2.1.2 Demografi	II-38
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-43
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-43
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-43
2.2.1.2 PDRB Per Kapita	II-48
2.2.1.3 Indeks Gini Kabupaten Dairi	II-49
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-52
2.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin.....	II-52
2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia	II-54
2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-57
2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup	II-59
2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk	II-60
2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Kurang	II-61
2.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	II-62
2.2.3.1 Perkembangan Seni dan Budaya	II-62
2.2.3.1.1 Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	II-62
2.2.3.1.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	II-62
2.2.3.1.3 Jumlah Karya Budaya Yang Di Revitalisasi Dan Inventarisasi	II-63
2.2.3.2 Perkembangan Olahraga.....	II-63
2.2.3.2.1 Kepemudaan dan Olahraga	II-63
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-64
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-64
2.3.1.1 Pendidikan	II-64
2.3.1.1.1 APK (Angka Partisipasi Kasar).....	II-64
2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	II-65
2.3.1.1.3 Angka Putus Sekolah.....	II-65
2.3.1.1.4 Angka Kelulusan.....	II-66
2.3.1.1.5 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan.....	II-66
2.3.1.1.6 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah.....	II-67
2.3.1.2 Kesehatan.....	II-67

2.3.1.2.1	Angka Kematian Bayi.....	II-67
2.3.1.2.2	Jumlah Kematian Ibu	II-68
2.3.1.2.3	Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar	II-68
2.3.1.2.4	Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	II-69
2.3.1.2.5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.....	II-70
2.3.1.2.6	Cakupan Kunjungan Bayi.....	II-70
2.3.1.2.7	Cakupan Pelayan Anak Balita.....	II-71
2.3.1.3	Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang.....	II-71
2.3.1.3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	II-71
2.3.1.3.2	Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik.....	II-72
2.3.1.3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang Bersih.....	II-73
2.3.1.3.4	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	II-74
2.3.1.3.5	Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Mengurus IMB.....	II-75
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	II-75
2.3.1.4.1	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU.....	II-75
2.3.1.4.2	Persentase Rumah Layak Huni	II-75
2.3.1.4.3	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.....	II-77
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-77
2.3.1.5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)	II-77
2.3.1.5.2	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	II-78
2.3.1.5.3	Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Politik.....	II-78
2.3.1.5.4	Tokoh Agama/Adat/Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kawasan Kebangsaan.....	II-79
2.3.1.6	Sosial.....	II-79
2.3.1.6.1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-81
2.3.1.6.2	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	II-81
2.3.1.6.3	Persentase Tingkat Kemiskinan	II-82
2.3.1.6.4	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial	II-83
2.3.1.6.5	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat.....	II-83
2.3.2	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-84

2.3.2.1	Tenaga Kerja.....	II-84
2.3.2.1.1	Besaran Pencari Kerja yang Ditempatkan.....	II-84
2.3.2.1.2	Angkatan Kerja	II-84
2.3.2.1.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-85
2.3.2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-85
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	II-86
2.3.2.2.1	Penanganan Pemberdayaan Perempuan	II-86
2.3.2.2.2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif	II-86
2.3.2.3	Pangan	II-87
2.3.2.4	Pertanahan.....	II-87
2.3.2.5	Lingkungan Hidup.....	II-88
2.3.2.5.1	Lahan Kritis.....	II-88
2.3.2.5.2	Persampahan.....	II-88
2.3.2.5.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan.....	II-89
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-89
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-90
2.3.2.7.1	Terfasilitasnya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .	II-90
2.3.2.7.2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK).....	II-91
2.3.2.7.3	Posyandu Aktif.....	II-91
2.3.2.7.4	LSM Aktif.....	II-91
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-91
2.3.2.8.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif.....	II-92
2.3.2.8.2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB Tapi Tidak Terpenuhi.....	II-92
2.3.2.8.3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	II-93
2.3.2.8.4	Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB.....	II-93
2.3.2.8.5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB	II-94
2.3.2.8.6	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan	II-94
2.3.2.9	Perhubungan.....	II-95
2.3.2.9.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.....	II-95
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-95
2.3.2.10.1	Jumlah Media yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)....	II-95
2.3.2.11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-96
2.3.2.11.1	Jumlah Koperasi Aktif	II-96
2.3.2.11.2	Jumlah Usaha Mikro	II-96
2.3.2.12	Penanaman Modal	II-97

2.3.2.12.1	Persentase Ijin yang Terbit Sesuai Dengan SOP	II-97
2.3.2.12.2	Persentase Peningkatan Investasi	II-97
2.3.2.12.3	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan	II-98
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-98
2.3.2.13.1	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan.....	II-99
2.3.2.13.2	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga	II-99
2.3.2.13.3	Persentase Penanganan Gedung Olah raga/Lapangan Olah Raga	II-100
2.3.2.14	Perpustakaan dan Kearsipan.....	II-100
2.3.2.14.1	Jumlah Arsip yang Dilestarikan.....	II-100
2.3.2.14.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	II-101
2.3.2.15	Kebudayaan	II-101
2.3.2.15.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi	II-101
2.3.2.15.2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya	II-102
2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-102
2.3.3.1	Pertanian.....	II-102
2.3.3.1.1	Tanaman Pangan.....	II-102
2.3.3.1.2	Hortikultura	II-103
2.3.3.1.3	Tanaman Perkebunan Kopi.....	II-104
2.3.3.1.4	Peternakan	II-104
2.3.3.1.4.1	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan / Ternak	II-105
2.3.3.1.4.2	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak Di RPH Sidikalang.....	II-106
2.3.3.2	Perikanan	II-106
2.3.3.2.1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.....	II-106
2.3.3.2.2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	II-108
2.3.3.3	Pariwisata.....	II-108
2.3.3.3.1	Kunjungan Wisata	II-108
2.3.3.3.2	Jumlah Objek Wisata yang Berkembang yang Ditangani.....	II-109
2.3.3.4	Perindustrian dan Perdagangan.....	II-109
2.3.3.4.1	Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis.....	II-109
2.3.3.4.2	Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi	II-110
2.3.3.4.3	Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok.....	II-110
2.3.3.4.4	Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan.....	II-111
2.3.3.4.5	Jumlah Alat UTP yang Ditera/Teraulang.....	II-111
2.3.4	Fokus Layanan Penunjang Umum.....	II-112
2.3.4.1	Pemerintahan Umum.....	II-112
2.3.4.1.1	Sekretariat Daerah.....	II-112

2.3.4.1.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.....	II-112
2.3.4.1.1.2	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	II-112
2.3.4.1.1.3	Rekomendasi LKPJ.....	II-112
2.3.4.1.1.4	Nilai LPPD	II-113
2.3.4.1.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-113
2.3.4.1.1.6	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/Rastra..	II-113
2.3.4.1.1.7	Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik	II-114
2.3.4.1.1.8	Jumlah Informasi Publik yang Dihasilkan	II-114
2.3.4.1.1.9	Jenis Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi..	II-115
2.3.4.1.1.10	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II-115
2.3.4.1.2	Sekretariat Dewan	II-115
2.3.4.1.2.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	II-116
2.3.4.1.3	Inspektorat	II-116
2.3.4.1.3.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	II-116
2.3.4.1.3.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan yang Ditindaklanjuti.....	II-116
2.3.4.2	Perencanaan Pembangunan	II-117
2.3.4.2.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	II-118
2.3.4.2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan ...	II-118
2.3.4.2.3	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan	II-119
2.3.4.2.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	II-119
2.3.4.2.5	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten.....	II-120
2.3.4.3	Keuangan	II-120
2.3.4.3.1	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-120
2.3.4.3.2	Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	II-121
2.3.4.3.3	Opini Laporan Keuangan	II-121
2.3.4.3.4	Penyusunan APBD Tepat Waktu	II-121
2.3.4.3.5	Penyusunan RKPD Tepat Waktu	II-122
2.3.4.3.6	Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS	II-122
2.3.4.4	Aparatur dan Kepegawaian.....	II-122

2.3.4.4.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	II-123
2.3.4.4.2	Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan.....	II-123
2.3.4.4.3	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	II-124
2.3.4.4.4	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional...	II-124
2.3.4.5	Penanggulangan Bencana Daerah	II-125
2.3.4.5.1	Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah yang Dilaksanakan	II-125
2.3.4.5.2	Terbentuknya Desa Tangguh Berencana	II-125
2.3.4.5.3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana	II-126
2.3.4.5.4	Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana	II-126
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-127
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-127
2.4.1.1	Pengeluaran masyarakat Per Kapita	II-127
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-128
2.4.3	Fokus Iklim Investasi.....	II-130
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-132
2.4.4.1	Ketenagakerjaan.....	II-132
2.5	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Dairi	II-136
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014-2018	III-5
3.1.2	Neraca Daerah	III-19
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-24
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-25
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-26
3.3	Kerangka Pendanaan	III-30
3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III-31
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	III-33
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-42
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		IV-1
4.1	Permasalahan	IV-1
4.1.1	Permasalahan Pokok Pembangunan	IV-2
4.1.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah....	IV-12
4.2	Isu - Isu Strategis	IV-30
4.2.1	Isu Strategis Internasional	IV-30
4.2.1.1	Isu Global/ Internasional	IV-30
4.2.1.2	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	IV-33
4.2.1.3	Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-34
4.2.2	Isu Strategis Nasional.....	IV-45
4.2.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	IV-45
4.2.2.2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-48
4.2.3	Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	IV-54
4.2.4	Rumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2020-2024.....	IV-64

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1 Visi Pembangunan Daerah V-2

5.2 Misi Pembangunan Daerah V-3

5.2.1 Misi 1 V-3

5.2.2 Misi 2 V-5

5.2.3 Misi 3 V-6

5.2.4 Misi 4 V-8

5.2.5 Misi 5 V-10

5.3 Tujuan Dan Sasaran..... V-12

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH VI-1**

6.1 Strategi VI-1

6.2 Arah Kebijakan VI-8

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial VI-9

6.4 Program Pembangunan Daerah VI-15

6.5 Arah Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) VI-37

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH VII-1**

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan..... VII-2

7.2 Program Perangkat Daerah VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Pedoman Transisi IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi	II-1
Tabel 2.2	Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi	II-7
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi	II-10
Tabel 2.4	Daerah Irigasi di Kabupaten Dairi	II-11
Tabel 2.5	Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi	II-13
Tabel 2.6	Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi	II-14
Tabel 2.7	Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi	II-14
Tabel 2.8	Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi	II-15
Tabel 2.9	Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi	II-16
Tabel 2.10	Sejarah Kejadian Bencana di Kab. Dairi Tahun 2004-2016	II-18
Tabel 2.11	Matriks Resiko Gempa Bumi Kabupaten Dairi	II-19
Tabel 2.12	Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi	II-20
Tabel 2.13	Matriks Resiko Banjir Bandang Kabupaten Dairi	II-21
Tabel 2.14	Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi	II-22
Tabel 2.15	Matriks Resiko Tanah Longsor Kabupaten Dairi	II-24
Tabel 2.16	Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi	II-25
Tabel 2.17	Matriks Resiko Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi	II-27
Tabel 2.18	Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi	II-28
Tabel 2.19	Matriks Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi	II-30
Tabel 2.20	Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi	II-31
Tabel 2.21	Matriks Resiko Kekeringan Kabupaten Dairi	II-33
Tabel 2.22	Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi	II-34
Tabel 2.23	Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2018	II-39
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2018	II-39
Tabel 2.25	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	II-41
Tabel 2.26	Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2014-2018	II-44
Tabel 2.27	Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2014 -2018	II-45
Tabel 2.28	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku	II-46
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 -2018	II-46
Tabel 2.30	PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (Rupiah)	II-48

Tabel 2.31	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Dairi dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 -2018	II-48
Tabel 2.32	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, 2016 dan 2017	II-54
Tabel 2.33	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	II-56
Tabel 2.34	IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi, 2018	II-56
Tabel 2.35	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2014-2018	II-62
Tabel 2.36	Penanganan Cagar Budaya.....	II-63
Tabel 2.37	Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Dairi, Tahun 2014-2018	II-63
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018.....	II-64
Tabel 2.39	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018.....	II-65
Tabel 2.40	Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018	II-65
Tabel 2.41	Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018	II-66
Tabel 2.42	Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018	II-66
Tabel 2.43	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2014 – 2018	II-87
Tabel 2.44	Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Dairi, 2014-2016	II-87
Tabel 2.45	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2014 – 2018	II-112
Tabel 2.46	Rekomendasi LKPJ Tahun 2014 – 2018.....	II-112
Tabel 2.47	Nilai LPPD Tahun 2014 – 2018	II-113
Tabel 2.48	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2014 – 2018.....	II-113
Tabel 2.49	Peningkatan Kapabilitas APIPTahun 2014 – 2018.....	II-116
Tabel 2.50	Opini Laporan Keuangan Tahun 2014 – 2018.....	II-121
Tabel 2.51	Penyusunan APBD Tepat Waktu Tahun 2014 – 2018	II-121
Tabel 2.52	Penyusunan LKPD Tepat Waktu Tahun 2014 – 2018.....	II-122
Tabel 2.53	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2016	II-128
Tabel 2.54	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2017.....	II-128
Tabel 2.55	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Ncihodi Kabupaten Dairi Tahun 2012-2016.....	II-129
Tabel 2.56	Jumlah Pelanggan pada PT PLN (Persero) Ranting Sidikalang Tahun 2016	II-130
Tabel 2.57	Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Dairi Tahun 2015	II-130
Tabel 2.58	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Dairi, 2014, 2015 dan 2017	II-132
Tabel 2.59	Jumlah Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Dairi menurut Kegiatan Seminggu yang lalu, 2014, 2015, dan 2017	II-133
Tabel 2.60	Persentase Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2014, 2015, 2017	II-135

Tabel 2.61	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Dairi	II-137
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dairi Dalam Persen (2014-2018)	III-5
Tabel 3.2	Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	III-8
Tabel 3.3	Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	III-11
Tabel 3.4	Nilai Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018 .	III-15
Tabel 3.5	Nilai Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018 .	III-18
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Dairi Per 31 Desember 2014-2017 (Rp).....	III-20
Tabel 3.7	Hasil Perhitungan Neraca Kabupaten Dairi.....	III-24
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi	III-25
Tabel 3.9	Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Dairi	III-27
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	III-29
Tabel 3.11	Pengeluaran Periodik Wajig dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Dairi	III-32
Tabel 3.12	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.....	III-34
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	III-36
Tabel 3.14	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	III-39
Tabel 3.15	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	III-41
Tabel 3.16	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.....	III-43
Tabel 3.17	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-204	III-45
Tabel 4.1	Permasalahan Pokok Pembangunan di Kabupaten Dairi...	IV-7
Tabel 4.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	IV-12
Tabel 4.3	Identifikasi Daftar Panjang Isu Strategis Dimensi Sosial....	IV-37
Tabel 4.4	Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Sosial	IV-39
Tabel 4.5	Identifikasi Daftar Panjang Isu Strategis Dimensi Ekonomi	IV-40
Tabel 4.6	Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Ekonomi	IV-41
Tabel 4.7	Identifikasi Daftar Panjang Isu Strategis Dimensi Lingkungan	IV-42
Tabel 4.8	Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Lingkungan	IV-43
Tabel 4.9	Identifikasi Isu Strategis Dimensi Hukum dan Tata Kelola	IV-43
Tabel 4.10	Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Hukum dan Tata Kelola	IV-44
Tabel 4.11	Persandingan Isu Strategis	IV-45
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-224	V-16
Tabel 6.1	Visi,Misi,Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.....	VI-5

Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	VI-9
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	IV-23
Tabel 6.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	IV-35
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	VII-3
Tabel 7.2	Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	VII-5
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	VII-9
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

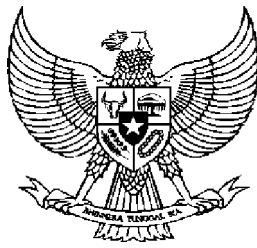
Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan, Pelaksanaan serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	I-5
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	I-12
Gambar 1.3	Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang.....	I-13
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Dairi	II-3
Gambar 2.3	Peta Kelereng Kabupaten Dairi	II-4
Gambar 2.4	Peta Morfologi Kabupaten Dairi	II-4
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Dairi	II-5
Gambar 2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Dairi.....	II-6
Gambar 2.7	Peta Hidrologi Kabupaten Dairi.....	II-8
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan Kabupaten Dairi	II-9
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dairi.....	II-10
Gambar 2.10	Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi.....	II-20
Gambar 2.11	Peta Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Dairi	II-23
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi.....	II-26
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Dairi	II-29
Gambar 2.14	Peta Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi.....	II-32
Gambar 2.15	Peta Indeks Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi	II-35
Gambar 2.16	Persentase Jumlah Penduduk	II-40
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2018.....	II-42
Gambar 2.18	Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi, PDRB Sumatera Utara dan PDB Nasional, Tahun 2014-2018 (Persen).....	II-47
Gambar 2.19	PDRB per kapita Kabupaten Dairi ADHB dan ADHK 2010, 2014-2018 (Rupiah)	II-49
Gambar 2.20	Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2010-2017	II-51
Gambar 2.21	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (%)	II-53
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-54
Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (%)	II-55
Gambar 2.24	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, 2014–2018 (Tahun)	II-57
Gambar 2.25	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, 2014–2018 (Tahun)	II-58
Gambar 2.26	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, 2014-2018 (Tahun)	II-59
Gambar 2.27	Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2014 – 2018.....	II-60
Gambar 2.28	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2014 – 2018	II-61
Gambar 2.29	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni Budaya Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-62
Gambar 2.30	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-67

Gambar 2.31	Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-67
Gambar 2.32	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-68
Gambar 2.33	Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018.....	II-69
Gambar 2.34	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018.....	II-69
Gambar 2.35	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018.....	II-70
Gambar 2.36	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-70
Gambar 2.37	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018	II-71
Gambar 2.38	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018.....	II-72
Gambar 2.39	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018.....	II-72
Gambar 2.40	Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018.....	II-73
Gambar 2.41	Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2014 – 2018.....	II-74
Gambar 2.42	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten Tahun 2014 – 2018.....	II-74
Gambar 2.43	Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2014 – 2018	II-75
Gambar 2.44	Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2014 – 2018.....	II-76
Gambar 2.45	Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2014 – 2018.....	II-76
Gambar 2.46	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2014 – 2018	II-77
Gambar 2.47	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2014 – 2018.....	II-78
Gambar 2.48	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik Tahun 2014 – 2018.....	II-78
Gambar 2.49	Jumlah Tokoh Agama/Adat/ Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun 2014 – 2018.....	II-79
Gambar 2.50	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018.....	II-81
Gambar 2.51	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan SosialKabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018.....	II-82
Gambar 2.52	Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2014 – 2018.....	II-82
Gambar 2.53	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2014 – 2018	II-83
Gambar 2.54	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2014 – 2018	II-83
Gambar 2.55	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2014 – 2018	II-84
Gambar 2.56	Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2014 – 2018.....	II-85
Gambar 2.57	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2014 – 2018..	II-85
Gambar 2.58	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 – 2018.....	II-85
Gambar 2.59	Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014 – 2018.....	II-86

Gambar 2.60	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2014 – 2018.....	II-86
Gambar 2.61	Penurunan Lahan Kritis Tahun 2014 – 2018.....	II-88
Gambar 2.62	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2014 – 2018	II-89
Gambar 2.63	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2014 – 2018	II-89
Gambar 2.64	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2014 – 2018.....	II-90
Gambar 2.65	Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2014 – 2018.....	II-90
Gambar 2.66	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif Tahun 2014 – 2018.....	II-92
Gambar 2.67	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB Tapi Tidak Terpenuhi Tahun 2014 – 2018.....	II-92
Gambar 2.68	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun, Tahun 2014 – 2018	II-93
Gambar 2.69	Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) ber KB Tahun 2014 – 2018	II-93
Gambar 2.70	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Tahun 2014 – 2018.....	II-94
Gambar 2.71	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2014 – 2018	II-94
Gambar 2.72	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2014 – 2018.....	II-95
Gambar 2.73	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N) Tahun 2014 – 2018.....	II-95
Gambar 2.74	Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2014 – 2018.....	II-96
Gambar 2.75	Jumlah Usaha Mikro Tahun 2014 – 2018.....	II-96
Gambar 2.76	Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2014 – 2018.....	II-97
Gambar 2.77	Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2014 – 2018....	II-97
Gambar 2.78	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan Tahun 2014 – 2018.....	II-98
Gambar 2.79	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan Tahun 2014 – 2018	II-99
Gambar 2.80	Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tahun 2014 – 2018	II-99
Gambar 2.81	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga Tahun 2014 – 2018	II-100
Gambar 2.82	Jumlah Arsip Yang Dilestarikan Tahun 2014 – 2018.....	II-100
Gambar 2.83	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 – 2018..	II-101
Gambar 2.84	Jumlah Organisasi/Lembaga yang Terfasilitasi Tahun 2014 – 2018.....	II-101
Gambar 2.85	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2014 – 2018.....	II-102
Gambar 2.86	Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014 – 2018.....	II-103
Gambar 2.87	Persentase Peningkatang Produksi Hortikultura Tahun 2014 – 2018.....	II-103
Gambar 2.88	Persentase Peningkatang Produksi Hortikultura Tahun 2014 – 2018.....	II-104
Gambar 2.89	Jumlah Populasi Peternakan Tahun 2014 – 2018.....	II-105
Gambar 2.90	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Tahun 2014 – 2018	II-106

Gambar 2.91	Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sidikalang Tahun 2014 – 2018.....	II-106
Gambar 2.92	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014 – 2018	II-107
Gambar 2.93	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 – 2018	II-108
Gambar 2.94	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Tahun 2014 – 2018	II-109
Gambar 2.95	Jumlah Objek Wisata yang Berkembang yang Ditangani Tahun 2014 – 2018.....	II-109
Gambar 2.96	Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2014 – 2018	II-109
Gambar 2.97	Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2014 – 2018	II-110
Gambar 2.98	Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2014 – 2018.....	II-110
Gambar 2.99	Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2014 – 2018.....	II-111
Gambar 2.100	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2014 – 2018	II-111
Gambar 2.101	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah Tahun 2014 – 2018	II-112
Gambar 2.102	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014 – 2018.....	II-113
Gambar 2.103	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik Tahun 2014 – 2018	II-114
Gambar 2.104	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan Tahun 2014 – 2018	II-114
Gambar 2.105	Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi Tahun 2014 – 2018.....	II-115
Gambar 2.106	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2014 – 2018	II-115
Gambar 2.107	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD Tahun 2014 – 2018	II-116
Gambar 2.108	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2014 – 2018.....	II-117
Gambar 2.109	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Tahun 2014 – 2018.....	II-118
Gambar 2.110	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2014 – 2018	II-118
Gambar 2.111	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Tahun 2014 – 2018.....	II-119
Gambar 2.112	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Tahun 2014 – 2018.....	II-119
Gambar 2.113	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2014 – 2018	II-120
Gambar 2.114	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2014 – 2018	II-120
Gambar 2.115	Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 – 2018.....	II-121
Gambar 2.116	Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Tahun 2014 – 2018.....	II-122
Gambar 2.117	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Tahun 2014 – 2018.....	II-123
Gambar 2.118	Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan Tahun 2014 – 2018	II-124

Gambar 2.119	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG) Tahun 2014 – 2018.....	II-124
Gambar 2.120	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional Tahun 2014 – 2018	II-124
Gambar 2.121	Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan Tahun 2014 – 2018	II-125
Gambar 2.122	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Tahun 2014 – 2018	II-125
Gambar 2.123	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana Tahun 2014 – 2018.....	II-126
Gambar 2.124	Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana Tahun 2014 – 2018	II-126
Gambar 2.125	Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun,2013-2017 (juta rupiah).....	II-127
Gambar 2.126	Persentase Penduduk Bekerja di Dairi menurut Lapangan Usaha, 2014, 2015, 2017	II-134
Gambar 2.127	Persentase Penduduk Bekerja Dairi menurut Status Pekerjaan, 2015 dan 2017	II-136
Gambar 3.1	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III-2
Gambar 3.2	Analisis Proyeksi Belanja Daerah	III-3
Gambar 3.3	Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-4
Gambar 3.4	Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Dairi	III-13
Gambar 3.5	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Dairi	III-16



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Dairi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode rencana.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kinerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

25. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
28. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. Visi, Misi, dan Program Bupati;
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi;
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah, dan;
 - e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berfungsi menjadi pedoman bagi :
 - a. Penyusunan RKPD selama kurun waktu Tahun 2020 - 2024;
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024;
 - c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Dairi.
- (3) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Bab IX : Penutup.

BAB II

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten dan antar Desa, meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 8 November 2019
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR : (9 / 192 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019-2024

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian. Selain potensi pertanian, Kabupaten Dairi juga memiliki kekayaan alam yang potensial untuk pengembangan pariwisata, sumber energi, dan pertambangan.

Secara geografis Kabupaten Dairi terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur lintas nasional (Medan-Aceh) yang memungkinkan menjadi daerah transit (kota Sidikalang). Ibu kota Kabupaten Dairi (Sidikalang) berjarak ± 153 Km dari Ibukota Provinsi atau sekitar tiga jam perjalanan darat.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dairi bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di Daerah Kabupaten Dairi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan

pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik nasional maupun provinsi, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2019-2024 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

2. Acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode tahun anggaran 2019-2024;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Dairi bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Dairi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditetapkan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud, sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode waktu lima tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mendefinisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, RPJPD Kabupaten Dairi tahun 2005-2025, kondisi lingkungan strategis, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. RPJMD periode sebelumnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2014-2019 dimana tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari perencanaan pembangunan lima tahunan dimaksud. Dengan demikian, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, SH yang dilantik pada tanggal 23 April 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1006 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dairi Propinsi Sumatera Utara, serta merujuk kepada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati Dairi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD dimulai pada Tahun 2020 sebagai tahun pertama perencanaan dan berakhir pada Tahun 2024 sebagaimana jangka waktu atau periode perencanaan RPJMD, yakni 5 tahun.

RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode keempat (tahap terakhir) dari RPJPD Kabupaten Dairi yang memuat pokok-pokok pikiran dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Dairi tahun 2015-2025. Dengan posisinya sebagai periode perencanaan terakhir dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah maka RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 memiliki nilai strategis untuk menuntaskan pencapaian sasaran dan tujuan dari hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya agar secara keseluruhan tujuan dan sasaran yang ditetapkan perencanaan pembangunan tahun 2005-2025 dapat mewujudkan visi misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Dairi tahun

2005-2025 yakni *“Terwujudnya masyarakat Dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan”*.

RPJMD ke-4 (2019-2024) berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan RPJMD ke-3, maka pada RPJMD ke-4 ditujukan pada: terwujudnya masyarakat yang semakin mandiri, semakin makmur, sejahtera, berkeadilan dan maju, hasil pembangunan terus diperkuat atau semakin dimantapkan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan ukuran-ukuran yang nyata, serta semakin mantapnya lembaga-lembaga dan pranata ekonomi daerah.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

1. Pendekatan Politik

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat telah menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut melalui penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

3. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan melalui forum konsultasi publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD.

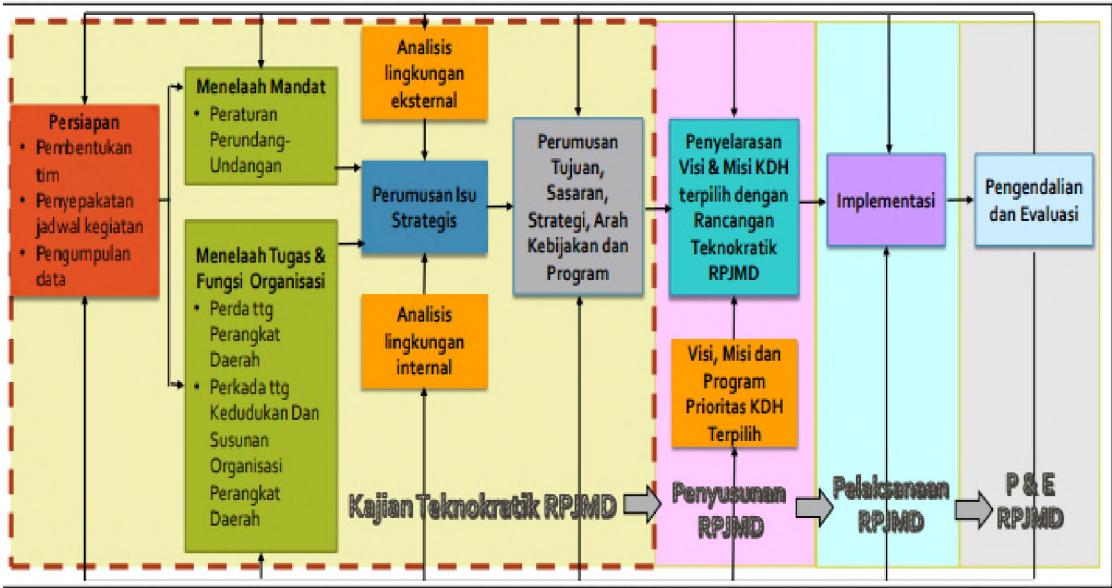
Secara substansi dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi tahun 2019-2024, dirumuskan dengan memperhatikan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perencanaan **Holistik-Tematik, Integratif** dan **Spasial**.
 - 1) **Pendekatan Tematik-Holistik:** dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - 2) **Pendekatan Integratif:** dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - 3) **Pendekatan Spasial:** dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Adapun alur proses penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Alur Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Jika dilihat dari gambar diatas, maka proses yang paling mendasar dalam penyusunan rancangan RPJMD adalah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakan dengan berbagai upaya dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, untuk itu disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tahapan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahapan penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan

sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Dairi. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Dairi menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Dairi.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala OPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

6. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD, setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungn RPJMD dengan dokumen lainnya dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 dengan

cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan RTRW Kabupaten Dairi

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupten Dairi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Dairi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan

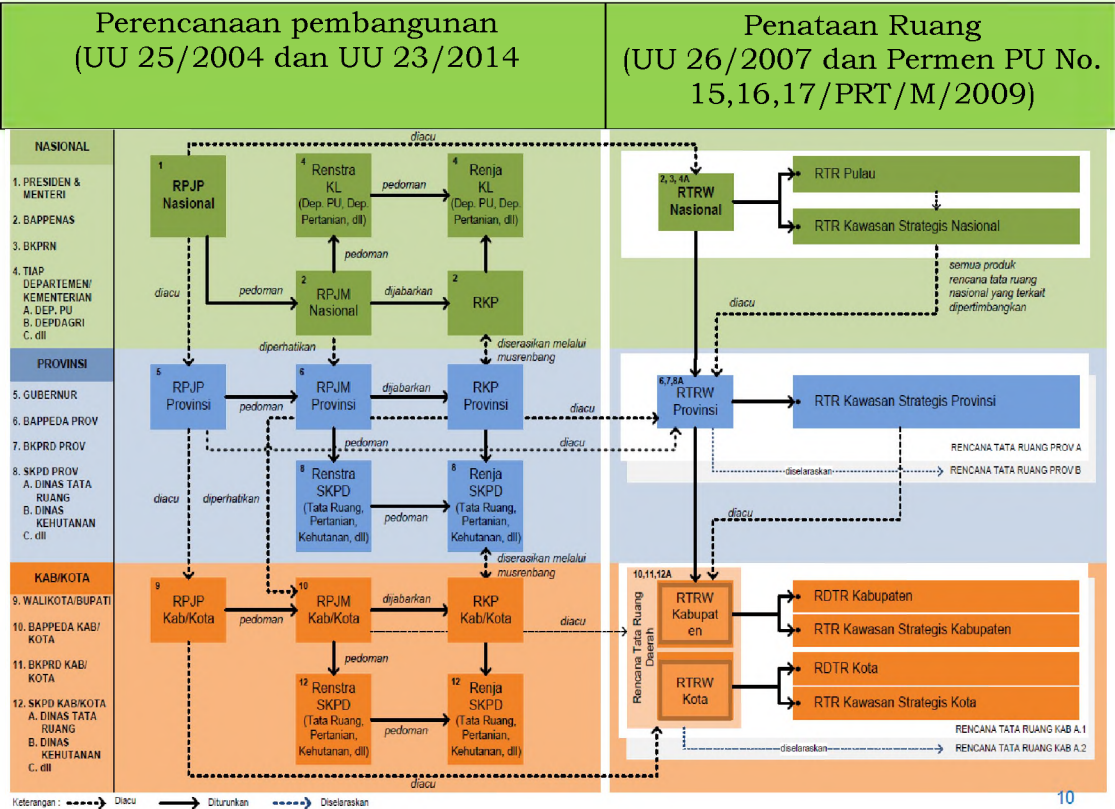
berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Mengetahui hal ini maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi telah diintegrasikan dengan KLHS. Sehingga diharapkan dokumen RPJMD Kabupaten Dairi betul-betul mendukung, mengakomodir dan menindaklanjuti pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.2.
Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Sumber : UU 25/2004, PP 8/2008, Permendari 86/2017 (diolah)

Rencana Tata Ruang (RTR) memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial atau keruangan. Untuk lebih jelasnya terkait keterkaitan antara dokumen rencana pembangunan dan rencana tata ruang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.3.
Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan dengan
Dokumen Rencana Tata Ruang



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (diolah)

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, sejahtera dalam harmoni keberagaman.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024 dan Pedoman dalam Penyusunan RPJMD Desa se-Kabupaten Dairi. RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024 sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolak ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya serta maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang

dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi misi kepala daerah terpilih, dan kebutuhan perumusan strategi.

Rincian gambaran umum ini meliputi: aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, serta gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.

Bagian ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, mengenai : (1) gambaran kinerja keuangan masa lalu meliputi: gambaran kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, meliputi: gambaran proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta (3) kerangka pendanaan pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, meliputi: proyeksi pendapatan dan belanja dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.

Bagian ini menyajikan gambaran analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.

Bagian ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan analisis.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu juga diuraikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan juga akan dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Bagian ini menyajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini merupakan narasi akhir dari dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang berisikan arahan dan harapan dari upaya mengoperasionalkan dokumen perencanaan ini dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Dairi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografis

Aspek geografi Kabupaten Dairi meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Dairi menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

1) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 192.780 ha atau sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Kabupaten adalah Sidikalang, terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 169 desa/kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Luas Kabupaten (%)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	7.317	3,80
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	5.315	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	3.168	1,64
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	22.700	11,77
5.	Sumbul	Sumbul	19	14.900	7,73
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	11.920	6,18
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	10.168	5,27
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	4.272	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	6.030	3,13
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	9.360	4,86
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	10.450	5,42
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	20.187	10,47
13.	Gunung Sitember	G. Sitember	8	7.520	3,90
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	15.533	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	43.940	22,79
Total			169	192.780	100,00

Sumber : Dairi Dalam Angka, 2018

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh
- Sebelah Timur : Kabupaten Samosir
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat
- Sebelah Barat : Provinsi Aceh (Kota Subulussalam)

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2) Letak dan Kondisi Geografis

Letak Kabupaten Dairi yang strategis dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam yang membuat aksesibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter diatas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

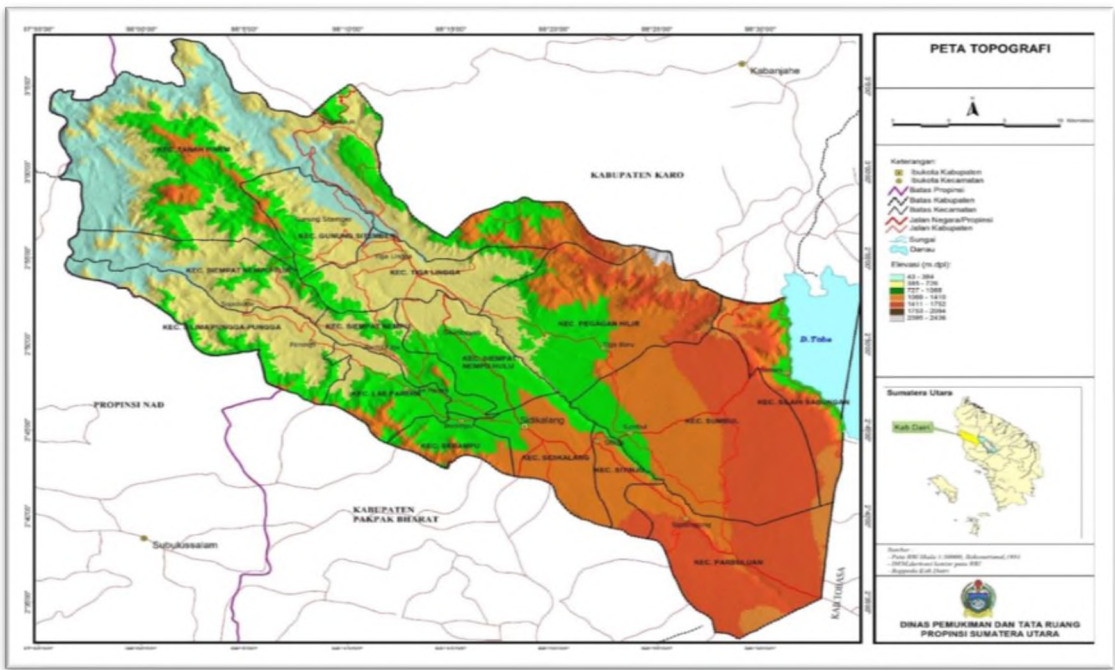
3) Topografi/Kelereng

Kabupaten Dairi berada pada ketinggian 200 – 1.431 meter diatas permukaan laut (*m. dpl*), didominasi kelereng berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelereng sebagai berikut:

- Kelereng bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar.
- Kelereng curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi
- Kelereng terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi

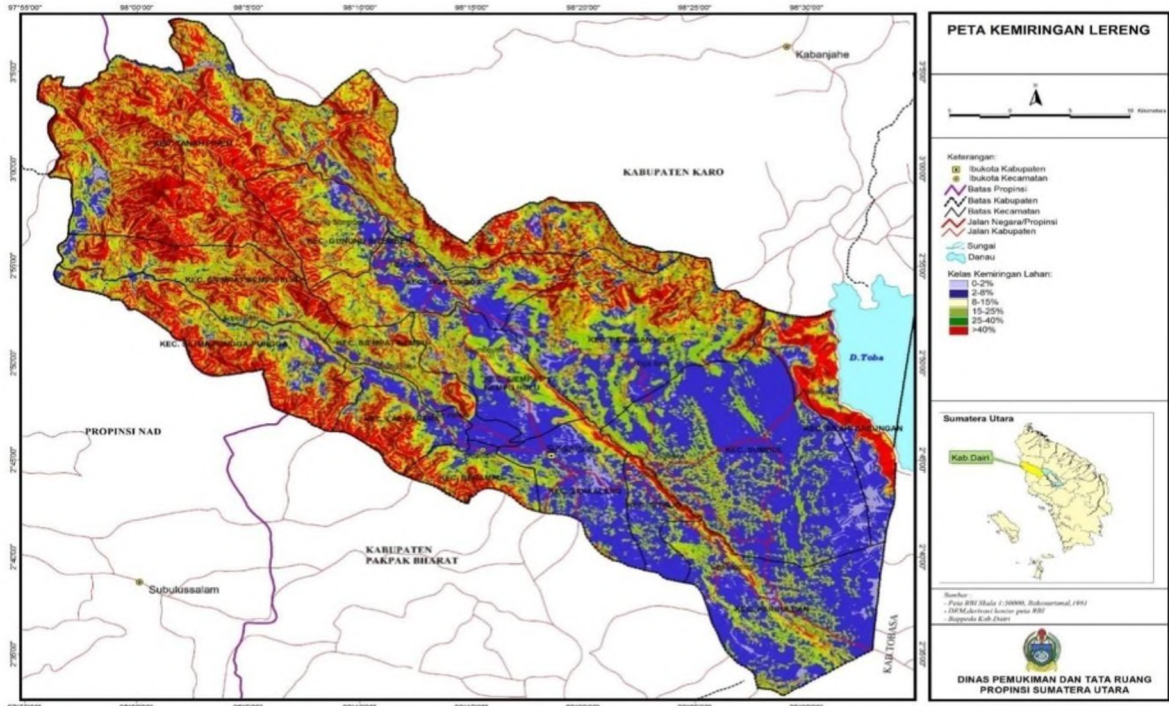
Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Dairi



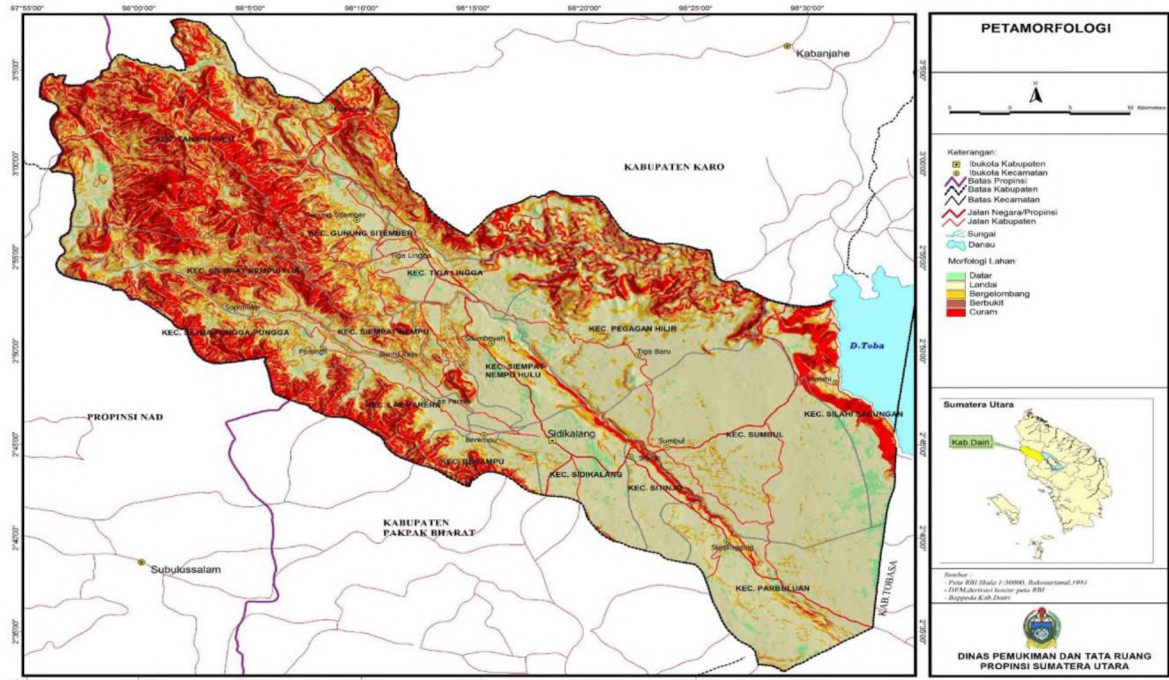
Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Gambar 2.4
Peta Morfologi Kabupaten Dairi



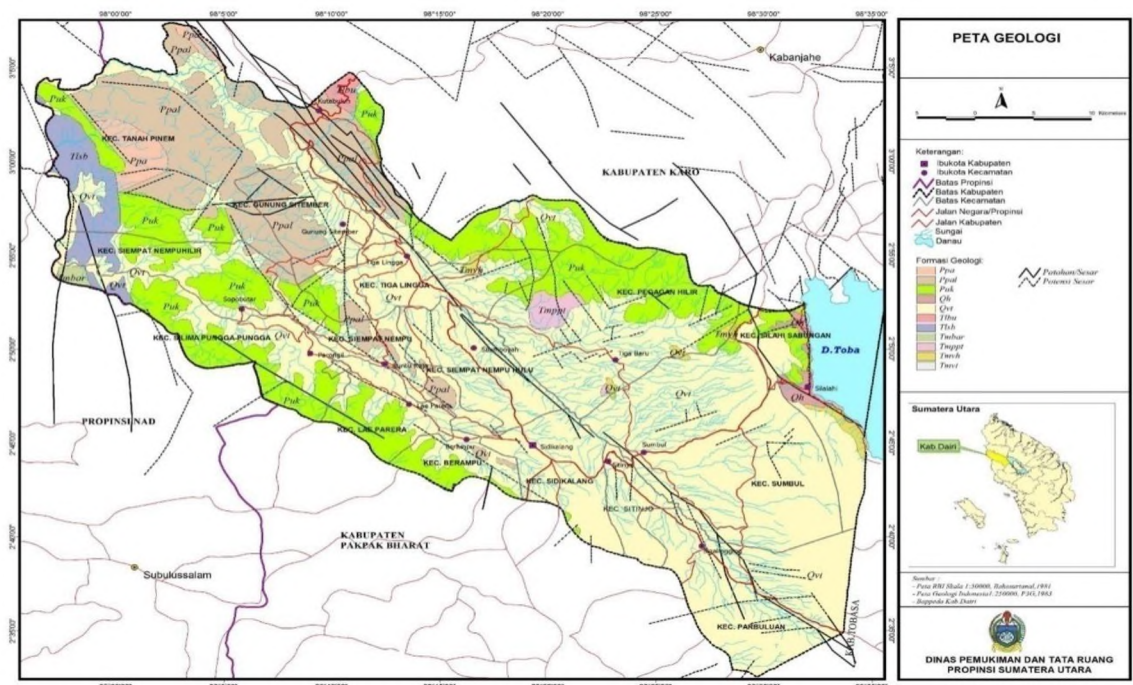
Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

4) Geologi

Kondisi geologi regional peta geologi lembar Sidikalang dan geomorfologi wilayah Kabupaten Dairi termasuk dalam zona fisiografi jajaran pegunungan Bukit Barisan Bagian Timur dan Bagian Tengah. Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Diatas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmptt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras diatasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Dairi

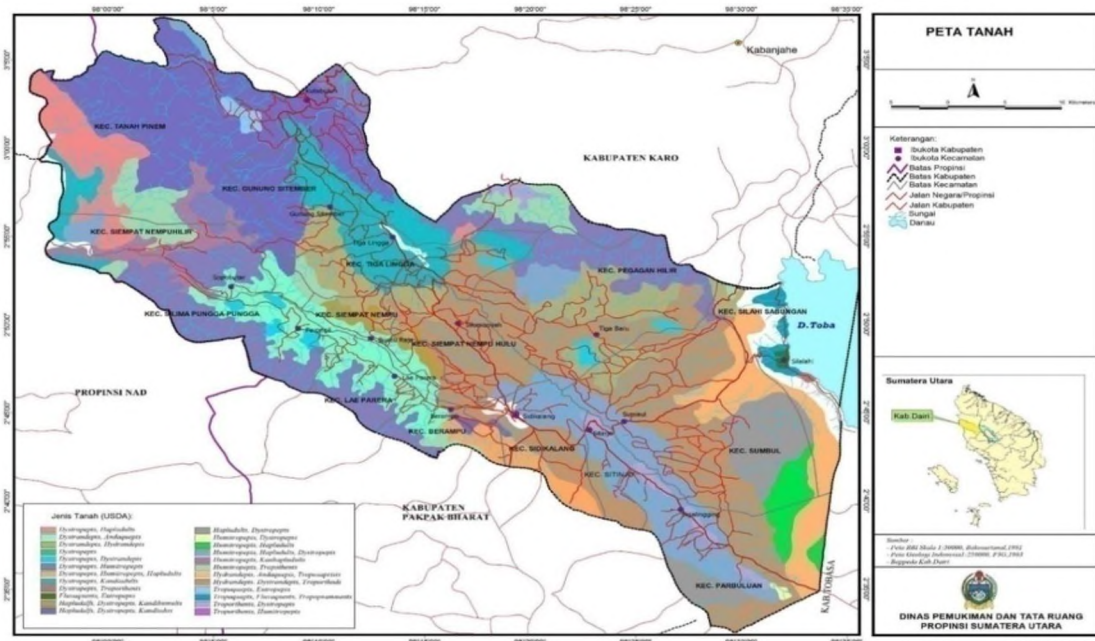


Sumber : RTRw Kabupatan Dairi Tahun 2014-2034

5) Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu, seperti jenis tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85% dari luas total Kabupaten Dairi menyebar di seluruh kecamatan, permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26%, palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83%, garbo diabase sepertijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94% dan sisanya jenis tanah jura seluas 231,34 ha. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar berikut.

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kedalaman efektif tanah diperinci menurut kedalaman < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga, kedalaman efektif tanah 30 - 90 cm terdapat di sebelah Selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah diperinci menurut halus dan kasar, tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah Barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga.

6) Hidrologi

Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi air permukaan dan air bawah tanah dengan karakter Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (CAT).

A. Wilayah Sungai (WS)

Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

- WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara - Lintas Provinsi).

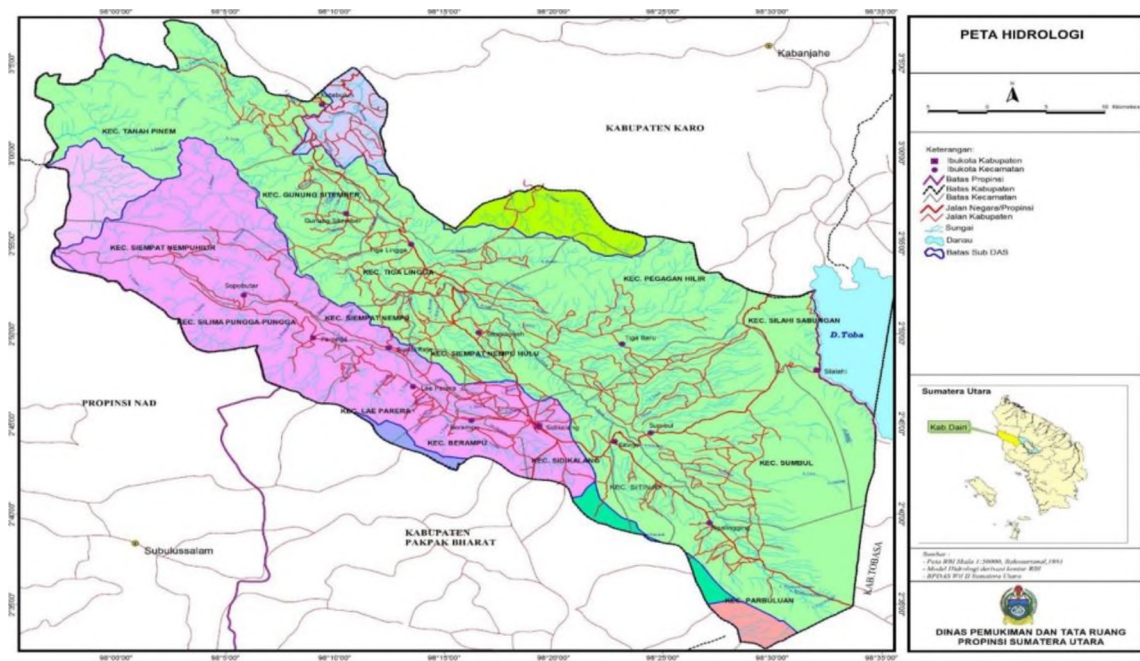
Diantara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum. Lihat Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.2
Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Peta Hidrologi Kabupaten Dairi



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

B. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km².

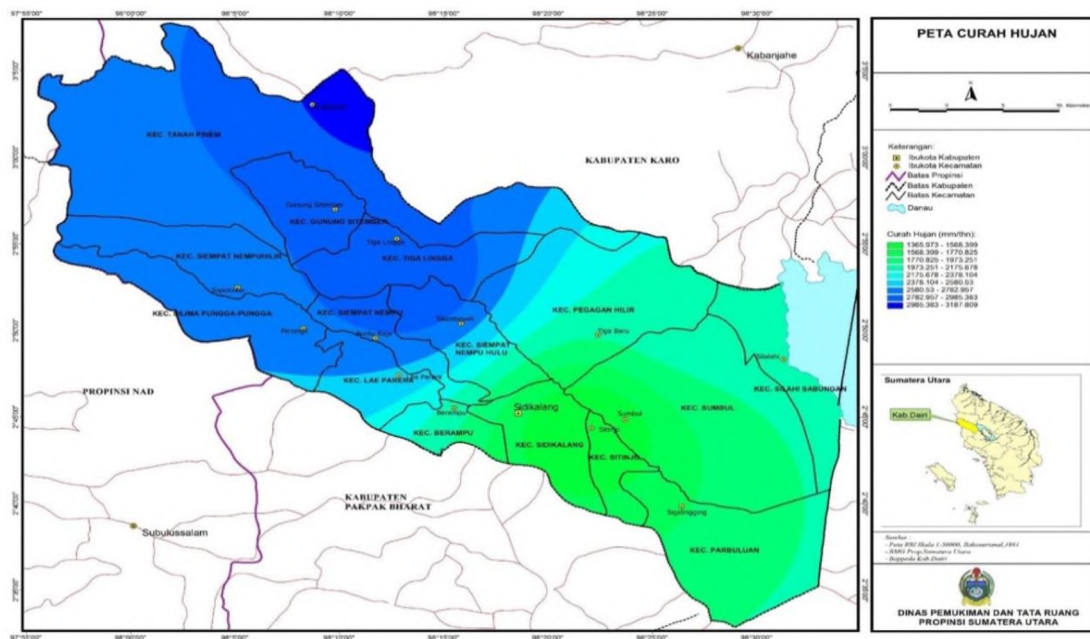
7) Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979)*, pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Iklim B1
Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.
- Iklim C1
Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Dairi



8) Penggunaan Lahan

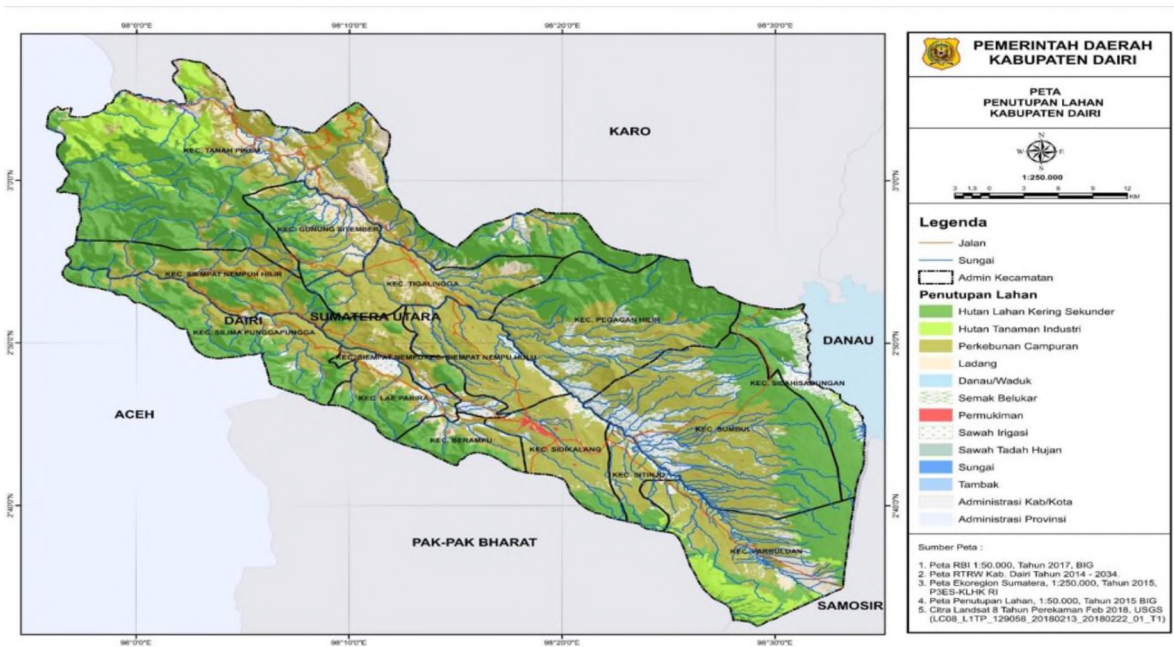
BAB II -9

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	Persentase (%)
1.	Hutan	95.603,00	49,59
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	40,00
3.	Ladang	10.463,39	5,43
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,53
5.	Permukiman	1.755,99	0,91
6.	Sungai	520,29	0,27
7.	Perkebunan Kopi	318,00	0,17
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,06
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,06
10.	Pertambangan	43,50	0,02
11.	Danau/Waduk	24,33	0,01
13.	Tambak	15,84	0,01
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,00
KABUPATEN DAIRI		192.780,00	100,00

Sumber: Laporan DDDTLH Kab. Dairi dan Hasil Analisa, 2019

Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan



Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian Lahan Basah

Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 Ha atau setara dengan sekitar 5,31% dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas sawah didukung dengan jaringan irigasi. Luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Dairi berdasarkan aspek fungsional seluas kurang lebih 10.225 Ha, sedangkan dari aspek potensial seluas kurang lebih 21.167 Ha.

Berdasarkan pola jaringan irigasi, luasan Daerah Irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 6.059 Ha, irigasi sederhana seluas kurang lebih 3.257 Ha dan irigasi non PU seluas kurang lebih 909 Ha dengan volume rata-rata pemakaian air sekitar 14.104 liter/detik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Daerah Irigasi di Kabupaten Dairi

Luas DI (Ha)		Pola Jaringan (Ha)			Volume Pemakaian (Liter/Detik)	Sumber Air
Potensial	Fungsional	Setengah Teknis	Sederhana PU	Non PU		
21.167	10.225	6.059	3.257	909	14.104	▪ Sungai ▪ Waduk/ Embung

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

B. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

Prospek hortikultura akan semakin baik, selain itu tanaman ini dapat ditanam baik di lahan basah maupun lahan kering. Luas lahan peruntukan hortikultura seluas 19.500 Ha tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

C. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

D. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu sedangkan ternak kuda di Kecamatan Parbuluan. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt).

Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

E. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai

interaksi dengan wilayah lain yang timbul karena adanya perbedaan antar wilayah. Artinya bahwa fenomena wilayah didasarkan pada analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Suatu wilayah merupakan satu kesatuan wilayah sosial ekonomi dan sumber daya hayati perikanan.

Tabel 2.5
Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No.	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	Budidaya		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	Perairan		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		1.824	1.426,8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi:

- Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi.
- Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batac), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya.

F. Pertambangan dan Sumber Daya Alam

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa

Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

No.	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Punggapungga, Tanah Pinem, Tigalingga, Siempat Nempu Hilir	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng		Tereka	
3.	Perak		Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.

Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M ³
2.	Batu Padas/Tufa Riodasit	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa
3.	Batu Gamping	- Kecamatan Sidikalang - Kecamatan Siempat Nempu - Kecamatan Lae Parira - Kecamatan Siempat Nempu Hulu - Kecamatan Tigalingga - Kecamatan Tanah Pinem - Kecamatan Gunung Sitember	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M³ Sekitar 73.235.312,500 M³ Sekitar 13.169.209,375 M³
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M ³

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2.8
Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer, Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silahisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Punggapungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping, Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas, Pasir Sedimen
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas, Tanah Liat, Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitam, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas, Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit, Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

G. Pariwisata

Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2.9
 Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/ Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pondom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matahari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Punggapungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantun Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduk-tanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornaui, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan (tempat pemujaan)
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk diatas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

H. Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/ anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
- b. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.
- c. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.

- d. Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/ anyam-anyaman dan lain-lain.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi di landa berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB no. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2004 – 2015, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi

adalah bencana : Gempa bumi, Banjir, Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung), Tanah Longsor dan Kebakaran Permukiman. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Sejarah Kejadian Bencana di Kab. Dairi Tahun 2004-2016

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Terdampak	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
Gempa Bumi	1	1	10	-	-	-	226	1.052
Banjir	8	-	-	-	-	123	4	34
Bandang								
Tanah Longsor	86	3	5	-	-	-	2	22
Cuaca Ekstrim	42	4	8	-	-	-	397	66
Karhutla	5	-	-	-	-	-	-	-
Kekeringan	3	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	65	2	1	-	-	121	17	86
JUMLAH	202	10	24	-	-	244	646	1.260

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2015 dan data BPBD Kabupaten Dairi 2012 – 2016

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2004 – 2016 berdasarkan data yang tercatat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi dan tercatat sebanyak 1 kali, yaitu kejadian gempa bumi pada tanggal 06 September 2011 berkekuatan 6,7 SR. Kejadian bencana gempa bumi ini mengakibatkan 1 orang meninggal, 10 orang luka-luka, 226 rumah rusak berat dan 1.052 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian bencana gempa bumi ini meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punga-Punga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Tanah Pinem, Gunung Sitember, dan Pegagan Hilir). Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 7 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 162 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Tabel 2.11
Matriks Resiko Gempa Bumi Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		KEC. TIGALINGGA : Jumagerat KEC. PEGAGAN HILIR : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II KEC. GUNUNG SITEMBER : Bukit Lau Kersik KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR : Lae Markelang	
	TINGGI	KEC. TANAH PINEM : Kuta Gamber	KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Kempawa, , Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame KEC. SUMBUL :Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Kuta Gugung, Barisan Nauli KEC. SIDIKALANG :Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang Malum, Bintang Mersada KEC. TIGALINGGA :Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Mil, Lau Pakpak, Palding Jaya KEC. PEGAGAN HILIR : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Mbinanga, Bukit Baru KEC. GUNUNG SITEMBER :Gunung Sitember, Lau Lebah, Batu Gunung, Rante Besi, Tupak Raja, Gundaling, Kendit Liang KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR :Lae Itam,Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas, Lae Sering KEC. SIEMPAT NEMPU HULU :Tambahan, Kuta Tengah, Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakal Julu, Pandan KEC. SIEMPAT NEMPU :Sinampang,Soban, Bunturaja, Gomit, Juma Antuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Juma Teguh KEC. SILIMA PUNGGGA PUNGGGA :Lae Rambong, Lae Ambat,Sumbari, Bakal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan KEC. PARBULUAN :Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I, Parbuluan II KEC. LAE PARIRA :Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu KEC. BERAMPU :Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III, Paropo I KEC. SITINJO :Sitinjo, Sitinjo I, Panji Dabutar	KEC. TANAH PINEM :Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar KEC. SUMBUL : Pegagan Julu I KEC. SIDIKALANG : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat KEC. PEGAGAN HILIR : Perik Mbue KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR : Pardomuan KEC. SIEMPAT NEMPU HULU : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong KEC. SIEMPAT NEMPU : Sihorbo, Adian Nangka, Maju, Adian Gupa KEC. SILIMA PUNGGGA PUNGGGA : Lae Panginuman KEC. PARBULUAN : Parbuluan V, Lae Hole II KEC. LAE PARIRA : Sumbul, Lae Parira KEC. BERAMPU : Berampu, Banjartoba KEC. SILAHISABUNGAN : Paropo KEC. SITINJO : Sitinjo II

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Tabel 2.12

Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi

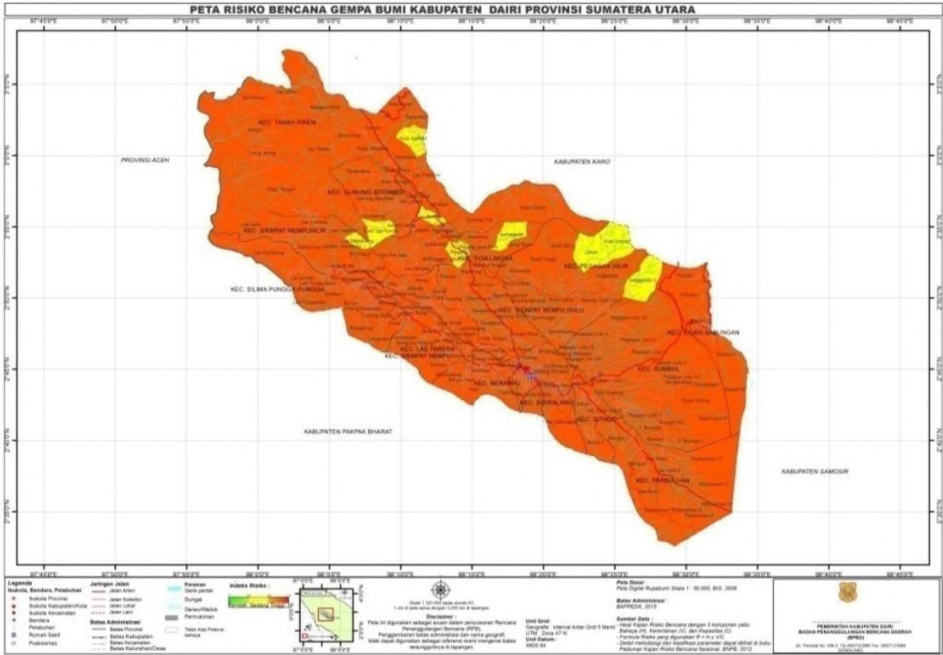
TINGKAT RISIKO BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	13.786	157.326
PENDUDUK (Jiwa)	-	9.005	269.956
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	3.898.272.216	215.363.355.663
FASILITAS UMUM (Rp)	-	21.800.000.000	570.790.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	340.600.000.000	9.597.600.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.421	64.169

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 14,51% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.10

Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi gempa bumi menyeluruh di Kabupaten Dairi, dan hanya sebagian kecil saja dari wilayah Kecamatan Pegagan Hilir dan Tanah Pinem yang digolongkan risiko

sedang. 9 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 160 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana gempa bumi.

Sebagai tambahan, Kajian tingkat risiko bencana gempa bumi menyimpulkan total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi, yaitu seluas 157.326 ha atau 81,60 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 269.956 jiwa atau 91,81 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi. Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 64.169 unit atau 96,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

2. Banjir Bandang

Bencana banjir telah terjadi sebanyak 8 kali kejadian pada periode Tahun 2012 - 2016. Bencana banjir terbesar yang terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana pada tanggal 18 Oktober 2015 yang mengakibatkan 123 orang menderita. Lokasi kejadian bencana banjir meliputi beberapa daerah di Kabupaten Dairi (Kecamatan Tanah Pinem, Silima Pungga-pungga, Lae Parira, dan Siempat Nempu Hulu).

Tabel 2.13
Matriks Resiko Banjir Bandang Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH		Kec. Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Palding Jaya Kec. L Parira : Sumbul, Lae Parira	
	SEDANG		Kec. T Pinem : Sinar Pagi, Harapan, Gunung Tua, Tanah Pinem Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Sireme, Lau Pakpak Kec. P Hilir :Tanjung Saluksuk, Simanduma, Bandar Huta Usang, Onan Lama, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. S5P2 : Parongil, Palipi Kec. L Parira : Kentara, Bulu Duri, Sempung Polling, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kaban Julu Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III	Kec. P Hilir : Laksa

			Kec. Tigalingga : Lau Mil Kec. P Hilir : Mbinanga Kec. SN Hilir : Jambur Indonesia, Sopo Butar, Lae Sering Kec. S5P2 : Uruk Belin, Longkotan	Kec. T Pinem : Lau Njuhar, Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Primbon, Balandua, Lau Tawar, Suka Dame Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat Kec. P Hilir : Lingga Raja, Lingga Raja II, Kuta Usang Kec. SN Hilir : Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Lae Haporas Kec. S5P2 : Lae Rambong, Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Bakal Gajah, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Lae Pangaroan Kec. Silahisabungan : Paropo I, Paropo

Sumber : RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 32 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 36 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana banjir bandang.

Tabel 2.14
 Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Banjir Bandang
 Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BANJIR BANDANG KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	8.420	42.557
PENDUDUK (Jiwa)	-	7.915	30.015
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	23.855.969.914	59.016.084.080
FASILITAS UMUM (Rp)	-	18.674.000.000	67.671.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	291.656.000.000	1.106.765.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	2.035	7.617

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 42.557 ha atau 22,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar

Tabel 2.15
Matriks Resiko Tanah Longsor Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH	Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Batang Beruh, Kalang Simbara, Kalang,Sidiangkat, Belang malum, Huta Gambir,Huta Rakyat, Bintang Marsada Kec. Tigalingga : Lau Bagot, Tigalingga, Lau Sireme, Palding Jaya Kec. P Hilir : Onan Lama Kec. G Sitember : Batu Gun Gun Kec. SN Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakal Julu, Sipoltong Kec. S Nempu : Adian Nangka, Buntu Raja, Sosor Lontung, Huta Imbaru Kec. S5P2 : Parongil Kec. Parbuluan : Lae Hole I, Lae Hole II Kec. L Parira : Sumbul, Lae Parira, Kabanjulu Kec. Berampu : Berampu Kec. Sitinjo : Panji Dabutar	Kec. Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli	
	SEDANG	Kec. Tigalingga : Palding Kec. P Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Bukit Tinggi, Simartugan, Perik Mbue Kec. Parbuluan : Parbuluan III, Parbuluan VI, Bangun I	Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu II, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Kuta Gugung, Pangguruan Kec. Sidikalang : Bintang Hulu, Bintang Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap Kec. P. Hilir : Tanjung Saluksuk, Lingga Raja II, Mbinanga Kec. G Sitember :Rante Besi, Tumpak Raja Kec. SN Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Sopo Butar Kec. SN Hulu :Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Pandan Kec. S Nempu :Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Maju	
			Kec. S5P2 : Lae Ambat, Bakkal Gajah, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi Kec. Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan V, Parbuluan IV, Lae Hole, Bangun Kec. L Parira : Kentara, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan Kec. Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang, Banjar Toba Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II Kec. Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I	

	TINGGI		Kec. Tanah Pinem : Lau Njuhar, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Tanah Pinem, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Gunung Tua, Suka dame, Liang Jering, Alur Subur, Sinar Pagi, Pamah, Lau Tawar, Kuta Gamber Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Juma Gerat, Sukandebi, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir : Simanduma, Laksa, Bukit Baru, Kuta Usang Kec. G Sitember : Bukit lau Kersik, Gunung Sitember, Gundaling, Kendit Liang, Lau Lebah Kec. SN Hilir : Lae Itam, Simungun, Janji, Lae Luhung, Lae Haporas, Lae Sering, Lae Markelang Kec. S N Hulu : Gunung Meriah, Sigambir-gambir Kec. S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Juman tuang, Kec. S5P2 : Lae Rambong, Lae Panginuman, Sumbari, Uruk Belin, Siboras, Bonian, Bongkaras, Tungtung Batu, Longkotan, Lae Pangaroan Kec. L Parira : Sempung Polling, Pandiangan Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sijinjo : Sijinjo II	Kec. T Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 54 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana tanah longsor.

Tabel 2.16
Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Tanah Longsor
Kabupaten Dairi

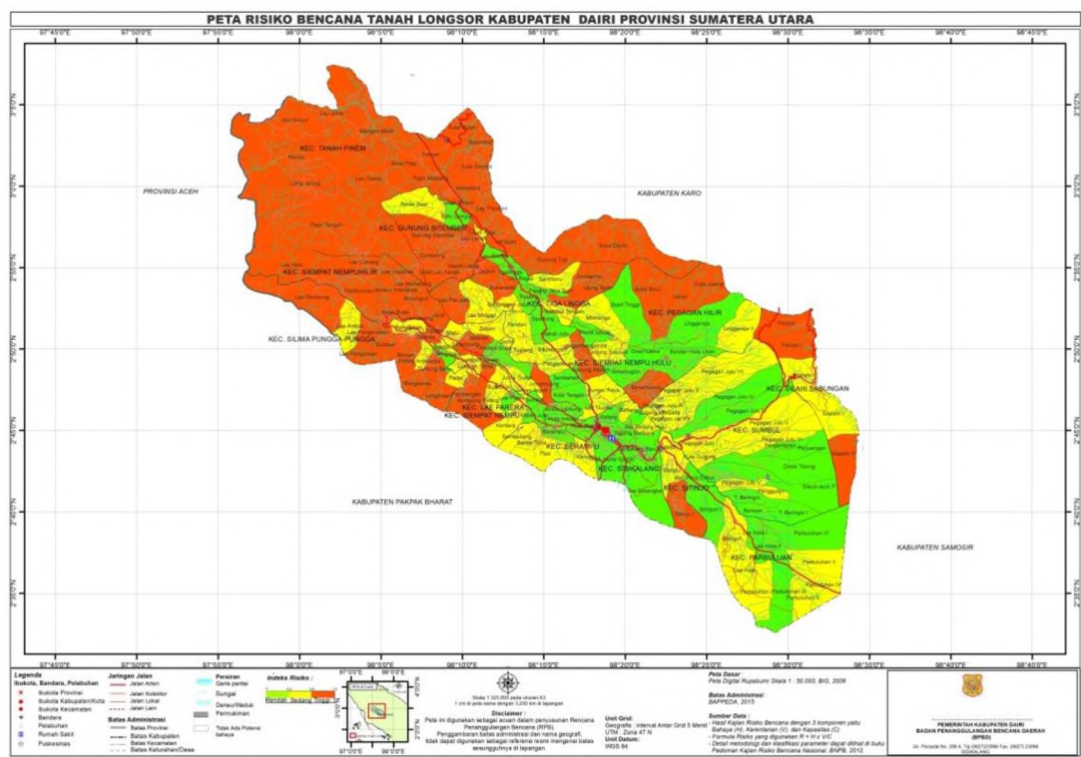
TINGKAT RISIKO TANAH LONGSOR DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	10.627	35.765
PENDUDUK (Jiwa)	-	15.518	26.829
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	75.366.443.412	122.962.226.481
FASILITAS UMUM (Rp)	-	12.279.000.000	39.972.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	581.421.000.000	972.045.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	3.910	7.517

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi di Kabupaten Dairi seluas 35.765 ha (18,60 %) dari total luas wilayah dan Jumlah jiwa

terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 26.829 jiwa atau 9,6 % dari total populasi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko tanah longsor, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hilir, Silimampungunga dan Silahisabungan.

4. Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung

Bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung di Kabupaten Dairi terjadi sebanyak 42 kali kejadian. Kejadian bencana cuaca ekstrim terparah terjadi pada tanggal 3 April 2016 yang mengakibatkan 153 rumah rusak berat, 7 rumah rusak ringan. Lokasi kejadian cuaca ekstrim ini di beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.17
Matriks Resiko Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung
Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	KEC. TANAH PINEM : Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Lau Perimbon, Balandua, Harapan, Sukadame. KEC. SUMBUL : Pangguruan, Barisan Nauli. KEC. PEG. HILIR : Laksa, Kuta Usang, Lingga Raja II. KEC. G. SITEMBER : Bukit Lau Kersik KEC. SI4N HILIR: Lae Itam, Lae Markelang, Lae Luhung, Sopo Butar.	KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Tanah Pinem, Gunung Tua. KEC. SUMBUL : Kuta Gugung, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Tanjung Beringin I, Pegagan Julu X. KEC. SIDIKALANG : Bintang KEC. TIGALINGGA : Ujung Teran, Jumagerat, Palding, Lau Sireme, Lau Pakpak. KEC. PEG. HILIR : Simanduma, Lingga raja, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan, Bukit Baru. KEC. G. SITEMBER : Gunung Sitember, Lau Lebah, Rantai Besi, Tumpak Raja, Kendet Liang. KEC. SI4N HILIR : Simungun, Lae Sering, Lae Haporas. KEC. SI4N HULU : Kuta Tengah, Sigambir-gambir KEC. SI4NEMPU : Soban, Gomit, Juma Teguh. KEC. SI5PP : Lae Rambong, Lae Ambat, Sumbari, Bonian, Bongkaras, Lae Pangaroan. KEC. PARBULUAN : Parbuluan I, Parbuluan II, Parb. IV. KEC. LAE PARIRA : Pandiangan KEC. BERAMPU : Karing, Pasi, Sambaliang KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi I, Silalahi III, Paropo I. KEC. SITINJO : Sitinjo I	

	TINGGI	KEC. TANAH PINEM : Liang Jering, Lau Tawar. KEC. SUMBUL : Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VII, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Pargambiran. KEC. SIDIKALANG : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Kalang, Sidiangkat, Belang Malum, Huta Gambir, Bintang Marsada. KEC. TIGALINGGA : Sumbul Tengah, Sarintonu, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Lau Bagot, Tigalingga, Lau Mil, Palding Jaya. KEC. PEG. HILIR : B. Huta Usang, Mbinanga, Perik Mbue KEC. G. SITEMBER : Batu Gun-gun, Gundaling. KEC. SI4N HILIR : Pardomuan, Jambur Indonesia, Janji. KEC. SI4N HULU : Tambahan, Lae Nuaha, Sungai Raya, Silumboyah, Pangaribuan, Tualang, Bakkal Julu, Sipoltong, Pandan. KEC. SI4NEMPU : Sinampang, Sihorbo, Buntu Raja, Juman Tuang, Juma Siulok, Sosor Lontung, Huta Imbaru, Maju, Adian Gupa KEC. SI5P : Lae Panginuman, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Siboras, Tung-tung Batu, Longkotan, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi. KEC. PARBULUAN : Parbuluan V, Parbuluan III, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Lae Hole II, Bangun I. KEC. LAE PARIRA : Lae Parira, Bulu Duri, Lumban Sihite, Lumban Toruan, Kentara, Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu. KEC. BERAMPU : Berampu, Banjar Toba. KEC. SILAHISABUNGAN : Silalahi II, Paropo KEC. SITINJO : Sitinjo, Sitinjo, Sitinjo II, Panji Dabutar.	KEC. SUMBUL : Pegagan Julu I, KEC. SIDIKALANG : Batang Beruh, Huta Rakyat KEC. SI4NEMPU : Adian Nangka

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 57 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 94 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana cuaca ekstrim / angin puting beliung.

Tabel 2.18
Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Cuaca Ekstrim/ Angin Puting Beliung Kabupaten Dairi

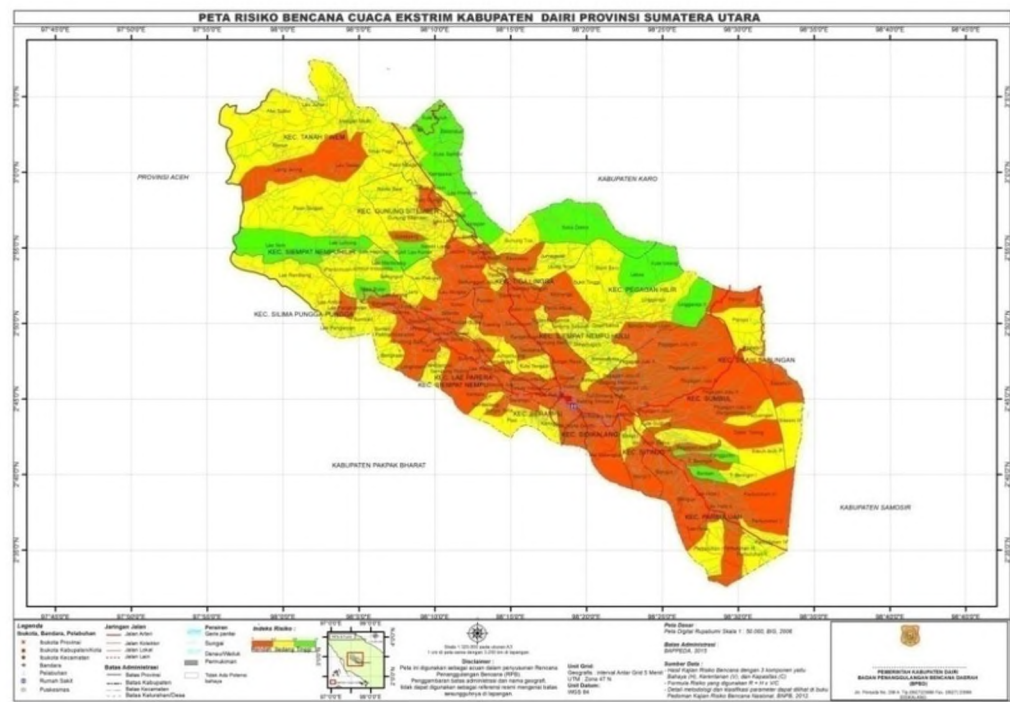
TINGKAT RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM/ ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	35.234	79.595	77.283
PENDUDUK (Jiwa)	20.844	78.959	179.161
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	14.578.309.440	48.433.470.921	148.626.611.240
FASILITAS UMUM (Rp)	49.950.000.000	173.900.014.950	294.350.059.800
RUMAH PDDK (Rp)	692.750.096.100	2.508.900.297.150	5.215.701.127.600
JUMLAH RUMAH (Unit)	4.032	10.532	25.701

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 77.283 ha atau 40,09% dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 179.161 jiwa atau 57,88% dari total populasi,

Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 25.458 unit atau 38,2% dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko angin puting beliung, daerah dengan tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Lae Parira, Parbuluan, Sidikalang, Sumbul, Sitinjo, dan Siempat Nempu Hulu maupun Siempat Nempu.

5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Dairi selama periode 2012 – 2016 tercatat sebanyak 3 kejadian. Umumnya adalah kebakaran hutan di daerah Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sitinjo, Kebakaran yang terjadi ini biasanya tidak menciptakan dampak yang berarti.

Tabel 2.19
Matriks Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG	Kec. Sidikalang : Bintang Kec. P Hilir : Laksa, Simartugan Kec. SN Hilir : Lae Itam, Lae Markelang Kec. S5P2 : Lae Rambong	Kec. Tanah Pinem : Lau Njuhar, Mangan Molih, Renun, Kuta Buluh, Tanah Pinem, Kempawa, Kuta gambar, Lau Primbon, Balandua, Harapan, Sukadame Kec. Sumbul : Pegagan Julu IV, Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagang Julu VI, Pegagan Julu VII, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileuleu Parsaoran, Pangguruan, Barisan Nauli Kec. Sidikalang : Kalang, Belang malum, Bintang Marsada Kec. Tigalingga : Ujung Teran, Sarintonu, Jua Gerat, Bertungen Julu, Lau Molgap, Sukandebi, Palding, Lau Bagot, Tigalingga, Laun Sereme, Palding Jaya Kec. P Hilir : Simanduma, Bandar Huta Usang, Lingga raja, Onan lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Kuta Usang, Lingga Raja II, Bukit Baru Kec. G Sitember : Gunung Sitember, Batu Gun-Gun, Tumpak Raja, Kendit Liang Kec. SN Hilir : Lae Luhung, Sopo Butar, Lae Haporas Kec. SN Hulu : Tambahan, Kuta Tengah, Bakkal Julu, , Lae Nuaha, Sungai Raya, Sigambir-Gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Pandan Kec. S Nempu : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung Kec. S5P2 : Lae Ambat, Lae Panginuman, Sumbari, Siboras, Bonian, Tung-tung Batu, Bongkaras, Parongil, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Lae Pangaroan Kec. Parbuluan : Parbuluan II, Parbuluan I, Parbuluan III, Parbuluan IV, Parbuluan VI, Lae Hole, Bangun, Lae Hole I, Bangun I Kec. L Parira :Lae Parira, Bulu Duri, Pandiangan, Lumban Sihite, Lumban Toruan,Kentara Kec. Berampu : Karing, Pasi, Sambaliang Kec. Silahisabungan : Silalahi I, Silalahi II, Paropo I Kec. Sitinjo : Panji Dabutar	

			Kec. Tanah Pinem : Liang Jering, Alur Subur, Sinar pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Lau Tawar, Gunung Tua Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin I Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Bintang Hulu, Kalang Simbara, Sidiangkat, Huta Gambir, Huta Rakyat Kec. Tigalingga : Sumbul Tengah, Lau Mil, Lau Pakpak Kec. P Hilir : Mbinanga, Perik Mbue Kec. G Sitember : Lau Lebah, Bukit Lau Kersik, Rantai Besi, Gundaling Kec. SN Hilir : Pardomuan, Jambur Indonesia, Simungun, Janji, Lae Sering Kec. SN Hulu : Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. S5P2 : Bakkal Gajah, Uruk Belin, Longkotan Kec. Parbuluan : Parbuluan V, Lae Hole II Kec. L Parira : Sumbul, Sempung Polling, Kaban Julu Kec. Berampu : Berampu, Banjartoba Kec. Silahisabungan : Silalahi III, Paropo Kec. Sitinjo : Sitinjo, Sitinjo I, Sitinjo II	Kec. Sidikalang : Batang Beruh Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 101 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 62 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan.

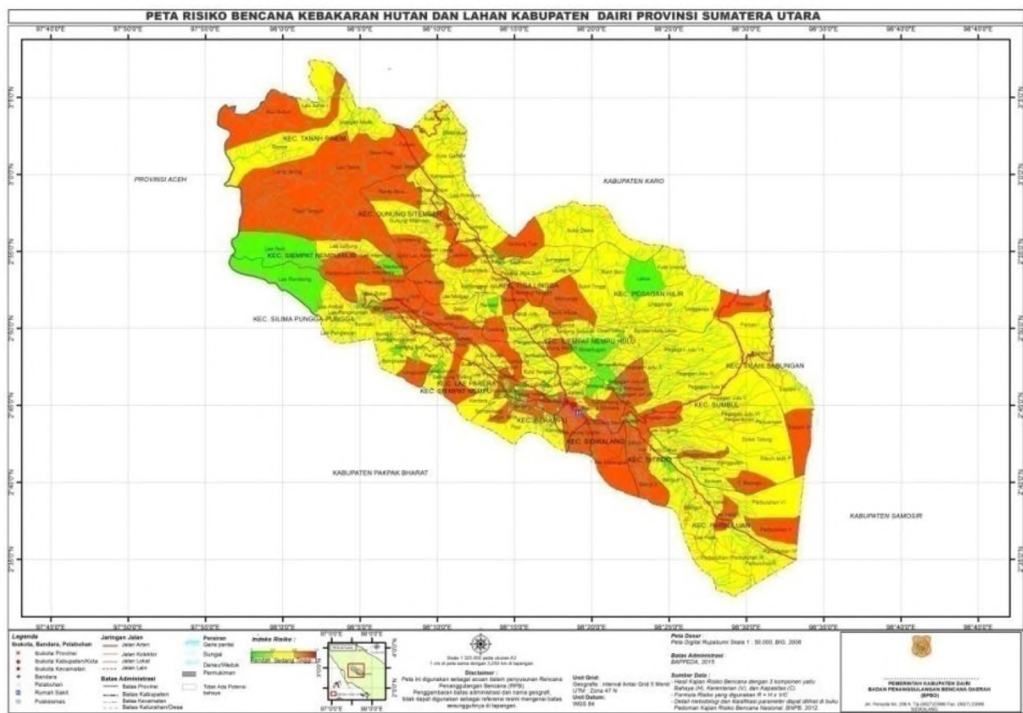
Tabel 2.20
Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	74.822	43.587
PENDUDUK (Jiwa)	-	143.918	116.336
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	69.943.046.260	130.399.124.070
FASILITAS UMUM (Rp)	-	276.850.000.000	211.250.000.000
RUMAH PDDK (Rp)	-	5.187.050.000.000	4.095.650.000.000
JUMLAH RUMAH (Unit)	-	62.724	3.320

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 43.587 ha atau 22,6 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 116.336 jiwa atau 41,7 % dari total populasi, Jumlah bangunan penduduk terpapar di wilayah risiko tinggi sebesar 3.320 unit atau 5,0 % dari total jumlah bangunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.14
Peta Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Di sisi lain, jika melihat pada peta risiko kebakaran hutan dan lahan, bisa dikatakan bahwa daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi masih didominasi oleh Kecamatan Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu dan Sidikalang.

6. Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Dairi pada periode 2012 – 2016 dilaporkan terjadi sebanyak 2 kejadian. Walau belum berdampak masif, secara lokal bencana ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air dan membuat gagal panen.

Tabel 2.21
Matriks Resiko Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RESIKO		TINGKAT KAPASITAS		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KERENTANAN	RENDAH			
	SEDANG		KEC. TANAH PINEM : Lau Njuhar, Tanah Pinem, Lau Primbon KEC. SUMBUL : Pegagan Julu II, Pegagan Julu III, Pegagan Julu VI, Pegagan Julu VIII, Pegagan Julu IX, Pegagan Julu X, Tanjung Beringin, Dolok Tolong, Kuta Gugung, Pargambiran, Perjuangan, Sileu-leu Parsaoran, Pangguruan, Tanjung Beringin I, Barisan Nauli KEC. SIDIKALANG : Bintang Hulu, Bintang, Sidiangkat, Belang malum, Bintang Marsada KEC. TIGALINGGA : Sumbul Tengah, Ujung Teran, Sarintonu, Juma Gerat, Palding, Bertungen Julu, Lau Molgap, Tigalingga, Lau Sireme, Lau Pak-pak KEC. PEGAGAN HILIR : Simanduma, Onan Lama, Tanjung Saluksuk, Bukit Tinggi, Simartugan KEC. GUNUNG SITEMBER : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru KEC. SN HILIR : Jambur Indonesia, Janji, Lae Markelang, Lae Luhung, Sopobutar, Lae Haporas KEC. SN HULU : Tambahan, Kuta Tengah, Sigambir-gambir, Silumboyah, Pangaribuan, Bakkal Julu, Pandan KEC. SIEMPAT NEMPU : Soban, Gomit, Juma Siulok, Juma Teguh, Sosor Lontung KEC.S5P2 : Lae Ambat, Sumbari, Siboras, Bonian, Bongkaras, Longkotan, Lae Pangaroan, Bakkal Gajah, Uruk Belin, Tuntung Batu, Siratah, Polling Anak-anak, Palipi, Parongil KEC. PARBULUAN : Parbuluan IV, Parbuluan VI KEC. LAE PARIRA : Bulu Duri, Pandiangan, Lumban Toruan, Kaban Julu	

	TINGGI	Kec. Tanah Pinem : Liang Jering, Mangan Molih, Renun, Alur Subur, Sinar Pagi, Pasir Tengah, Pasir Mbelang, Pamah, Kuta Buluh, Kempawa, Kuta Gamber, Balandua, Lau Tawar, Harapan, Gunung Tua, Suka dame Kec. Sumbul : Pegagan Julu V, Pegagan Julu IV, Pegagan Julu I, Pegagan Julu VII Kec. Sidikalang : Kota Sidikalang, Kalang Simbara, Kalang, Huta Gambir, Huta Rakyat Kec. Tigalingga : Sukandebi, Lau Bagot, Lau Mil, Palding Jaya Kec. P Hilir : Bandar Huta Usang, Lingga Raja, Laksa, Mbinanga, Kuta Usang, Lingga Raja II, Perik Mbue, Bukit Baru Kec. G Sitember : Bukit lau Kersik, Batu Gungun, Rante Besi Kec. SN Hilir : Lae Itam, Pardomuan, Simungun, Lae Sering Kec. S N Hulu : Lae Nuaha, Sungai Raya, Gunung Meriah, Tualang, Sipoltong Kec. S Nempu : Sinampang, Sihorbo, Adian Nangka, Buntu Raja, Juman tuang, Huta Imbaru, Maju Kec. Silima Punggapungga : Lae Rambong, Lae Panginuman, Kec. L Parira : Sumbul, Kentara, Lae Parira, Sempung Polling, Lumban Sihite Kec. Silahisabungan : Silalahi, Silalahi II, Silalahi III, Paropo, Paropo I Kec. Sitingjo : Sitingjo, Sitingjo I, Panji Dabutar	Kec. T Pinem : Mangan Molih, Renun, Kempawa Kec. S Nempu : Adian Gupa

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Berdasarkan matriks penentuan tingkat risiko, 84 dari 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah tingkat Risiko Sedang dan 76 dari 169 Desa/Kelurahan termasuk tingkat Risiko Tinggi untuk bencana kekeringan.

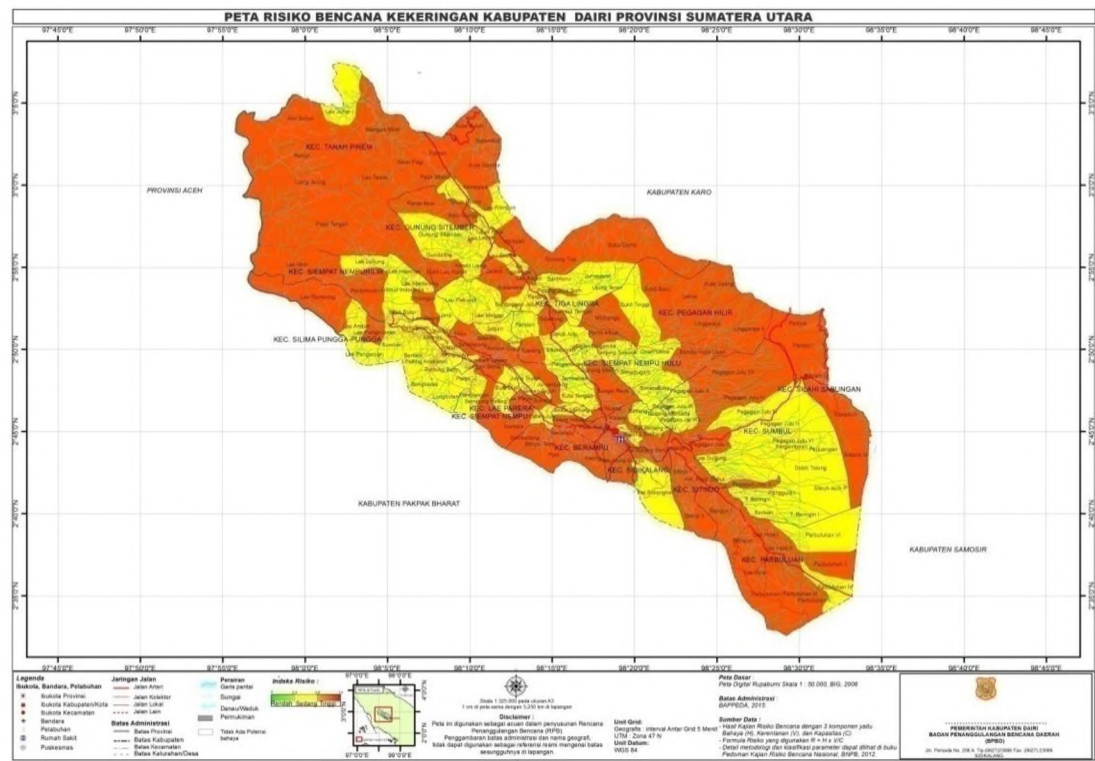
Tabel 2.22
Tingkat Keterpaparan Resiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi

TINGKAT RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN DAIRI			TINGGI
KETERPAPARAN	RISIKO RENDAH	RISIKO SEDANG	RISIKO TINGGI
LUAS (Ha)	-	78.110	114.002
PENDUDUK (Jiwa)	-	117.649	161.315
LAHAN PRODUKTIF (Rp)	-	68.731.519.992	150.530.107.796

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Total luas wilayah terpapar risiko tinggi seluas 114.002 ha atau 59,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Dairi. Jumlah jiwa terpapar sebesar 161.315 jiwa atau 57,8 % dari total populasi.

Gambar 2.15
Peta Indeks Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Dairi



Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Dairi (BPBD)

Jika melihat pada peta risiko kekeringan, bisa disimpulkan daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terutama di Kecamatan Sidikalang, Sumbul, dan Pegagan Hilir. Dan berdasarkan perkembangan perubahan cuaca global dan kerusakan lingkungan, maka diprediksi tingkat risiko ini akan meningkat secara cepat.

Berdasarkan data DIBI tahun 2004 – 2016 persentase kejadian bencana di Kabupaten Dairi dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah bencana tanah longsor sebesar 43%, Kebakaran Permukiman 32%, Cuaca Ekstrim sebesar 21%, dan banjir bandang 4%.

2.1.1.4 Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

1. Kawasan Danau Toba

Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitinjo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil, terdapat beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

a. Kawasan Minapolitan Budidaya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minapolitan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

b. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan.

Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi.

Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat kearah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata (*ecotourism*) atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk diatas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Baski, Panorama Tornaui dan lain-lain.

c. Kawasan Agropolitan Parsiul

Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitinjo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.

d. Kawasan Perkotaan Siultinggil

Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar - masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat.

Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2018 adalah 309.539 jiwa, terdiri dari 155.272 jiwa penduduk laki-laki dan 154.267 jiwa penduduk perempuan.

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 101 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata hampir 101 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2018, terdapat 10 kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sidikalang, Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Pegagan Hilir, Parbuluan, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara empat kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen, yang mempunyai

arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2.23
Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	26.696	26.496	53.192	101
2	Sumbul	23.171	22.722	45.893	102
3	Tigalingga	12.231	12.419	24.650	98
4	Siempat Nempu	10.294	10.424	20.718	99
5	Silima Punggapungga	7.230	7.365	14.595	98
6	Tanah Pinem	11.383	11.275	22.658	101
7	Siempat Nempu Hulu	10.270	10.143	20.413	101
8	Siempat Nempu Hilir	6.131	6.013	12.144	103
9	Pegagan Hilir	8.470	8.466	16.936	100
10	Parbuluan	12.636	12.560	25.196	101
11	Lae Parira	7.419	7.531	14.950	99
12	Gunung Sitember	5.546	5.366	10.912	103
13	Berampu	4.626	4.460	9.086	103
14	Silahi Sabungan	2.594	2.611	5.205	98
15	Sitinjo	6.575	6.416	12.991	103
Jumlah		155.272	154.267	309.539	101

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2019

Persebaran penduduk dapat dilihat dari kepadatan penduduk dan persentase penduduk yang menempati suatu wilayah. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 752,46 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

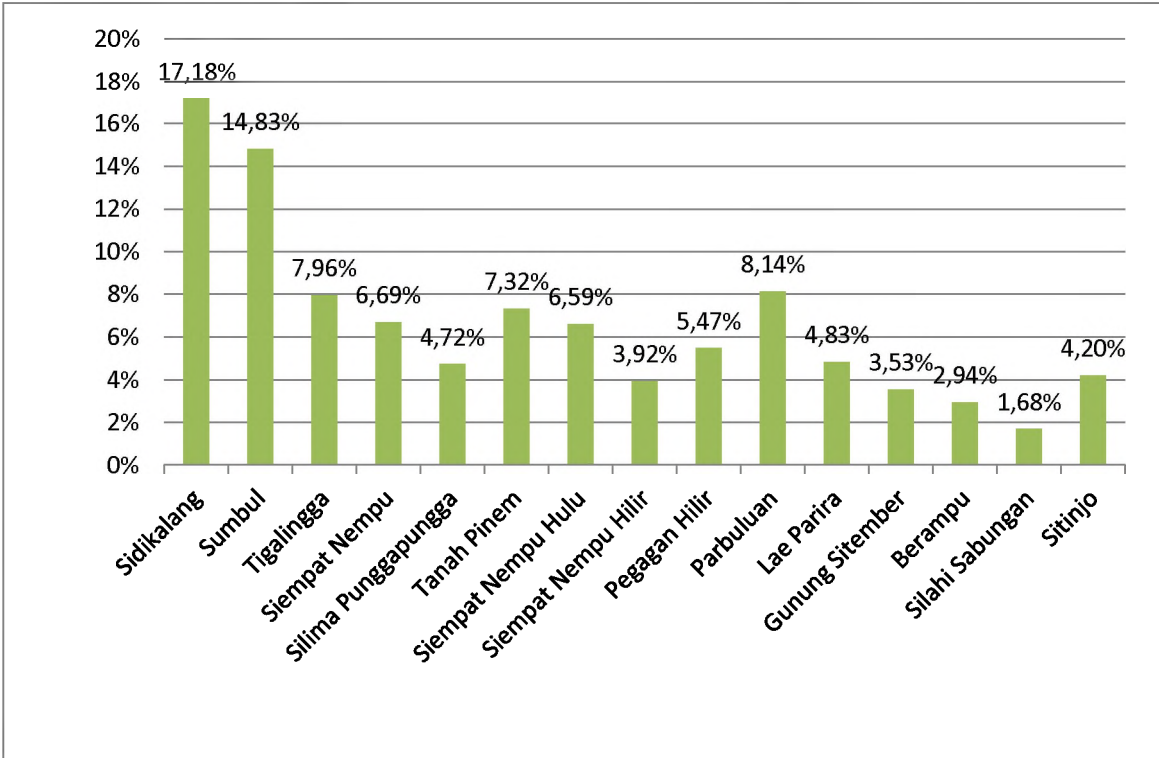
Tabel 2.24
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km ²)	%	
1	Sidikalang	53.192	70,69	3,67	752,46
2	Sumbul	45.893	192,58	9,99	238,30
3	Tigalingga	24.650	197	10,2	125,12
4	Siempat Nempu	20.718	59,35	3,08	349,08
5	Silima Punggapungga	14.595	83,4	4,33	175
6	Tanah Pinem	22.658	439,4	22,8	51,56
7	Siempat Nempu Hulu	20.413	93,93	4,87	217,32
8	Siempat Nempu Hilir	12.144	105,12	5,45	115,52
9	Pegagan Hilir	16.936	158,4	8,22	106,91
10	Parbuluan	25.196	235,4	12,2	107,03
11	Lae Parira	14.950	61	3,16	245,08

12	Gunung Sitember	10.912	77	3,99	141,71
13	Berampu	9.086	39,45	2,05	230,31
14	Silahi Sabungan	5.205	75,62	3,92	68,83
15	Sitinjo	12.991	39,48	2,05	329,05
Jumlah		309.539	1.927,82	100	160,58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2018

Gambar 2.16
 Persentase Jumlah Penduduk



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2018

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban, yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun), persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (usia 65 tahun ke atas).

Tabel 2.25
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk				L+P	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1	0 – 4	7,562	5	6,823	4	14,385	5
2	5 – 9	15,872	10	14,776	10	30,648	10
3	10 – 14	18,415	12	17,358	11	35,773	12
4	15 – 19	18,621	12	17,824	12	36,445	12
5	20 – 24	15,966	10	15,079	10	31,045	10
6	25 – 29	13,752	9	12,627	8	26,379	9
7	30 – 34	10,929	7	10,109	7	21,038	7
8	35 – 39	10,973	7	9,995	7	20,968	7
9	40 – 44	9,298	6	8,848	6	18,146	6
10	45 – 49	8,219	5	8,317	5	16,536	5
11	50 – 54	7,257	5	8,039	5	15,296	5
12	55 – 59	6,103	4	7,305	5	13,408	4
13	60 – 64	5,094	3	6,315	4	11,409	4
14	65 – 69	3,320	2	4,484	3	7,804	3
15	70 – 74	1,809	1	2,744	2	4,553	2
16	>=75	2,082	1	3,624	2	5,706	2
Jumlah		155.272	100	154.267	100	309.539	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2019

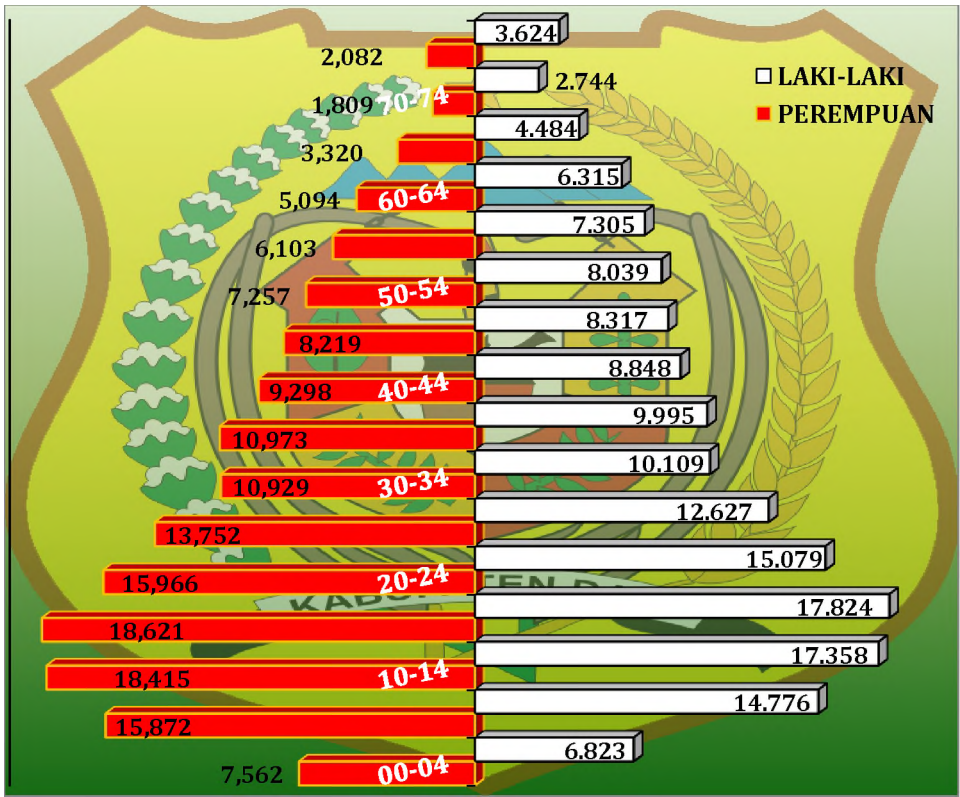
Tabel Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2018 diatas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu sebesar 210.670 atau 68,06% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang menjadi beban adalah sebesar 98.869 atau 31%, dengan rincian penduduk belum produktif sebesar 80.806 atau 26,11% dan penduduk kurang produktif sebesar 18.063 atau 5,84% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia reproduksi adalah sebesar 170.557 atau 55 % dari jumlah penduduk perempuan.

Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin juga dapat disajikan dalam bentuk **Piramida**. Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat berupa jumlah absolut ataupun persentase, sedangkan sumbu vertikal

menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Berikut disajikan piramida penduduk Kabupaten Dairi tahun 2018.

Gambar 2.17
Piramida Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2018



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2019

Pada gambar piramida penduduk menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dairi didominasi oleh penduduk usia produktif, terutama umur 15-34 tahun, sedangkan usia belum produktif didominasi umur 5-14 tahun. Penduduk berumur dibawah lima

tahun sudah mulai berkurang, diduga karena penurunan tingkat kelahiran atau masih minimnya kesadaran masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta lahir sehingga datanya belum terekam dalam database SIAK.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Nilai PDRB ADHK tahun 2010 Kabupaten Dairi selama periode tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 nilai PDRB sebesar Rp. 5.153.826,3 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.688.450,9 juta dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp. 6.271.541,66 juta. Peningkatan nilai PDRB ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.26
 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Menurut Lapangan Usaha(Jutaan Rupiah) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.870.701,58	3.044.049,84	3.269.725,6	3.480.911,1	3.729.507,48
Pertambangan & Penggalian	4.450,46	4.742,82	5.168,8	5.581,6	6.036,85
Industri Pengolahan	21.132,55	24.224,62	27.471,3	30.238,7	33.609,81
Pengadaan Listrik dan Gas	4.416,12	4.801,9	5.165,3	5.684,0	6.308,90
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5.154	5.556,3	5.787,9	6.207,5	6.643,89
Konstruksi	784.788,47	874.098,4	980.835,0	1.096.985,2	1.210.731,08
Perdagangan Besar dan Eceran	981.701,61	1.113.784,9	1.273.010,0	1.364.947,,9	1.487.169,16
Transportasi dan Pergudangan	238.296,75	265.316,7	292.724,6	313.287,8	344.304,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180.597,6	202.013,0	226.043,7	249.672,9	275.054,81
Informasi dan Komunikasi	63.262,98	65.885,4	68.979,1	73.841,7	80.401,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	134.160,32	151.390,7	163.657,4	177.607,9	192.778,44
Real Estat	174.021	187.707,7	200.218,0	216.902,1	235.121,38
Jasa Perusahaan	39.44,15	4.370,7	4.672,2	5.088,3	5.568,37
Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	639.781,22	696.396,9	758.224,4	809.870,2	890.509,49
Jasa Pendidikan	119.615,46	131.375,9	145.424,1	155.934,2	171.071,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.787,03	46.070,0	50.485,7	54.937,3	59.661,34
Jasa lainnya	1.270,51	1.375,9	1.478,2	1.627,5	1.796,56
PDRB	6.268.081,8	6.823.161,5	7.484.071,5	8.049.324,1	8.736.335,50

Sumber: Dairi dalam Angka-BPS, 2019

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar Rp.6.268.081,8, naik menjadi Rp.6.823.161,5 pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi Rp.7.484.071,5 kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp.8.049.324,1 dan pada tahun 2018 menjadi Rp.8.736.335,50. Nilai PDRB atas harga berlaku mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,7% per tahun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp.3.729.507,48 disusul oleh perdagangan besar dan eceran sebesar Rp.1.487.169,16 dan konstruksi sebesar Rp.1.210.731,08.

Tabel 2.27
 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2014 -2018

NO.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.446.524,3	2.520.784,2	2.617.969,5	2.726.169,0	2.838.868,0
2.	Pertambangan & Penggalian	3.439,1	3.555,3	3.727,7	3.909,0	4.078,6
3.	Industri Pengolahan	16.774,4	17.793,4	18.954,5	19.757,1	20.727,1
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.632,8	5.074,2	5.186,5	5.336,1	5.560,2
5.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4.758,2	4.976,9	5.079,9	5.287,1	5.495,8
6.	Konstruksi	629.431,0	672.548,8	720.019,3	767.839,3	812.668,3
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	798.257,3	863.875,0	934.528,3	988.624,5	1.046.311,2
8.	Transportasi dan Pergudangan	184.015,5	196.512,6	209.413,4	223.660,5	239.252,4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	147.829,5	158.784,3	170.332,9	178.334,8	187.236,3
10.	Informasi dan Komunikasi	60.979,4	62.595,5	64.814,9	67.943,1	71.797,1
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	104.083,4	112.040,9	116.168,4	120.944,5	126.035,9
12.	Real Estat	138.967,8	144.697,1	148.766,4	159.001,2	167.386,0
13.	Jasa Perusahaan	3.195,3	3.400,0	3.495,1	3.656,8	3.847,6
14.	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	482.434,3	510.873,4	524.808,7	545.223,4	576.801,2
15.	Jasa Pendidikan	95.642,8	101.444,4	108.117,9	114.012,7	120.577,0
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31.840,9	33.735,8	35.973,9	37.913,1	39.944,2
17.	Jasa lainnya	1.020,3	1.057,0	1.093,8	1.161,9	1.235,0
PDRB		5.153.826,3	5.413.748,7	5.688.450,9	5.968.774,1	6.267.821,6

Sumber: Dairi dalam Angka-BPS, 2019

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 berjumlah sebesar Rp.5.153.826,3, naik menjadi Rp.5.413.748,7 pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.688.450,9, pada tahun 2017 menjadi Rp. 5.968.774,1 dan pada tahun 2018 menjadi Rp.6.267.821,6. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB per tahun atas harga konstan sebesar 5,11%. Pada tahun 2018 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 2.838.868,0 disusul oleh perdagangan besar dan eceran sebesar Rp. 1.046.311,2, Kontruksi sebesar Rp. 812.668,3, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 576.801,2 dan Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp.239.252,4.

Tabel 2.28
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 -2018

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,8	44,61	43,69	43,24	42,69
2.	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.	Industri Pengolahan	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6.	Konstruksi	12,52	12,81	13,11	13,63	13,86
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	15,66	16,32	17,08	16,96	17,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,8	3,89	3,91	3,89	3,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	2,96	3,02	3,10	3,15
10.	Informasi dan Komunikasi	1,01	0,97	0,92	0,92	0,92
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,22	2,19	2,21	2,21
12.	Real Estat	2,78	2,75	2,68	2,69	2,69
13.	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
14.	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,21	10,21	10,13	10,06	10,19
15.	Jasa Pendidikan	1,91	1,93	1,94	1,94	1,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65	0,68	0,67	0,68	0,68
17.	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: Dairi dalam Angka-BPS, 2019

Distribusi persentase PDRB pada tahun 2014-2018 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar tetap dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 pertama adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,79% disusul oleh Perdagangan besar dan eceran sebesar 16,98%, kemudian konstruksi sebesar 14,14%, dari sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial sebesar 9,99 %, serta transportasi dan pergudangan sebesar 3,96%.

Tabel 2.29
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 -2018

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,48	3,04	3,85	4,13	4,13
2.	Pertambangan & Penggalian	2,86	3,38	4,85	4,86	4,34
3.	Industri Pengolahan	6,73	6,07	6,53	4,23	4,91
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,89	9,53	3,10	2,00	4,20
5.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2,59	4,60	2,07	4,08	3,95
6.	Konstruksi	4,57	6,85	7,06	6,64	5,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	7,24	8,22	7,83	6,13	5,84

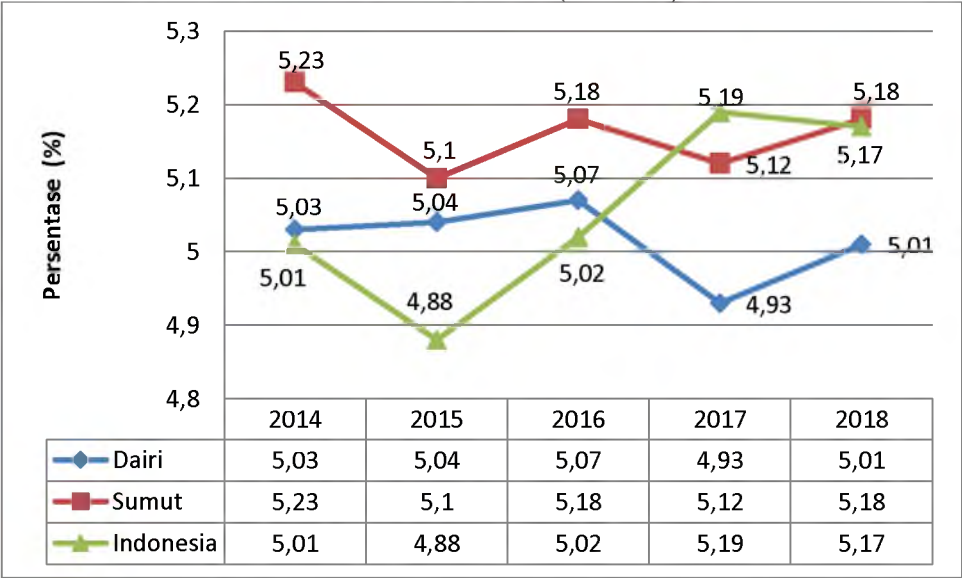
No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
8.	Tranportasi dan Pergudangan	8,64	6,79	6,56	6,80	6,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,17	7,41	7,27	4,70	4,99
10.	Informasi dan Komunikasi	5,54	2,65	3,55	4,83	5,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,04	7,65	3,68	4,11	4,21
12.	Real Estat	3,45	4,12	3,16	6,52	5,27
13.	Jasa Perusahaan	5,88	6,40	2,80	4,63	5,22
14.	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	7,57	5,89	3,31	3,31	5,79
15.	Jasa Pendidikan	8,16	6,07	6,58	5,45	5,76
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	5,95	5,15	6,88	5,36
17.	Jasa lainnya	1,73	3,60	3,49	6,22	6,29
PDRB		5,03	5,04	5,07	4,93	5,01

Sumber: Dairi dalam Angka-BPS, 2019

Dari tabel di atas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha tahun 2014-2018 yang paling berkontribusi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 6,97%, diikuti jasa lainnya sebesar 6.29%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2014-2018 menunjukkan trend yang relatif stabil walaupun pada tahun 2017 menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 5,03% dan pada tahun 2017 sebesar 4,93%. Pada tahun 2016 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi berada pada kondisi yang tertinggi yaitu sebesar 5,07%.

Gambar 2.18
Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi, PDRB Sumatera Utara dan PDB Nasional, Tahun 2014-2018 (Persen)



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka,BPS 2019

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.30
PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2014-2018 (Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	22.581.579	9,12	18.567.329	4,44
2015	24.447.890	8,26	19.397.860	4,47
2016	26.670.728	9,09	20.271.733	4,50
2017	28.563.613	7,10	21.175.177	4,46
2018	30.848.320	8,20	22.131.900	4,52

Sumber: PDRB Kab. Dairi-BPS, 2019

Tabel 2.31
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Dairi dengan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 -2018

TAHUN	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Dairi	Sumatera Utara	Dairi	Sumatera Utara
2014	22.581.579	37.913.896	18.567.329	30.477.072
2015	24.447.890	41.019.540	19.397.860	31.637.415
2016	26.670.728	44.557.760	20.271.733	32.885.090
2017	28.563.613	48.304.400	21.175.177	34.159.541
2018	30.848.320	52.366.075	22.131.900	35.483.382

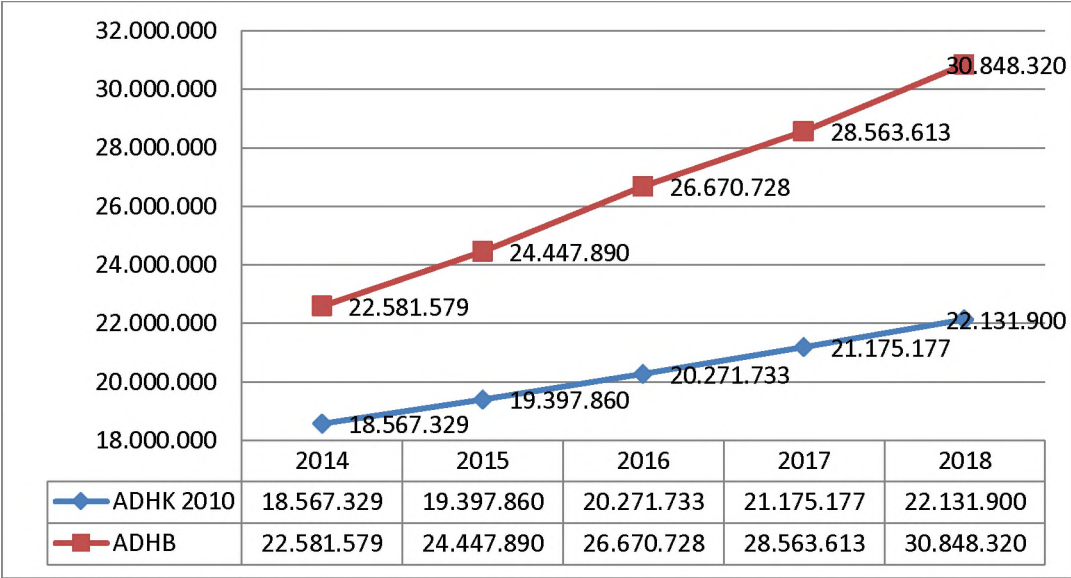
Sumber: PDRB Kab. Dairi-BPS, 2019

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 22,58 juta rupiah dan meningkat menjadi 30,84 juta rupiah pada tahun 2018. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2014-2018 terjadi peningkatan yang PDRB relatif stabil. Tahun 2018, PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga konstan mencapai 22,13 juta rupiah.

Jika dibanding dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi yang mengalami perlambatan, yakni dari tahun 2016 sebesar 5,07 persen menjadi sebesar 4,93 persen pada tahun 2017, maka PDRB per kapita tidak mengalami hal yang sama dengan laju

pertumbuhannya. PDRB per kapita ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Angka ini juga berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Dairi.

Gambar 2.19
PDRB per kapita Kabupaten Dairi ADHB dan ADHK 2010, 2014-2018 (Rupiah)



Sumber : PDRB Kabupaten Dairi (BPS)

2.2.1.3 Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk

menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

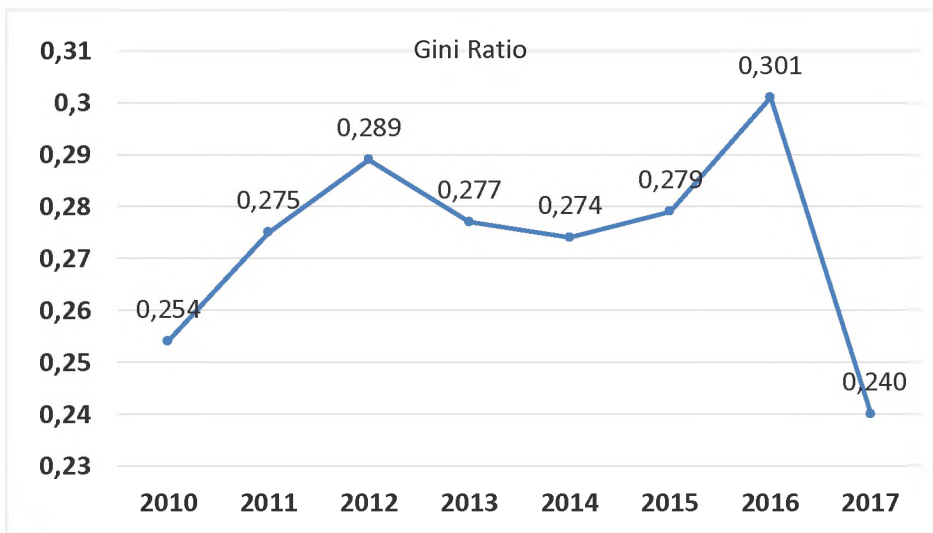
Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, $G=0$, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio $0 < G < 0,3$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, $0,3 < G < 0,5$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, $0,5 < G < 1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Dan jika nilai Gini Ratio, $G=1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan

cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.20
Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Kabupaten Dairi

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2010-2017 menunjukkan trend penurunan tetapi pada tahun 2016 kembali meningkat. Pada tahun 2010 Gini Ratio sebesar 0,254 kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 0,275 dan pada tahun 2012 Gini Ratio sebesar 0,289. Tetapi penurunan terjadi pada tahun 2013 menjadi 0,277 dan tahun 2014 menjadi 0,274 namun kondisi ini tidak dapat dipertahankan karena pada tahun 2015 Gini Ratio meningkat kembali dengan nilai sebesar 0,279.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Dairi tahun 2010-2017 yang berada pada nilai 0,3 menunjukkan angka yang cukup tinggi mengingat bahwa Kabupaten Dairi merupakan daerah perdesaan/agraris. Nilai Gini Ratio yang cukup tinggi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dairi mengingat dampak yang akan ditimbulkan akibat perbedaan pendapatan yang cukup besar antar masyarakat. Permasalahan sosial dan tindak kriminal akan mudah terjadi di daerah yang memiliki Gini Ratio yang tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebahagian besar jumlah penduduk yang bekerja tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi sebahagian kecil

penduduk lainnya yang bekerja memiliki penghasilan yang sangat besar. Maka disinilah diperlukan peranan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemerataan pendapatan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai sumber daya dan modal.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multi dimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

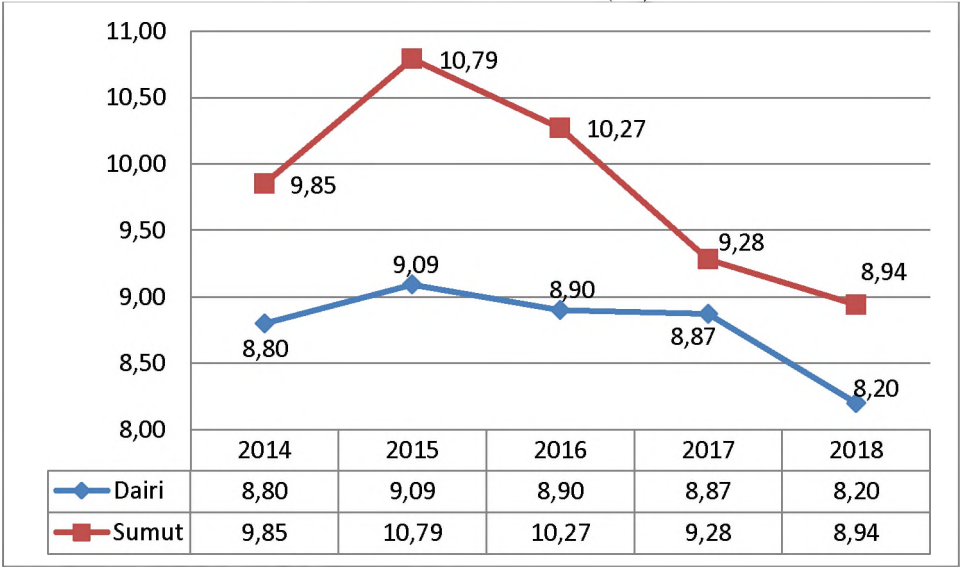
Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,8 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter penduduk miskin di Kabupaten Dairi masih banyak yang dekat dengan garis kemiskinan, sehingga ketika penduduk miskin mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh faktor ekstern pemerintah, persentase penduduk miskin akan mengalami perubahan struktur.

Gambar 2.21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Tahun 2014-2018 (%)



Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 masih berada dibawah persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut pada tahun 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi mencapai 1,77. Angka ini semakin meningkat dibandingkan 2016. Angka ini menunjukkan ada indikasi semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan di Kabupaten Dairi. Demikian juga dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2018 mencapai 0,54 yang meningkat 0,35 dibandingkan tahun 2017, berarti ada indikasi semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.32
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2014-2018

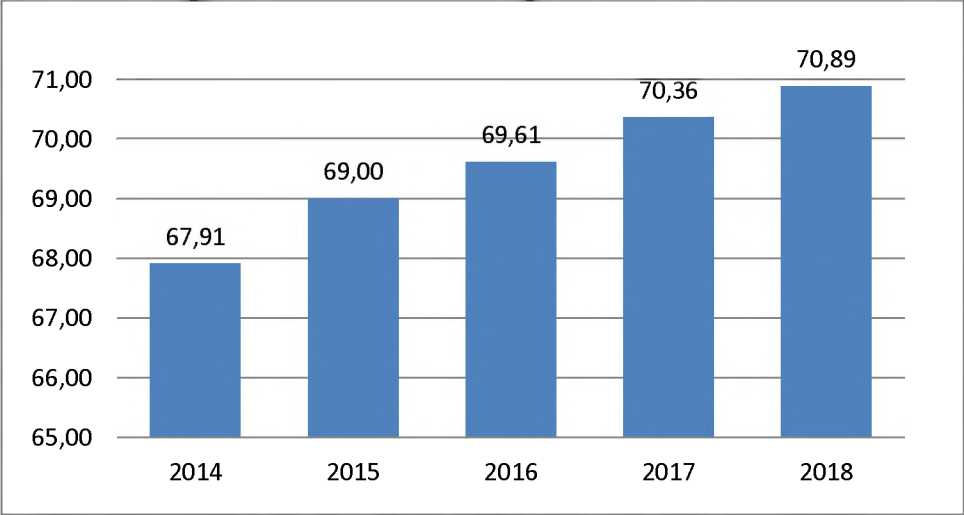
Indeks	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,24	0,91	0,78	1,03	1,77
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,26	0,15	0,18	0,19	0,54

Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018

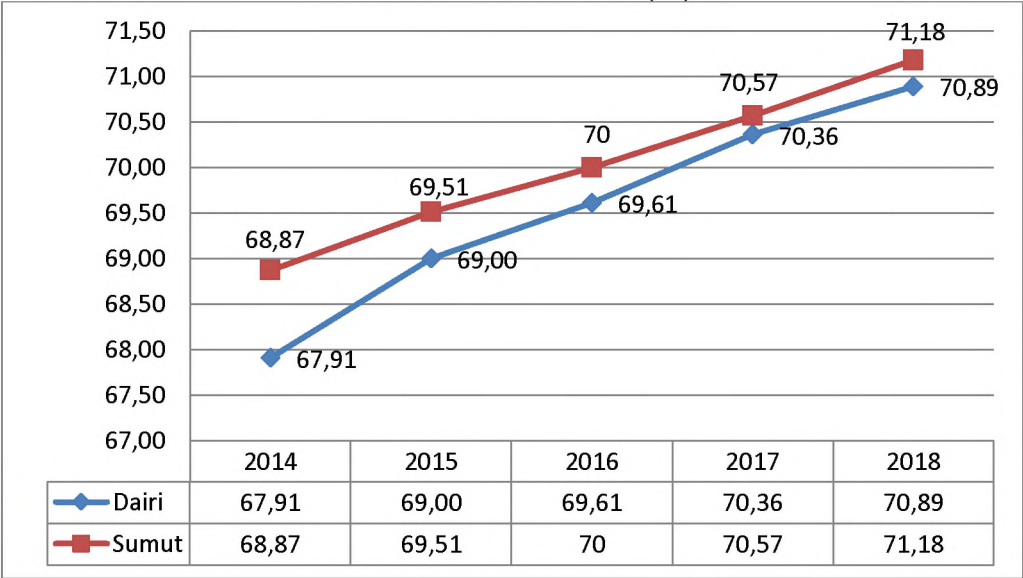


Sumber: Dairi Dalam Angka-BPS, 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018 sebagaimana terlihat pada gambar diatas. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang lebih komprehensif dibandingkan hanya dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi). Melalui kombinasi ini, pengukuran keberhasilan pembangunan daerah akan menjadi lebih baik.

Gambar 2.23
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (%)



Sumber : Dairi Dalam Angka-BPS, 2019

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat diteliti. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 2.33

Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM < 70	Sedang
70 ≤ IPM < 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : Dairi Dalam Angka-BPS, 2019

Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Dairi sudah berada pada status “tinggi”, dan Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi meningkat lagi menjadi 70,89. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Tabel 2.34

IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi, 2018

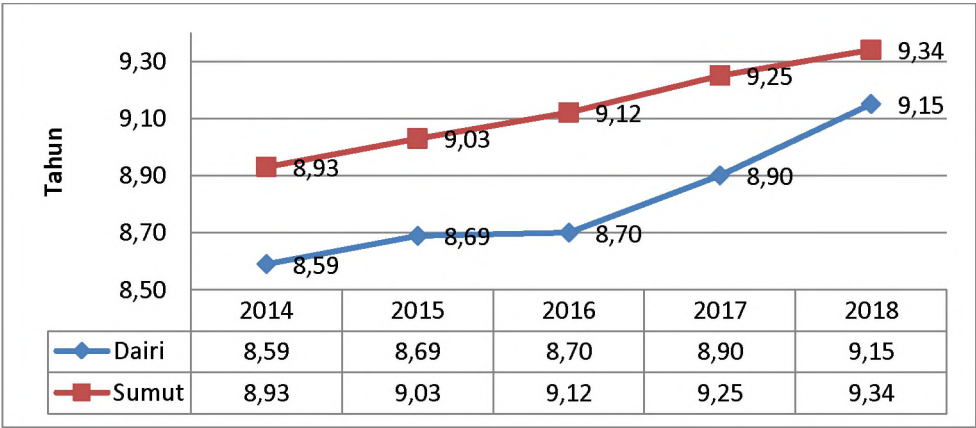
Komponen	Nilai
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	68,41
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rupiah/orang/tahun)	Rp. 10.492.000
	70,89

Sumber : Dairi Dalam Angka-BPS, 2019

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.24
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara,
Tahun 2014 – 2018 (Tahun)



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka-BPS, 2019

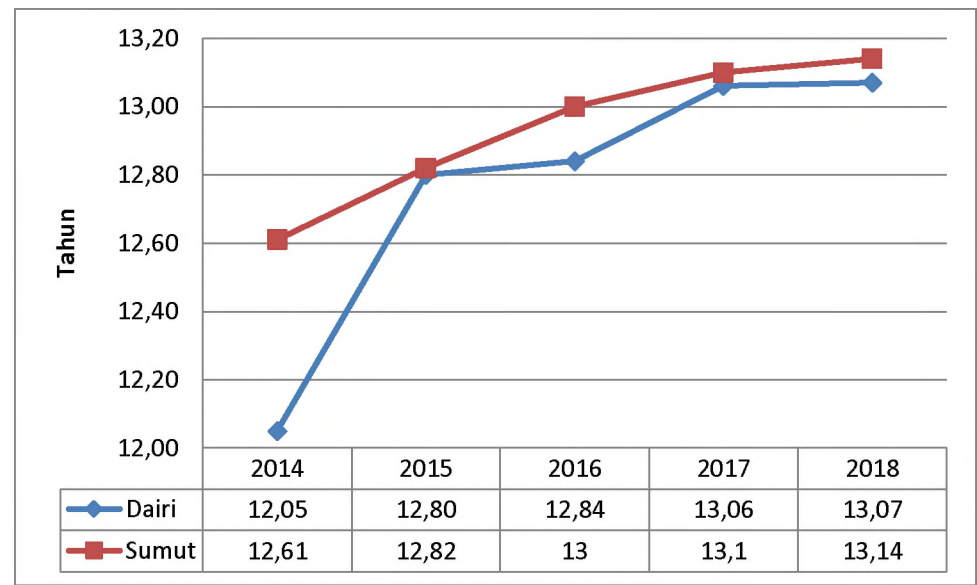
Hal ini berarti penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,15 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SLTP kelas 3.

Pada skala Provinsi, angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi selama kurun waktu 2014-2018 selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara.

Indikator lain IPM dari dimensi Pengetahuan adalah Harapan Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi 2018 diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.25
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara,
2014–2018 (Tahun)



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka-BPS, 2019

Sungguh menarik melihat tren pencapaian indikator ini, berkaca pada waktu lima tahun yang lalu, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi pada tahun 2014 masih 12,05. Angka ini mempunyai selisih 0,56 poin dari angka Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2018 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi sudah mencapai 13,07 dan hanya mempunyai selisih 0,07 poin saja dari angka Provinsi Sumatera Utara.

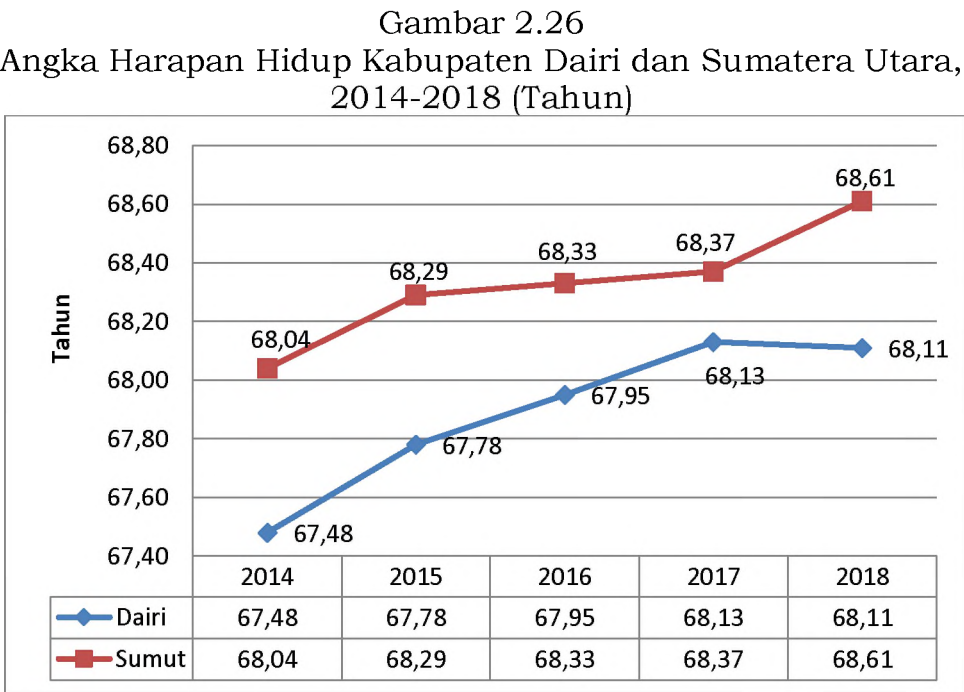
Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Semula atau pada tahun 2014, anak usia 7 tahun yang memasuki dunia pendidikan di Kabupaten Dairi diharapkan hanya akan dapat bersekolah hingga jenjang SMU, namun pada tahun 2018 harapan tersebut meningkat ke jenjang Diploma II.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7

tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut :



Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka-BPS, 2019

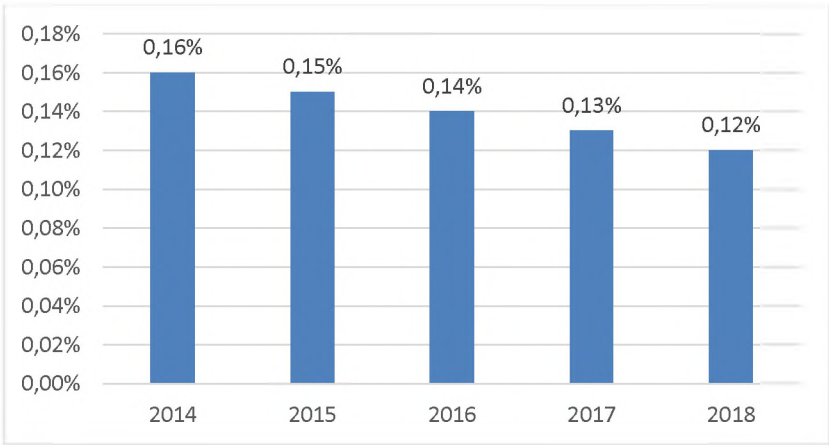
Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2014-2018 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi masih belum lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi yang selalu rendah dibandingkan Angka Harapan Hidup Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidacukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.27
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2014 – 2018 (%)



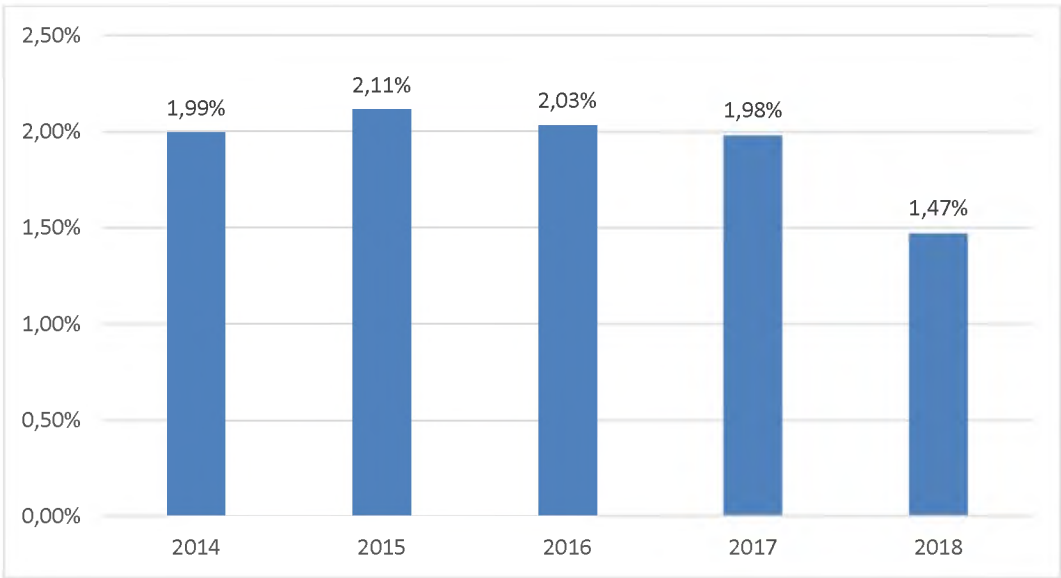
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi cenderung menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 0.16% kemudian turun menjadi sebesar 0,12% pada tahun 2018. Penurunan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh meningkatnya upaya pendidikan gizi, penguatan surveilans gizi serta pemberian suplementasi gizi. Seluruh balita gizi buruk di Kabupaten Dairi telah memperoleh perawatan.

2.2.2.6 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya di kemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2014 – 2018 (%)



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar di atas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi sejak tahun 2014 hingga 2018 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang naik menjadi sebesar 2,11 persen pada tahun 2015, dari sebelumnya sebesar 1,99 persen pada tahun 2014, kemudian menurun menjadi sebesar 2,03 persen pada tahun 2016, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,98 persen. Pada tahun 2018, persentase balita gizi kurang sebesar 1,47 persen.

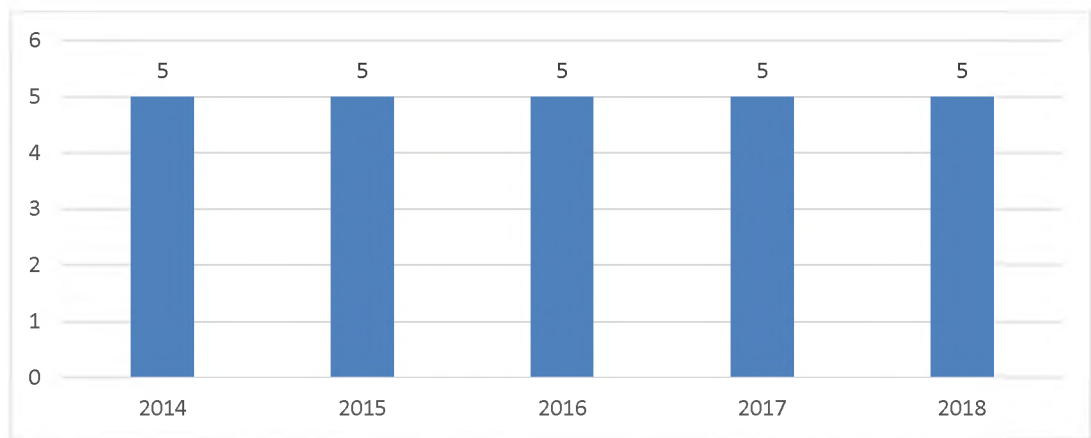
2.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda Dan Olah Raga

2.2.3.1 Perkembangan Seni dan Budaya

2.2.3.1.1 Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Dairi, tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.29
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kabupaten Dairi
Tahun 2014-2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.2.3.1.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kabupaten Dairi memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat beragam, sehingga terdapat banyak benda, situs maupun kawasan Cagar Budaya yang dimiliki. Namun tidak semua benda cagar budaya tersebut telah dilestarikan maupun tersertifikasi.

Tabel 2.35
Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	34	34	34	34	34
2.	Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3	3
3.	Situs	-	-	-	-	-
4.	Monumen Sejarah Perjuangan	6	6	6	6	6
5.	Museum	-	-	-	-	-

Sumber:Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahragaTahun 2018

Tabel diatas menyajikan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dairi yang dilestarikan. Tahun 2018 jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 34 buah.

Jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan di Kabupaten Dairi berjumlah sebanyak 43 buah dengan jumlah terbesar yakni benda cagar budaya sebanyak 34 buah, kemudian monumen sejarah perjuangan sebanyak 6 buah dan kawasan cagar budaya sebanyak 3 buah.

2.2.3.1.3 Jumlah Karya Budaya Yang Di Revitalisasi Dan Inventarisasi

Tabel 2.36
Penanganan Cagar Budaya

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30	35	40	40	40
2.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	80	80	80	80	80

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 30 buah pada tahun 2014 menjadi 40 buah pada tahun 2018 sedangkan total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki sebanyak 80 buah.

2.2.3.2 Perkembangan Olahraga

2.2.3.2.1 Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.37
Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Dairi, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Organisasi Kepemudaan	41	41	47	47	47	Unit
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	16	16	16	16	16	Organisasi
3.	Prasarana Olah Raga	13	13	13	13	13	Unit

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dairi dari tahun 2014 hingga tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 ada sebanyak 41 organisasi kepemudaan dan pada tahun 2016 menjadi 47 organisasi, sementara untuk jumlah organisasi olahraga berjumlah 16 buah dan sarana prasarana olahraga sebanyak 13 unit.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/Negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Gambar di bawah:

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
Pendidikan Anak Usia Dini	23,57	15,50	18,30	21,90	29,97
SD	103,74	103,94	104,14	104,14	106,52
SMP	94,44	94,64	94,84	95,04	95,41

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Angka Partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2014 sebesar 23,57, turun menjadi 15,00 pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 18,30, pada tahun 2017 naik menjadi 21,90 dan pada tahun 2018 naik menjadi 29,97. Angka Partisipasi kasar SD rata-rata diatas 100%, dimana pada tahun 2014 sebesar 103,74, tahun 2015 sebesar 103,94, tahun 2016 sebesar 104,24, tahun 2017 sebesar 104,14 dan pada tahun 2018 sebesar 106,52. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2014 sebesar 94,44 dan pada tahun 2018 sebesar 95,41.

2.3.1.1.2 **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.39
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	89,75	90,25	90,75	91,25	96,63
SMP	99,25	92,60	89,95	86,24	76,59

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Angka Partisipasi Murni SD meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2014 sebesar 89,75, naik menjadi 90,25 pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi 90,75, kemudian pada tahun 2017 sebesar 91,25 dan pada tahun 2018 menjadi 96,63. Angka Partisipasi Murni SMP selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 99,25, tahun 2015 menurun menjadi 92,60, tahun 2016 menurun manjadi 89,95 , pada tahun 2017 menurun menjadi 86,24 dan pada tahun 2018 menjadi 76,59.

2.3.1.1.3 **Angka Putus Sekolah**

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat PendidikanTahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	0,12	0,12	0,12	0,12	0,29
SMP	0,32	0,33	0,34	0,35	0,47

Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Angka Putus Sekolah SD selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,12 namun pada tahun 2018 angka putus sekolah meningkat menjadi 0,29. Angka Putus sekolah SMP dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 meningkat dimana pada tahun 2014 sebesar 0,32, kemudian pada tahun 2015 menjadi 0,33, tahun 2016 menjadi 0,34, tahun 2017 menjadi 0,35 dan pada tahun 2018 menjadi 0,47.

2.3.1.1.4 Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari tahun 2014 - 2018 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	100	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.1.1.5 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD ke SMP	92,69	94,31	95,93	97,55	99,17
SMP ke SMA	91,65	93,73	95,81	97,89	99,97

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Angka Melanjutkan SD ke SMP dari tahun 2014 ke tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 sebesar 92,69, tahun 2015 menjadi 94,31, tahun 2016 menjadi 95,93, tahun 2017 meningkat menjadi 97,55 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,17. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014 sebesar 91,65, tahun 2015 meningkat menjadi 93,73, tahun 2016 menjadi 95,81, tahun 2017 meningkat menjadi 97,89 dan pada tahun 2018 menjadi 99,97.

2.3.1.1.6 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat pada gambar dibawah ini dimana ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah kabupaten Dairi dari tahun 2014 sampai 2018 sebesar 100%.

Gambar 2.30
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018 (%)



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.31
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018



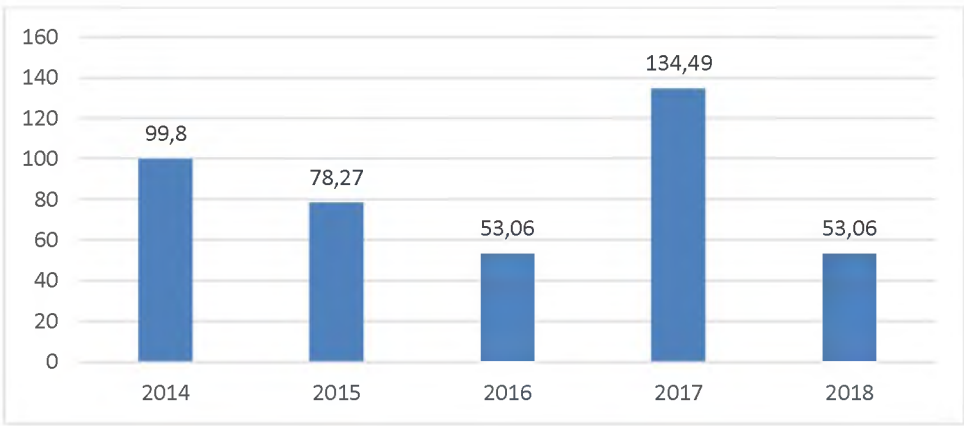
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Jika dilihat dari Perkembangannya jumlah kematian bayi tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 7,47.

2.3.1.2.2 Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.32
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018



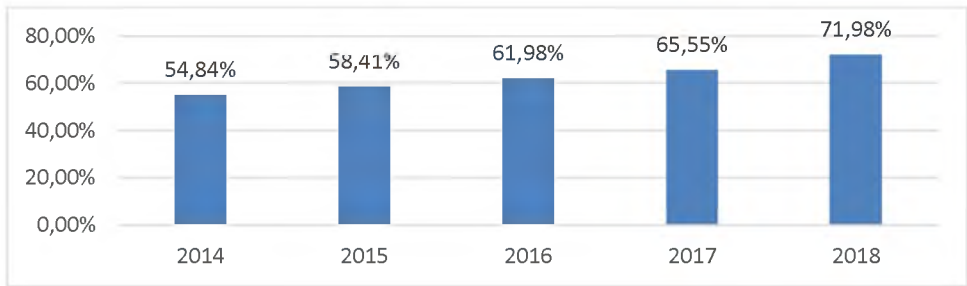
Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Dairi kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung menurun, yaitu sebesar 99,8 pada tahun 2014 menjadi 53,06 pada tahun 2018.

2.3.1.2.3 Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.33
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin
Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018



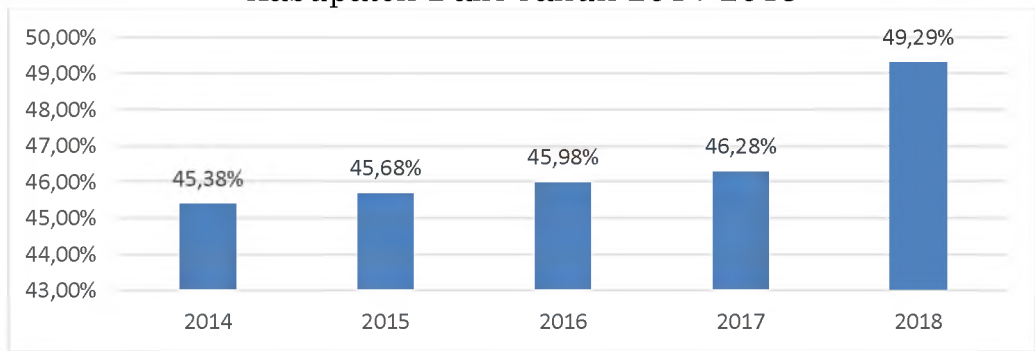
Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Jika dilihat dari tabel diatas terjadi peningkatan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2014 sebesar 54,84 persen, 58,41 persen pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 61,98 persen, 65,55 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 71,98 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih menggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan didaerah daerah tersebut.

2.3.1.2.4 Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Cakupan penderita penyakit TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 dapat dilihatpada gambar dibawah ini:

Gambar 2.34
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018



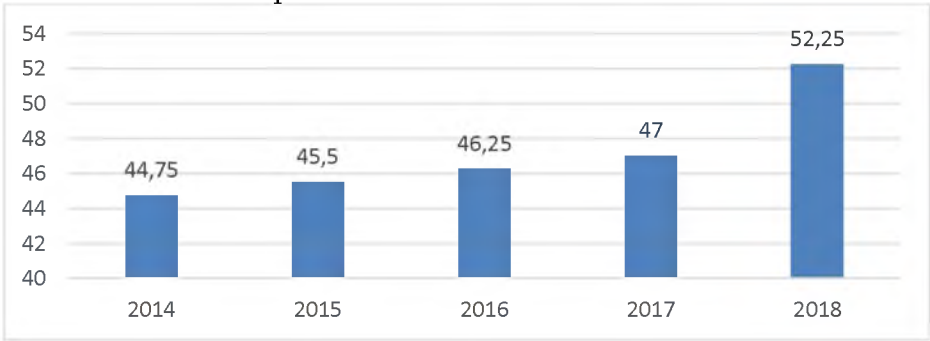
Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Jika dilihat dari tabel diatas terjadi peningkatan Pertolongan penderita penyakit TB pada tahun 2014 sebesar 45,38 persen, 45,68 persen pada tahun 2015, pada tahun 2016 45,98 persen, 46,28 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 49,29 persen.

2.3.1.2.5 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.35
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018

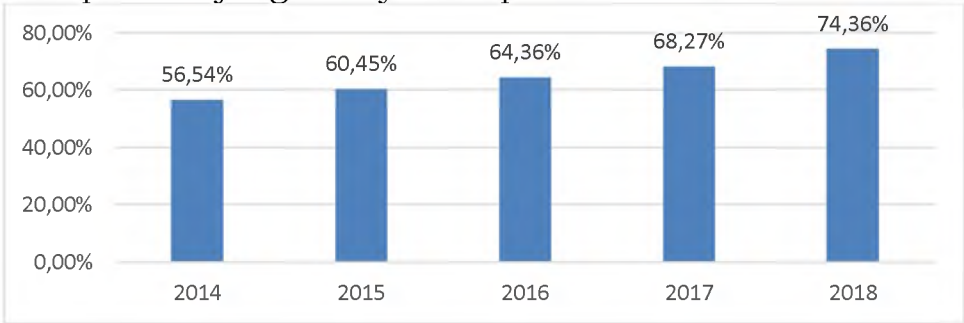


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.1.2.6 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kopetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun & waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi Utara dapat di lihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.36
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018



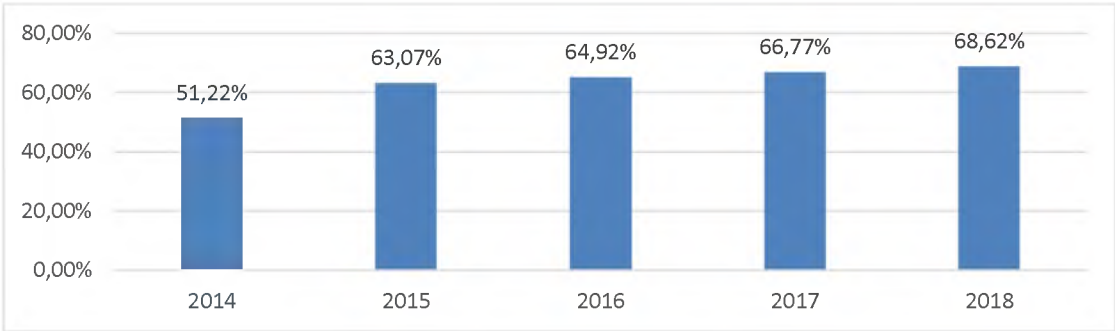
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Jika dilihat dari tabel diatas Cakupan kunjungan Bayi mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 56,54 persen, sebesar 60,45 persen pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 64,36 persen, sebesar 68,27 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 74,36 persen.

2.3.1.2.7 Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.37
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

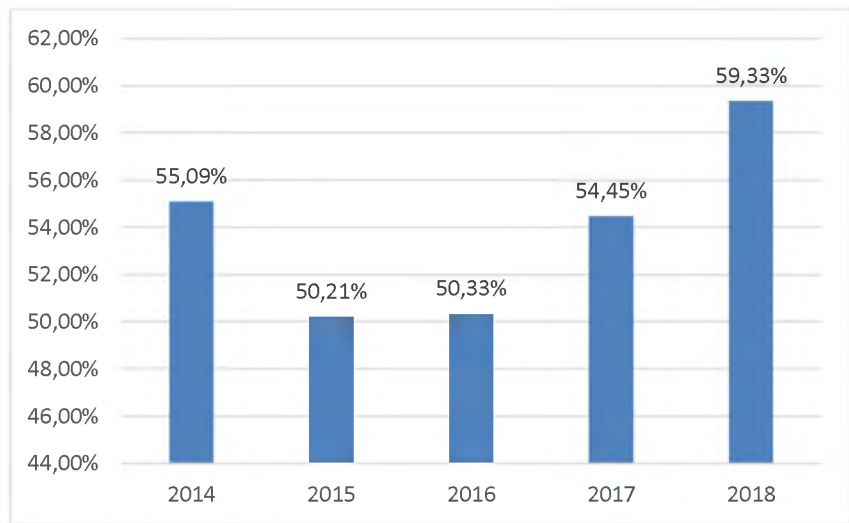
Persentase cakupan kunjungan bayi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 51,22% pada tahun 2014 menjadi 68,62% pada tahun 2018.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

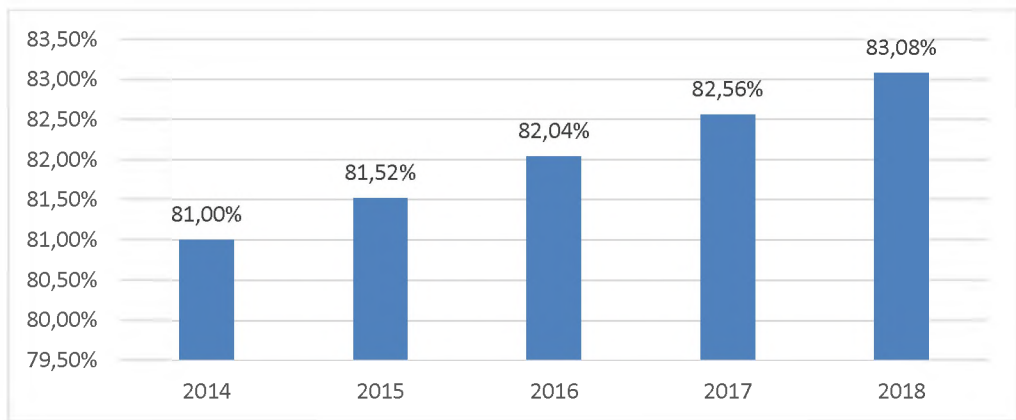
Gambar 2.38
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa jalan dengan kondisi baik mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 50,21 persen dari 55,09 persen pada tahun 2014 dan kemudian berturut-turut mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 sebesar 59,33 persen. Sedangkan untuk perkembangan kondisi jembatan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.39
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
Tahun 2014 – 2018



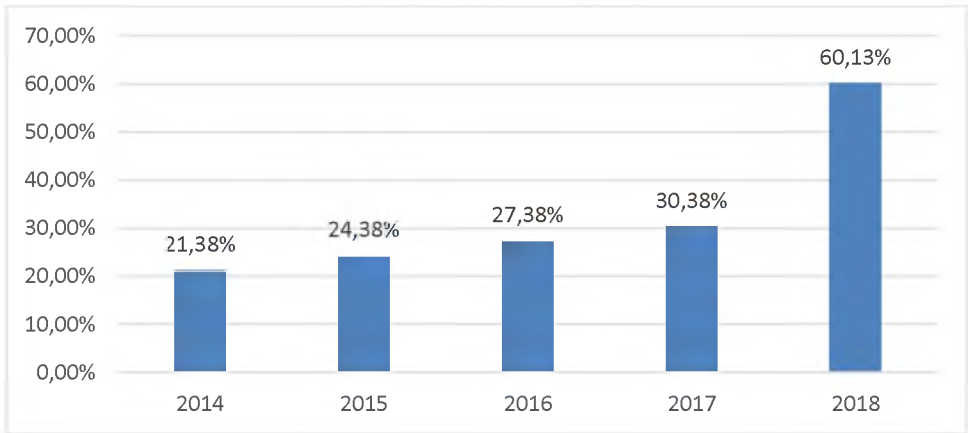
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.1.3.2 Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2014-2018, menunjukkan adanya peningkatan, namun belum

mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Gambar 2.40
Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi
Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

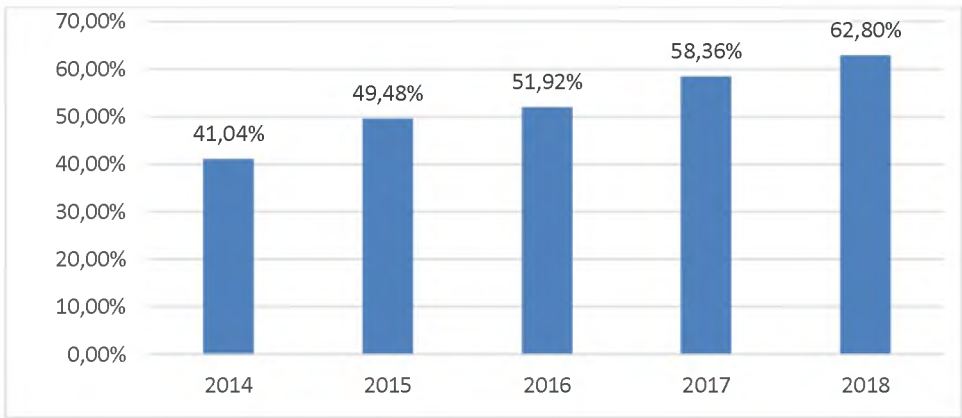
Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu bertambahnya kerusakan jaringan irigasi sebagai dampak daya rusak air, masih sering terjadi khususnya pada daerah dengan topografi berbukit dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil.

2.3.1.3.3 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2.41
Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih
Tahun 2014 – 2018



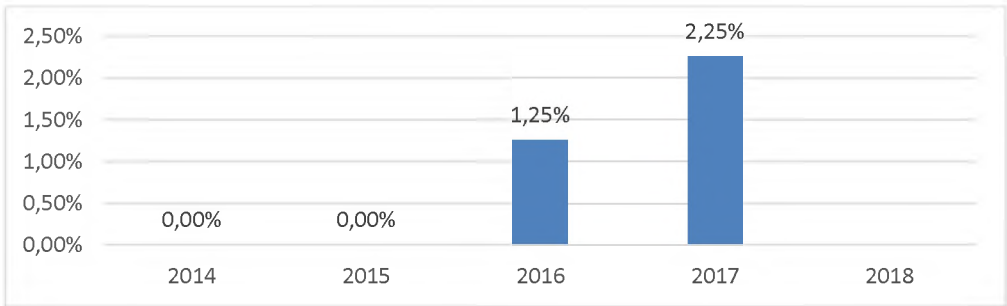
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Persentase capaian tersedianya akses air minum bersih mengalami kenaikan yaitu 41,04% pada tahun 2014, menjadi 62,80% pada tahun 2018

2.3.1.3.4 Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten

Persentase peningkatan konstruksi Jalan Kabupaten di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.42
Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten Tahun
2014 – 2018

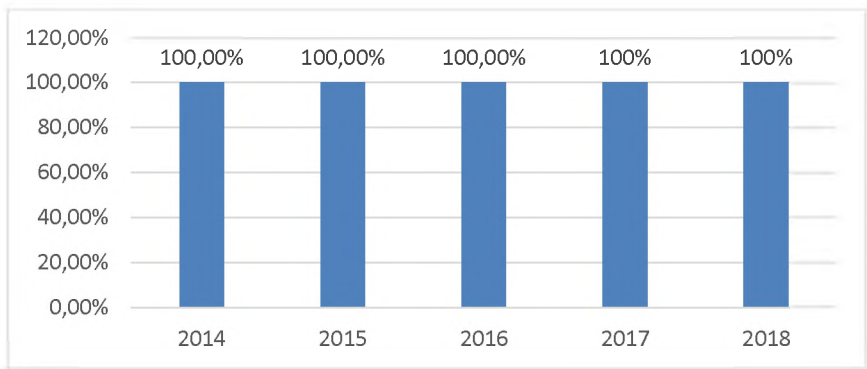


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa persentase peningkatan konstruksi jalan kabupaten pada Tahun 2016 sebesar 1,25% dan pada Tahun 2017 sebesar 2,25%.

2.3.1.3.5 Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2.43
Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB
Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

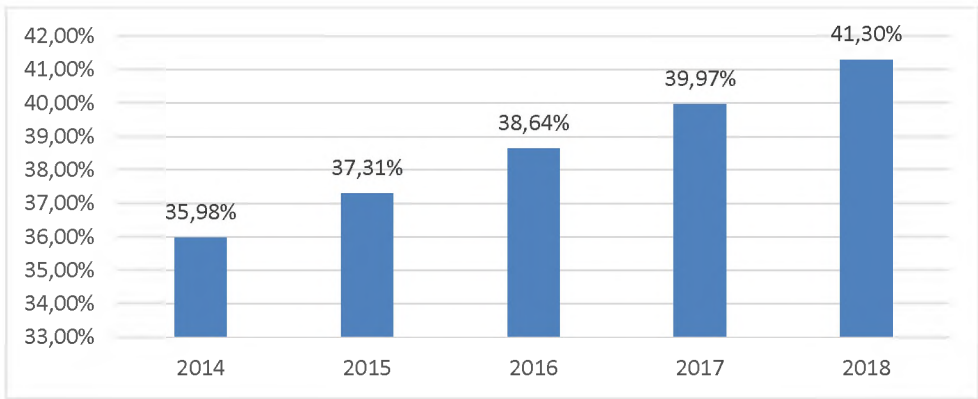
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa capaian terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB dari tahun 2014 – 2018 tercapai 100%.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.3.1.4.1 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan

infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi tahun 2014-2018 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.44
Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2014 – 2018

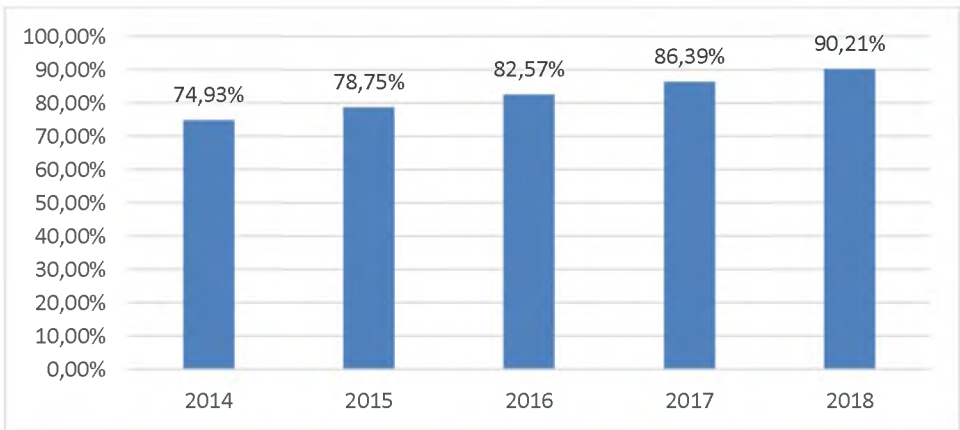


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2014 sebesar 35,98%, tahun 2015 sebesar 37,31%, tahun 2016 sebesar 38,64%, tahun 2017 sebesar 39,97%, tahun 2018 sebesar 41,30%.

2.3.1.4.2 Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2.45
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2014 – 2018

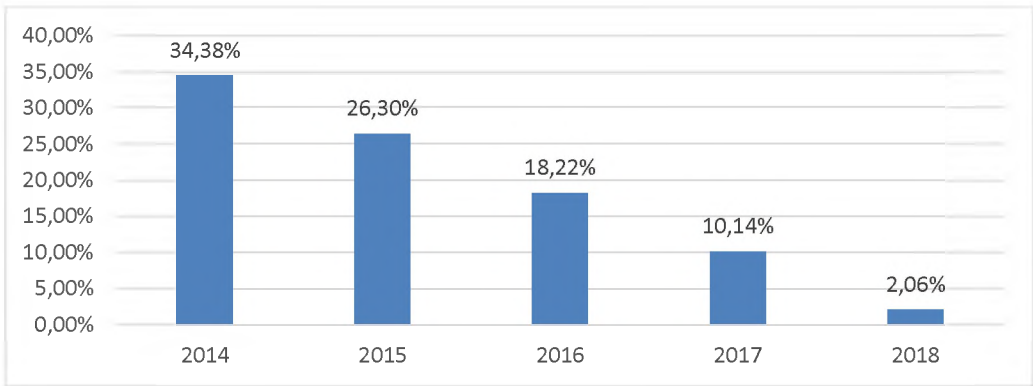


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi terus meningkat dari tahun 2014 sebesar 74,93%, sebesar 78,75% pada tahun 2015, sebesar 82,57% pada tahun 2016, tahun 2017 sebesar 86,39% dan pada tahun 2018 sebesar 90,21%.

2.3.1.4.3 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Gambar 2.46
Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Dimana Pada tahun 2014 sebesar 34,38%, sebesar 26,30% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 18,22%, sebesar 10,14% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 2,06%.

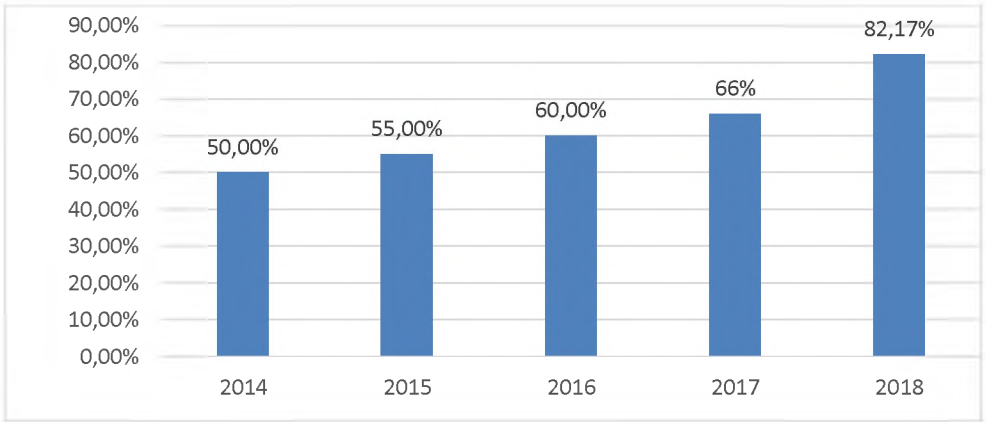
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tahun 2017 sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dalam pemilu, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang struktur dan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri fungsi linmas sudah tidak ada di Kesbangpol, akan tetapi regulasi pengalihan linmas dari kesbangpol Kabupaten Dairi belum ada sehingga pelaksanaan kegiatan kelinmasan tidak berjalan optimal.

2.3.1.5.2 **Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah**

Gambar 2.47
Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun 2014 – 2018

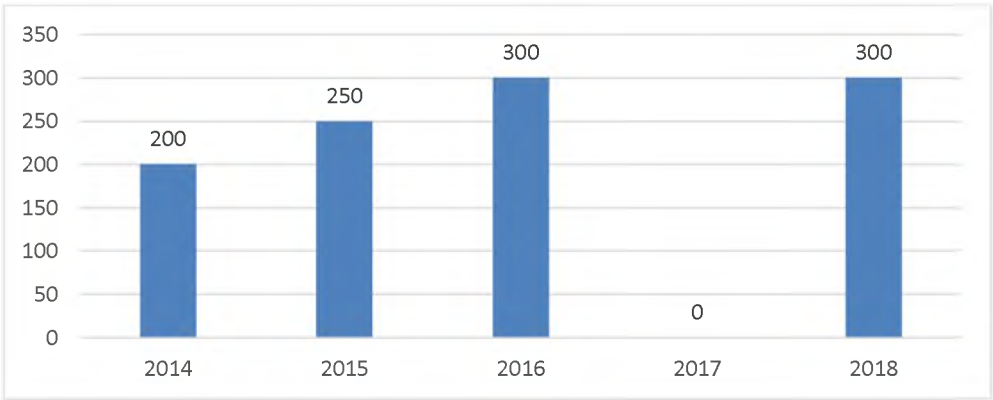


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 50%, sebesar 55% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 60%, sebesar 66% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 82,17%.

2.3.1.5.3 **Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik**

Gambar 2.48
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik
Tahun 2014 – 2018



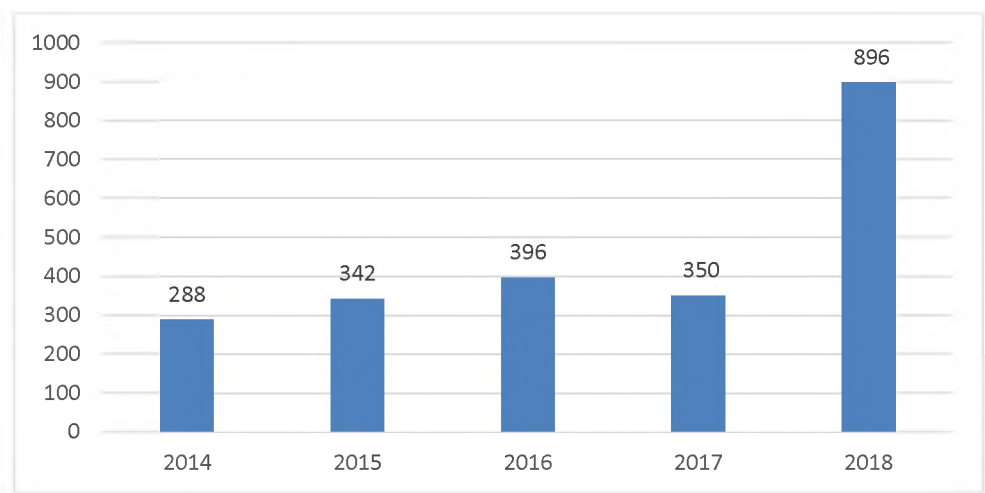
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik dapat dilihat dari gambar diatas sebanyak 200 orang pada tahun 2014, 250 orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 300 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 300 orang.

2.3.1.5.4 Tokoh Agama/Adat/Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah tokoh agama/ adat/ masyarakat yang mengikuti kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan pada tahun 2014 sebanyak 288 orang, sebanyak 342 orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 396, sebanyak 350 orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 896 orang.

Gambar 2.49
Jumlah Tokoh Agama/Adat/ Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.1.6 Sosial

Untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point Pertama, *no poverty*, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; Kedua, *zero hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahananpangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) *Urusan Pemerintahan Wajib*

yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

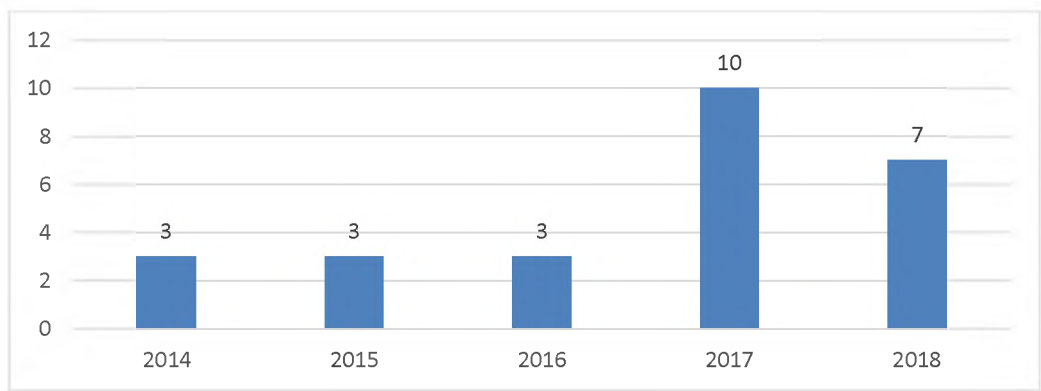
Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa Jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota:

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

2.3.1.6.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai mana dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS). Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.50
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

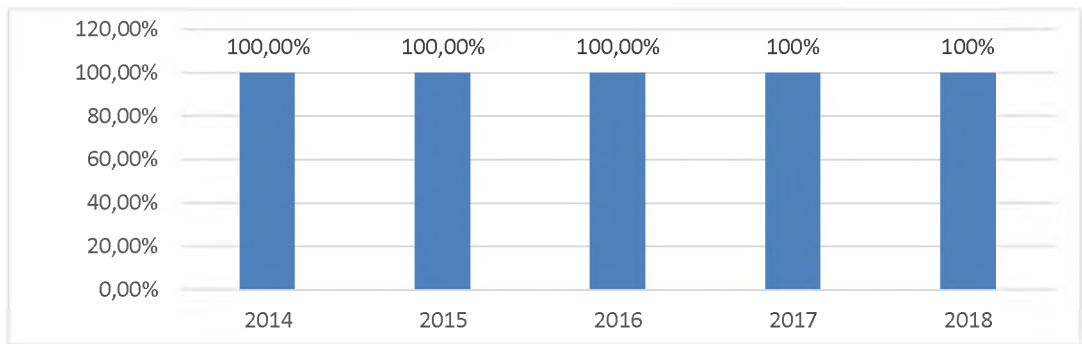
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada tahun 2017 sebesar 10 kelompok, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 7 kelompok.

2.3.1.6.2 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan

sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun, perkembangan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

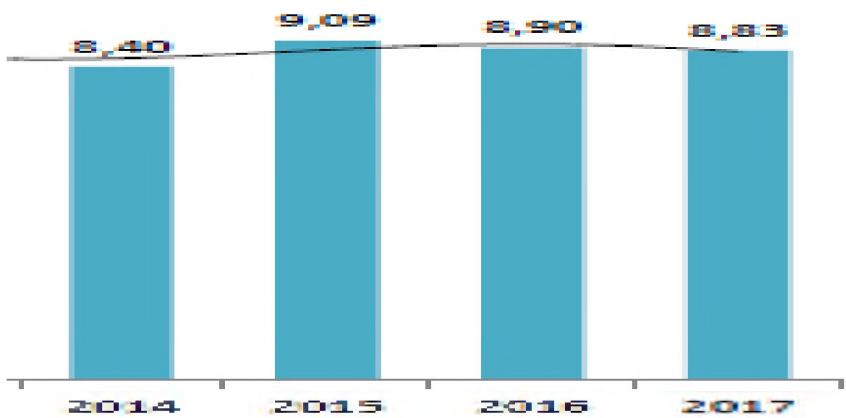
Gambar 2.51
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.1.6.3 Persentase Tingkat Kemiskinan

Gambar 2.52
Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2014 – 2018

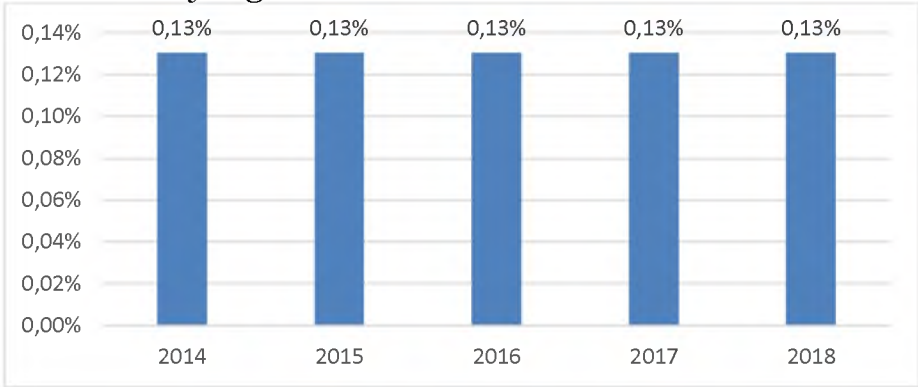


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 8,4%, sebesar 9,09% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 8,9% dan pada tahun 2017 sebesar 8,83%.

2.3.1.6.4 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial

Gambar 2.53
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2014 – 2018



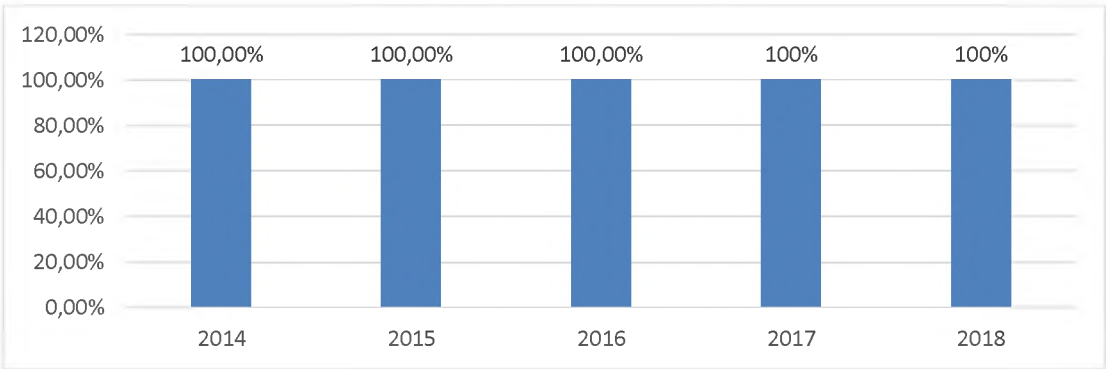
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 sebesar 0.13%.

2.3.1.6.5 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah 100%.

Gambar 2.54
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2014 - 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

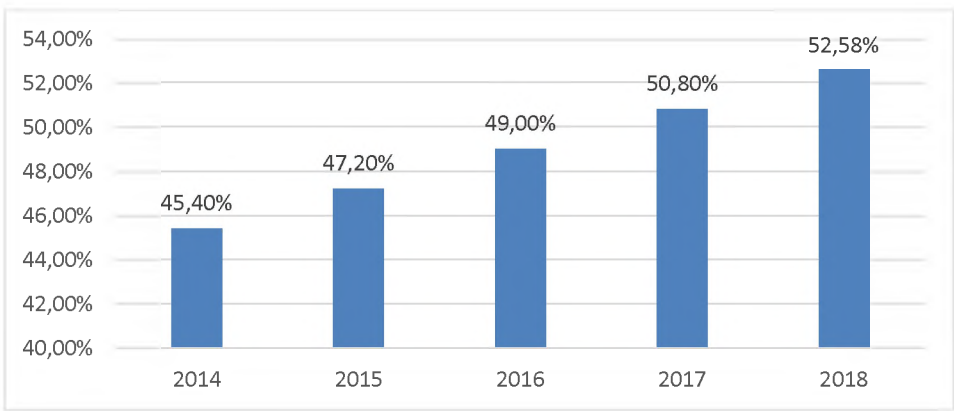
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1 Tenaga Kerja

2.3.2.1.1 Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat mengalami peningkatan dari 45,40% pada tahun 2014 menjadi 52,58% pada tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.55
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2014 – 2018

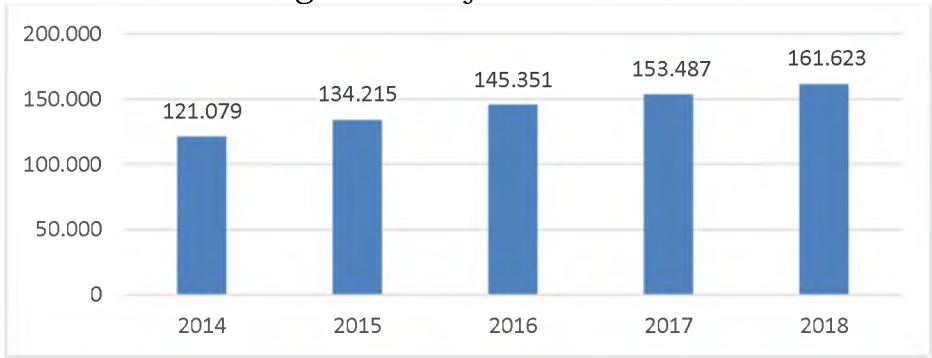


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.1.2 Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi, tercatat mengalami peningkatan dari 121.079 Orang pada tahun 2014 menjadi 161.623 Orang pada tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

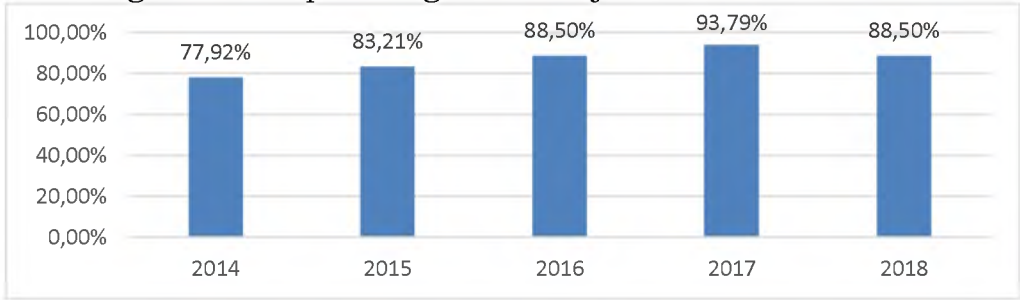
Gambar 2.56
Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 2.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2014 – 2018

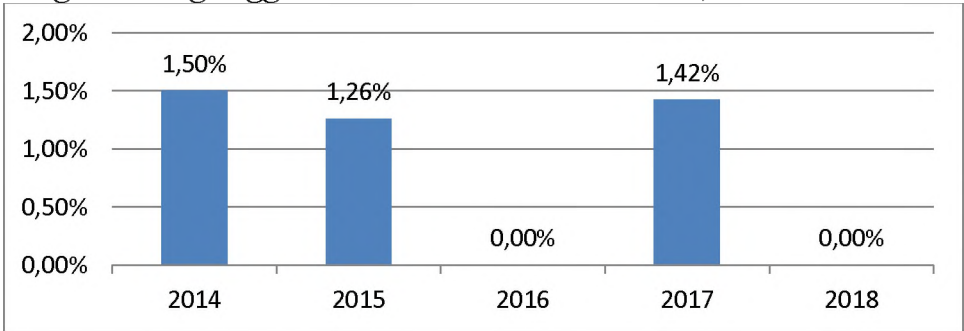


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 77,92%, sebesar 83,21% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 88,50%, sebesar 93,79% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 88,50%.

2.3.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.58
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014, 2015 dan 2017



Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

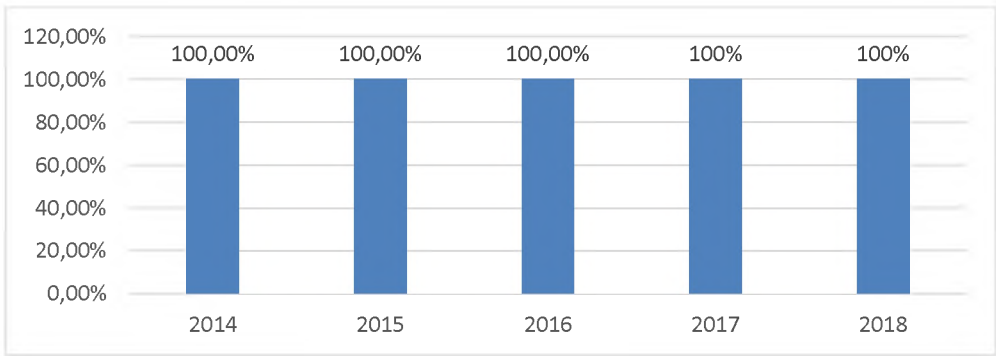
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi Pada tahun 2014 sebesar 1,50%, sebesar 1,26% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 0%, sebesar 1,42% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 0%.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari tahun 2014 – 2018 adalah 100%.

Gambar 2.59
Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2014 – 2018

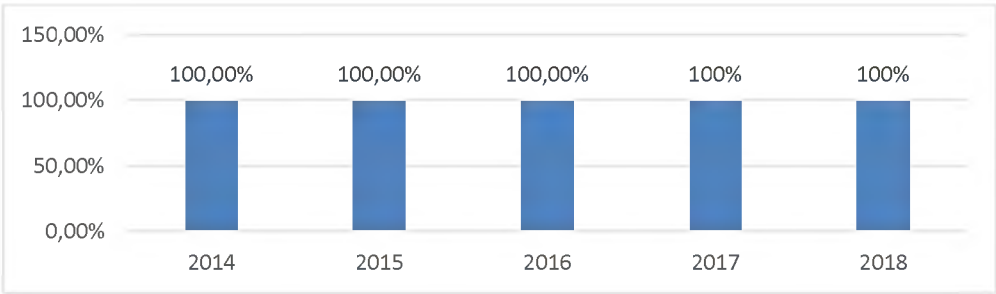


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.2.2 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari tahun 2014 – 2018 adalah 100%.

Gambar 2.60
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan.

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan.

Tabel 2.43
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Energi Per Kapita (%)	90,17	91,49	92,81	94,13	95,45
Protein Per Kapita (%)	38,43	52,12	65,81	79,5	93,19

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.4 Pertanahan

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Dairi, 2014-2016

Tahun	HakMilik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Jumlah
2016	2.517	3	104	2.624
2015	1.594	1	18	1.613
2014	2.956	-	14	2.970

Sumber : Dairi Dalam Angka, 2017

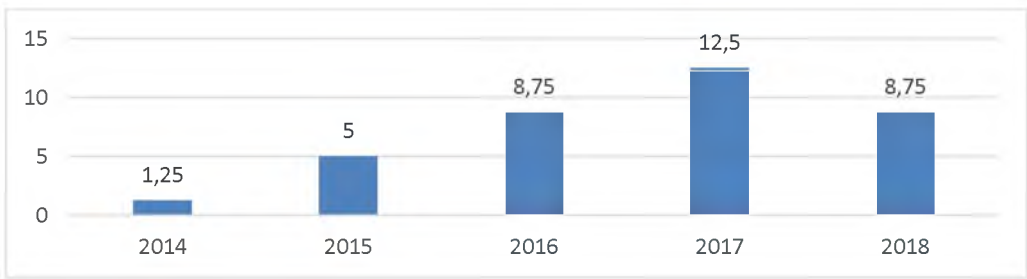
Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi pada tahun 2014-2016 terbesar merupakan hak milik. Pada tahun 2016 status kepemilikan dengan status hak milik sebanyak 2.517, hak pakai sebanyak 104 dan hak guna bangunan sebanyak 3 buah.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1 Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2.61
Penurunan Lahan Kritis Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.5.2 Persampahan

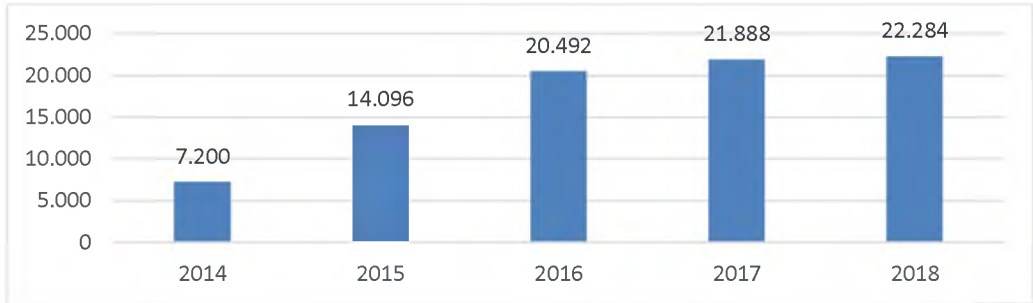
Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah pembuangan secara individual, seperti membuang sampah secara individu dengan metode dan cara tersendiri, kedua adalah dengan membuang sampah secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

Cara pembuangan sampah di Kabupaten Dairi diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah, selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada.

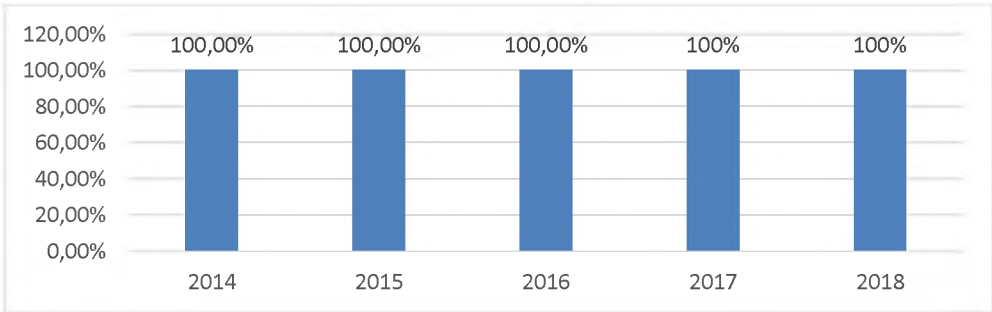
Gambar 2.62
Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.5.3 **Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan**

Gambar 2.63
Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen
Lingkungan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

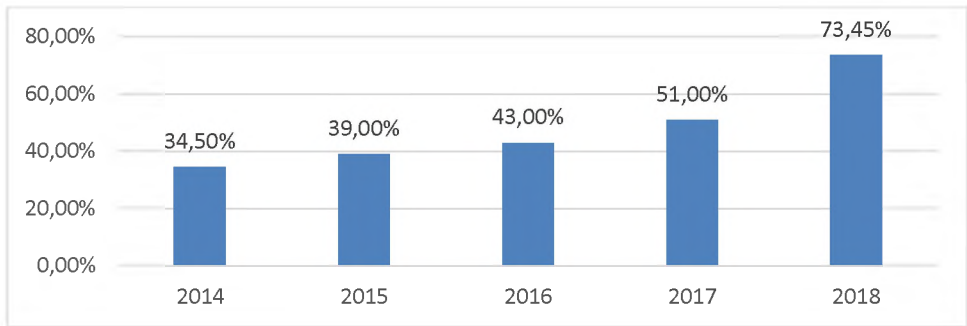
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 adalah 100%.

2.3.2.6 **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pegelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 34,50%, sebesar 39% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 43%, sebesar 51% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 73,45%.

Gambar 2.64
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

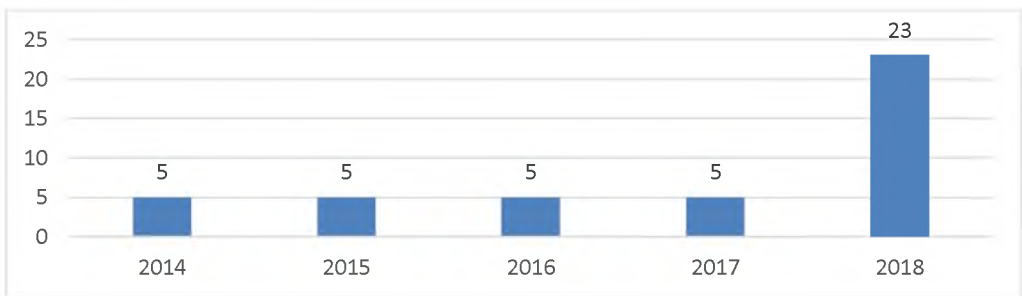
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

2.3.2.7.1 Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada tahun 2014 sebanyak 5 desa, sebanyak 5 desa pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 5 desa, sebanyak 5 desa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 23 desa.

Gambar 2.65
Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.7.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

2.3.2.7.3 Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

2.3.2.7.4 LSM aktif

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

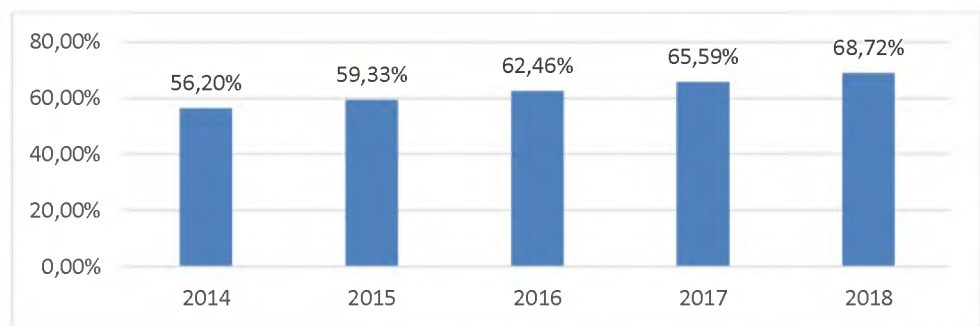
Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengendalian penduduk

dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

2.3.2.8.1 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat cakupan pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana aktif di kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 56,20%, sebesar 59,33% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 62,46%, sebesar 65,59% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 68,72%.

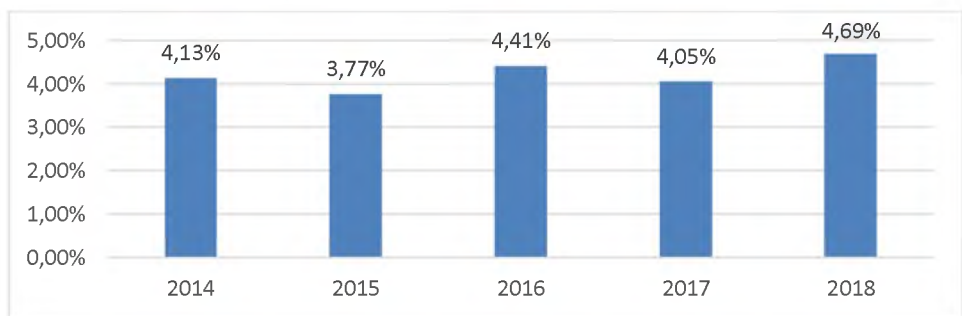
Gambar 2.66
Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.8.2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB Tapi Tidak Terpenuhi

Gambar 2.67
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB Tapi Tidak Terpenuhi Tahun 2014 – 2018



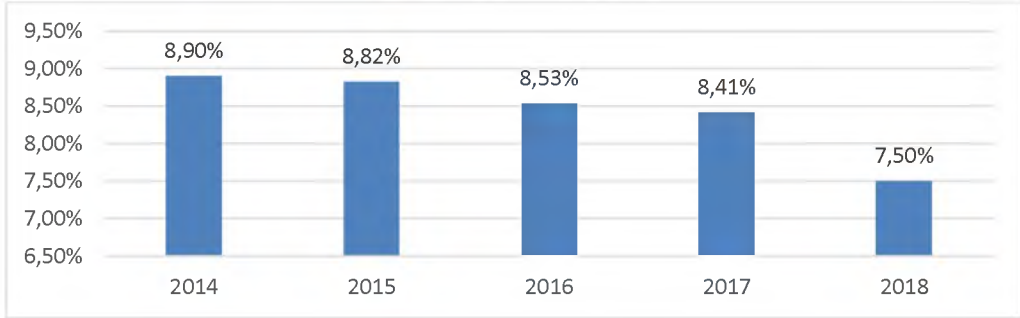
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi pada tahun 2014 sebesar 4,13%, sebesar 3,77% pada

tahun 2015, pada tahun 2016 4,41%, sebesar 4,05% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 4,68%.

2.3.2.8.3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Gambar 2.68
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun
Tahun 2014 - 2018

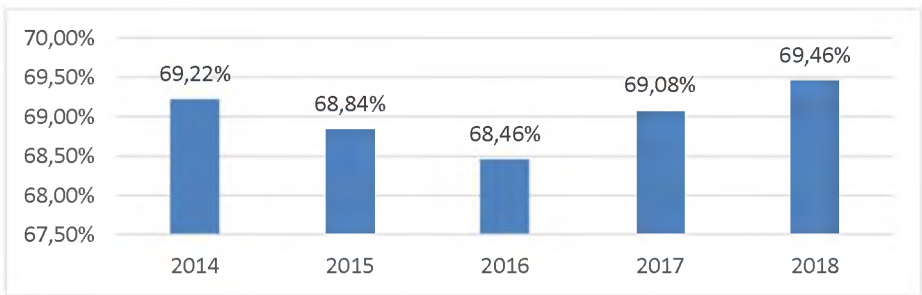


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 8,90%, sebesar 8,82% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 8,53%, sebesar 8,41% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 7,50%.

2.3.2.8.4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Gambar 2.69
Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) ber KB Tahun 2014 – 2018

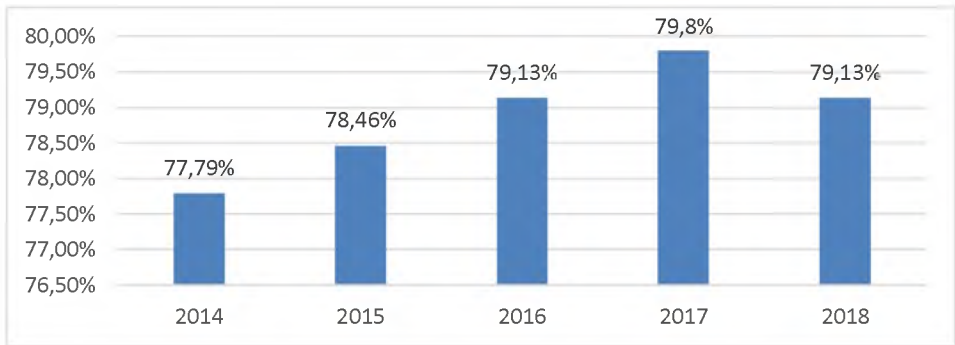


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dijelaskan cakupan anggota bina balita (BKB) ber KB di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 69,22%, sebesar 68,84% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 68,46%, sebesar 69,08% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 69,46%.

2.3.2.8.5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Gambar 2.70
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Tahun 2014 – 2018



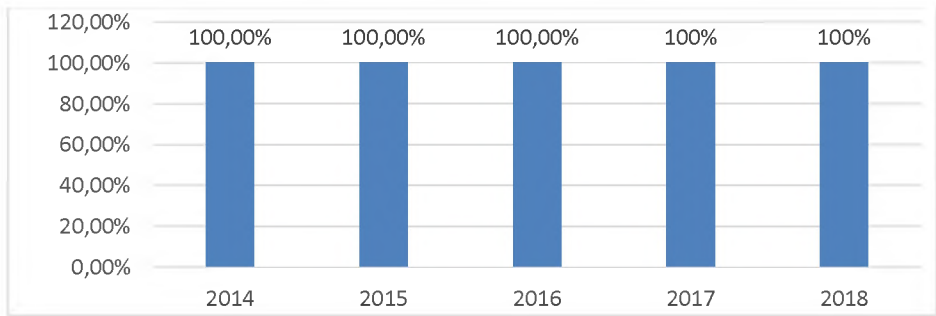
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Dairi sebesar 77,79% pada tahun 2014, pada tahun 2015 sebesar 78,46%, sebesar 79,13% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar 79,8% dan sebesar 79,13% pada tahun 2018.

2.3.2.8.6 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 sebesar 100%.

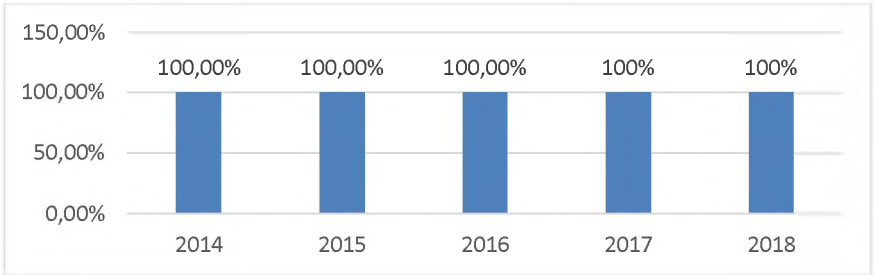
Gambar 2.71
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.9 Perhubungan
2.3.2.9.1 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar 2.72
Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2014 – 2018

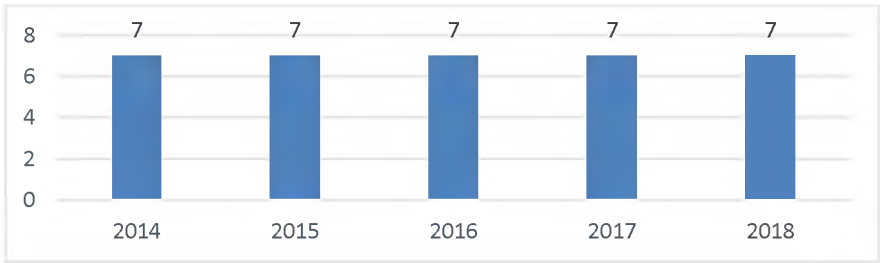


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 sebesar 100%.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika
2.3.2.10.1 Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)

Gambar 2.73
Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N) Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

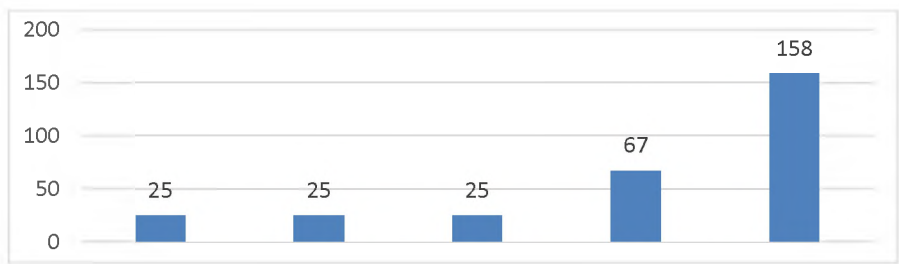
Dari gambar diatas dapat dijelaskan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi (SP4N) di Kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 adalah 7 media desiminasi informasi.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.11.1 Jumlah Koperasi Aktif

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 25 unit, sebanyak 25 unit pada tahun 2015, sebanyak 25 unit pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebanyak 67 unit dan pada tahun 2018 sebanyak 158 unit.

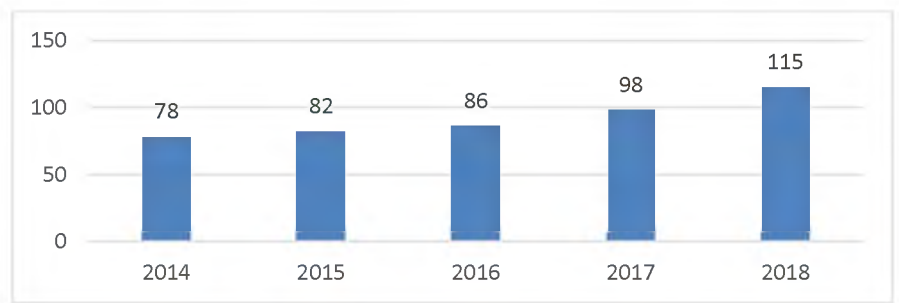
Gambar 2.74
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.11.2 Jumlah Usaha Mikro

Gambar 2.75
Jumlah Usaha Mikro Tahun 2014 – 2018



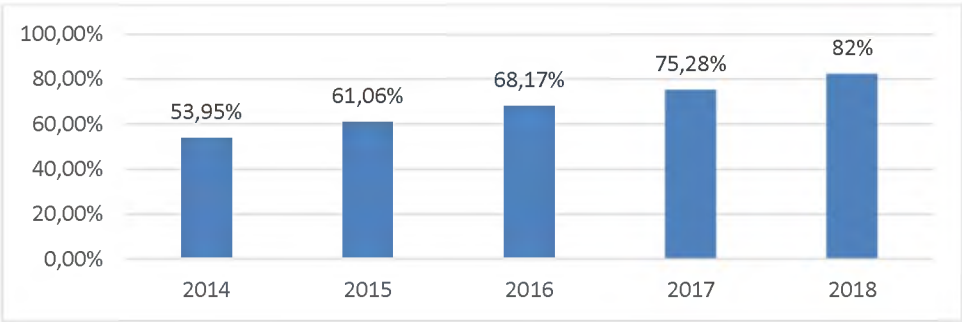
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 78 unit, sebanyak 82 unit pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 86 unit, sebanyak 98 unit pada tahun 2017 dan sebanyak 115 unit pada tahun 2018.

2.3.2.12 Penanaman Modal

2.3.2.12.1 Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.76
Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2014 – 2018



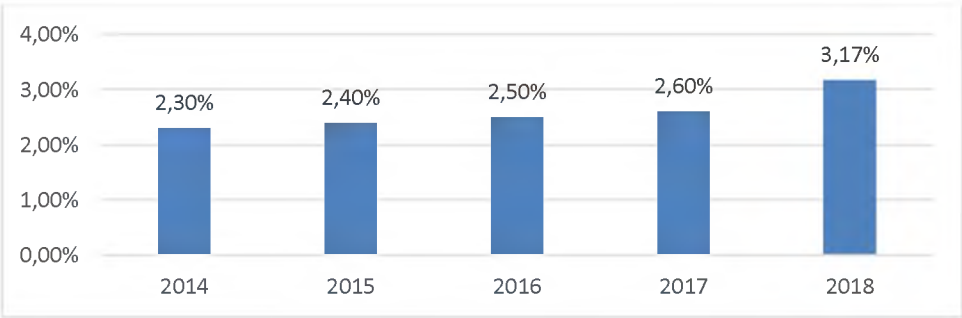
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 53,95%, sebesar 61,06% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 68,17%, sebesar 75,28% pada tahun 2017 dan sebesar 82% pada tahun 2018.

2.3.2.12.2 Persentase Peningkatan Investasi

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase peningkatan investasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 2,30%, sebesar 2,40% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 2,50%, sebesar 2,60% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 3,17%.

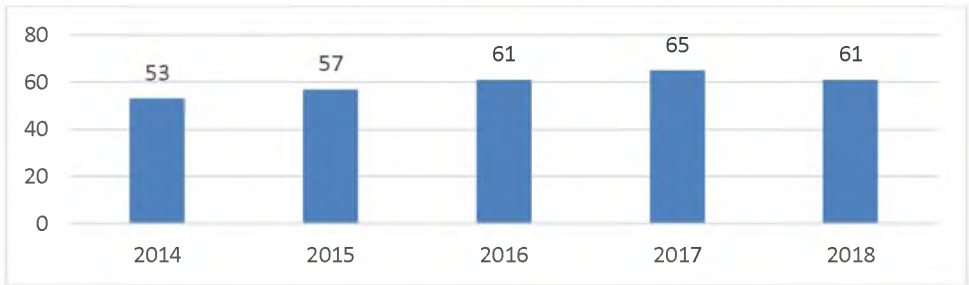
Gambar 2.77
Persentase Peningkatan InvestasiTahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.12.3 Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan

Gambar 2.78
Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan
Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat banyaknya jumlah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 53 unit, sebanyak 57 unit pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 61 unit, sebanyak 65 unit pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 61 unit.

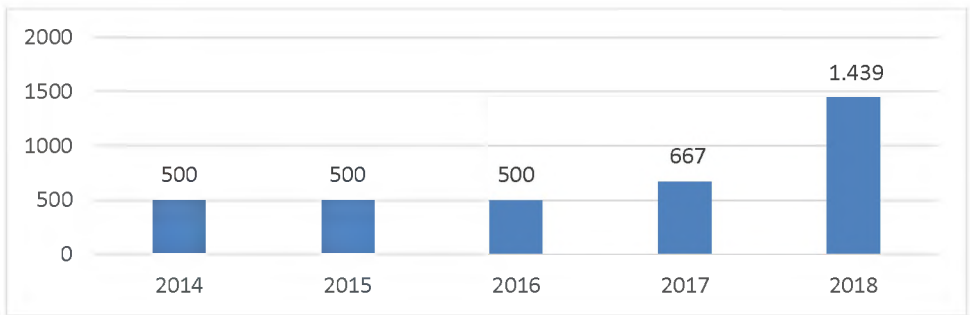
2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program, yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi *entrepreneur* sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.

2.3.2.13.1 Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan

Gambar 2.79
Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan Tahun 2014 – 2018

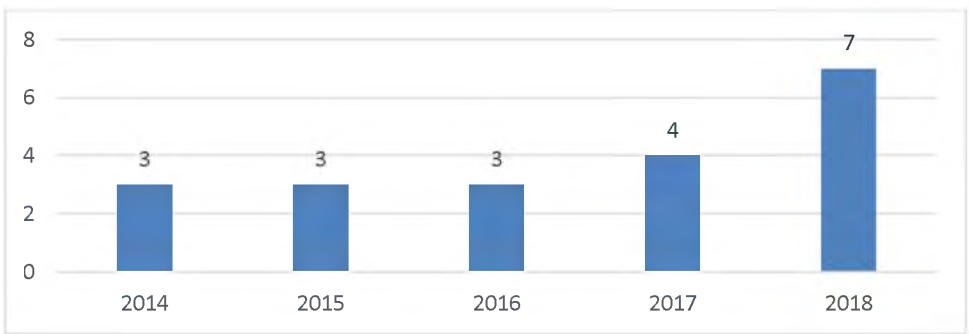


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah terfasilitasinya pelayanan kepemudaan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 500 orang, sebanyak 500 orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 500 orang, sebanyak 667 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 1439 orang.

2.3.2.13.2 Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga

Gambar 2.80
Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tahun 2014 – 2018

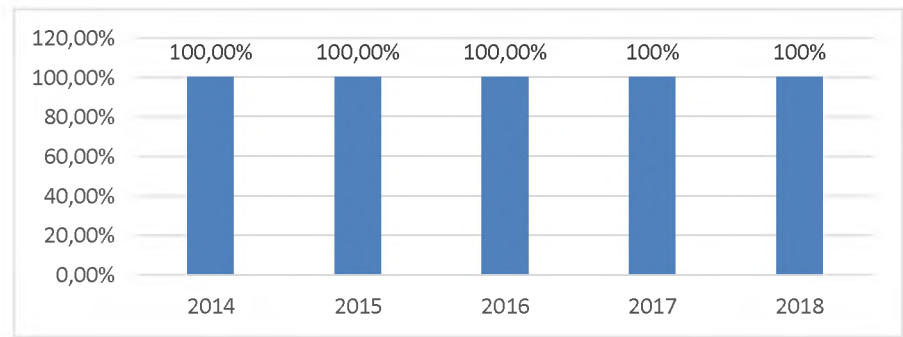


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

Banyaknya kompetisi olah raga yang terselenggara di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 3 cabang olah raga, sebanyak 3 cabang olah raga pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 3 cabang olah raga, sebanyak 4 cabang olah raga pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 7 cabang olah raga.

2.3.2.13.3 Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga

Gambar 2.81
Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

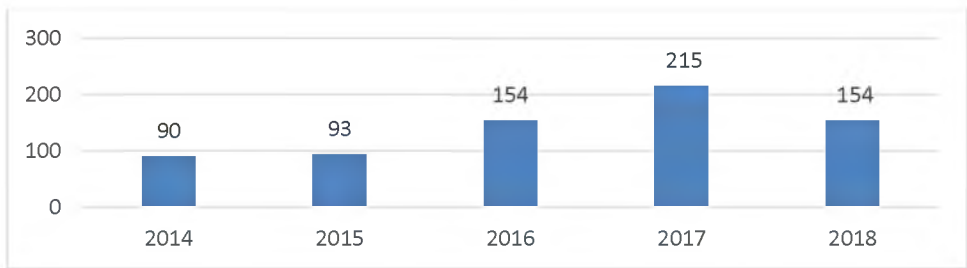
Persentase penanganan gedung olah raga/ lapangan olah raga di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 sebesar 100%.

2.3.2.14 Perpustakaan dan Kearsipan

2.3.2.14.1 Jumlah Arsip Yang Dilestarikan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah arsip yang dilestarikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 90 arsip, sebanyak 93 arsip pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 154 arsip, sebanyak 215 arsip pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 154 arsip.

Gambar 2.82
Jumlah Arsip Yang Dilestarikan Tahun 2014 – 2018

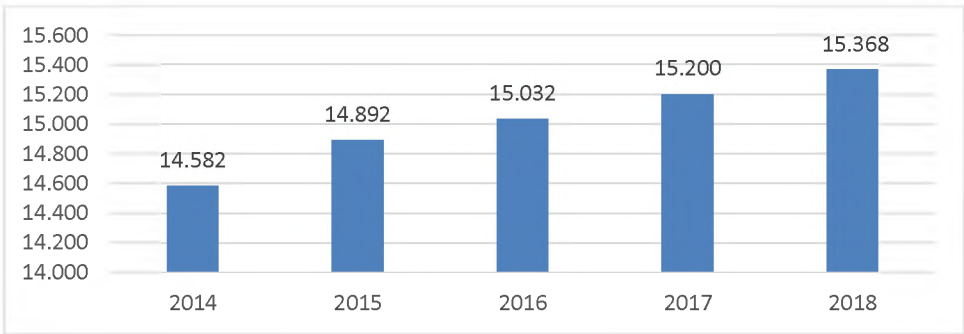


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.14.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 14.582 Orang, sebanyak 14.892 Orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 15.032 Orang, sebanyak 15.200 Orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 15.368.

Gambar 2.83
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 – 2018

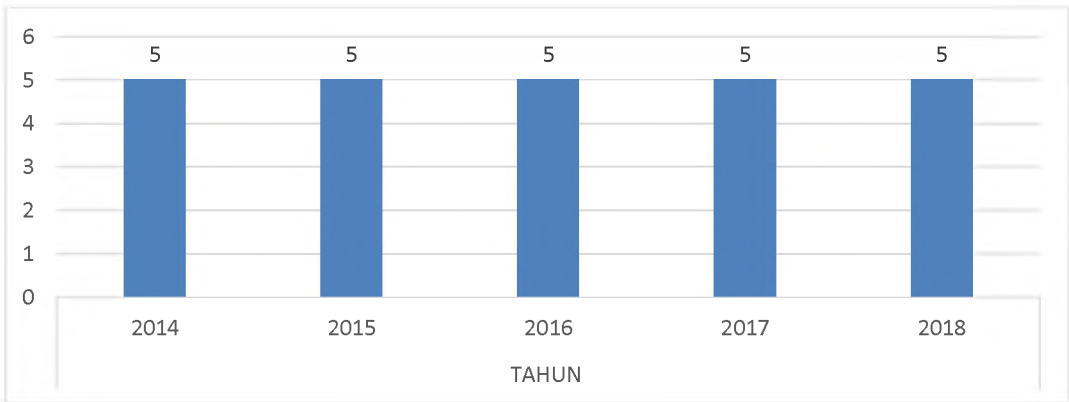


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2018

2.3.2.15 Kebudayaan

2.3.2.15.1 Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi

Gambar 2.84
Jumlah Organisasi/Lembaga yang Terfasilitasi Tahun 2014 – 2018



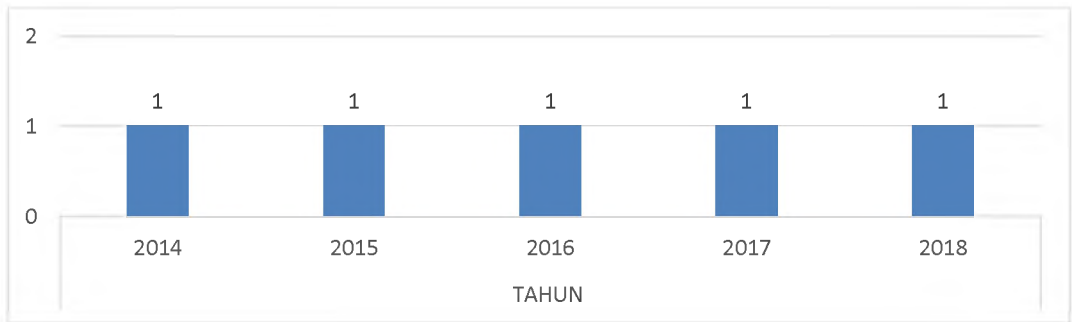
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah organisasi/lembaga yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah sebanyak 5 organisasi.

2.3.2.15.2 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah sebanyak 1 unit.

Gambar 2.85
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1 Pertanian

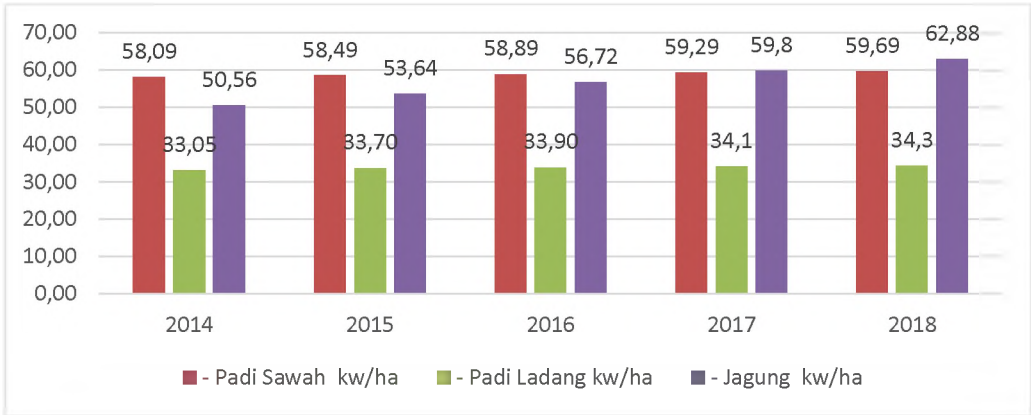
2.3.3.1.1 Tanaman Pangan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut Padi sawah pada tahun 2014 sebanyak 58,09 kw/ha, sebanyak 58,49 kw/ha pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 58,89 kw/ha, sebanyak 59,29 kw/ha pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 59,69 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada tahun 2014 sebanyak 33,05 kw/ha, sebanyak 33,70 kw/ha pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 33,90 kw/ha, sebanyak 34,1 kw/ha pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 34,3 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada tahun 2014 sebanyak 50,56 kw/ha, sebanyak 53,64 pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 56,72 kw/ha, sebanyak 59,8 kw/ha pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 62,88 kw/ha.

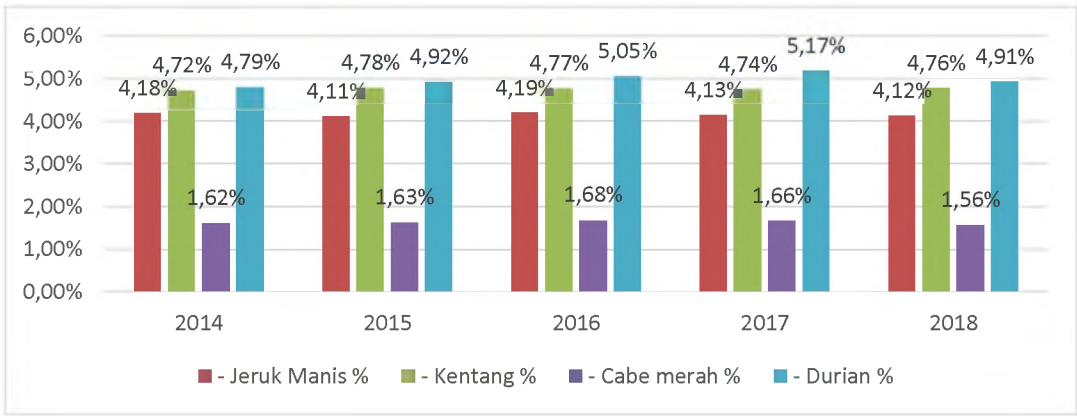
Gambar 2.86
 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.1.2 Hortikultura

Gambar 2.87
 Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase fluktuasi produksi hortikultura di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut Jeruk manis pada tahun 2014 sebesar 4,18%, sebesar 4,11% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 4,19%, sebesar 4,13% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 4,12%.

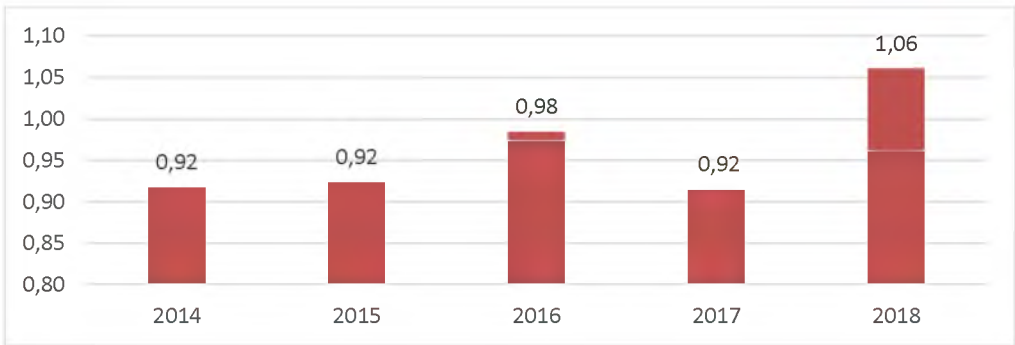
Persentase fluktuasi produksi hortikultura kentang pada tahun 2014 sebesar 4,72%, sebesar 4,78% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 4,77%, sebesar 4,74% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 4,76%.

Persentase fluktuasi produksi hortikultura cabe merah pada tahun 2014 sebesar 1,62%, sebesar 1,63% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 1,68%, sebesar 1,66% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 1,56%.

Persentase fluktuasi produksi hortikultura durian pada tahun 2014 sebesar 4,79%, sebesar 4,92% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 5,05%, sebesar 5,17% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 4,91%.

2.3.3.1.3 Tanaman Perkebunan Kopi

Gambar 2.88
Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

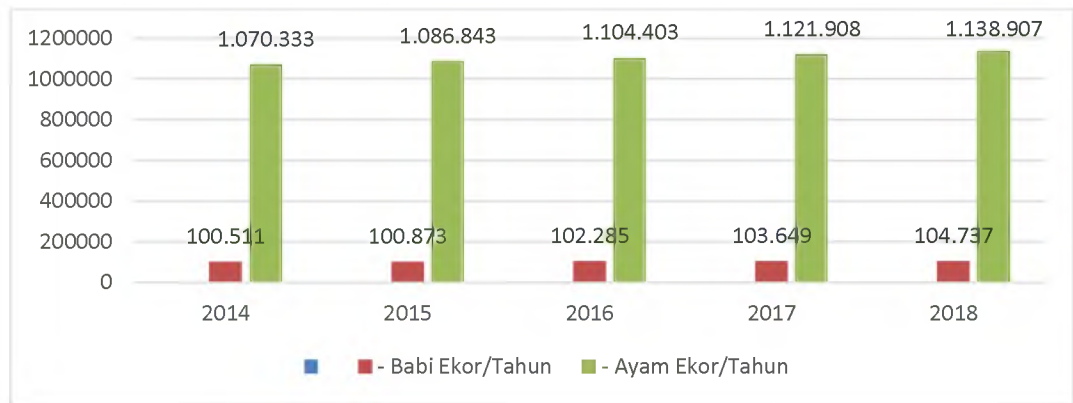
Dari gambar diatas dapat dilihat persentase peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 0,92%, sebesar 0,92% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 0,98%, pada tahun 2017 sebesar 0,92% dan pada tahun 2018 sebesar 1,06%.

2.3.3.1.4 Peternakan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut ternak Babi pada tahun 2014 sebanyak 100.511 ekor/tahun, sebanyak 100.873 ekor/tahun pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 102.285 ekor/tahun, sebanyak 103.649 ekor/tahun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 104.737 ekor/tahun.

Jumlah populasi ternak ayam pada tahun 2014 sebanyak 1.070.333 ekor/tahun, sebanyak 1.086.843 ekor/tahun pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 1.104.403, sebanyak 1.121.908 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 1.138.907.

Gambar 2.89
Jumlah Populasi Peternakan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.1.4.1 **Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/Ternak**

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak di kabupaten Dairi adalah sebagai berikut ternak sapi pada tahun 2014 sebesar 32,31%, sebesar 32,54% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 32,77%, sebesar 33% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 33,23%.

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak kerbau pada tahun 2014 sebesar 27,74%, sebesar 29,83% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 31,92%, sebesar 34,01% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 36,1%.

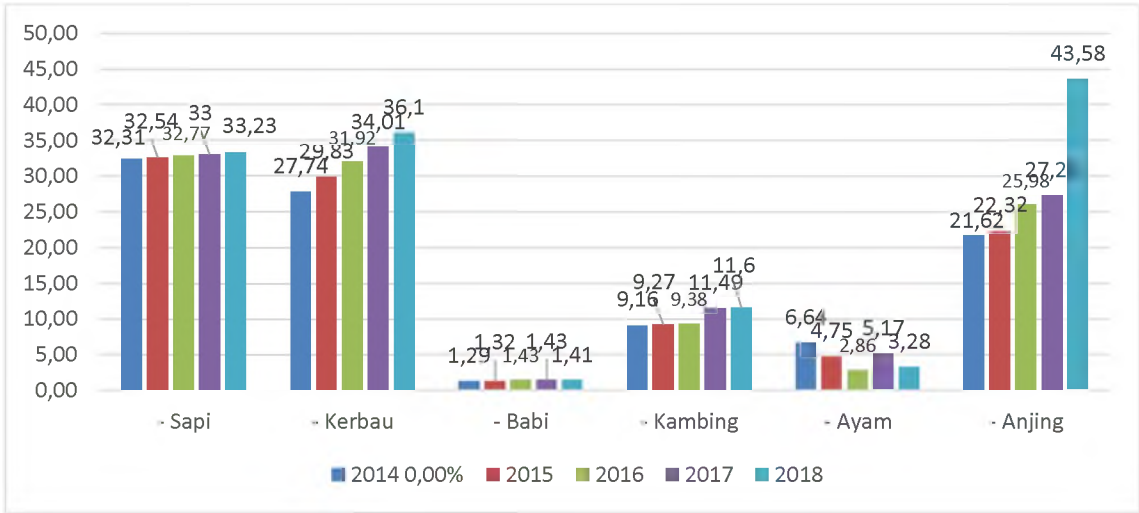
Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak babi pada tahun 2014 sebesar 1,29%, sebesar 1,32% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 1,43%, sebesar 1,43% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 1,41%.

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak kambing pada tahun 2014 sebesar 9,16%, sebesar 9,27% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 9,38%, sebesar 11,49% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 11,6%.

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak ayam pada tahun 2014 sebesar 6,64%, sebesar 4,75% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 2,86%, sebesar 5,17% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 3,28%.

Persentase penanganan kesehatan hewan/ ternak anjing pada tahun 2014 sebesar 21,62%, sebesar 22,32% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 25,98%, sebesar 27,28% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 43,58%.

Gambar 2.90
Persentase Penanganan Kesehatan Hewan Tahun 2014 – 2018

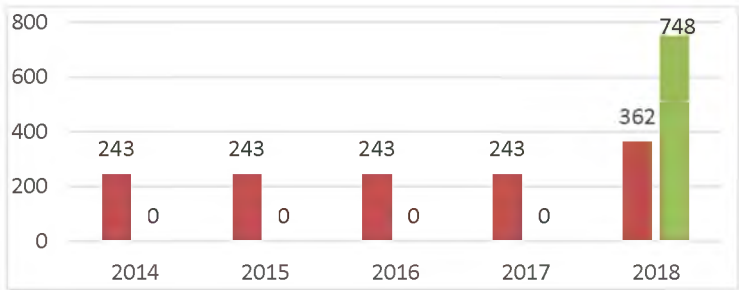


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.4.1.2 Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang

Dari gambar dibawah ini dapat dilihat jumlah pemotongan hewan ternak di RPH Sidikalang adalah sebagai berikut untuk ternak besar pada tahun 2014 sebanyak 243 ekor/tahun, sebanyak 243 ekor/tahun pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 243 ekor/tahun, sebanyak 243 ekor/tahun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 362 ekor/tahun. Sementara untuk ternak kecil sebanyak 748 ekor/tahun pada tahun 2018.

Gambar 2.91
Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sidikalang Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.2 Perikanan

2.3.3.2.1 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi adalah sebagai

berikut ikan gabus pada tahun 2014 sebesar 8,32%, sebesar 8,34% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 8,36%, sebesar 8,39% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (74,04)%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan mujair pada tahun 2014 sebesar 10,22%, sebesar 10,24% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 10,26%, sebesar 10,29% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (22,33)%.

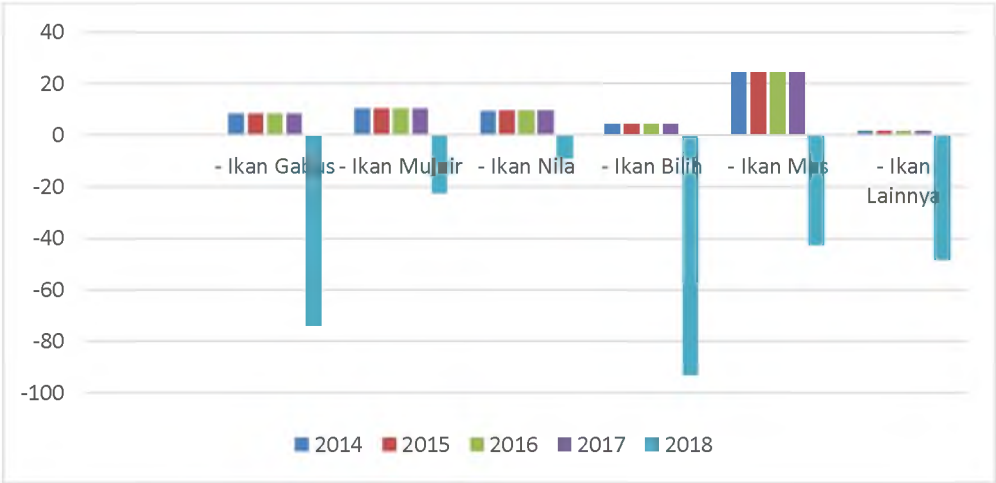
Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan nila pada tahun 2014 sebesar 9,37%, sebesar 19,39% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 9,41%, sebesar 9,44% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (9,27)%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan bilih pada tahun 2014 sebesar 4,2%, sebesar 4,22% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 4,24%, sebesar 4,27% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (93,10)%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan mas pada tahun 2014 sebesar 24,2%, sebesar 24,22% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 24,24%, sebesar 24,27% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (42,59)%.

Peningkatan produksi perikanan tangkap untuk ikan lainnya pada tahun 2014 sebesar 1,6%, sebesar 1,62% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 1,64%, sebesar 1,67% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar (48,34)%.

Gambar 2.92
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

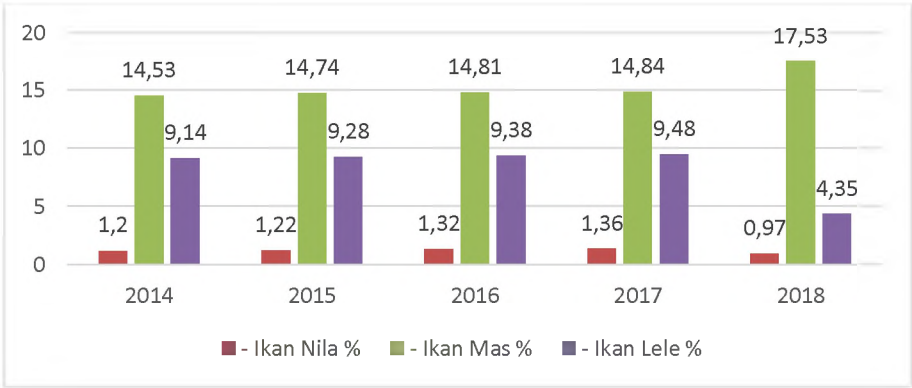
2.3.3.2.2 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut untuk ikan nila pada tahun 2014 sebesar 1,2%, sebesar 1,22% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 1,32%, sebesar 1,36% dan pada tahun 2018 sebesar 0,97%.

Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ikan mas pada tahun 2014 sebesar 14,53%, sebesar 14,74% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 14,81%, sebesar 14,84% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 17,53%.

Peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ikan lele pada tahun 2014 sebesar 9,14%, sebesar 9,28% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 9,38%, sebesar 9,48% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 4,35%.

Gambar 2.93
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 – 2018



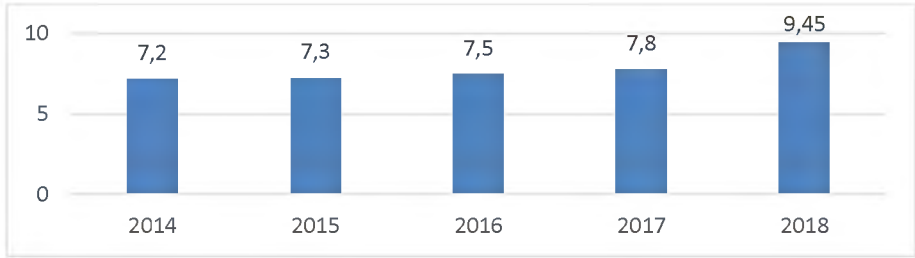
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.3 Pariwisata

2.3.3.3.1 Kunjungan Wisata

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase kunjungan wisata di Kabupaten Dairi adalah pada tahun 2014 sebesar 7,2%, sebesar 7,3% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 7,5%, sebesar 7,8% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 9,45%.

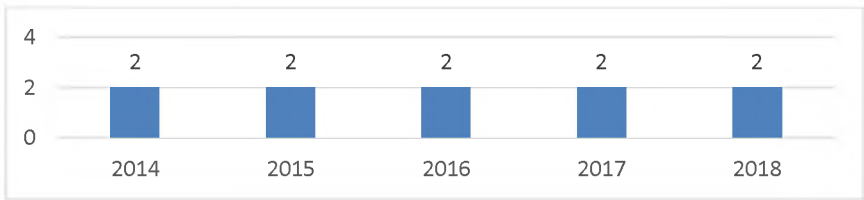
Gambar 2.94
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.3.2 Jumlah Objek Wisata yang Berkembang yang Ditangani

Gambar 2.95
Jumlah Objek Wisata yang Berkembang yang Ditangani Tahun 2014 – 2018

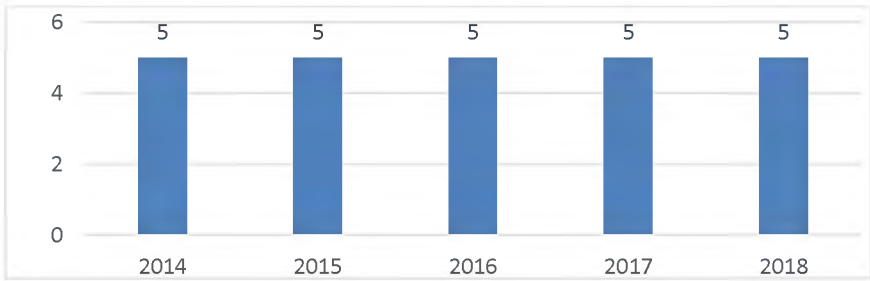


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Jumlah objek wisata yang berkembang yang ditangani di Kabupaten Dairi setiap tahunnya pada tahun 2014 – 2018 hanya sebanyak 2 unit.

2.3.3.4 Perindustrian dan Perdagangan
2.3.3.4.1 Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Gambar 2.96
Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2014 – 2018 (%)



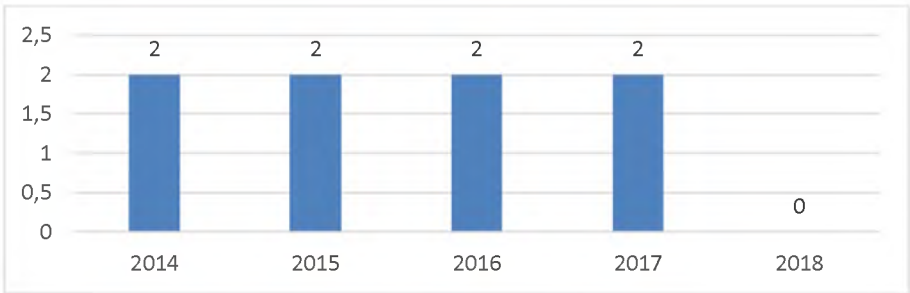
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 stagnan yaitu sebesar 5% tiap tahunnya.

2.3.3.4.2 Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah produk IKM bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2017 adalah 2 produk tiap tahunnya.

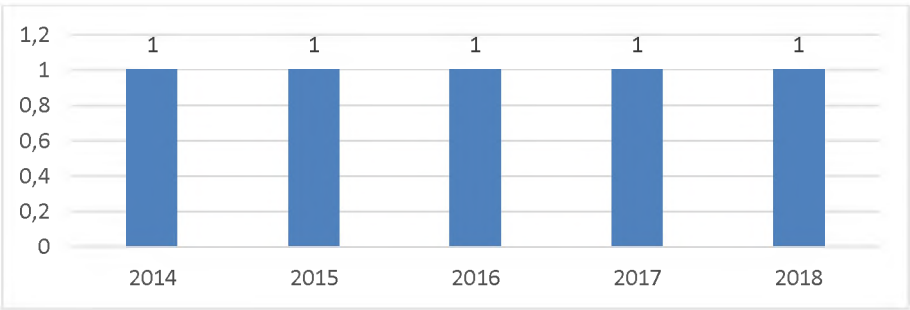
Gambar 2.97
Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.3.4.3 Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.98
Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2014 – 2018

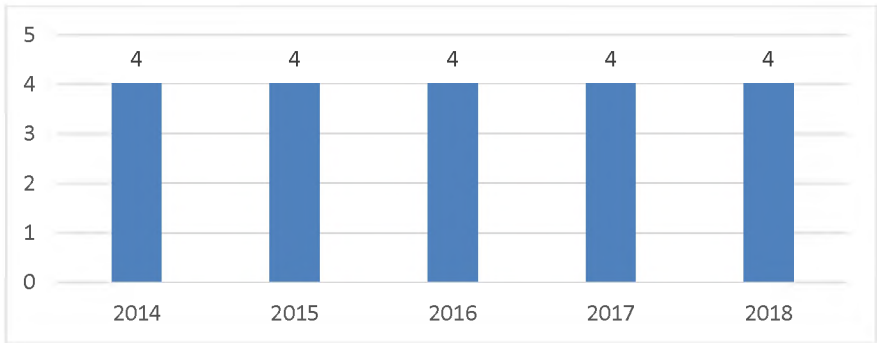


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah 1 dokumen setiap tahunnya.

2.3.3.4.4 Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Gambar 2.99
Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan
Tahun 2014 – 2018

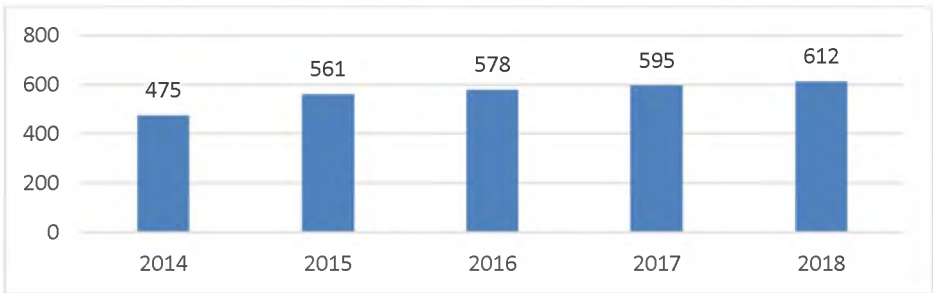


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari gambar diatas dapat dijelaskan jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya.

2.3.3.4.5 Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.100
Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Jumlah alat UTTP yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 475 unit, sebanyak 561 unit pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 578 unit, sebanyak 595 unit pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 612 unit.

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Umum

2.3.4.1 Pemerintahan Umum

2.3.4.1.1 Sekretariat Daerah

2.3.4.1.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 2.45
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2014 – 2018

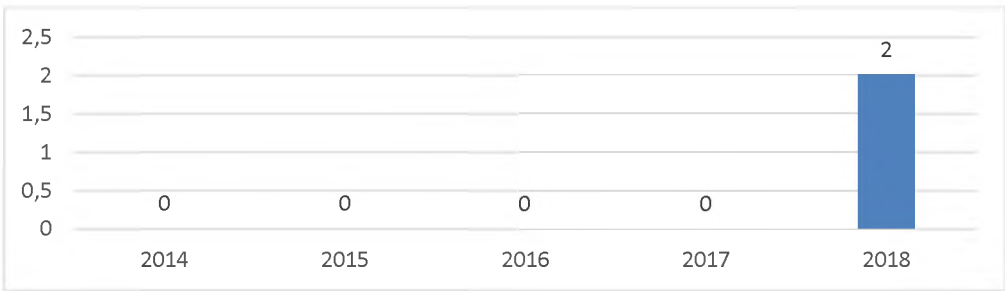
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai	C	C	C	C	C

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah C.

2.3.4.1.1.2 Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah

Gambar 2.101
Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2017 level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Dairi masih 0 level , sedangkan pada tahun 2018 menjadi 2 level.

2.3.4.1.1.3 Rekomendasi LKPJ

Tabel 2.46
Rekomendasi LKPJ Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Rekomendasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2014 – 2018 Rekomendasi LKPJ di Kabupaten Dairi ada setiap tahunnya.

2.3.4.1.1.4 Nilai LPPD

Tabel 2.47
Nilai LPPD Tahun 2014 – 2018

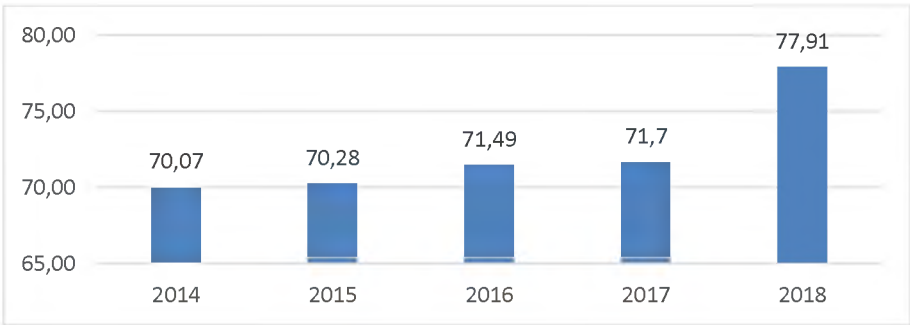
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2014 – 2018 Nilai LPPD Kabupaten Dairi adalah sedang setiap tahunnya.

2.3.4.1.1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 2.102
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 70,07, sebesar 70,28 pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 71,49, sebesar 71,7 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 77,91.

2.3.4.1.1.6 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra

Tabel 2.48
Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2014 – 2018

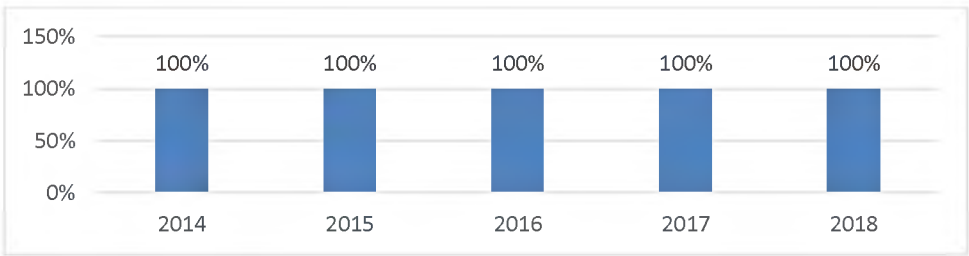
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
KK	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah sebanyak 16.525 KK setiap tahunnya.

2.3.4.1.1.7 Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik

Gambar 2.103
Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik
Tahun 2014 – 2018



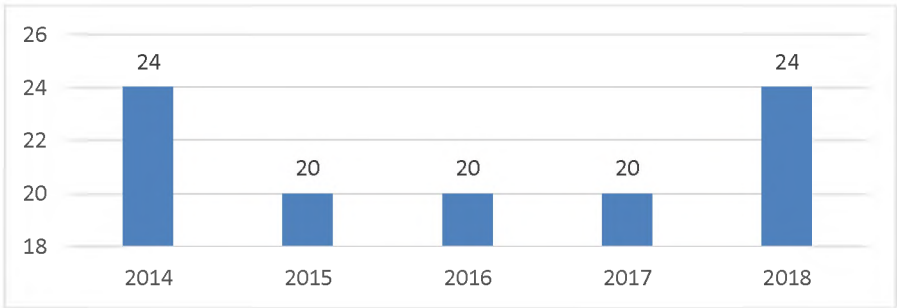
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 sebesar 100% setiap tahunnya.

2.3.4.1.1.8 Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan banyaknya informasi publik yang dihasilkan Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 24 naskah, sebanyak 20 naskah pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 20 naskah, sebanyak 20 naskah pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 24 naskah.

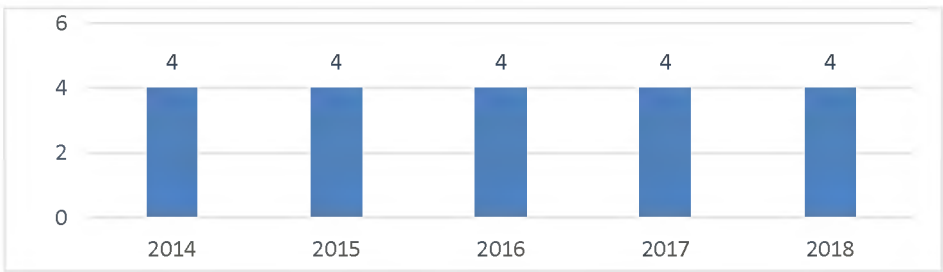
Gambar 2.104
Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.1.1.9 Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi

Gambar 2.105
Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi Tahun 2014 – 2018



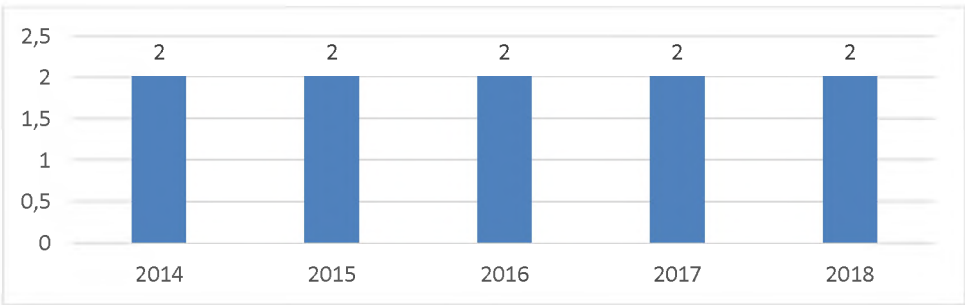
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Banyaknya jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 sebanyak 4 jenis setiap tahunnya.

2.3.4.1.1.10 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari gambar dibawah ini banyaknya Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimonitoring dan dievaluasi pada tahun 2014 – 2018 adalah 2 unit setiap tahunnya.

Gambar 2.106
Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

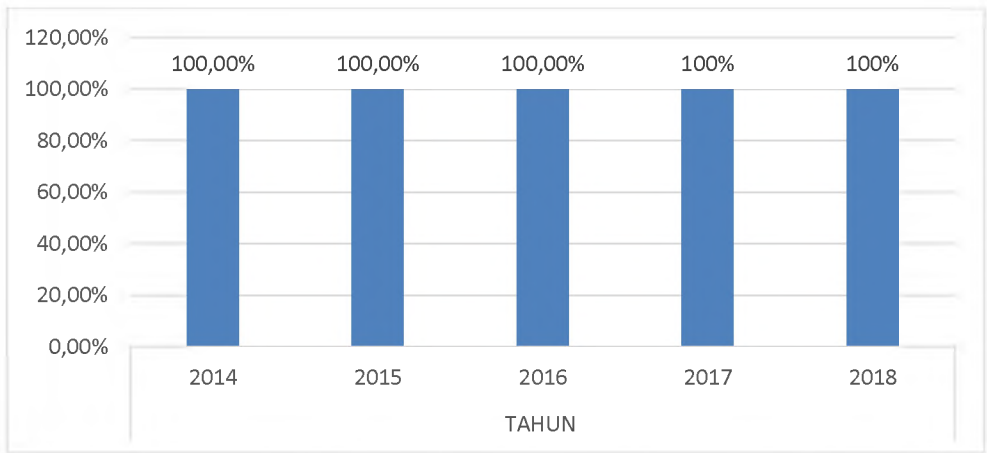
2.3.4.1.2 Sekretariat Dewan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

2.3.4.1.2.1 Terfasilitasinya Persidangan di DPRD

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan terfasilitasinya persidangan di DPRD pada tahun 2014 – 2018 adalah terfasilitasi 100% setiap tahunnya.

Gambar 2.107
Terfasilitasinya Persidangan di DPRD Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.1.3 Inspektorat

2.3.4.1.3.1 Peningkatan Kapabilitas APIP

Tabel 2.49
Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Level	1	1	1	2	2

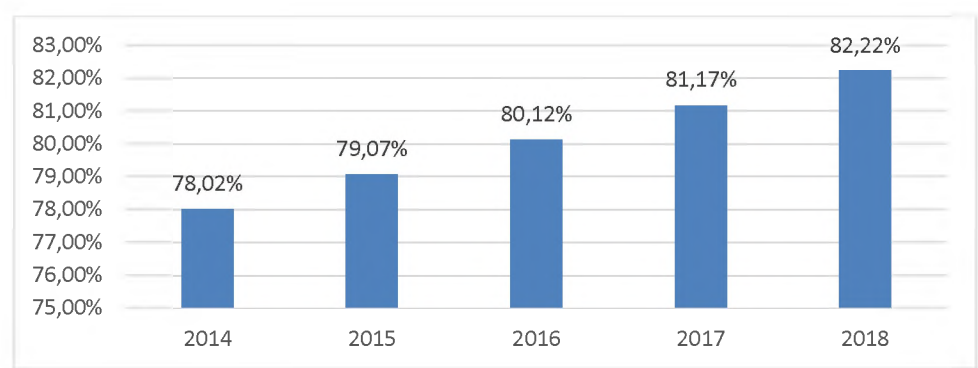
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi pada tahun 2014 level 1, level 1 pada tahun 2015, pada tahun 2016 level 1, level 2 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 level 2.

2.3.4.1.3.2 Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan persentase temuan aparat pengawasan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 78,02%, sebesar 79,07% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 80,12%, sebesar 81,17 % pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 82,22%.

Gambar 2.108
 Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti
 Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.2 Perencanaan Pembangunan

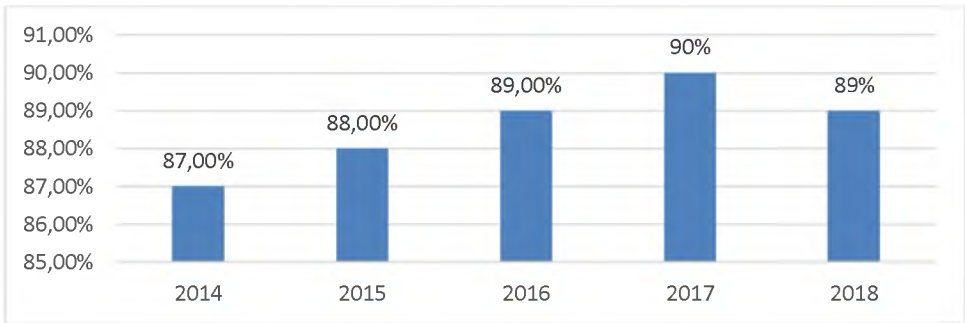
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*Sense of ownership*) juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

2.3.4.2.1 Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Gambar 2.109
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD
Tahun 2014 – 2018

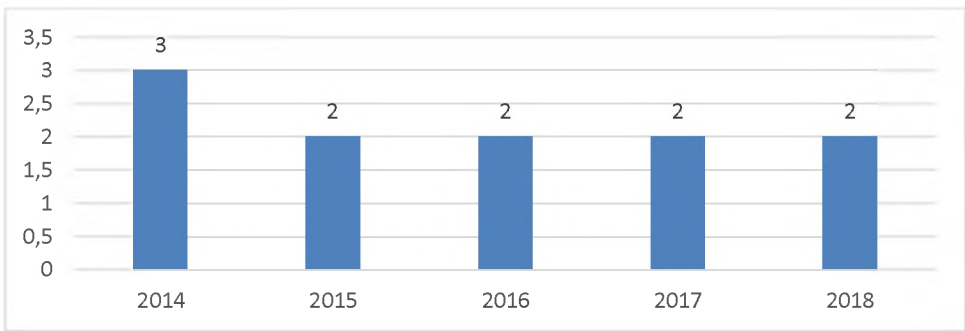


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 87%, sebesar 88% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 89%, sebesar 90% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 89%.

2.3.4.2.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan

Gambar 2.110
Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2014 – 2018

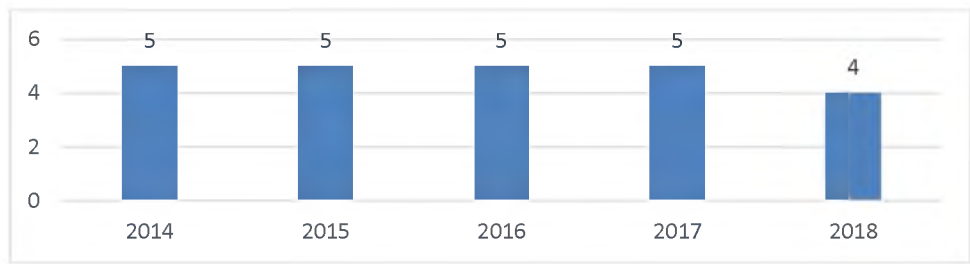


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tersedianya dokumen perencanaan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebanyak 3 dokumen, sebanyak 2 dokumen pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 2 dokumen, sebanyak 2 dokumen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 2 dokumen.

2.3.4.2.3 Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan

Gambar 2.111
Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Tahun 2014 – 2018

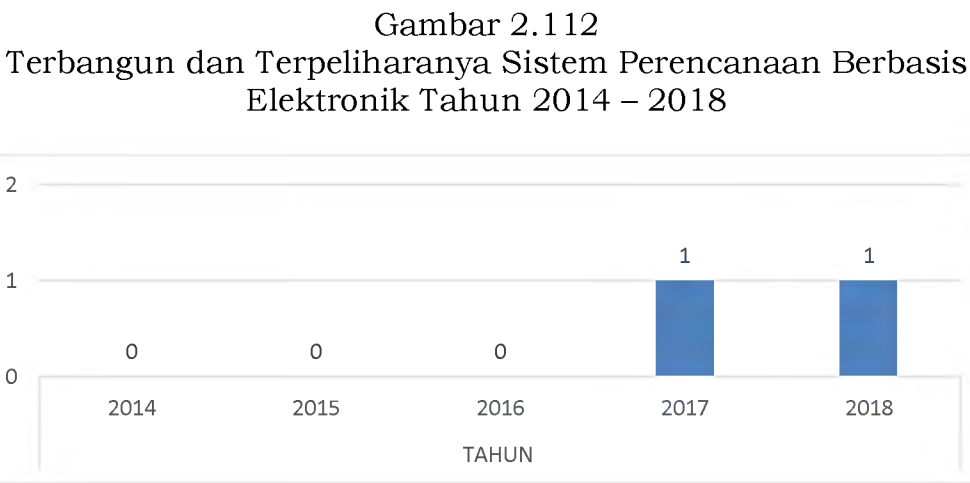


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Banyaknya dokumen pendukung perencanaan yang tersedia di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 masing-masing sebanyak 5 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 4 unit.

2.3.4.2.4 Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan terbangun dan terpeliharanya sistem perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah sebanyak 1 sistem untuk masing-masing tahun.

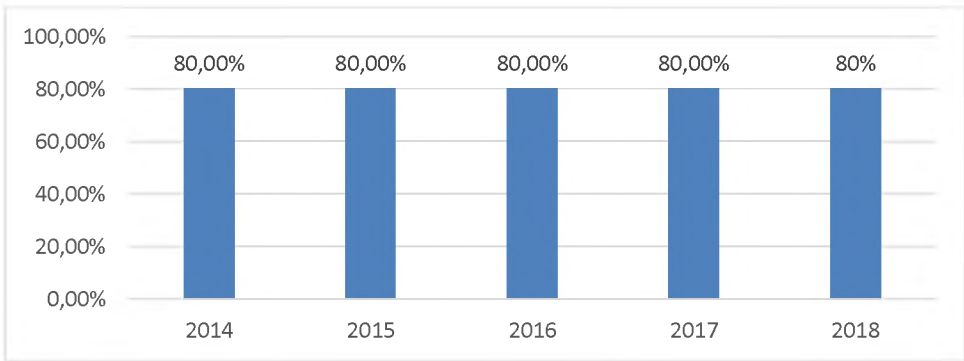


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.2.5 Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten

Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 sebesar 80% tiap tahunnya.

Gambar 2.113
Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2014 – 2018

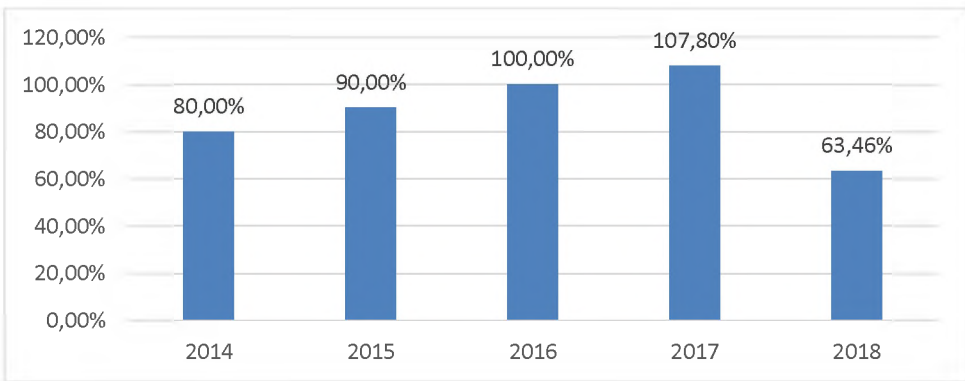


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.3 Keuangan

2.3.4.3.1 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah

Gambar 2.114
Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2014 – 2018



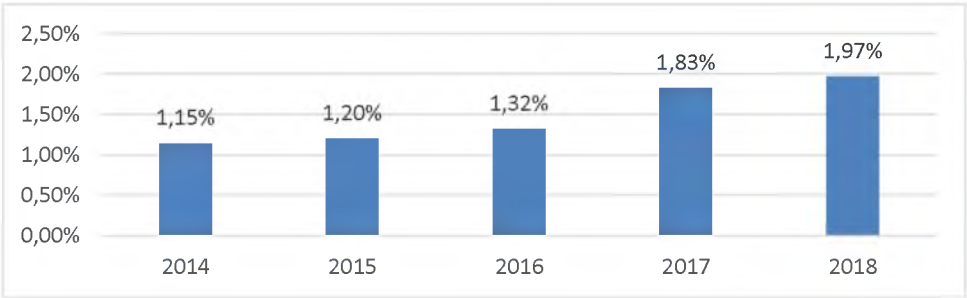
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 80%, sebesar 90% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 100%, sebesar 107,80% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 63,46%.

2.3.4.3.2 Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 1,15%, sebesar 1,20% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 1,32%, sebesar 1,83% pada tahun 2017 dan pada tahu 2018 sebesar 1,97%.

Gambar 2.115
Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 - 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.3.3 Opini Laporan Keuangan

Tabel 2.50
Opini Laporan Keuangan Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari tabel diatas dapat dilihat opini laporan keuangan Kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 adalah dengan kriteria wajar tanpa pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

2.3.4.3.4 Penyusunan APBD Tepat Waktu

Tabel 2.51
Penyusunan APBD Tepat Waktu Tahun 2014 – 2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 adalah Tepat waktu setiap tahunnya.

2.3.4.3.5 **Penyusunan LKPD Tepat Waktu**

Tabel 2.52
Penyusunan LKPD Tepat Waktu Tahun 2014 – 2018

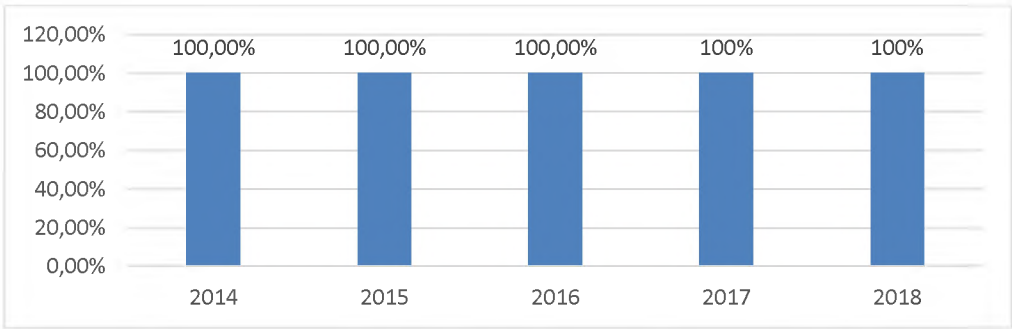
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
31 Maret	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari tahun 2014 – 2018 adalah Tepat waktu setiap tahunnya.

2.3.4.3.6 **Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS**

Gambar 2.116
Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Kabupaten Dairi pada taun 2014 – 2018 adalah 100% setiap tahunnya.

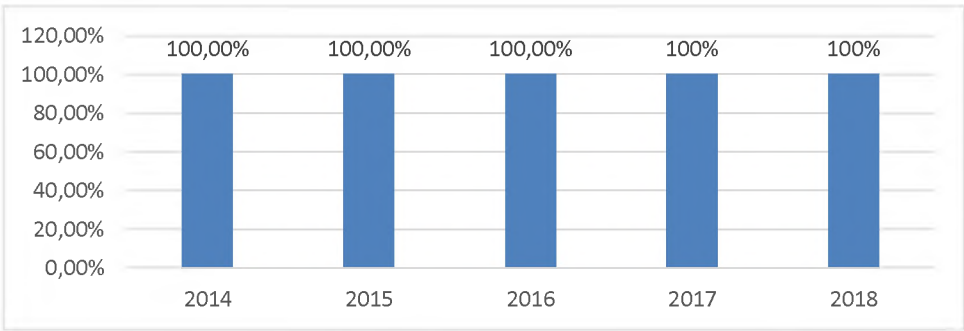
2.3.4.4 **Aparatur dan Kepegawaian**

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Apartur Sipil Negera sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

2.3.4.4.1 Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin

Gambar 2.117
Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin
Tahun 2014 – 2018



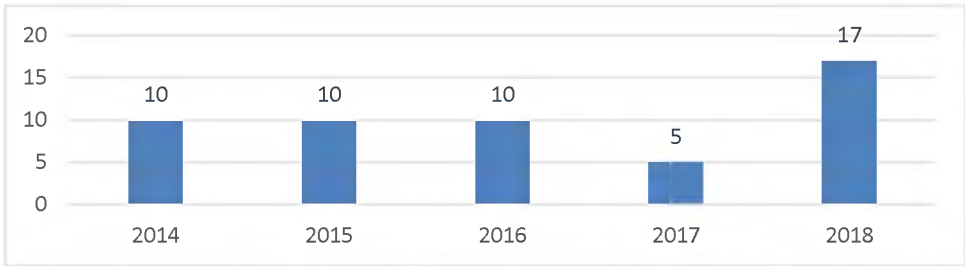
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah tercapai 100 % setiap tahunnya.

2.3.4.4.2 Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan

Dari gambar dibawah ini dapat dijelaskan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat kepemimpinan Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 10 orang, sebanyak 10 orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 10 orang, sebanyak 5 orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 17 orang.

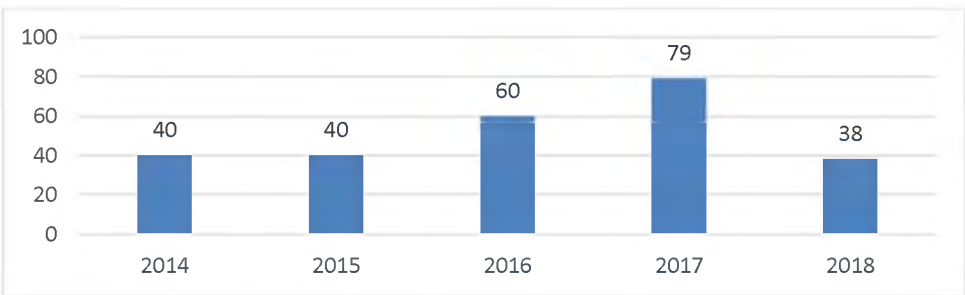
Gambar 2.118
 Jumlah Aparatur yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan
 Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.4.3 Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Gambar 2.119
 Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)
 Tahun 2014 – 2018

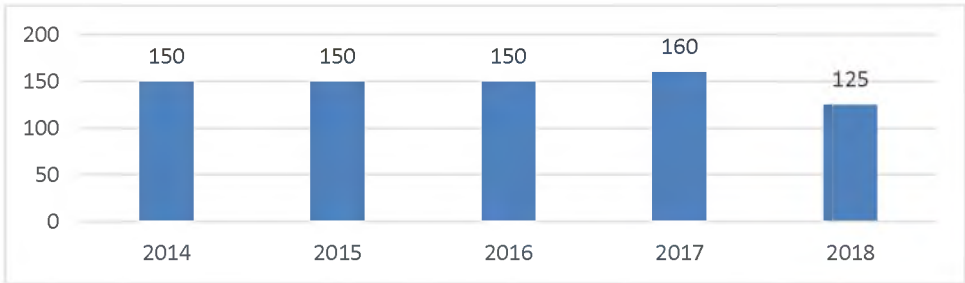


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Banyaknya guru diklat penilaian kinerja guru (PKG) di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebanyak 40 Orang, sebanyak 40 Orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 60 Orang, sebanyak 79 Orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 38 Orang.

2.3.4.4.4 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

Gambar 2.120
 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

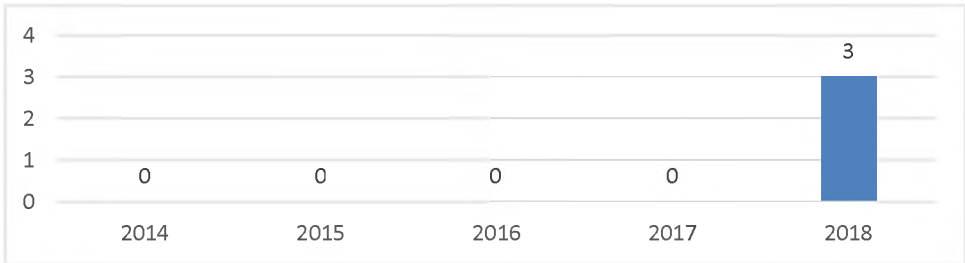
Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional pada tahun 2014 sebanyak 150 Orang, sebanyak 150 Orang pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 150 Orang, sebanyak 160 Orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 125 Orang.

2.3.4.5 Penanggulan Bencana Daerah

2.3.4.5.1 Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Dairi pada tahun 2018 sebanyak 3 dokumen.

Gambar 2.121
Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dilaksanakan Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.5.2 Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

Gambar 2.122
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Tahun 2014 – 2018



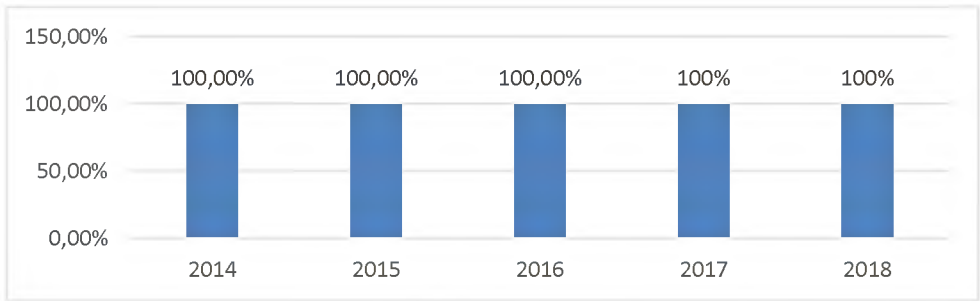
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Banyaknya desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 – 2018 adalah sebanyak 5 desa.

2.3.4.5.3 Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 – 2018 adalah sebesar 100% setiap tahunnya.

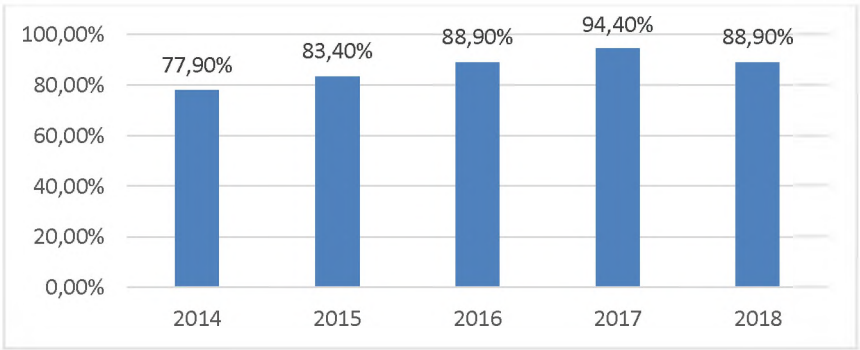
Gambar 2.123
Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

2.3.4.5.4 Terpenuhiya Pemulihan Dampak Bencana

Gambar 2.124
Terpenuhiya Pemulihan Dampak Bencana Tahun 2014 – 2018



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi

Persentase terpenuhinya pemulihan dampak bencana di Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sebesar 77,90%, sebesar 83,40% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 88,90%, sebesar 94,40% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar 88,90%.

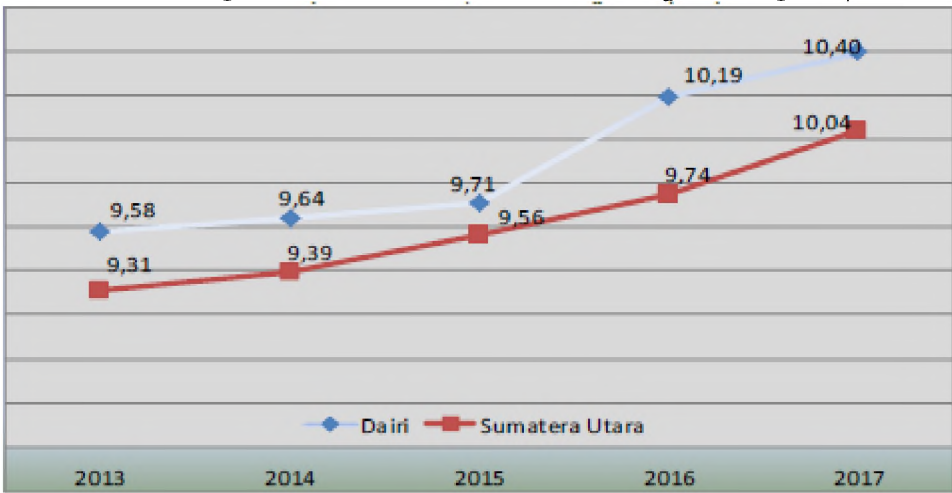
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Masyarakat Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.125
Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun, 2013-2017 (juta rupiah)



Sumber : IPM Kabupaten Dairi 2017 (BPS)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, Jika pada tahun 2013 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 9,58 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2017 mencapai 10,40 juta rupiah per tahun. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antar daerah (pengeluaran perkapita disesuaikan).

Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan meskipun nilainya masih berada di bawah Kabupaten Dairi.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Pekerjaan Umum

Berdasarkan data Tahun 2016 dapat diketahui kondisi jalan, jembatan dan luas irigasi dalam keadaan baik dalam tabel dibawah ini

1. Panjang jalan dan Jembatan

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2016 sepanjang 770,59 Km atau sebanyak 47,91% sedangkan jembatan dalam kondisi baik sepanjang 153 Km atau sebanyak 76,69%.

Tabel 2.53
Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Dairi Tahun 2016

No	Keterangan	Panjang Kondisi Keadaan Baik	Persentase
1	Jalan	770,59 Km	770,59/1.608,48 = 47,91%
2	Jembatan	153 Km	153/195 = 79,69 %

Sumber : Dinas PUPR Kab Dairi

2. Luas Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 2.54
Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2017

No	Keterangan	Luas Irigasi Keadaan Baik	Persentase
1	Irigasi	10.255 Km	10.255/19.090 = 53,72

Sumber : Dinas PUPR Kab Dairi

Luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 sesuai dengan tabel diatas sepanjang 10.255 Km atau sebanyak 53,72% dari seluruh luas irigasi yang ada.

3. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Kabupaten Dairi.

Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan meliputi dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobak dorong, gerobak motor, kontainer, TPS dan depo dan transito) sampai di TPA. Sampai dengan akhir Tahun 2015 daya tampung TPA sebanyak 120.000 M³

B. Perumahan

1. Penduduk Terlayani Air Minum

Cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum layak, dihitung berdasar persentase perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dibanding dengan keseluruhan penduduk Kabupaten Dairi. Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Ncihodi Kabupaten Dairi
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	10.892
2014	15.122
2015	13.995
2016	14.432
2017	15.366

Sumber: Dairi Dalam Angka Tahun 2018

Jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho di Kabupaten Dairi sesuai dengan tabel diatas pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat kecuali pada tahun 2015. Sampai dengan tahun 2017 jumlah pelanggan PDAM Tirta Nciho sebanyak 15.366 pelanggan.

2. Penduduk Menggunakan Listrik PT. PLN

Perkembangan cakupan pelayanan penduduk terlayani aliran listrik, yang disalurkan oleh PT.PLN di Kabupaten Dairi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Jumlah Pelanggan pada PT PLN (Persero) Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	53.256
2014	53.256
2015	63.058
2016	59.399
2017	67.358

Sumber : Dairi Dalam Angka Tahun 2017

3. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Untuk mendukung iklim investasi yang baik dan kondusif dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah tingkat kriminalitas di suatu daerah. Di Kabupaten Dairi angka kriminalitas pada Tahun 2017 terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

A. Angka Kriminalitas

Tabel 2.57
Jumlah Angka Kriminalitasdi Kabupaten Dairi Tahun 2017

No	Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
1.	Kebakaran	11	12	15
2.	Pembakaran	0	0	0
3.	Korupsi	0	0	0
4.	Pemalsuan surat	2	2	0
5.	Kejahatan Susila	0	1	0
6.	Penipuan/Penggelapan	15	9	6
7.	Perjudian	25	20	5
8.	Pembunuhan	1	1	0

9. Penganiayaan Berat	0	0	0
10. Penganiayaan Ringan	99	76	23
11. Pencurian dengan kekerasan	3	1	2
12. Pencurian kekerasan berat	28	7	21
13. Pencurian biasa	58	17	41
14. Curanmor	50	7	43
15. Peras/Ancam	1	0	1
16. Penghinaan	18	10	8
17. Penggelapan	14	4	10
18. Penipuan	11	13	0
19. Merusak	20	6	14
20. Minyak dan Gas	3	2	1
21. Perasaan tidak senang	4	1	3
22. Illegal Logging	8	5	3
23. Sengketa Tanah	21	10	11
24. Perkawinan Terhalang	0	0	0
25. Penemuan Mayat	12	10	2
26. Mengakibatkan Meninggal dunia atau luka karena alfa	0	0	0
27. KDRT	14	16	0
28. Perlindungan anak	13	8	5
29. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0	0
30. Membinasakan binatang	0	0	0
Jumlah Kasus	435	238	203
Jumlah Penduduk	309.539		
Persentase Angka Kriminalitas	0,141 %		

Sumber : Dairi Dalam Angka Tahun 2018 (BPS)

B. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

C. Lama Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Dairi diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Dairi dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 2.58
Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Dairi, 2014, 2015 dan 2017

Kegiatan	2014		2015		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Angkatan Kerja	150.737	85,78	153.487	86,45	157.038	86,70
- Bekerja	148.471	84,49	151.557	85,36	154.801	85,47
- Pengangguran	2.266	1,29	1.930	1,09	2.237	1,23
Bukan Angkatan Kerja	24.986	14,22	24.062	13,55	24.086	13,30
Jumlah	175.723	100	177.549	100	181.124	100
TPAK (%)	85,78		86,45		86,70	
TPT (%)	1,50		1,26		1,42	

Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Pada tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Dairi adalah 181.124 orang, terdiri dari 157.038 orang angkatan kerja dan sisanya sebanyak 24.086 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

TPAK Dairi tahun 2017 adalah sebesar 86,70 persen, artinya bahwa pada tahun 2017 sebanyak 86,70 persen penduduk usia kerja di Dairi siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Dairi menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014, TPAK Dairi 85,78 persen, kemudian naik menjadi 86,45 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 kembali naik kembali menjadi 86,70 persen.

2. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 di Dairi sebesar 1,42 persen, meningkat dibanding tahun 2015 (1,26 %). Namun jika dibandingkan dengan tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka pada 2017 menurun dimana TPT 2014 sebesar 1,50 persen.

Tabel 2.59
Jumlah Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Dairi menurut Kegiatan Seminggu yang lalu, 2014, 2015, dan 2017

Tahun	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja					
	Bekerja	%	Pengan gguran	%	Sekolah	%	Mengurus Rumah Tangga	%	Lainnya	%
2014	148.471	84,49	2.266	1,29	9.706	5,52	9.363	5,33	5.917	3,37
2015	151.557	85,36	1.930	1,09	13.339	7,51	6.878	3,87	3.845	2,17
2017	154.801	85,47	2.237	1,23	12.412	6,85	6.518	3,60	5.156	2,84

Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

Hal yang cukup menarik jika mencermati struktur penduduk 15 tahun ke atas Kabupaten Dairi Tahun 2017, terjadi pergeseran penduduk yang mengurus rumah tangga dan bekerja. Persentase penduduk yang mengurus rumah tangga pada 2015 sebesar 3,87 persen menurun menjadi 3,60 persen pada 2017 sebaliknya persentase penduduk yang bekerja pada 2015 sebesar 85,36 persen atau meningkat pada 2017 menjadi 85,47 persen.

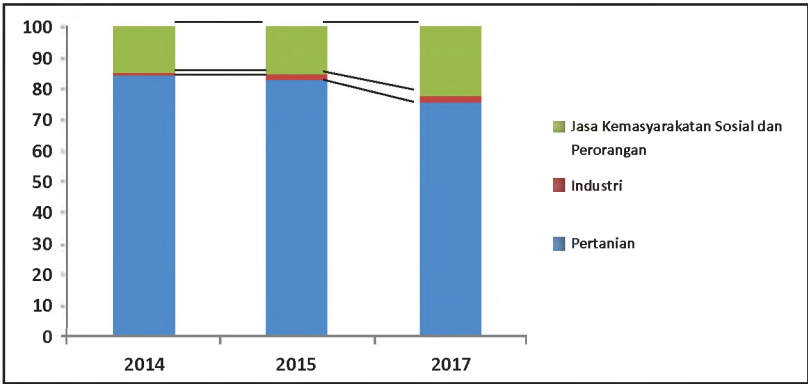
3. Karakteristik Penduduk Bekerja

3.1. Lapangan Pekerjaan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Dairi. Perkembangan 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 sebanyak 84,59 persen penduduk Dairi bekerja di sektor *agriculture*/pertanian, kemudian diikuti sektor *service* (angkutan, perdagangan, keuangan dan jasa) sebesar 5,11 persen dan sisanya 0,30 persen pada sektor *manufacture* (pertambangan/penggalian, industri, listrik gas dan air serta bangunan) seperti yang terlihat pada Gambar.

Pada tahun 2015 kondisinya relatif sama, yaitu pertanian masih mendominasi walaupun menunjukkan penurunan yaitu menjadi 83,16 persen, diikuti sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan sebesar 15,31 persen serta sektor industri sebesar 1,53 persen. Besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Dairi karena memang Dairi memiliki potensi pertanian tanam pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang didukung oleh lahan yang cukup luas dan subur. Namun, dalam kurun waktu sampai dengan 2017, sektor pertanian cenderung menurun tetapi sektor industri dan jasa kemasyarakatan cenderung meningkat.

Gambar 2.126
Persentase Penduduk Bekerja di Dairi menurut Lapangan Usaha, 2014, 2015, 2017



Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa pertanian mendominasi lapangan pekerjaan di Dairi pada 2014. Namun pada 2015 dan 2017 terjadi pergeseran struktur lapangan kerja dari pertanian ke jasa kemasyarakatan. Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tahun 2017 sebesar 75,31 persen sedangkan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 22,53 persen.

Tabel 2.60
 Persentase Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, 2014, 2015, 2017

Tahun	Lapangan Usaha		
	Pertanian	Industri	Jasa Kemasyarakatan
2014	84.59	0.30	15.11
2015	83.16	1.53	15.31
2017	75.31	2.16	22.53

Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

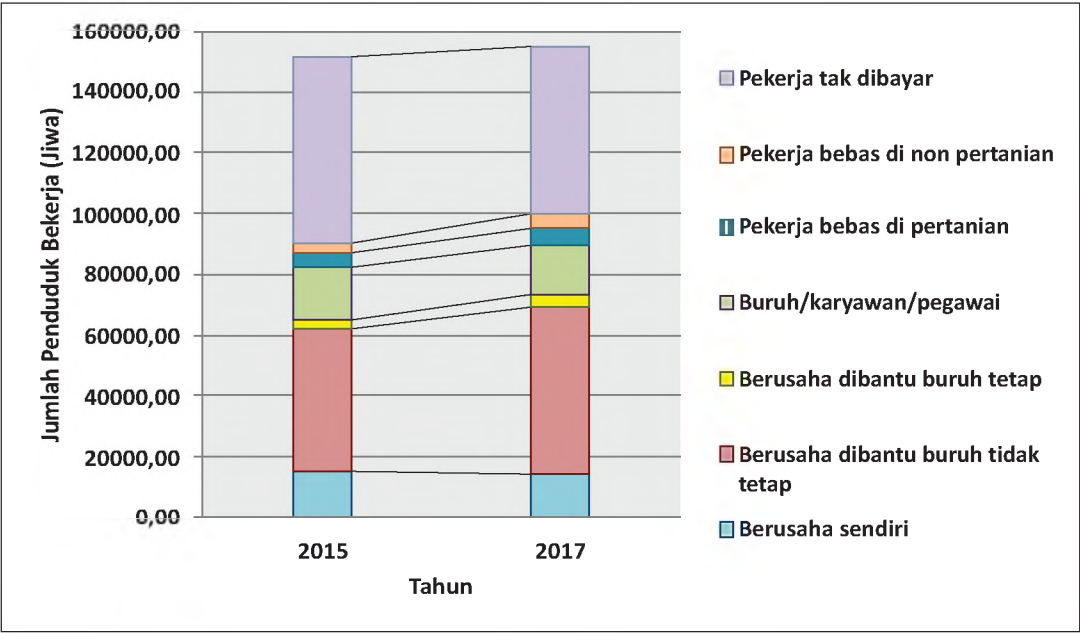
3.2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 6 macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif ‘tradisional’. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Pada umumnya penduduk Dairi yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Gambar berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 29,94 persen pekerja di Dairi berstatus buruh/karyawan, kemudian diikuti berusaha sendiri (11,36 %) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 31,21 persen.

Gambar 2.127
Persentase Penduduk Bekerja Dairi menurut Status Pekerjaan, 2015 dan 2017



Sumber : Inkesra Kabupaten Dairi (BPS)

2.5 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Dairi

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dan dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Dairi dapat dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.61
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Dairi

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku	%	9,74	8,86	8,95	8,22	8,53	9,6	<
1.2	Pertumbuhan PDRB atas harga konstan	%	5,03	5,04	5,07	4,93	5,01	5,4	<
1.3	PDRB per kapita (Rp) atas harga berlaku	%	22.581.579	24.447.890	26.490.918	28.539.613	30.848.320	26.000.000	>
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,274	0,279	0,301	0,240	0,238	0,2	<
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.1	Persentase Penduduk Miskin	%	8,4	9,09	8,9	8,83	8,2	8	<
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	%	67,91	69	69,61	70,36	70,89	71	<
1.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,69	8,70	8,9	9,15	8,8	<
1.4	Angka usia harapan hidup	Tahun	67,78	67,95	68,13	68,92	68,4	69,2	<
1.5	Persentase balita gizi buruk	%	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,17	>
1.6	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,99	2,11	2,03	1,98	1,47	0,50	<
1.7	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	121.079	134.215	145.351	153.487	161.623	185.211	>
1.8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	77,92	83,21	88,50	93,79	88,50	91,50	<
1.9	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,50	1,26		1,42	1,4	1,22	<
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga									

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
1	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga								
1.1	Jumlah Grup Kesenian		0,92	0,22	0,82			1	<
1.2	Jumlah Gedung Kesenian		0,17	0,04	0,04			0,08	=
2	Pemuda dan Olah Raga								
2.1	Jumlah Klub Olah Raga (per 10.000 penduduk)		2,15	1,65	1,65			3	<
2.2	Jumlah Gedung Olah Raga (per 10.000 penduduk)		0,43	0,04	0,04			0,05	>
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Partisipatif Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	23,57	15,50	18,30	21,90	29,97	30	=
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	103,74	103,94	104,14	104,34	106,52	100	>
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	94,44	94,64	94,84	95,04	95,41	100	<
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	89,75	90,25	90,75	91,25	96,63	100	<
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	99,25	92,60	89,95	86,24	76,59	100	<
1.6	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	%	92,69	94,31	95,93	97,55	99,17	100	=
1.7	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	91,65	93,73	95,81	97,89	99,97	100	=
1.8	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,12	0,12	0,12	0,120	0,29	0	<
1.9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,32	0,33	0,34	0,35	0,47	0	<
1.10	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	=
1.11	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	=
1.12	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	%	100	100	100	100	100	100	=

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
2	Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Bayi	AKB/ 1.000 KH	6,45	6,81	6,82	7,47	2,83	3	=
2.2	Angka Kematian Ibu	AKI/ 100.000 Kelahiran	99,8	78,27	53,06	134,49	53,06	70	=
2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	54,84	58,41	61,98	65,55	71,98	85	<
2.4	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	56,54	60,45	64,36	68,27	74,36	85	<
2.5	Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	51,22	63,07	64,92	66,77	68,62	85	<
2.6	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	45,38	45,68	45,98	46,28	49,29	85	<
2.7	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	Kasus/100.000 Penduduk	44,75	45,5	46,25	47	52,25	55	<
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	55,09	50,21	50,33	54,45	59,33	80	<
3.2	Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	81	81,52	82,04	82,56	83,08	89,50	<
3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang bersih	%	41,04	49,48	51,92	58,36	62,80	100	<
3.4	Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB	%	100	100	100	100	100	100	=
3.5	Persentase Luas Irigasi Dalam Keadaan Baik	%	21,38	24,38	27,38	30,38	60,13	82	<
3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	%	0,00	0,00	1,25	2,25		1,43	<

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	74,93	78,75	82,57	86,39	90,21	91,43	=
4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	34,38	26,30	18,22	10,14	2,06	100	<
4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	35,98	37,31	38,64	39,97	41,30	55	<
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	%	50	55	60	66	82,17	100	<
5.2	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik	Orang	200	250	300	0	300	750	<
5.3	Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	FKUB, FPK, FKDM, FPPBD	3	3	3	3	3	4	=
5.4	Jumlah tokoh agama/adat/ masyarakat yang mengikuti kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Orang	288	342	396	350	896	950	<
6	Sosial								
6.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,4	9,2	9,0	8,9	8,9	8	<
6.2	PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kelompok	3	3	3	10	7	10	=
6.3	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial	%	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	3	<

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
6.4	Presentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	80	=
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	45,40	47,20	49	50,80	52,58	63,20	<
1.2	Besaran pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi/masyarakat/teknologi tepat guna/kewirausahaan	Orang	50	50	60	107	212	270	<
1.3	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	Kasus	0	0	0	1	0	2	=
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	=
2.2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mendapat Pelayanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	79	=
3	Ketahanan Pangan								
3.1	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100)	%	77,27	74,03	75,29	76,55	77,81	80	<
3.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	%	90,17	91,49	92,81	94,13	95,45	95,20	=
3.3	Persentasi Konsumsi Protein Per kapita	%	38,43	52,12	65,81	79,5	93,19	91,72	=
4	Pertanahan								

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani		7.200	14.096	20.492	21.888	22.284	40.165	<
5.2	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah di Kecamatan	%	40	40	40	40	40	80	<
5.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	=
5.4	Penurunan Luas Lahan Kritis	Ha	1,25	5	8,75	12,5	8,75	10	<
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	34,50	39,00	43,00	51,00	73,45	58	=
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7.1	Peningkatan klasifikasi desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya	Desa	0	0	0	0	0	62	<
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	%	56,20	59,33	62,46	65,59	68,72	67	=
8.2	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,13	3,77	4,41	4,05	4,69	4,85	=
8.3	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	%	0	0	0	0	0	30	<
8.4	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun	%	8,90	8,82	8,53	8,41	7,50	3,40	<
8.5	Cakupan anggota bina balita (BKB) ber KB	%	69,22	68,84	68,46	69,08	69,46	72	<

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
8.6	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	77,79	78,46	79,13	79,8	79,13	87	<
8.7	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	=
9	Perhubungan								
9.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	%	100	100	100	100	100	100	=
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	Media desiminasi informasi	7	7	7	7	7	8	<
10.2	Jumlah Ketersedian Data Statistik Daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	6	<
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
11.1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	25	25	25	67	158	85	=
11.2	Jumlah Usaha Mikro	Unit	78	82	86	98	115	5	=
12	Penanaman Modal								
12.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	%	53,95	61,06	68,17	75,28	82	90	<
12.2	Persentase peningkatan investasi	%	2,30	2,40	2,50	2,60	3,17	5	<
12.3	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	Unit	53	57	61	65	61	85	<
13	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1	Terfasilitasinya pelayanan kepemudaan	Orang	500	500	500	667	1.439	1.439	=

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
13.2	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	OKP	0	0	0	0	0	47	<
13.3	Terselenggaranya kompetisi olah raga	Cabang Olahraga	3	3	3	4	7	7	=
13.4	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	%	100	100	100	100	100	100	=
14	Statistik								
15	Persandian								
16	Kebudayaan								
16.1	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	=
16.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	unit	1	1	1	1	1	1	=
16.3	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	Organisasi	5	5	5	5	5	5	=
17	Perpustakaan								
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	14.582	14.892	15.032	15.200	15.368	24.000	<
18	Kearsipan								
18.1	Jumlah Arsip Yang Dilestarikan	Arsip	90	93	154	215	154	225	<
Urusan Pemerintah Pilihan									
1	Pertanian								
1.1	Produktivitas Tanaman Pangan								
	- Padi Sawah	Kw/ha	58,09	58,49	58,89	59,29	59,69	61,19	<
	- Padi Ladang	Kw/ha	33,05	33,70	33,90	34,1	34,3	35,13	<

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
	- Jagung	Kw/ha	50,56	53,64	56,72	59,8	62,88	65,48	=
1.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura								
	- Jeruk Manis								
	- Kentang	%	4,18	4,11	4,19	4,13	4,12	5	<
	- Cabe Merah	%	4,72	4,78	4,77	4,74	4,76	5	<
	- Durian	%	1,62	1,63	1,68	1,66	1,56	2	<
		%	4,79	4,92	5,05	5,17	4,91	5	=
1.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat								
	- Kopi	%	0,92	0,92	0,98	0,92	1,06	1	=
1.4	Jumlah Populasi Peternakan								
	- Babi	Ekor/Tahun	100.511	100.873	102.285	103.649	104.737	110.057	<
	- Ayam	Ekor/Tahun	1.070.333	1.086.483	1.104.403	1.121.908	1.138.907	1.167.070	<
1.5	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak								
	- Sapi	%	32,31	32,54	32,77	33	33,23	35	<
	- Kerbau	%	27,74	29,83	31,92	34,01	36,1	37	=
	- Babi	%	1,29	1,32	1,43	1,43	1,41	2,80	<
	- Kambing	%	9,16	9,27	9,38	11,49	11,6	11,50	=
	- Ayam	%	6,64	4,75	2,86	5,17	3,28	5	=
	- Anjing	%	21,62	22,32	25,98	27,28	43,58	38	=
1.6	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang								
	- Ternak Besar	Ekor/Tahun	243	243	243	243	362	384	=
	- Ternak Kecil	Ekor/Tahun	0	0	0	0	748	768	=
1.7	Jumlah Kelompok Tani Yang Terfasilitasi	Kelompok	50	60	100	185	1.302	650	=
1.8	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Unit	5	5	5	5	5	51	<
2	Perikanan								
2.1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap								
	- Ikan Gabus	%	8,32	8,34	8,36	8,39	(74,04)	14	<
	- Ikan Mujair	%	10,22	10,24	10,26	10,29	(22,33)	17	<

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
	- Ikan Nila	%	9,37	9,39	9,41	9,44	(9,27)	16	<
	- Ikan Bilih	%	4,2	4,22	4,24	4,27	(93,10)	5	<
	- Ikan Mas	%	24,2	24,22	24,24	24,27	(42,59)	25	<
	- Ikan Lainnya	%	1,6	1,62	1,64	1,67	(48,34)	2,97	<
2.2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya								
	- Ikan Nila	%	1,2	1,22	1,32	1,36	0,97	1,50	<
	- Ikan Mas	%	14,53	14,74	14,81	14,84	17,53	15	=
	- Ikan Lele	%	9,14	9,28	9,38	9,48	4,35	10	<
3	Pariwisata								
3.1	Jumlah Objek Wisata Yang berkembang Yang Ditangani	Objek	2	2	2	2	2	2	=
3.2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	7,2	7,3	7,5	7,8	9,45	8	=
4	Kehutanan								
5	Transmigrasi								
6	Energi dan Sumber Daya Mineral								
7	Perdagangan								
7.1	Tersediannya dokumen Informasi Harga Dan Ketersediaan Barang Pokok (33 jenis)	dokumen	1	1	1	1	1	1	=
7.2	Jumlah Produk bidang agribisnis Yang Dipromosikan	produk	4	4	4	4	4	4	=
8	Perindustrian								
8.1	Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis	%	5	5	5	5	5	5	=

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
8.2	Jumlah Produk IKM bidang agribisnis Yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi	Produk	2	2	2	2	0	60	<
8.3	Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Teraulang	Unit	475	561	578	595	612	1.100	<
Urusan Penunjang Urusan Pemerintah									
1	Pemerintahan Umum								
1.1	Sekretaris Daerah								
1.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	C	C	C	C	C	B	<
1.1.2	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah	Level	0	0	0	0	2	3	=
1.1.3	Rekomendasi LKPJ	Rekomendasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
1.1.4	Nilai LPPD	Nilai	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	=
1.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70,07	70,28	71,49	71,7	77,91	73,8	=
1.1.6	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	KK	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	=
1.1.7	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	%	100	100	100	100	100	100	=
1.1.8	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan	naskah	24	20	20	20	24	24	=
1.1.9	Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi	Jenis	4	4	4	4	4	4	=
1.1.10	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Unit	2	2	2	2	2	2	=
1.2	Sekretariat DPRD								
1.2.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	%	100	100	100	100	100	100	=
1.3	Inspektorat								

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	1	1	1	2	2	3	=
1.3.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	%	78,02	79,07	80,12	81,17	82,22	90	<
2	Aparatur dan Kepegawaian								
2.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	%	100	100	100	100	100	100	=
2.2	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	Orang	10	10	10	5	17	50	<
2.3	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	Orang	40	40	60	79	38	40	=
2.4	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	Orang	150	150	150	160	125	200	<
3	Keuangan Daerah								
3.1	Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah	%	80,00%	90,00%	100,00%	107,80%	63,46%	95%	<
3.2	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	%	1,15%	1,20%	1,32%	1,83%	1,97%	5,50%	<
3.3	Opini laporan keuangan	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
3.4	Penyusunan APBD tepat waktu	31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
3.5	LKPD Tepat Waktu	31 Maret	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
3.6	Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam KUA/PPAS	%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	=
4	Perencanaan Pembangunan								
4.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	87,00%	88,00%	89,00%	90%	89%	100%	=
4.2	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	3	2	2	2	2	4	=
4.3	Tersedianya dokumen pendukung	Dokumen	5	5	5	5	4	5	=

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
	perencanaan								
4.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	Sistem	1	1	1	1	1	1	=
4.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%	=
5	Penelitian dan Pengembangan Daerah								
5.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	Dokumen	0	0	0	0	3	6	<
6	Penanggulangan Bencana Daerah								
6.1	Terbentuknya desa tangguh bencana	desa	0	0	0	5	5	15	<
6.2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	=
6.3	Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana	%	77,90	83,40	88,90	94,40	88,90	100	<
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	rupiah	640.691	708.151	802.177	754.204		1.000.000	<
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	rupiah	222.445	254.260	288.433	260.502		350.000	<
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1	Perhubungan								
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m/kndr)		86,8	76,03	61,8			60	>
2	Penataan Ruang								

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					RPJMD Kab. Dairi Tahun 2014-2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018		
2.1	Ketaatan terhadap RTRW								
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang		28	32	28			30	>
3.2	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang		1	2	2			4	=
3.3	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran		5	7	10			10	=
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih		19,45	20,94	21,48			100	<
Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Angka Kriminalitas		0,0008	0,0008	0,0021			0,0007	=
1.2	Jumlah Demonstrasi		4	8	0			0	=
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Rasio Ketergantungan		71,22	70,77	70,14			30	<

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan Pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, Termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

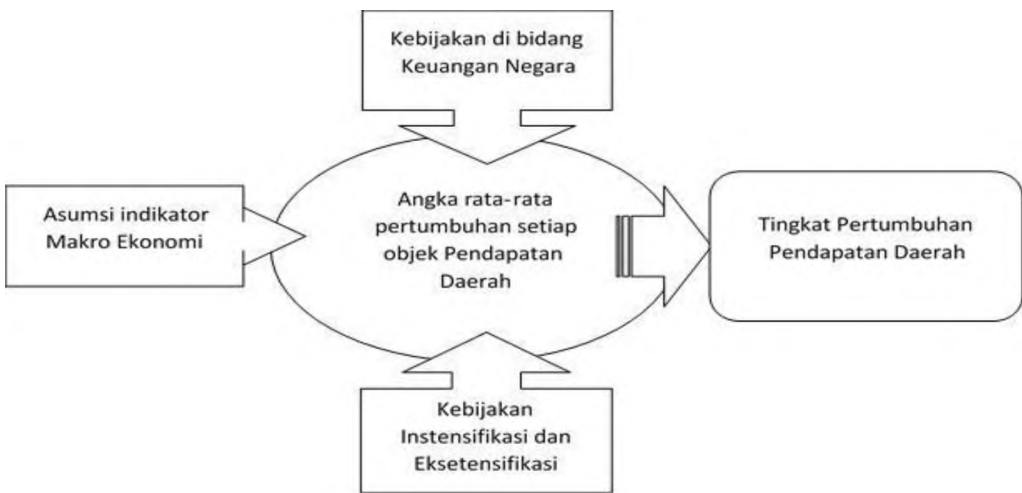
Secara ringkas, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar 3.1 dibawah

Gambar 3.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Pendapatan Daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan Negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro

ekonomi, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi Pendapatan Daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Dari formulasi dimaksud diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang secara kumulatif mencerminkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah. Angka pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Setelah dilakukan analisis Pendapatan Daerah, perlu dilakukan analisis Belanja Daerah dengan kerangka pemikiran yang digambarkan pada Gambar 3.2 sebagai berikut:

Gambar 3.2
Analisis Proyeksi Belanja Daerah

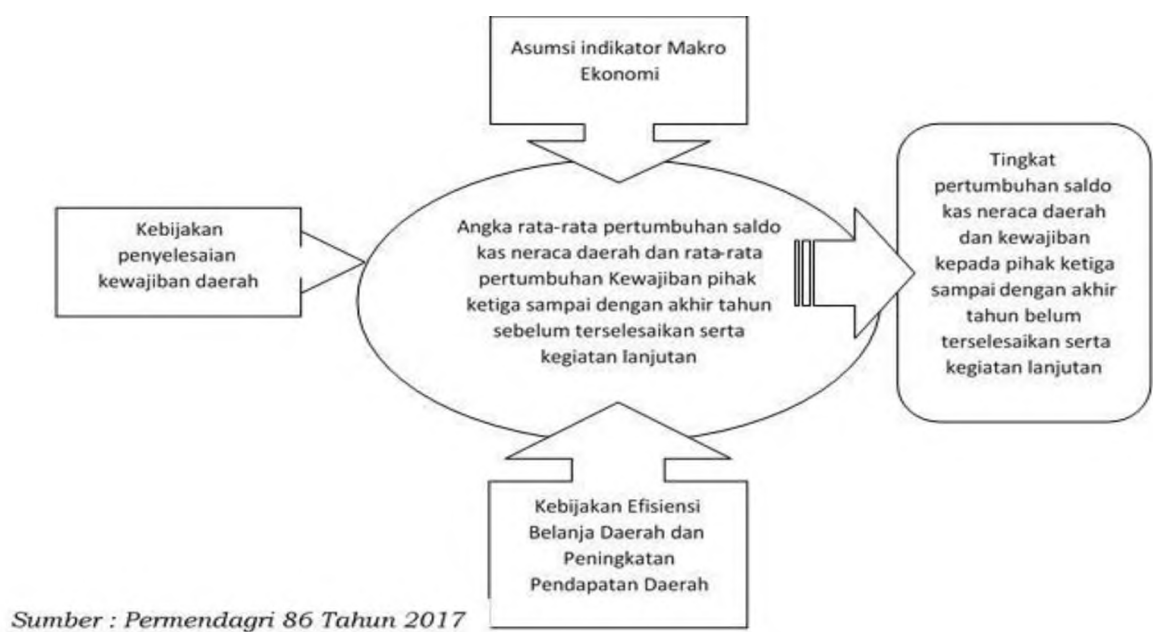


Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Analisis mengenai Belanja Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada Kebijakan Pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari Belanja Daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang. Selain analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dilakukan analisis berkaitan dengan Pembiayaan Daerah yang rumusan pemikiran digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 3.3
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



Pembiayaan Daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam menganalisis Pembiayaan Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian dilapangan yang ditunjukkan melalui asumsi

indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi Belanja Daerah dan peningkatan Pendapatan Daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014-2018

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai gambaran kondisi perekonomian dilapangan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dairi
Dalam persen (2014-2018)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
A	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,04	5,07	4,93	5,01
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,47	3,04	3,85	4,13	4,13
2	Pertambangan dan Penggalian	2,80	3,38	4,85	4,86	4,34
3	Industri Pengolahan	6,62	6,07	6,53	4,23	4,91
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,10	9,53	2,21	2,00	4,20
5	Pengadaan Air	2,59	4,60	2,07	4,08	3,95
6	Konstruksi	5,08	6,05	7,06	6,64	5,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,97	8,22	8,18	6,13	5,84
8	Transportasi dan Pergudangan	6,90	6,79	6,56	6,80	6,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,12	7,41	7,27	4,70	4,99

10	Informasi dan Komunikasi	5,54	2,65	3,55	4,83	5,67
11	Jasa Keuangan	4,28	7,65	3,68	4,11	4,21
12	Real Estate	4,98	4,12	2,81	6,52	5,27
13	Jasa Perusahaan	6,38	6,40	2,80	4,63	5,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,22	5,89	2,73	3,31	5,79
15	Jasa Pendidikan	6,86	6,07	6,58	5,45	5,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,03	5,95	6,63	6,88	5,36
B	Inflasi	7,94	3,36	4,76	2,13	4,05

Sumber: BPS Kabupaten Dairi

Selama tahun 2014 hingga 2018, realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi berada pada kisaran diatas 5 (lima) persen per tahun. Namun pada tahun 2017 mengalami perlambatan, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi hanya mencapai 4,93 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hingga tahun 2018 terus meningkat, sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan sektoral khususnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Konstruksi serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Dengan pendekatan tersebut, dapat dilihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor produksi utama perekonomian di Kabupaten Dairi, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi menandai peningkatan output pada sektor-sektor produksi utama, juga sebaliknya. Pergerakan output sektor-sektor produksi utama tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pendapatan Daerah. Untuk dapat melihat bagaimana pengaruh tersebut, terlebih dahulu perlu dilihat Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2014-2018 sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2014-2019, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

- a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga dapat meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan, melalui :
 - a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan,

termasuk untuk memperoleh dana bagi hasil sub sektor perkebunan.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah, melalui :
- a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - b. Mengembangkan ekstensifikasi PAD, dengan meminimalisir resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah.

Pengaruh dari pergerakan output sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan Pendapatan Daerah, selama tahun 2014-2018 tergambar dalam rencana dan realisasi Pendapatan Daerah pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018

No	Tahun	Proyeksi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	% Realisasi pendapatan daerah
1	2014	762.170.820.090,00	766.415.851.556,00	100,55%
1	2015	907.013.557.518,00	889.613.804.786,21	98,08%
2	2016	997.410.632.050,00	1.062.706.591.682,34	106,55%
3	2017	1.149.194.986.485,00	1.133.794.210.279,88	98,66%
4	2018	1.119.058.878.123,00	1.080.878.465.095,45	96,59%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

PAD terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah;
- Penerimaan retribusi daerah;
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer terdiri dari:

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
- Bagi hasil sumber daya alam;
- Dana alokasi umum;
- Dana alokasi khusus;
- Dana Otonomi Khusus (Transfer Pemerintah Pusat);
- Dana penyesuaian (Transfer Pemerintah Pusat).

Sedangkan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari:

- Bantuan/Hibah;
- Dana Darurat;
- Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya;
- Pendapatan Lainnya dari Pemerintah.

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang. Realisasi kinerja pendapatan daerah Kabupaten Dairi menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (hingga tahun 2018) sebesar 9,39 persen. Pada tahun 2014 pendapatan Kabupaten Dairi sebesar Rp.766.415.851.556, pada tahun 2015 pendapatan Kabupaten Dairi meningkat menjadi Rp 889,613,804,786,21 pada tahun 2016 menjadi Rp 1.062.706.591.682,34 dan pada tahun 2017 menjadi Rp.1.133.794.210.279,88 namun pada tahun 2018 menurun menjadi Rp.1.080.878.465.095,45.

Sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,34 persen. Komponen Dana Perimbangan memiliki kontribusi terbesar yakni Dana Alokasi Umum dengan rata-rata pertumbuhan 3,68%, Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata pertumbuhan 48,13% dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 2,70%.

Jika melihat Tabel dibawah ini keseluruhan komponen pendapatan Kabupaten Dairi menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2014-2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rata-rata Pertumbuhan
1.1	Pendapatan Asli Daerah	53.525.854.131,00	58.791.848.521,21	68.003.241.760,34	128.489.751.331,88	73.906.829.603,45	17,99%
	Pendapatan Pajak Daerah	7.226.000.000,00	7.715.031.033,50	8.654.027.559,70	11.481.804.235,24	11.708.281.188,90	13,40%
	Pendapatan Retribusi Daerah	34.677.451.762,00	27.834.589.423,23	10.290.370.228,00	8.775.219.568,50	7.447.646.332,53	-28,15%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.182.151.408,00	7.026.750.893,00	10.029.770.339,00	10.779.522.587,00	12.998.925.226,00	34,70%
	Lain-lain PAD yang sah	13.537.755.080,00	16.215.477.171,48	39.029.073.633,64	97.453.204.941,14	41.751.976.856,02	63,25%
1.2	Dana Perimbangan	602.937.946.707,00	630.242.780.607,00	790.727.052.037,00	790.001.519.650,00	785.653.444.094,00	7,34%
1.2.1	Dana bagi Hasil Pajak/Bagi Bukan Hasil Pajak	21.222.457.707,00	16.943.346.607,00	19.793.534.537,00	16.430.938.114,00	17.995.907.380,00	-2,70%
	Dana Bagi Hasil Pajak	18.581.166.419,00	13.536.417.444,00	17.472.042.520,00	14.846.360.356,00	13.765.597.541,00	-5,10%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.641.291.288,00	3.406.929.163,00	2.321.492.017,00	1.584.577.758,00	4.230.309.839,00	33,09%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	532.723.259.000,00	560.602.194.000,00	623.702.235.000,00	612.745.792.000,00	612.742.762.000,00	3,68%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.992.230.000,00	52.697.240.000,00	147.231.282.500,00	160.824.789.536,00	154.914.774.714,00	48,13%
	Dana Alokasi Khusus Fisik	48.992.230.000,00	52.697.240.000,00	71.703.017.000,00	87.210.289.950,00	60.157.861.300,00	8,56%
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	75.528.265.500,00	73.614.499.586,00	94.756.913.414,00	13,09%
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	109.952.050.718,00	200.579.175.658,00	203.976.297.885,00	215.302.939.298,00	221.318.191.398,00	23,12%
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	675.484.660,00	17.413.406.461,00	761.610.500,00	48.313.595.428,00	2875,30%
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.963.522.747,00	32.129.268.198,00	46.299.043.424,00	36.984.005.308,00	27.522.170.970,00	16,96%
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	4.178.490,00	-	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	5.795.530.825,00	10.896.556.800,00	1.293.400.000,00	-	6.800.945.000,00	-0,06%
1.3.5	Dana Penyesuaian Pendidikan	81.481.689.000,00	120.383.237.000,00	-	-	-	47,74%
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan PPD	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.7	Dana Annual Fee	3.711.308.146,00	-	-	-	-	0,00%
1.3.8	Pendapatan Dana Insentif Daerah	-	-	40.759.805.000,00	51.456.355.000,00	26.750.000.000,00	-10,89%
1.3.9	Pendapatan Transfer Dana Desa	-	36.494.629.000,00	98.210.643.000,00	126.096.790.000,00	111.931.480.000,00	62,09%
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		766.415.851.556,00	889.613.804.786,21	1.062.706.591.682,34	1.133.794.210.279,88	1.080.878.465.095,45	9,39%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

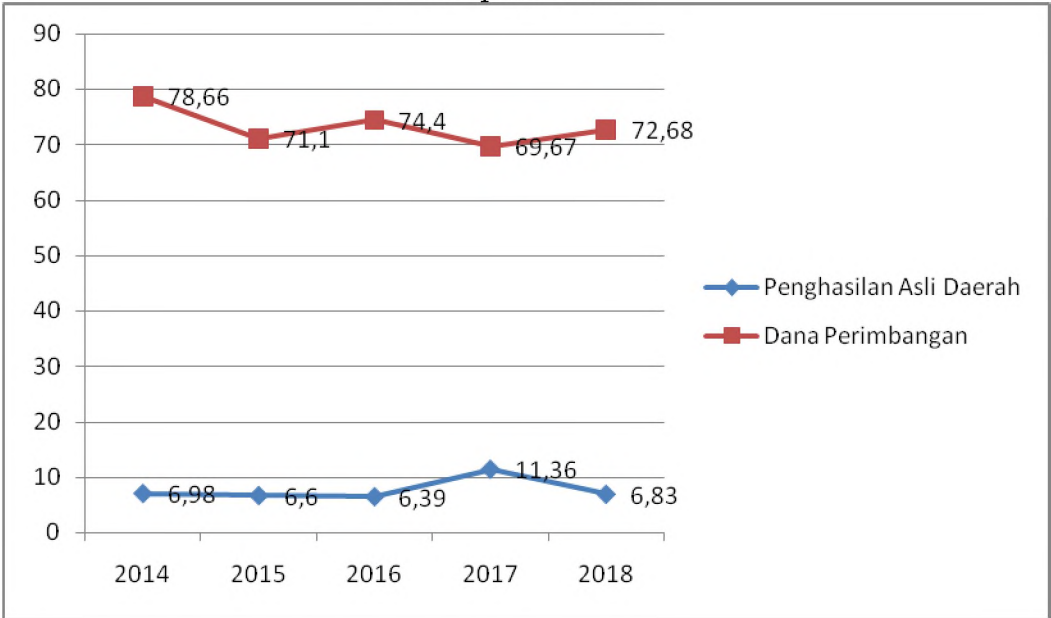
Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Daerah (Tabel 3.2), terlihat bahwa realisasi total Pendapatan Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,39%. Realisasi terbesar Pendapatan Daerah kurun waktu Tahun 2014 s.d 2018 berada pada komponen Dana Perimbangan, kemudian Lain-lain Pendapatan yang sah dan Pendapatan Asli Daerah.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kabupaten Dairi menunjukkan kondisi yang fluktuatif sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 dimana pada tahun 2014 yang semula sebesar 6,98% menurun menjadi 6,66% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 6,39%, namun pada tahun 2017 naik menjadi menjadi 11,36% tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 6,83%. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2014 sampai 2018 juga fluktuatif dimana pada tahun 2014 sebesar 78,66% kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 71,11%, tahun 2016 naik menjadi 74,40%, tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 69,67% pada tahun 2018 naik menjadi 72,68%. Dari data

diatas dapat disimpulkan bahwa derajat kemandirian Kabupaten Dairi masih dukup rendah dan rasio ketergantungan Daerah Kabupaten Dairi sangat tinggi.

Gambar 3.4
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah
Kabupaten Dairi



B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2014-2018 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan Belanja Daerah tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang

semakin baik, cepat, bermutu, dan terjangkau;

3. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, drainase, sarana air bersih, dan lainnya;
4. Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, belanja perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah lingkaran luar;
7. Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
8. Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah.

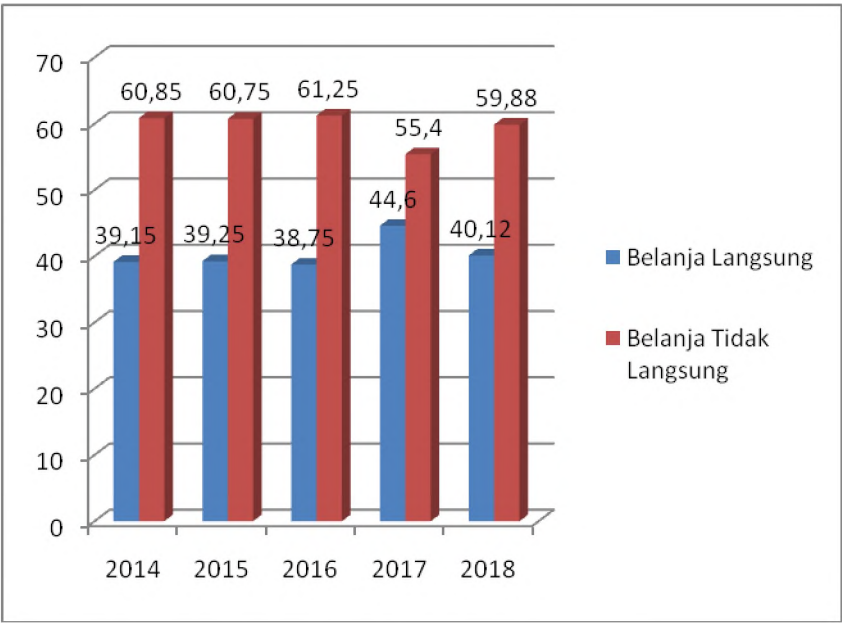
Tabel 3.4
Nilai Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rata-rata Pertumbuhan
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja pegawai	439.091.508.127,60	455.571.044.162,00	474.972.500.699,00	419.123.315.929,00	447.633.614.846	0,76%
2.1.2	Belanja bunga	493.171.921,00	345.146.800,30	197.859.477,71	49.287.204,84	3.126.272	-60,36%
2.1.3	Belanja subsidi		-	-	-		
2.1.4	Belanja hibah	2.684.799.700,00	2.735.000.000,00	3.963.600.000,00	21.817.692.116,00	27.700.582.366	131,05%
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.310.850.000,00	460.000.000,00	-	490.000.000,00	11.728.500.000	1114,33%
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa *	-	-	-	1.058.118.000,00	1.500.000.000	41,76%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa *	-	65.774.254.500,00	127.490.268.500,00	190.593.720.900,00	176.072.305.500	
2.1.8	Belanja tidak terduga	3.704.955.000,00	2.456.251.000,00	1.760.000.000,00	2.249.100.000,00		45,24%
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	453.709.164.593,00	527.341.696.462,30	608.384.228.677	635.381.234.149,84	664.638.128.984	-11,42%
2.2	Belanja Langsung						10,16%
2.2.1	Belanja pegawai	14.163.429.156	-	17.322.456.150,00	31.194.106.932,00	32.107.612.224	41,50%
2.2.2	Belanja barang dan jasa	121.943.986.112,09	160.553.752.142,22	149.698.178.110,10	219.524.690.836,48	211.632.801.915	16,99%
2.2.3	Belanja modal	155.712.106.277,00	180.098.060.210,00	217.941.187.120,00	260.705.968.964,00	201.561.437.853	8,40%
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	291.819.521.545,00	340.651.812.352,22	384.961.821.380	511.424.766.732,48	445.301.851.992	12,42%
TOTAL JUMLAH BELANJA		745.528.686.138,00	867.993.508.815,00	993.346.050.056,81	1.146.806.000.882,32	1.109.939.980.976	10,78%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa komponen Belanja Daerah terdiri dari 2 kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar 3.5
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Dairi



Perkembangan proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung selama empat tahun terakhir berfluktuatif dimana pada tahun 2014 belanja langsung sebesar 39,15% dan belanja tidak langsung sebesar 60,85%, kemudian 2015 belanja langsung naik menjadi 39,25% dan belanja tidak langsung sebesar 60,75%, pada tahun 2016 belanja langsung menurun menjadi 38,75% dan belanja tidak langsung naik menjadi 61,25% namun pada tahun 2017 belanja langsung meningkat menjadi 44,60 % dan belanja tidak langsung menurun 55,40. Tetapi pada tahun 2018 belanja langsung menurun menjadi 40,12% sedangkan belanja tidak langsung menjadi 59,88%.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi periode 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Nilai Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rata-rata Pertumbuhan
3.1	Penerimaan Daerah	8.301.894.075,00	75.920.334.604,90	94.272.905.688,37	141.523.424.283,68	121.851.798.620	218,72%
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	8.301.894.075,00	75.920.334.604,90	94.271.905.688,37	141.523.424.283,68	121.851.798.620	218,72%
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
3.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	1.000.000,00	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-	
3.2	Pengeluaran Daerah	3.268.724.888,00	3.268.724.888,22	22.110.023.030,22	6.659.835.060,99	4.843.147.274	119,81%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	20.841.298.142,00	5.971.403.058,00	4.789.077.715	212,73%
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	1.268.724.888,00	1.268.724.888,22	1.268.724.888,22	688.432.002,99	54.069.559	-34,47%
3.2.4	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
Pembiayaan Netto		55.033.169.187,00	72.651.609.716,68	72.162.882.658,15	134.863.589.222,69	117.008.651.346	26,25%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Dari data di atas terlihat bahwa penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Dairi berfluktuatif setiap tahunnya, dimana SiLPA memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Dairi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah memberikan kontribusi terbesar dimana Penyertaan Modal (Investasi) Daerah pada tahun 2016 dan tahun 2017 dalam pengeluaran pembiayaan daerah, disebabkan oleh adanya pemberian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perusahaan Daerah (BUMD) .

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Asset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Asset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Asset Lainnya.

Tabel 3.6
Neraca Daerah Kabupaten Dairi Per 31 Desember 2014-2018 (Rupiah)

No	URAIAN	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.1	ASET LANCAR	2.053.990.936.012,84	155.233.978.728,63	174.864.466.188,54	145.966.994.153,42	136.467.339.577,05	-25,71%
1.1.1	Kas	81.528.805.399,10	96.764.785.590,31	142.878.669.868,68	121.882.229.323,25	88.313.213.502,89	6,03%
	- Kas di Kas Daerah	75.797.482.962,48	94.146.058.375,95	141.397.018.081,68	120.997.016.725,73	87.422.289.856,29	8,06%
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	122.851.642,42	125.847.312,42	126.406.202,00	155.132.300,00	217.200,00	-18,56%
	- Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.328.394.974,36	1.166.149.207,94	56.994.075,00	30.430.703,00	96.051.334,00	15,43%
	- Kas di Bendahara Penerimaan	4.280.075.819,84	90.947.674,00	7.270.612,00	37.688.919,00	270.026.703,00	211,24%
	- Kas di Bendahara dana Bos	-	1.235.783.020,00	1.290.980.898,00	661.960.675,52	524.628.409,60	-21,67%
1.1.2	Piutang	36.631.506.364,84	44.237.702.491,08	17.598.623.480,79	10.014.207.755,59	34.194.130.717,47	39,73%
	- Piutang Pajak Daerah	3.719.117.014,00	4.480.782.932,00	4.981.591.712,00	4.651.267.272,00	5.735.181.044,00	12,08%
	- Piutang Retribusi Daerah	486.189.480,00	3.000.597.406,00	565.291.583,00	68.893.333,00	68.993.333,00	87,08%
	- Piutang Kepada Pihak Ketiga	1.008.981.120,00	-	5.093.482.150,00	6.472.586.000,00	-	27,08%
	- Piutang lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-
	- Piutang Pendapatan bagi Hasil Dari Pemerintah Provinsi	31.294.420.174,48	29.452.040.400,36	4.178.490,00	-	8.984.027.835,30	-
	- Piutang Pendapatan bagi Hasil Dari Pemerintahan Pusat	-	9.114.468.956,00	8.927.692.289,00	541.523.738,00	21.775.301.815,00	1275,04%
	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	105.080.000,00	49.460.000,00	28.500.000,00	-	-47,65%
	- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	122.798.576,36	135.338.648,36	211.913.087,00	790.056.058,00	23.260.000,00	60,64%
	- Penyisihan Piutang	-	(2.050.605.851,64)	(2.234.985.830,21)	(2.538.718.645,41)	478.796.915,10	-32,09%
1.1.3	Persediaan	6.671.927.419,90	14.231.490.647,24	14.387.172.839,07	14.070.557.074,58	13.959.995.356,69	27,85%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	37.972.630.986,86	41.893.062.406,86	60.190.291.189,86	62.071.737.854,86	60.580.742.328,00	13,68%
	- Investasi Non Permanen	-	1.007.403.120,00	-	-	-	-

	- Dana Bergulir	-	1.007.403.120,00	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	-0,03%
	- Peny.dana bergulir	-	(1.007.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	-0,03%
	- Investasi permanen	37.972.630.986,86	40.885.695.286,86	60.190.291.189,86	62.071.737.854,86	60.580.742.328,00	13,90%
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	37.972.630.986,86	40.885.659.286,86	60.190.291.189,86	62.071.737.854,86	60.580.742.328,00	13,90%
1.3	ASET TETAP	1.857.825.367.790,47	1.476.019.490.183,38	1.623.093.873.576,02	1.697.991.031.596,83	1.744.743.237.187,02	-0,80%
	- Tanah	297.842.706.211,00	379.953.590.728,00	380.889.117.580,00	371.179.911.250,61	371.333.923.810,61	6,33%
	- Peralatan dan Mesin	189.579.136.195,24	194.520.917.588,66	226.641.560.939,75	251.448.488.982,23	277.510.657.914,02	10,11%
	- Gedung dan Bangunan	512.018.575.257,45	555.404.378.058,30	606.934.381.413,40	597.129.228.494,70	624.462.795.318,55	5,18%
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	806.592.355.015,01	920.980.693.300,38	1.056.001.283.969,81	1.224.882.574.374,48	1.346.656.189.345,56	13,69%
	- Aset tetap lainnya	51.441.217.685,77	61.775.470.841,11	72.235.302.357,68	76.420.614.838,36	83.980.369.738,45	13,18%
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	351.377.426,00	3.131.357.172,00	9.578.065.923,00	18.949.023.793,00	8.380.446.595,00	259,78%
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(639.746.917.516,07)	(729.185.838.607,62)	(842.018.810.136,55)	(967.581.145.535,17)	14,79%
1.4	ASET LAINNYA	33.360.698.051,67	24.724.782.949,49	4.588.168.514,15	6.541.671.569,97	18.923.897.592,56	31,13%
	- Tagihan Penjualan Angsuran	-	76.720.000,00	-	-	-	-
	- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	266.776.718,67	204.664.986,67	248.424.769,67	73.771.000	79.109.117,85	-16,24%
	- Aset Tak Berwujud	2.026.865.736,00	1.690.365.736,00	1.876.663.736,00	1.876.663.736,00	1.932.091.193,69	-0,66%
	- Amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud	-	(1.015.677.874,40)	(1.281.150.761,60)	(1.529.647.648,80)	(1.789.230.027,54)	20,83%
	- Aset Lain-lain	31.067.055.597,00	23.768.710.101,22	22.559.772.274,51	22.647.167.725,53	39.140.522.057,53	11,16%
	- Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	-	(18.815.541.504,43)	(16.526.283.242,76)	(20.438.594.748,97)	5,75%
	JUMLAH ASET	2.053.990.936.012,84	1.697.871.314.268,36	1.862.736.799.468,57	1.912.571.435.175,08	1.960.715.216.684,63	-0,61%
2	KEWAJIBAN	9.815.631.412,99	8.221.348.741,76	14.198.093.215,06	35.255.460.443,00	9.114.155.499,02	43,54%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	7.804.404.962,88	7.478.847.179,87	14.144.023.656,16	35.255.460.443,00	9.114.155.499,02	40,02%
	- Bagian Lancar Utang Bunga Pinjaman	345.146.800,30	197.859.477,71	49.287.204,84	3.126.271,86	-	-70,47%
	- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.328.394.974,36	1.166.149.207,94	56.994.075,00	30.430.703,00	96.051.334,00	15,43%
	- Utang Kepada Pihak Ketiga	4.862.138.300,00	4.088.108.090,00	13.276.390.273,33	35.062.521.607,24	8.884.964.135,02	74,57%

-	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintahan Pusat	1.268.724.888,22	1.268.724.888,22	688.432.002,99	54.069.558,90	-	-68,94%
-	Pendapatan Diterima Dimuka	-	52.325.730,00	-	-	59.611.250,00	0,00%
-	Hutang Beban	-	705.679.786,00	72.920.100,00	105.312.302,00	73.528.780,00	-18,86%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2.011.226.450,11	742.501.561,89	54.069.558,90	-	-	-77,90%
-	Hutang Jangka Panjang dalam Negeri-Pemerintah Pusat	2.011.226.450,11					
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.815.631.412,99	8.221.348.741,76	14.198.093.215,06	35.255.460.443,00	9.114.155.499,02	32,65%
3	EKUITAS	2.044.175.304.599,85	1.689.649.965.526,60	1.848.538.706.253,51	1.877.315.914.732,08	1.951.601.061.185,61	-0,61%
	EKUITAS	2.044.175.304.599,85	1.689.649.965.526,60	1.848.538.706.253,51	1.877.315.914.732,08	1.951.601.061.185,61	-0,61%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.053.990.936.012.84	1.697.871.314.268,36	1.862.736.799.466,57	1.912.571.435.175,08	1.960.715.216.684,63	-0,61%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan rasio diatas 1 yang artinya kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dairi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel diatas, Rasio Cair Pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2014 sampai dengan 2018 rasio diperoleh lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu antara lain :

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya

menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong kecil, hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel dibawah ini, diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong baik dengan nilai rasio.

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Neraca Kabupaten Dairi

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Lancar(CurrentRatio)	16,00	20,75	12,31	4,14	14,97
2	Rasio Quick(Quick Ratio)	15,14	18,85	11,34	3,74	13,44
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0048	0,0048	0,0076	0,0184	0,0046
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0048	0,0049	0,0077	0,0188	0,0046

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami fluktuasi walaupun cenderung menurun tiap tahunnya jika di lihat dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 58,63 persen, menurun pada tahun 2015 dimana proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 52,29 persen, kemudian menurun lagi menjadi 48,48 persen pada tahun 2016, di tahun 2017 masih mengalami menurun menjadi 39,04 persen, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 43,03 persen (Tabel 3.8). Kedepannya proporsi penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur diharapkan menurun agar proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Dairi

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran)	Persentase
1	2014	439.091.508.127,60	748.797.411.026,09	58,64
2	2015	455.571.044.162,00	871.262.233.702,74	52,29
3	2016	492.294.956.849,00	1.015.456.073.087,03	48,48
4	2017	450.317.422.861,00	1.153.465.835.943,31	39,04
5	2018	479.741.227.070,00	1.114.783.128.249,81	43,03

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah alokasi pendanaan aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
 Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Dairi

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	766.415.851.556,23	889.613.804.786,21	1.062.706.591.682,34	1.133.794.210.279,88	1.080.878.465.095,45
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	745.528.686.137,87	867.993.508.814,52	993.346.050.056,81	1.146.806.000.882,32	1.109.939.980.975,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.268.724.888,22	3.268.724.888,22	22.110.023.030,22	6.659.835.060,99	4.843.147.273,90
	Surplus/(Defisit Riil (Rp.))	17.618.440.530,14	21.620.295.971,69	69.360.541.625,53	(13.011.790.602,44)	(29.061.515.880,46)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Dairi memiliki defisit anggaran pada tahun 2017 dan 2018, sementara itu pada tahun 2014, 2015 dan 2016 mengalami surplus.

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah perolehan SiLPA selama tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	75.920.334.604,90		94.271.905.688,37		141.523.424.283,68		121.851.798.620,25		87.947.135.465,89	
2	Pelampauan penerimaan PAD	(6.097.504.118,77)	-8,03	(15.448.541.012,79)	-16,39	2.158.911.421,71	1,53	4.995.243.316,88	4,10	(24.975.631.322,55)	-28,40
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	13.687.535.585,00	18,03	3.644.715.921,00	3,87	66.218.232.749,00	46,79	(20.268.080.382,00)	-16,63	(11.412.722.133,00)	-12,98
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(3.345.000.000,00)	-4,41	(5.595.927.540,00)	-5,94	(3.081.184.539,00)	-2,18	(127.939.140,00)	-0,10	(1.792.059.572,00)	-2,04
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	85.520.827.428,13	112,65	123.296.540.613,48	130,79	88.963.767.054,19	62,86	137.240.998.602,68	112,63	124.756.618.052,09	141,85
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembiayaan Netto	(13.845.524.289,46)	-18,24	(11.624.882.293,32)	-12,33	(12.736.302.402,22)	-9,00	11.576.222,69	0,01	1.370.930.441,35	1,56

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Dari tabel 3.10 di atas terlihat bahwa selama rentang 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 sebagai tahun rujukan untuk memperoleh gambaran perhitungan anggaran tahun berikutnya, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya dari tahun 2014 - 2017. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pertahunnya. SiLPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro Kabupaten Dairi, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam setahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tabel 3.11
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dairi

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	439.091.508.127,00	455.571.044.162,00	474.972.500.699,00	419.123.315.929,00	447.633.614.846
2.1.2	Belanja bunga	493.171.921,00	345.146.800,30	197.859.477,71	49.287.204,84	3.126.272
2.1.3	Belanja subsidi		-	-	-	
2.1.4	Belanja hibah	2.684.799.700,00	2.735.000.000,00	3.963.600.000,00	21.817.692.116,00	27.700.582.366
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.310.850.000,00	460.000.000,00	-	490.000.000,00	11.728.500.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	-	-	-	1.058.118.000,00	1.500.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	-	65.774.254.500,00	127.490.268.500,00	190.593.720.900,00	176.072.305.500
2.1.8	Belanja tidak terduga	3.704.955.000,00	2.456.251.000,00	1.760.000.000,00	2.249.100.000,00	
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	453.709.164.593,00	527.341.696.462,30	608.384.228.677	635.381.234.149,84	664.638.128.984
2.2	Belanja Langsung		-			
2.2.1	Belanja pegawai	14.163.429.156,00	-	17.322.456.150,00	31.194.106.932,00	211.632.801.915
2.2.2	Belanja barang dan jasa	121.943.986.112,00	160.553.752.142,22	149.698.178.110,10	219.524.690.836,48	201.561.437.853
2.2.3	Belanja modal	155.712.106.277,00	180.098.060.210,00	217.941.187.120,00	260.705.968.964,00	32.107.612.224
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	291.819.521.545,00	340.651.812.352,22	384.961.821.380	511.424.766.732,48	445.301.851.992
3.2	Pengeluaran pembiayaan	3.268.724.888,22	3.268.724.888,22	22.110.023.030,22	6.659.835.060,99	4.843.147.274
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	20.841.298.142,00	5.971.403.058,00	4.789.077.715
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.268.724.888,22	1.268.724.888,22	1.268.724.888,22	688.432.002,99	54.069.559
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah		-	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.268.724.888,22	3.268.724.888,22	22.110.023.030,22	6.659.835.060,99	4.843.147.274
C	TOTAL (A+B+C)	778.216.411.026,22	871.262.233.702,74	1.015.456.073.087,03	1.153.465.835.943,31	1.114.423.128.250

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi (Audited)

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

A. Kebijakan Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2020-2024

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi diperkirakan tumbuh membaik. Pertumbuhan didorong oleh perbaikan struktur ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur, implementasi paket kebijakan, peningkatan konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga didukung inflasi yang terjaga.

Inflasi terjaga dalam level yang rendah didukung perbaikan efisiensi baik dalam distribusi barang dan jasa, perbaikan manajemen stok, dan proses bisnis yang lebih tertata baik. Pengendali inflasi di Kabupaten Dairi di fokuskan pada 4K yaitu kesediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi untuk pengendalian ekspektasi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian inflasi diarahkan baik untuk mengurangi dampak maupun frekuensi dari inflasi komoditas strategis. Inflasi tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dari inflasi saat ini, dengan asumsi permasalahan struktural terkait infrastruktur telah diselesaikan dan proses tata niaga yang semakin efisien.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dairi dan tingkat inflasi pada tahun 2020-2024 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,4%	5,5%	5,6%	5,7%	5,8%
Inflasi (yoy persen ± 1 persen)	2,95 ± 1%	2,90 ± 1%	2,85 ± 1%	2,80 ± 1%	2,75 ± 1%

Sumber: BPS Sumut (data diolah)

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 serta melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2014-2018, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat lebih meningkat dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Pada tahun 2020-2024, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam pembentukan PAD;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- e. Melaksanakan intensifikasi pungutan pajak dan retribusi;
- f. Menyempurnakan dan mengevaluasi dasar hukum pungutan.

Berdasarkan arah kebijakan PAD yang telah dikemukakan di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Dairi 2020-2024 menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian global dan nasional yang lebih baik;
- b. Tingkat inflasi yang diproyeksikan semakin terkendali diangka 3+1 persen;
- c. Proyeksi angka kemiskinan yang semakin menurun yang dibarengi dengan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat;
- d. Realisasi Pendapatan Daerah (PD) berdasarkan rata-rata

kenaikan penerimaan Pendapatan Daerah selama periode 2014-2018 sebesar 9,39%, serta optimalisasi peran Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Dairi dalam melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.13 dibawah ini memperlihatkan bahwa proyeksi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2020-2024 akan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan diproyeksikan sebesar 5 % pertahun.

Tabel 3.13
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
		81.482.279.638	85.556.393.620	89.834.213.301	94.325.923.966	99.042.220.164
1.1.1	Pajak daerah	12.908.380.011	13.553.799.011	14.231.488.962	14.943.063.410	15.690.216.580
1.1.2	Retribusi daerah	8.211.030.082	8.621.581.586	9.052.660.665	9.505.293.698	9.980.558.383
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.331.315.062	15.047.880.815	15.800.274.855	16.590.288.598	17.419.803.028
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	46.031.554.484	48.333.132.208	50.749.788.818	53.287.278.259	55.951.642.172
1.2	Dana Perimbangan					
		866.182.922.114	909.492.068.219	954.966.671.630	1.002.715.005.212	1.052.850.755.472
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	19.840.487.886	20.832.512.281	21.874.137.895	22.967.844.790	24.116.237.029
1.2.2	Dana alokasi umum	675.548.895.105	709.326.339.860	744.792.656.853	782.032.289.696	821.133.904.181
1.2.3	Dana alokasi khusus	170.793.539.122	179.333.216.078	188.299.876.882	197.714.870.726	207.600.614.263
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
		244.003.306.016	256.203.471.317	269.013.644.883	282.464.327.127	296.587.543.483
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.191.668.507.768	1.251.251.933.156	1.313.814.529.814	1.379.505.256.305	1.448.480.519.120

Sumber: Bappeda (data diolah)

Kebijakan peningkatan sumber Pendapatan Daerah diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Provinsi melalui Peraturan Daerah dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa/layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah didukung dengan perbaikan dan pengembangan regulasi daerah serta sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi serta peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei-survei untuk mendapatkan penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;
7. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten /Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
8. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat (bertambahnya insentif ke daerah) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kebijakan Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Penggunaan Belanja Daerah fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan asumsi proyeksi Pendapatan Daerah, maka proyeksi Belanja Daerah tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja dalam pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, namun demikian kebijakan Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan, antara lain untuk :

1. Mendorong pencapaian target indikator makro pembangunan daerah termasuk diantaranya pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Mendukung pencapaian target dan saran visi misi kepala daerah dan mendukung kebijakan prioritas nasional di daerah;
3. Peningkatan pelayanan aparatur daerah.

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	513.817.732.752	523.163.680.885	539.364.086.027	555.514.100.119	575.586.466.648
2.1.2	Belanja bunga	60.422.885	67.401.728	75.186.628	83.870.683	93.557.747
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	26.747.061.475	29.836.347.076	33.282.445.163	37.126.567.579	41.414.686.135
2.1.5	Belanja bantuan sosial	600.707.905	670.089.668	747.485.025	833.819.545	930.125.702
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa *	1.297.183.361	1.447.008.039	1.614.137.468	1.800.570.346	2.008.536.221
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa *	174.941.493.106	194.734.555.184	208.880.239.167	224.328.101.321	237.137.324.693
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.757.249.284	3.075.711.576	3.430.956.263	3.827.231.712	4.269.276.974
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	720.221.850.768	752.994.794.156	787.394.534.814	823.514.261.305	861.439.974.120
2.2	Belanja Langsung		-	-	-	-
2.2.1	Belanja pegawai	42.772.504.707	47.712.729.000	53.223.549.200	59.370.869.132	66.228.204.517
2.2.2	Belanja barang dan jasa	202.123.259.035	204.379.031.323	205.848.803.309	206.381.534.438	205.813.655.712
2.2.3	Belanja modal	291.550.893.258	311.165.378.676	332.347.642.491	355.238.592.430	379.998.684.771
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	536.446.657.000	563.257.139.000	591.419.995.000	620.990.995.000	652.040.545.000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.256.668.507.768	1.316.251.933.156	1.378.814.529.814	1.444.505.256.305	1.513.480.519.120

Sumber: Bappeda (data diolah)

Pada tabel 3.14 di atas, Pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun 2020-2024 diproyeksikan rata-rata pertahun mencapai 11,55 persen. Asumsi selanjutnya dan berdasarkan pengalaman selama periode 2015-2017, terdapat keseimbangan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung, sehingga Belanja Modal terutama untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat memungkinkan dioptimalkan untuk ditingkatkan. Secara nominal kelihatannya masih besar Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan Belanja Langsung, namun masih dalam batas kewajaran. Hal ini disebabkan karena pada komponen belanja Tidak Langsung terdapat Belanja Hibah (BOS) yang merupakan operasional langsung ke sekolah dan sejak tahun 2016 beralih jenis Belanja Hibah dalam komponen Belanja Tidak Langsung.

C. Kebijakan Dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2024

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 serta asumsi-asumsi kebijakan penggunaan anggaran dimasa mendatang.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat ditingkatkan untuk mendorong penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.15
 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
Pengeluaran pembiayaan					
Penyertaan modal (Investasi) daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000

Sumber:Bappeda (data diolah)

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setiap tahun dialokasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- hingga Tahun 2024.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Dairi dalam periode 2020 - 2024 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pendapatan	1.191.668.507.768	1.251.251.933.156	1.313.814.529.814	1.379.505.256.305	1.448.480.519.120
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
Total penerimaan	1.266.668.507.768	1.326.251.933.156	1.388.814.529.814	1.454.505.256.305	1.523.480.519.120
<i>Dikurangi:</i>					
Belanja Tidak Langsung	720.221.850.768	752.994.794.156	787.394.534.814	823.514.261.305	861.439.974.120
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Kapasitas riil kemampuan keuangan	536.446.657.000	563.257.139.000	591.419.995.000	620.990.995.000	652.040.545.000

Sumber : Bappeda (data diolah)

Analisis data di atas adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dari tabel di atas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020 sampai tahun 2024 relatif cukup kecil, meskipun ada penyesuaian belanja terhadap Pendapatan dari tahun 2019 menuju tahun 2020.

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diperlihatkan pada tabel selanjutnya dapat ditentukan kerangka pendanaan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kapasitas riil kemampuan keuangan	536.446.657.000	563.257.139.000	591.419.995.000	620.990.995.000	652.040.545.000
PRIORITAS I	95.789.582.000	100.579.061.000	105.608.014.000	110.888.415.000	116.432.836.000
PRIORITAS II	399.036.108.000	418.976.062.000	439.924.865.000	461.921.108.000	485.017.164.000
PRIORITAS III	41.620.977.000	43.702.016.000	45.887.116.000	48.181.472.000	50.590.546.000

Sumber : Bappeda (data diolah)

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah;
- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan.

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal (*das sein*) dengan kenyataan/realitas (*das sollen*). Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/ MDG's/ Standar Nasional/ target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam bab ini, permasalahan pembangunan yang dirumuskan dari evaluasi indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ MDG's/ Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya).

Harapan ideal yang diinginkan tentunya sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu menaikkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan

Berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 dan hasil analisis serta interpretasi dari data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Dairi adalah “Masih belum meratanya kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Dairi”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok yang dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada Kabupaten Dairi kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak SDM daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk menempuh pendidikan dikarenakan masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan, hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah.

Indikator pendidikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun meskipun begitu secara nilai masih tergolong cukup rendah. Hal ini terlihat pada perbandingan rata-rata lama sekolah se-Provinsi Sumatera Utara dimana rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi yang mencapai 9,15 tahun berada pada posisi 15. Rendahnya capaian pembangunan pendidikan tersebut dipertegas dengan capaian harapan lama sekolah yang hanya

mencapai 13,07 tahun dimana angka tersebut berada pada posisi 14 pada level perbandingan provinsi.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Dairi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur wilayah

Infrasruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang mutlak bagi pengembangan sebuah wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, penataan wilayah perumahan dan permukiman, penanganan sanitasi dan ketersediaan air bersih serta kelengkapan fasilitas publik dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Namun seiring dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan tata ruang wilayah, penataan jaringan infrastruktur belum dapat diwujudkan secara baik. Beberapa penyebab yang menjadi permasalahan strategisnya adalah:

- a) Masih terdapatnya kondisi jalan kabupaten yang rusak, dimana sampai tahun 2018 kondisi jalan mantap masih sebesar 59,33 % dari target 70 %;
- b) Masih terdapatnya kondisi jembatan yang rusak, dimana sampai tahun 2018 kondisi jembatan dalam kondisi baik masih sebesar 83,08 % dari target 89 %;
- c) Belum tersediaya pengolahan air yang cukup untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat, dimana sampai tahun 2018

- capaian tersedianya akses air minum yang bersih sebesar 62,80 % dari target 80 %;
- d) Belum optimalnya penanganan daerah irigasi (DI), dimana sampai tahun 2018 persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 60,13 % dari target 80 %;
 - e) Masih terdapatnya kawasan kumuh, dimana sampai tahun 2018 persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh sebesar 2,06 % dari target 65,20%;

3. Tingginya angka kemiskinan

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,8 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter penduduk miskin di Kabupaten Dairi masih banyak yang dekat dengan garis kemiskinan, sehingga ketika penduduk miskin mengalami peningkatan kesejahteraan disebabkan oleh faktor ekstern pemerintah, persentase penduduk miskin akan mengalami perubahan struktur.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi mencapai 1,77. Angka ini semakin meningkat dibandingkan 2016. Angka ini menunjukkan ada indikasi semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan di Kabupaten Dairi. Demikian juga dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi tahun 2018 mencapai 0,54 yang meningkat 0,35 dibandingkan tahun 2017, berarti ada indikasi semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Dairi.

4. Belum optimalnya pelayanan publik

Pembangunan sektor kependudukan membutuhkan data yang akurat. Karena itu, capaian pelayanan KTP dan Catatan Sipil harus ditingkatkan. Selain untuk memenuhi hak masyarakat juga untuk peningkatan akurasi data kependudukan. Permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus KTP, KK dan Akte Kelahiran dan dokumen pencatatan sipil lainnya, dimana sampai tahun 2018 kondisi persentase kepemilikan dokumen kependudukan masih sebesar 73,45%.

Dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu permasalahan pembangunan yang dihadapi adalah masih rendahnya penerbitan perizinan sesuai dengan SOP, dimana sampai tahun 2018 persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP sebesar 82,39 %, hal ini berimplikasi pada rendahnya peningkatan investasi dimana pada tahun 2018 persentase peningkatan investasi sebesar 3,17%. Dan jika dilihat dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, indeksnya sebesar 77,91 poin, dengan kriteria pelayanan publik yang baik.

5. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Selain tingkat pendidikannya, modal manusia juga ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat bersama-sama menentukan produktivitas masyarakat Kabupaten Dairi. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang berpotensi mendorong meningkatnya derajat kesehatan Kabupaten Dairi. Karena itu, komitmen untuk pengembangan RSUD Sidikalang ini harus direalisasikan dalam kebijakan pengembangannya. Pada sektor kesehatan ini, permasalahan strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, dimana sampai tahun 2018 cakupan ibu hamil dan ibu melahirkan mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar sebesar 71,98 %;

- b) Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup, dimana usia harapan hidup sampai tahun 2018 sebesar 68,11 tahun, dimana hal ini masih berada dibawah usia harapan hidup tingkat Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 68,61 tahun;
- c) Belum optimalnya penanganan kesehatan balita, dimana sampai tahun 2018 cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 68,62 %;
- d) Belum optimalnya penanganan kesehatan lansia, dimana sampai tahun 2018 cakupan usia 60 tahun keatas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar sebesar 16,48 %;
- e) Masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita, dimana sampai tahun 2018 prevalensi gizi buruk sebesar 0,12 % dan prevalensi balita gizi kurang sebesar 1,47%;
- f) Masih rendahnya pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (atau paradigma sehat) di masyarakat, dimana sampai tahun 2018 cakupan keluarga mempunyai akses/ menggunakan jamban sehat sebesar 80,25%;
- g) Masih kurangnya sarana dan prasarana medis dan non medis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Sidikalang, dimana sampai tahun 2018 akreditasi RSUD Sidikalang masih kreteria Dasar.

6. Rendahnya kualitas lingkungan hidup

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian, dimana sampai tahun 2018 penanganan lahan kritis masih sebesar 8,75 ha. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada, dimana sampai tahun 2018 cakupan pelayanan sampah di kecamatan masih sebesar 40 %.

Kabupaten Dairi juga berpotensi di landa berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Tabel 4.1
Permasalahan Pokok Pembangunan di Kabupaten Dairi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketimpangan		
1.1.	Kualitas Pendidikan	a. Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf. b. Kualitas sekolah menengah pertama swasta yang harus ditingkatkan untuk sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Dairi. c. Kompetensi tenaga pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar relatif rendah. d. Penyebaran mutu	a. Tidak meratanya akses pendidikan dan distribusi guru. b. Kurangnya ekonomi keluarga peserta didik.

		pendidikan yang tidak sama di wilayah kecamatan. e. Prestasi pendidikan pada tingkat nasional yang masih harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. f. Lingkungan sekolah rawan dengan kenakalan remaja, kriminalitas dan narkoba. g. Masih terdapatnya anak usia 4-6 tahun yang tidak mengikuti PAUD. h. Masih terdapatnya anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar. i. Masih terdapatnya siswa Pendidikan Dasar yang tidak lulus SD dan SMP. j. Masih terdapatnya siswa Pendidikan Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. k. Masih terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP dalam kondisi buruk.	
1.2	Infrastruktur Wilayah	a. Masih terdapatnya kondisi jalan kabupaten yang rusak. b. Masih terdapatnya kondisi jembatan yang rusak. c. Belum tersediaya pengolahan air yang cukup untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat. d. Belum optimalnya pengawasan terhadap pembangunan gedung. e. Belum optimalnya penanganan daerah	a. Sumber Daya Manusia b. Kemampuan Anggaran

		irigasi (DI). f. Belum optimalnya penanganan daerah irigasi (DI). g. Perlunya pengembangan Data base jalan/jembatan infrastruktur dasar. h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peyediaaan dan penataan perumahan. i. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman. j. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehat perumahan.	
1.3	Kemisikinan	a. Populasi keluarga miskin masih cukup besar, sementara penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai. b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial. c. Munculnya kecenderungan masyarakat tidak mandiri (tergantung). d. Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. e. Masih tingginya angka pengangguran. f. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. g. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja.	Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, upah yang rendah dan lemahnya sumber daya manusia.

		h. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja. i. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan. j. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan.	
1.4	Pelayanan Publik	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus KTP, KK dan Akte Kelahiran dan dokumen pencatatan sipil lainnya. b. Masih belum dipakainya data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan terkait dengan kependudukan. c. Belum optimalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pembudayaan Keluarga Berencana. d. Masih rendahnya cakupan pelayanan Keluarga Berencana. e. Belum optimalnya cakupan pelayanan penyediaan data mikro Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1. f. Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian remaja untuk peduli tentang kesehatan reproduksi.	a. Sumber daya manusia
1.5	Kesehatan	a. Belum optimalnya penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan. b. Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup. c. Belum optimalnya	a. Sumber daya manusia b. Pelayanan tenaga medis c. Sarana dan Prasarana kesehatan

		penanganan kesahatan balita. d. Belum optimalnya penanganan kesehatan lansia. e. Masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita. f. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat. g. Belum optimalnya penanganan peyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi mewabah. h. Masih rendahnya pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (atau paradigma sehat) di masyarakat. i. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses air minum dan air bersih. j. Masih kurangnya sarana dan prasarana medis dan non medis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Sidikalang. k. Masih belum optimalnya penyelenggaraan PROTAP pelayanan medis. l. Masih belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis di RSUD Sidikalang.	
1.6	Kualitas Lingkungan Hidup	a. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. b. Berkurangnya sumber-sumber air. c. Adanya lahan kritis.	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi belum tercapai (<)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tercapai (=)		
		Melampaui (>)		
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				
1	Pendidikan			
1.1	Angka Partisipatif Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	>	a. Masih terdapatnya anak usia 4-6 tahun yang tidak mengikuti PAUD;	a. Jangkauan Kewilayahan
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	>	b. Masih terdapatnya anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar;	b. Perencanaan kebutuhan guru antar wilayah
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	<	c. Masih terdapatnya siswa Pendidikan Dasar yang tidak lulus SD dan SMP;	c. Akses ekonomi keluarga
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	>	d. Masih terdapatnya siswa Pendidikan Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;	d. Standarisasi guru dan sekolah
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	<	e. Masih terdapatnya sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP dalam kondisi buruk;	
1.6	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	>	f. Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf	
1.7	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	>	g. Kualitas sekolah menengah pertama swasta yang harus ditingkatkan untuk sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Dairi.	
1.8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	>	h. Kompetensi tenaga pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar relatif rendah.	
1.9	Angka Putus Sekolah SD/MI	<	i. Penyebaran mutu pendidikan yang tidak sama di	
1.10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	<		
1.11	Angka Kelulusan SD/MI	=		
1.12	Angka Kelulusan SMP/MTs	=		
1.13	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	=		
1.14	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	>		
1.15	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	>		

1.16	Persentase Guru TK Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	>	j. Prestasi pendidikan pada tingkat nasional yang masih harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. k. Lingkungan sekolah rawan dengan kenakalan remaja, kriminalitas dan narkoba.	
1.17	Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	>		
1.18	Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	<		
1.19	Persentase Guru TK Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	<		
1.20	Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	<		
1.21	Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	<		
1.22	Angka Melek Huruf Usia 15 s/d 44 tahun	>		
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi	>	a. Belum optimalnya penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan; b. Belum optimalnya peningkatan usia harapan hidup ; c. Belum optimalnya penanganan kesehatan balita; d. Belum optimalnya penanganan kesehatan lansia; e. Masih ditemukannya masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita; f. Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat g. Belum optimalnya penanganan penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi mewabah; h. Masih rendahnya pembudayaan pola hidup bersih dan sehat (atau paradigma sehat) di masyarakat. i. Jumlah penyakit tidak menular semakin meningkat. j. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akses air minum dan air bersih.	a. Rasio tenaga kesehatan b. Wilayah jangkauan pelayanan c. Kemampuan Akses Ekonomi Keluarga
2.2	Angka Kematian Ibu	>		
2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	>		
2.4	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	>		
2.5	Usia Harapan Hidup	=		
2.6	Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	>		
2.7	Cakupan Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	<		
2.8	Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	>		
2.9	Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<		
2.10	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	>		
2.11	Prevalensi Gizi Buruk	<		

2.12	Prevalensi Balita Gizi Kurang	>	k. Masih kurangnya sarana dan prasarana medis dan non medis untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Sidikalang. 1. Masih belum optimalnya penyelenggaraan PROTAP pelayanan medis. m. Masih belum optimalnya kompetensi tenaga medis dan non medis di RSUD Sidikalang.	
2.13	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	>		
2.14	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<		
2.15	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	>		
2.16	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<		
2.17	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	>		
2.18	Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta	=		
2.19	Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji	=		
2.20	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	<		
2.21	Persentase TTU/TPM Yang memenuhi Syarat kesehatan	<		
2.22	Cakupan Keluarga Mempunyai Akses / Menggunakan Jamban Sehat	>		
2.23	Cakupan Keluarga Menjadi Anggota JKN	<		
2.24	Persentase Industri Rumah Tangga Yang Memiliki Izin PIRT	<		
2.25	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	>		
2.26	BOR (<i>Bad Occupacy Rate</i>)	=		
2.27	AVLOS (<i>Average Length Of Stay</i>)	<		
2.28	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	=		
2.29	GDR (<i>Gross Date Rate</i>)	<		
2.30	NDR (<i>Net Date Rate</i>)	<		
2.31	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	<		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	<	a. Masih terdapatnya kondisi jalan kabupaten yang rusak; b. Masih terdapatnya kondisi jembatan yang	a. Pengelolaan alokasi dana pembangunan jalan;
3.2	Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	<		b. Pengawasan Mutu

3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang bersih	<	rusak; c. Belum tersedia pengolahan air yang cukup untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat; d. Belum optimalnya pengawasan terhadap pembangunan gedung; e. Belum optimalnya penanganan daerah irigasi (DI); f. Semakin tingginya potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang yang telah ditetapkan. g. Perlunya pengembangan Data base jalan/jembatan infrastruktur dasar.	Pelaksanaan Pembangunan
3.4	Capaian Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB	=		
3.5	Persentase Luas Irigasi Dalam Keadaan Baik	<		
3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	<		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	>	a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peyediaaan dan penataan perumahan; b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman; c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehat perumahan;	a. Dukungan/Fasilitasi Pemerintah dalam menjalankan kewenangan Penyediaan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah. d. Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan MBR e. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman. f. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	<		
4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	>		

				melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU: tingkat kemampuan menengah
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<	a. Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di Daerah.	a. Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan bencana dan peringatan dini;
5.2	Jumlah tokoh agama/adat/ masyarakat yang mengikuti kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	>	b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.	b. Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan terutama di wilayah rawan bencana;
5.3	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik	<	c. Belum optimalnya cakupan pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	c. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat
5.4	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	<	d. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya	d. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika; e. Meningkatnya koordinasi antar instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan;
6	Sosial			
6.1	Tingkat Kemiskinan	<	a. Ketersediaan data PMKS masih belum baik	a. Peningkatan penanganan bencana sosial dan PMKS;
6.2	PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	<	b. Populasi keluarga miskin masih cukup besar, sementara penanganan penanggulangan kemiskinan masih belum memadai.	b. Sinergitas antar lembaga terkait dalam penanggulang an bencana;
6.3	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial	<	c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial. d. Munculnya	

6.4	Presentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	>	e. Masih belum sinergisnya upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.	
6.5	Terbentuknya desa tangguh bencana	<		
6.6	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana	=		
6.7	Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana	<		
Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1	Pencari kerja yang ditempatkan	<	a. Masih tingginya angka pengangguran.	a. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing;
1.2	Besaran pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi/masyarakat at/ teknologi tepat guna/kewirausahaan	>	b. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.	b. Peningkatan tenaga kerja yang mandiri;
1.3	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	<	c. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja.	c. Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja;
1.4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<	d. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mencari kerja.	d. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja;
1.5	Tingkat pengangguran terbuka	<	e. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan.	
1.6	Jumlah angkatan kerja	<	f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan pelatihan dan bantuan yang diberikan.	
			g. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis dasar tentang ketenagakerjaan (mediator, pengawas, perencana dan fasilitator).	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Anak			
2.1	Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan	=	a. Kurangnya penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak.	a. Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2.2	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mendapat Pelayanan Komprehensif	>	b. Belum meratanya pemahaman tentang KDRT dan Human trafficking.	b. Peningkatan pengimplemen tasian PPRG;
			c. Masih rendahnya peran tokoh	

			masyarakat dan tokoh agama dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak. d. Belum optimalnya perkembangan organisasi perempuan. e. Masih rendahnya peran partisipasi anak dalam forum anak. f. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. g) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa.	c. Peningkatan penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu berbasis gender dan anak; d. Pemahaman masyarakat pada undang-undang terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
3	Pangan			
3.1	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100)	<	a. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan.	a. Ketersediaan pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas;
3.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	>	b. Masih belum optimalnya penganekaragaman pangan.	b. Peningkatan penyuluhan pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;
3.3	Persentasen Konsumsi Protein Per kapita	>		c. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian; d. Pengoptimalan pemanfaatan lahan perkarangan; e. Peningkatan sistem jaringan irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air;
4	Lingkungan Hidup			
4.1	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani	<	a. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian	a. Penanaman bibit tanaman teduh dan tanaman hias

4.2	Persentase Cakupan Pelayanan Sampah di Kecamatan	<	b. lingkungan hidup. Berkurangnya sumber-sumber air. c. Adanya lahan kritis.	b. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup;
4.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	=	d. Masih rendahnya cakupan pengendalian pencemaran udara.	c. Peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup;
4.4	Penurunan Luas Lahan Kritis	<	e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan drainase wilayah perkotaan. f. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan persampahan. g. Minimnya pemahaman aparaturnya tentang mekanisme kerja di bidang kebersihan dan pasar. h. Belum tertatanya dengan baik tempat berjualan dipasar. i. Belum optimalnya cakupan pelayanan Rasio Ketersediaan Petugas Kebersihan. j. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah. k. Masih kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu 3R.	d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan minimal 30 %
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
5.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	>	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus KTP, KK dan Akte Kelahiran dan dokumen pencatatan sipil lainnya. b. Masih belum dipakainya data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan terkait dengan kependudukan.	a. Sosialisasi pentingnya tertibnya administrasi kebutuhan data pribadi masyarakat; b. Peningkatan sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
6.1	Peningkatan klasifikasi desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya	<	a. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama-sama.	a. Peningkatan fungsi Lembaga Desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenang;
6.2	Terfasilitasi dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	<		b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

			b. Meningkatnya ketergantungan masyarakat pada bantuan dari pemerintah daerah. c. Masih belum optimalnya peran kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kompetensinya yang tidak merata. d. Masih rendahnya inovasi TTG.	c. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa; d. Peningkatan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa;
7	Pengendalian Penduduk dan KB			
7.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	>	a. Belum optimalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kebudayaan Keluarga Berencana b. Masih rendahnya cakupan pelayanan Keluarga Berencana. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan penyediaan data mikro Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 d. Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian remaja untuk peduli tentang kesehatan reproduksi.	a. Penguatan program keluarga berencana b. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan/ GDPK Kabupaten c. Pengembangan Kampung KB
7.2	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need)	<		
7.3	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	<		
7.4	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun	<		
7.5	Cakupan anggota bina balita (BKB) ber KB	<		
7.6	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	<		
7.7	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan	=		
8	Perhubungan			
8.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	=	a. Masih banyaknya ruas jalan yang belum mempunyai trayek. b. Terminal belum berfungsi secara optimal. c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal berlalu lintas. d. Manajemen Lalu Lintas yang belum optimal. e. Masih rendahnya fasilitas kelengkapan jalan. f. Belum optimalnya pemanfaatan dermaga pelabuhan Silalahi.	a. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata b. Pengontrolan sistem pelayanan angkutan umum dan barang c. Pembangunan sarana dan prasarana d. Kawasan terminal penumpang

9	Komunikasi dan Informatika			
9.1	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	<	a. Belum optimalnya pelayanan Website Milik Pemerintah Daerah. b. Belum optimalnya cakupan pelayanan Telekomunikasi. c. Belum optimalnya koordinasi penyampaian informasi pembangunan dari tiap urusan atau sektoral. d. Masih terbatasnya sumberdaya yang memahami dan menangani aspek komunikasi dan informasi dalam pelembagaan akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya aplikasi e-Government yang terintegrasi
10	Koperasi dan UKM			
10.1	Jumlah Koperasi Aktif	>	a. Masih rendahnya keterkaitan usaha (kemitraan) koperasi dengan usaha lainnya.	a. Fasilitasi Akses Permodalan UMKM
10.2	Jumlah Usaha Mikro	>	b. Masih rendahnya animo masyarakat untuk ikut dalam Koperasi. c. Belum optimalnya pengendalian koperasi yang tidak sesuai dengan aturannya. d. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar). e. Masih rendahnya kemampuan kewirausahaan masyarakat. f. Masih rendahnya daya saing produk UMKM. g. Belum optimalnya kerjasama usaha (kemitraan), baik <i>backward linkages</i> maupun <i>forward linkages</i>.	b. Pelatihan Sosial Marketing dan Pemanfaatan Teknologi Informasi c. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM d. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha

11	Penanaman Modal			
11.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	<	a. Belum terjaminnya jaringan internet dalam pengoperasian aplikasi perizinan secara elektronik terintegrasi (OSS).	a. Peningkatan Standar Pelayanan Adm. atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif
11.2	Persentase peningkatan investasi	>		b. Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi
11.3	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	<	b. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal. c. Masih rendahnya cakupan pelayanan informasi peluang investasi. d. Belum optimalnya daya serap tenaga kerja dari realisasi penanaman modal.	c. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi d. Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur e. Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik, lengkap dan mudah diakses
12	Kepemudaan dan Olah Raga			
12.1	Terfasilitasinya pelayanan kepemudaan	=	a. Belum optimalnya pembinaan atlet untuk semua cabang olah raga	a. Peningkatan pembinaan ketenagaolahr
12.2	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	<	b. Belum optimalnya penyediaan fasilitas olah raga.	b. Sinkronisasi antara Pemerintah Atlet, Organisasi Olahraga dalam hal informasi event-event olahraga
12.3	Terselenggaranya kompetisi olah raga	=	c. Kurangnya ruang ekspresi pemuda. d. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga.	c. Fasilitasi kepada atlet dalam hal meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri
12.4	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	=	e. Masih belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan pemuda tangguh.	d. Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi e. Meningkatkan komitmen organisasi

				kepemudaan dalam melaksanakan UU No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
13	Statistik			
13.1	Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah	<	a. Belum optimalnya konsolidasi data kinerja sektoral di tingkat Perangkat Daerah.	Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan SDM di bidang Statistik
			b. Rendahnya kapasitas SDM dalam analisis Statistika.	
14	Kebudayaan			
14.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	=	a. Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pembangunan sektor kebudayaan.	a.Identifikasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Benda, Cagar Budaya dan Situs Budaya agar kelestariannya bisa terpelihara b.Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah
14.2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	=	b. Masih rendahnya koordinasi pembangunan sektor kebudayaan.	
14.3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	=	c. Belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan. d. Belum optimalnya pengadaan dan pelayanan sanggar dan arena tempat kegiatan kebudayaan. e. Belum optimalnya penggalian peran nilai dan prinsip agama dalam pembangunan sektor kebudayaan.	
15	Perpustakaan			
15.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	<	a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pelayanan perpustakaan daerah dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan. b. Masih rendahnya minat baca masyarakat. c. Masih kurangnya jumlah dan jenis buku yang terkait dengan pengembangan kelompok usaha mikro dan kecil serta buku-buku lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas	a.Penambahan koleksi buku secara rutin terutama buku-buku best seller yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan perpustakaan b.Mengubah pola pikir masyarakat tentang perpustakaan melalui promosi-promosi yang kreatif secara berkelanjutan

			masyarakat. d. Masih belum optimalnya penjangkauan pelayanan perpustakaan daerah ke masyarakat umum, pelajar dan khususnya kelompok masyarakat binaan. e. Belum optimalnya pemanfaatan IT di perpustakaan.	
16	Arsip			
16.1	Jumlah Arsip Yang Dilestarikan	<	a. Masih terbatasnya sumberdaya aparatur di bidang kearsipan sehingga kearsipan belum diselenggarakan secara profesional. b. Belum optimalnya penghimpunan arsip dan naskah kuno. c. Belum terbangunannya sistem layanan dan informasi arsip daerah.	a. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan b. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip
Urusan Pilihan				
1	Pariwisata			
1.1	Jumlah Objek Wisata Yang berkembang Yang Ditangani	=	a. Minimnya event pariwisata. b. Belum memadainya infrastruktur di objek wisata yang sudah ada. c. Masih terdapat objek wisata yang belum dikelola. d. Minimnya usaha di bidang pariwisata.	a. Peningkatan penataan objek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan b. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata dengan melibatkan masyarakat swasta dan pemerintahan c. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan disekitar lokasi wisata d. Peningkatan sarana Promosi (pembuatan brosur), event dan pameran yang berguna mengundang wisatawan
1.2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	>		

				baik lokal dan mancanegara
2	Pertanian			
2.1	Produktivitas Tanaman Pangan			
	- Padi Sawah	<	a. Masih terdapat ancaman alih fungsi lahan. b. Masih minimnya sarana dan prasarana produksi pertanian. c. Ancaman dampak perubahan Iklim (Serangan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan) d. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen. e. Masih Minimnya Jumlah penangkar benih	a. Penguatan peran kelembagaan Pertanian b. Pelatihan bimbingan bidang Pertanian/Perkebunan dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui teknologi yang sesuai c. Peningkatan pembangunan infrastruktur/ jalan daerah Produksi Perkebunan d. Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi yang melayani sentra-sentra Produksi Pertanian demi meningkatkan kualitas dan kuantitas Produksi Pertanian e. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian guna menciptakan benih unggul menuju kualitas dan produktifitas hasil pertanian yang tinggi
	- Padi Ladang	>		
	- Jagung	<		
2.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura			
	- Jeruk Manis	>		
	- Kentang	>		
	- Cabe merah	>		
	- Durian	>		
2.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat			
	- Kopi	=		
2.4	Jumlah Populasi Peternakan		a. Masih belum terkoordinasikannya pengendalian penyakit hewan ternak. b. Masih rendahnya kompetensi SDM kelompok peternak di masyarakat. c. Masih belum	
	- Babi	>		
	- Ayam	>		
2.5	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/			

	Ternak		optimalnya cakupan pelayanan pengendalian area pengembangan ternak.	
	- Sapi	<		
	- Kerbau	>		
	- Babi	>		
	- Kambing	>		
	- Ayam	>		
	- Anjing	>		
2.6	Jumlah Pemotongan Hewan Ternak di RPH Sidikalang			
	- Ternak Besar	>		
	- Ternak Kecil	>		
2.7	Jumlah Kelompok Tani Yang Terfasilitasi	>		
2.8	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	<		
3	Perdagangan			
3.1	Tersediannya dokumen Informasi Harga Dan Ketersediaan Barang Pokok (33 jenis)	=	a. Belum optimalnya kerjasama antara pasar berjejaring dengan kelompok binaan pemerintah daerah. b. Belum optimalnya cakupan pelayanan bina kelompok pedagang/usaha informal. c. Penggunaan alat UTTP yang belum memenuhi standar kemetrolagian. d. Belum adanya neraca perdagangan di Kabupaten. e. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi harga, komoditas dan jenis produk. f. Masih perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pasar. g. Masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyarakat.	a. Peningkatan kualitas Produk unggulan daerah b. Mengoptimalkan akses dan distribusi
3.2	Jumlah Produk bidang agribisnis Yang Dipromosikan	=		
3.3	Jumlah Alat UTTP Yang Ditera/Teraulang	<		
4	Perindustrian			
4.1	Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis	=	a. Kurangnya daya saing pemasaran produk IKM. b. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pelaku IKM untuk menciptakan produk yang berkualitas. c. Belum optimalnya cakupan pelayanan pengembangan industri/perusahaan	a. Regulasi b. Memperkuat riset dan inovasi c. Persediaan bahan baku untuk mempelancar proses produksi d. Pelaksanaan produksi harus disertai
4.2	Jumlah Produk IKM bidang agribisnis Yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi	<		

			d. Masih rendahnya kemitraan usaha industri/ perusahaan	dengan pengendalian produksi.		
5	Perikanan					
5.1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		a. Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha budidaya ikan. b. Masih rendahnya produktifitas usaha perikanan karena pengelolaan yang belum optimal atau masih secara tradisional. c. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pengembangan perikanan. d. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan usaha, iklim usaha, dan investasi. e. Masih rendahnya daya saing produk perikanan.	a. Kesiambungan sumber daya ikan b. Ketersediaan sarana dan parasarana yang memadai c. Pengembangan atau inovasi penerapan teknologi kelauatan dan perikanan secara pasif dan efektif d. SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten e. Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik f. Dukungan investasi dari para pelaku usaha g. Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha Perikanan		
	- Ikan Gabus	<				
	- Ikan Mujair	<				
	- Ikan Nila	<				
	- Ikan Bilih	<				
	- Ikan Mas	<				
	- Ikan Lainnya	<				
5.2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya					
	- Ikan Nila	<				
	- Ikan Mas	>				
	- Ikan Lele	<				
Urusan Penunjang						
1	Perencanaan					
1.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	<	a. Belum meratanya kemampuan teknis aparatur perencana Perangkat Daerah. b. Kurangnya dokumen pendukung dalam menunjang perencanaan pembangunan. c. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet. d. Masih belum optimalnya prosedur perencanaan	Optimalisasi E-Planning		
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan	=				
1.3	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan	<				
1.4	Terbangun dan Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	=				
1.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	=				

			pembangunan sehingga penyelesaian dokumen perencanaan masih sering terlambat. e. Belum optimalnya tugas-tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang perencanaan pembangunan. f. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi pembangunan	
2	Keuangan			
2.1	Opini laporan keuangan	=	a. Belum optimalnya penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan pajak dan retribusi daerah. b. Masih belum optimalnya upaya penggalan PAD, seperti pengelolaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan dengan :
2.2	Penyusunan APBD tepat waktu	=	c. Masih rendahnya kapasitas SDM di perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.	a. Peningkatan kapasitas SDM otoritas pajak.
2.3	LKPD Tepat Waktu	=	d. Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah.	b. Kerjasama pertukaran data dan informasi perpajakan dengan pemerintah pusat maupun institusi lainnya.
2.4	Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam KUA/PPAS	=	e. Masih rendahnya koordinasi pemberian bantuan hibah sebagai bagian dari investasi sosial.	c. Peningkatan tarif pajak dan retribusi daerah
2.5	Persentase tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	<		d. Penggunaan teknologi informasi dalam pajak.
2.6	Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah	<		e. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan.
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	=	a. Masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi di bidangnya. b. Masih terdapat ASN jabatan pelaksana yang berpendidikan dibawah SMA/SMK.	Peningkatan aktualisasi prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>
3.2	Jumlah Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Diklat Kepemimpinan	<	c. Belum optimalnya	

3.3	Jumlah Guru Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG)	<	upaya pembinaan profesionalisme aparatur di tingkat perangkat daerah. d. Belum optimalnya cakupan pelayanan pembinaan purnabhakti PNS.	
3.4	Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	<		
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	<	a. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan. b. Belum optimalnya penerapan IPTEK bagi masyarakat. c. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam mendukung kinerja kelitbangan. d) Belum optimalnya inovasi daerah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian
5	Pengawasan			
5.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	=	a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas APIP. b. Masih adanya hasil temuan pemeriksaan oleh aparat pengawasan inter (APIP)	
5.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	<		
6	Sekretariat Daerah			
6.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<	a. Belum optimalnya penilaian LAKIP perangkat Daerah. b. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan SOP, SP, IKM dan SPM. c. Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP. d. Belum adanya data tentang potensi wilayah yang tepat syarat. e. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih dan penambahan pelanggan PDAM. f. Belum optimalnya kontribusi PD Pasar terhadap PAD. g. Belum optimalnya pencapaian indikator urusan di daerah.	
6.2	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah	=		
6.3	Rekomendasi LKPJ	=		
6.4	Nilai LPPD	=		
6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	>		
6.6	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelengkan Secara Elektronik	=		
6.7	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan	=		
6.8	Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi	=		
6.9	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	=		
6.10	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan PDAM Tirta	<		

6.10	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan PDAM Tirta Nciho Menurut Wilayah Teknis	<	h. Masih belum optimalnya pengadaan barang dan jasa.	
6.11	Persentase Kios Yang Dikelola PD Pasar yang Ditempati Pedagang	<	i. Belum optimalnya pelayanan informasi publik. Belum optimalnya pelayanan produk hukum daerah.	
6.12	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	=		
7	Sekretariat DPRD			
7.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	=	Belum optimalnya fasilitasi persidangan di DPRD	

4.2. Isu-Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan isu strategis terlebih dahulu perlu diidentifikasi isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Isu Global/ Internasional

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan akan sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang. Dinamika ekonomi global yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global namun disertai dengan perekonomian Tiongkok dan India yang masih

melambat. Namun, kebijakan pengurangan pajak di Amerika Serikat telah memberikan dampak berupa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang cukup baik di tahun 2017 yakni tumbuh mencapai 2,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global juga tumbuh mencapai 3,7 persen pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga kisaran 3,9 persen pada tahun 2019. Capaian ini lebih optimis dibandingkan prediksi sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Ekspansi ekonomi global tahun 2017 dan 2018 diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan menjadi penopang utama laju pertumbuhan global di tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik tahun 2017 dan 2018 ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami perbaikan setelah sempat turun dari 5,0 persen tahun 2013 menjadi 4,0 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi negara berkembang meningkat menjadi 4,3 persen. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang kembali meningkat pada tahun 2017 yang tumbuh mencapai 4,7 persen. IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan kelompok negara ini akan terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 5,0 persen.

Gelombang pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik juga didorong oleh semakin membaiknya ekonomi negara maju. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 1,7 persen dan pada tahun 2017 menjadi 2,3 persen. Membaiknya perekonomian negara Eropa yang tumbuh sebesar 2,4 persen pada tahun 2017 dan ekonomi Amerika Serikat yang juga tumbuh sebesar 2,3 persen mendorong perekonomian global semakin baik. Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan terus berlanjut di tahun 2018 dimana pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 2,3 persen. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh sebesar 2,7 persen di tahun 2018 lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sekitar 2,2 persen.

Membaiknya ekonomi AS didukung oleh cukup kuatnya sektor ketenagakerjaan serta meningkatnya pendapatan dan belanja masyarakat sebagai akibat meningkatnya investasi perusahaan korporat sebagai dampak penurunan pajak korporasi. Kebijakan moneter yang akomodatif secara gradual diperkirakan terus dilakukan oleh Bank Sentral AS dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi AS di tengah situasi ekonomi dunia yang masih terus dibayangi risiko ketidakpastian.

Isu-isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Dairi adalah

- 1) Moderasi pertumbuhan (*rebalancing*) pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini akan mengalami pertumbuhan yang tidak begitu tinggi bahkan cenderung sedikit melambat.
- 2) Meningkatnya harga minyak dunia mendorong kenaikan harga barang atau inflasi di dalam negeri. Jika harga minyak terus meningkat maka akan dapat mempengaruhi biaya produksi pelaku usaha dan kemudian akan berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi.
- 3) Masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2018 disebabkan adanya reformasi pajak yang dilakukan Amerika Serikat dengan memangkas pajak perusahaan. Dengan demikian akan terjadi penarikan uang dari luar negeri untuk balik ke Amerika Serikat. Dampaknya mata uang Dollar Amerika Serikat akan semakin menguat dan utang Indonesia bisa melonjak. Melonjaknya nilai tukar Rupiah yang sempat menembus Rp15.000 per US Dollar dapat berdampak terhadap kenaikan impor bahan baku/penolong, dan barang modal yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi di tanah air.
- 4) Risiko geopolitik jadi tantangan ekonomi, terutama berasal dari Korea Utara, Timur Tengah, dan Amerika Serikat.
- 5) Rencana lanjutan kenaikan *Fed Fund Rate* dan normalisasi

neraca bank sentral Amerika Serikat. Dengan demikian, aliran dana masuk ke dalam negeri Amerika Serikat akan semakin meningkat dan dapat mengancam cadangan devisa Indonesia. *The Fed* akan mendorong kenaikan bunga tiga sampai empat kali bunga acuan, seiring pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). Jika ini terjadi, ada potensi rupiah terpapar dengan kenaikan bunga acuan. Dalam pasar keuangan Indonesia, penguasaan dana investor asing dikisaran Rp. 830,3 triliun yang dapat sewaktu-waktu keluar untuk mengejar rente yang lebih menarik. Dampaknya akan mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah

4.2.1.2 Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ketika teknologi informasi begitu digdaya berevolusi dan era digitalisasi menjadi anak kandungnya, dunia bergejolak dengan kecepatan luar biasa, ditandai dengan adanya VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). *Volatility* (penuh gejolak) berarti kondisi dimana terjadi perubahan dinamika yang sangat cepat dan volume yang besar dalam berbagai hal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak dapat diprediksi arahnya. *Uncertainty* (ketidakpastian) berarti kondisi yang tidak jelas dan masa depan yang tidak dapat diprediksi, bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. *Complexity* (bersifat kompleks) berarti kondisi dimana banyak sekali faktor yang mempengaruhi, tumpang tindih dan disertai beragam penyebab serta kemungkinan yang terjadi dan bermakna adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. *Ambiguity* (ketidakjelasan) didefinisikan hubungan sebab akibat yang jelas dan tidak ada pertanda sebelumnya, bermakna sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau suatu kondisi yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

Untuk menghadapi VUCA, sebuah organisasi termasuk Pemerintah Daerah harus berjuang untuk tetap bertahan dan selaras dalam sifat VUCA tersebut karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber daya manusia. Kesiapan dalam menghadapi

VUCA itu menjadi beban dan perhatian dari keseluruhan *stakeholders* pembangunan daerah, dengan melakukan banyak hal penting yang boleh jadi selama ini diabaikan. Pemerintah Kabupaten Dairi harus mampu memfokuskan pemikiran dan tindakan pada tujuan dan sasaran yang berdaya hasil tinggi (*focus*), banyak mendengar (*listen*), men-*challenge* setiap ide, berani keluar dari zona nyaman, berani merubah dan dengan cepat beradaptasi membangun keterlibatan yang luas (*involve*), tidak saja bagi organisasi Pemerintah Kabupaten Dairi, tetapi juga pada *stakeholder* secara personal bahkan massal (*personalize*).

4.2.1.3 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara diseluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang. Tujuan dalam SDG's sebagai berikut:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
- 2) Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
- 3) Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- 8) Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
- 10) Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
- 11) Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- 15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 16) Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas dapat dikelompokkan dalam empat dimensi (pilar), yakni: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Pilar pembangunan sosial yang menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Upaya pencapaian SDG's di pilar ekonomi yakni: meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh dengan membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.

Upaya pencapaian SDG's pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain: mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumberdaya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, upaya mencapai tujuan SDG's antara lain: memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

Untuk memastikan prinsip berkelanjutan (*sustainable*) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Analisis pencapaian terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dilakukan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yang memunculkan isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut:

I. Identifikasi Isu Strategis berdasarkan Pencapaian TPB.

A. Isu Strategis Dimensi Sosial.

Dimensi Sosial berdasarkan TPB memiliki 5 tujuan dengan 144 indikator. TPB Dimensi Sosial di Kabupaten Dairi terdiri dari 5 (lima) tujuan, yaitu tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan 66 indikator atau sekitar 45,83% dari jumlah indikator TPB. Ketercapaian Kabupaten Dairi dari 66 indikator TPB; sejumlah 26 Tercapai, 26 indikator TPB Belum Tercapai dan 14 indikator TPB Belum Ada Data.

Berdasarkan pencapaian tersebut, indikator TPB yang Belum Tercapai dan Belum Ada Data diidentifikasi menjadi daftar panjang isu strategis, seperti dapat dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 4.3.
Identifikasi Daftar Panjang Isu Strategis Dimensi Sosial

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN TPB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum Tercapai
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Belum Tercapai
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Belum Ada Data
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Belum Tercapai
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Belum Tercapai
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum Tercapai
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Belum Ada Data
		Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Belum Ada Data
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belum Tercapai
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Belum Tercapai
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Belum Tercapai
		Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum Ada Data

3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Belum Tercapai
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Belum Tercapai
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Belum Ada Data
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Belum Ada Data
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Belum Ada data
		Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Belum Ada Data
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Belum Ada Data
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Belum Ada Data
		Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Belum Ada Data
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Belum Tercapai
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Belum Tercapai
		Total Fertility Rate (TFR).	Belum Tercapai
		Unmet need pelayanan kesehatan.	Belum Tercapai
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Belum Tercapai
		Proporsi kematian akibat keracunan.	Belum Ada Data
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum Tercapai
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Belum Tercapai
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Belum Tercapai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Belum Tercapai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Belum Tercapai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Belum Tercapai
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Belum Tercapai
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Belum Ada Data
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)	Belum Tercapai

		oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Belum Ada Data
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Belum Tercapai
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Belum Tercapai
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Belum Tercapai

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

Berdasarkan Tabel diatas, diadaptasi analisa USGR dalam menentukan daftar pendek seperti dijelaskan pada Tabel berikut dan Lampiran Analisa USGR Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Sosial.

Tabel 4.4.
Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Sosial.

NO. TPB	TEMA DAFTAR PENDEK ISU STRATEGIS
1	Kesehatan, Pendidikan dan Sosial
2	Kesehatan, Pangan Berkelanjutan, Nilai Tambah dan Pemberdayaan Masyarakat (Tenaga Kerja)
3	Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, Anak dan KB
4	Pendidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Sumber Daya Manusia (Guru)
5	Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

B. Isu Strategis Dimensi Ekonomi.

Dimensi ekonomi berdasarkan TPB memiliki 5 tujuan dengan 135 indikator. Untuk Kabupaten Dairi, pencapaian TPB Dimensi Ekonomi terdiri dari 4 (empat) tujuan dengan 37 indikator atau sekitar 29,37% dari jumlah indikator TPB. Dari 37 indikator TPB, sejumlah 8 indikator TPB Tercapai, 17 indikator TPB Belum Tercapai dan 12 indikator TPB Belum Ada Data.

Berdasarkan pencapaian tersebut, indikator TPB yang Belum Tercapai dan Belum Ada Data diidentifikasi menjadi daftar panjang isu strategis, seperti dapat dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 4.5.
Identifikasi Daftar Panjang Isu Strategis Dimensi Ekonomi

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	DAFTAR PANJANG ISU STRATEGIS	PENCAPAIAN TPB
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Belum Tercapai
		PDB per kapita.	Belum Tercapai
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Belum Tercapai
		Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Belum Tercapai
		Persentase tenaga kerja formal.	Belum Tercapai
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Belum Tercapai
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum Tercapai
		Tingkat setengah pengangguran.	Belum Ada Data
		Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Belum Ada Data
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Belum Ada Data
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Belum Tercapai
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum Ada Data
		Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Belum Tercapai
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Belum Tercapai
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Jumlah dermaga penyeberangan.	Belum Tercapai
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Belum Tercapai
		Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Belum Ada Data
		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Belum Ada Data
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Belum Tercapai
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Koefisien Gini.	Belum Tercapai
		Jumlah Desa Mandiri.	Belum Tercapai
		Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Belum Ada Data
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Tercapai

	Pembangunan Berkelanjutan	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Belum Tercapai
		Proporsi individu yang menggunakan internet.	Belum Tercapai
		Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Belum Ada Data

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

Berdasarkan Tabel diatas, diadaptasi analisa USGR (*Urgent, Serious, Growth, Rationality*) dalam menentukan daftar pendek seperti dijelaskan pada Tabel berikut dan Lampiran Analisa USGR Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Ekonomi berikut.

Tabel 4.6.
Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Ekonomi

NO. TPB	TEMA DAFTAR PENDEK ISU STRATEGIS
8	Sumber Daya Manusia, UMKM, Ketenagakerjaan, Keuangan
9	Industri Kecil dan Nilai Tambah, Teknologi IT
10	Ketimpangan Antar Wilayah
17	Pajak, Infrastruktur

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

C. Isu Strategis Dimensi Lingkungan.

Dimensi Lingkungan berdasarkan TPB memiliki 6 tujuan dengan 138 indikator. Untuk Kabupaten Dairi, pencapaian TPB Dimensi Lingkungan terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan 28 indikator atau sekitar 0,23% indikator TPB. Dari 28 indikator TPB, diidentifikasi pencapaiannya terhadap TPB sejumlah 7 indikator TPB Tercapai, 19 indikator TPB Belum Tercapai, dan 2 indikator TPB Belum Ada Data.

Berdasarkan pencapaian tersebut, indikator TPB yang Belum Tercapai dan Belum Ada Data diidentifikasi menjadi daftar panjang isu strategis, seperti dapat dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 4.7.
Identifikasi Daftar Panjang Isu Strategis Dimensi Lingkungan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	DAFTAR PANJANG ISU STRATEGIS	PENCAPAIAN TPB
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Belum Tercapai
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Belum Ada Data
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Belum Tercapai
		Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Belum Tercapai
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Belum Tercapai
		Kualitas air danau.	Belum Tercapai
		Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Belum Tercapai
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Belum Tercapai
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum Tercapai
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Belum Tercapai
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Belum Tercapai
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum Tercapai
		Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Belum Tercapai
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Belum Tercapai
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Belum Tercapai
		Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Belum Tercapai
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Belum Tercapai
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Belum Ada Data
		Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Belum Tercapai

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

Berdasarkan Tabel diatas, diadaptasi analisa USGR dalam menentukan daftar pendek seperti dijelaskan pada Tabel berikut dan Lampiran Analisa USGR Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Lingkungan.

Tabel 4.8.
Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Lingkungan

NO. TPB	TEMA DAFTAR PENDEK ISU STRATEGIS
6	Air Bersih, Jamban, Kualitas Air Danau
11	Rumah Yang Layak, Kebencanaan, Pengelolaan Sampah dan Pembiayaan Infrastruktur
12	Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan
13	Dokumen Laporan
15	Rehabilitasi Lahan Kritis

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

D. Isu Strategis Dimensi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan.

Dimensi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan berdasarkan TPB memiliki 1 tujuan dengan 52 indikator. Untuk Kabupaten Dairi, pencapaian TPB Dimensi Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 tujuan dengan12 indikator atau sekitar 23,08% indikator TPB. Dari 12 indikator TPB, diidentifikasi pencapaiannya terhadap TPB sejumlah 4 indikator TPB Tercapai, 4 indikator TPB Belum Tercapai, dan 4 indikator TPB Belum Ada Data.

Berdasarkan pencapaian tersebut, indikator TPB yang Belum Tercapai dan Belum Ada Data diidentifikasi menjadi daftar panjang isu strategis, seperti dapat dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 4.9.
Identifikasi Isu Strategis Dimensi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	DAFTAR PANJANG ISU STRATEGIS	PENCAPAIAN TPB
	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Belum Ada Data
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Belum Ada Data
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Belum Ada Data

	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Belum Tercapai
	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Belum Tercapai
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Belum Tercapai
	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Belum Tercapai
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Belum Ada Data

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

Berdasarkan Tabel diatas, diadaptasi analisa USGR dalam menentukan daftar pendek seperti dijelaskan pada Tabel berikut dan Lampiran Analisa USGR Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Hukum dan Tata Kelola.

Tabel 4.10.
Identifikasi Daftar Pendek Isu Strategis Dimensi Hukum dan Tata Kelola.

NO. TPB	TEMA DAFTAR PENDEK ISU STRATEGIS
16	Nyaman, Akta Lahir, Keuangan, Kekerasan Anak Dan Perempuan

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

II. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Dairi

Dalam penetapan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Dairi, dilakukan persandingan antara isu strategis berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Dairi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut, yaitu :

- 1. Peningkatan pelayanan dasar dan jaminan sosial;
- 2. Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbudaya;
- 3. Peningkatan sumber daya manusia, produksi berkelanjutan dan infrastruktur berbasis teknologi;
- 4. Pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;
- 5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Tabel 4.11.
Persandingan Isu Strategis

No.	Dimensi	Tema Isu Strategis Daftar Pendek Pencapaian TPB	Rumusan Isu Strategis KLHS RPJMD
1.	Sosial	▪ Kesehatan, pendidikan dan sosial ▪ Kesehatan, pangan berkelanjutan, nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat (tenaga kerja) ▪ Pelayanan kesehatan dan tenaga Kesehatan, anak dan KB ▪ Pendidikan, sarana dan prasarana Pendidikan, SDM (Guru) ▪ Pemberdayaan perempuan, anak dan KB	▪ Peningkatan pelayanan dasar dan jaminan sosial ▪ Pengembangan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Berbudaya
2.	Ekonomi	▪ Sumber daya manusia, UMKM, ketenagakerjaan, keuangan ▪ Industri kecil dan nilai tambah, teknologi IT ▪ Ketimpangan antar wilayah ▪ Pajak, infrastruktur	Peningkatan sumber daya manusia, produksi berkelanjutan dan infrastruktur berbasis teknologi
3.	Lingkungan	▪ Air bersih, jamban, kualitas air danau ▪ Rumah yang layak, kebencanaan, pengelolaan sampah dan pembiayaan infrastruktur ▪ Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan ▪ Dokumen laporan ▪ rehabilitasi Lahan Kritis	Pengelolaan lingkungan dan kebencanaan
4.	Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	▪ Nyaman, akta lahir, keuangan, kekerasan anak dan perempuan	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Dairi 2019-2024

4.2.2 Isu Strategis Nasional
4.2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Penyusunan RPJMD juga mengacu pada RPJM Nasional yang disusun dengan berpedoman kepada RPJP Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengarahkan Tahun 2005-2025 memberikan arahan untuk RPJM Nasional 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema RPJM Nasional tahun 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Beberapa isu strategis dari kajian arah kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024 adalah:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan:

- a. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya.
- c. Peningkatan konektivitas antar wilayah.
- d. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK=Kawasan Ekonomi Khusus, KI=Kawasan Industri, KPBPB=Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, KSPN=Kawasan Strategis Pariwisata Nasional).
- e. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM aparatur).
- f. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah.
- g. Peningkatan kemudahan perizinan.
- h. Pengembangan kerja sama antar daerah, kolaborasi multi pihak serta meningkatkan kualitas SDM.
- i. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
- j. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan.
- k. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

2. Arah Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

- a. Penataan hubungan pemerintah pusat-daerah dan antar pemerintah daerah.
- b. Perluasan basis penerimaan dan peningkatan efektivitas belanja serta pengelolaan fiskal daerah.
- c. Pengarusutamaan inovasi dalam pelayanan publik daerah.
- d. Pembangunan sistem PILKADA dan hubungan Kepala Daerah-DPRD yang berintegritas.

3. Arah Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
- a. Mendorong kerja sama antar Daerah dan terbentuknya kelembagaan regional pada kawasan metropolitan (Mebidangro dan Patungraya Agung), KSPN Danau Toba, KEK Sei Mangke, Kawasan Zona Batam-Tanjung Pinang dan sekitarnya; dan pusat pertumbuhan wilayah lainnya.
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan prioritas anggaran.
 - c. Melanjutkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi (perluasan basis pajak dan retribusi daerah, khususnya PBB P3 non perkotaan dan PBB P2) dan intensifikasi (administrasi perpajakan daerah).
 - e. Meningkatkan ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama kompetensi bidang pertanian, kehutanan, dan industri manufaktur.
 - f. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang pendidikan dan kesehatan.
 - g. Mendorong kolaborasi multi pihak (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas), antara lain melalui kewirausahaan, dan keterkaitan aktivitas ekonomi terutama di perdesaan non tertinggal.
 - h. Meningkatkan iklim investasi melalui pengurangan peraturan daerah (aturan) yang berimplikasi pada ekonomi berbiaya tinggi serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS).
 - i. Meningkatkan pelaksanaan *good governance* di level pemerintahan daerah (Opini Keuangan BPK, Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
 - j. Meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran.
 - k. Mendorong tercipta dan dilaksanakannya inovasi daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

4.2.2.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- 1) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- 4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka

ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Jenis SPM Daerah Kabupaten terdiri atas:

1) **SPM Pendidikan.**

a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:

- (1) Pendidikan anak usia dini.
- (2) Pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan kesetaraan.

b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

c. Penerima pelayanan dasar, adalah warga negara dengan ketentuan:

- (1) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini.
- (2) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar.
- (3) usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

2) **SPM Kesehatan.**

a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:

- (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- (4) Pelayanan kesehatan balita;
- (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis.
- (12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Penerima pelayanan dasar:

- (1) ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil.
- (2) ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin.

- (3) bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- (4) balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita.
- (5) usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- (6) usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- (7) usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- (8) penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- (9) penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.
- (10) orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- (11) orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.
- (12) orang dengan risiko terinfeksi virus HIV untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV.

3) **SPM Pekerjaan Umum.**

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - (1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - (2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum yaitu setiap warga negara.

4) **SPM Perumahan Rakyat.**

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
 - (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Penerima pelayanan dasar:
 - (1) Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
 - (2) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.

5) **SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.**

- a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:
 - (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - (2) Pelayanan informasi rawan bencana.
 - (3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - (4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - (5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

c. Penerima pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan:

- (1) Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten dan peraturan kepala daerah kabupaten.
- (2) Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (3) Yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6) **SPM Sosial.**

a. Jenis pelayanan dasar, terdiri atas:

- (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
- (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

b. Mutu pelayanan dasar, diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- c. Penerima pelayanan dasar, adalah warga negara dengan ketentuan:
- (1) Penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
 - (2) Anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
 - (3) Lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.
 - (4) Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
 - (5) Korban bencana kabupaten untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

Selanjutnya pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menetapkan penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dengan target capaian indikator 100% setiap tahunnya.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara.

Isu regional Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai isu strategis utama pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menangkap peluang dimaksud dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke depan.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah: “Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”, dengan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan.
- 2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik.
- 3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan.
- 4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan.
- 5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Kebijakan Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja yang diarahkan kepada:
 - a. Membangun kerjasama dengan institusi nasional dan internasional serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung latihan kerja (*link and match*).
 - b. Meningkatkan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja yang bertumpu kepada peningkatan daya saing tenaga kerja.
 - c. Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pariwisata dan industri 4.0.
 - d. Pengembangan sentra koperasi dan KUKM berbasis *online*.
 - e. Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan IKM berbasis *online* (*e-smart* IKM).
 - f. Mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru dan pengembangan industri kreatif.
 - g. Meningkatkan promosi, potensi investasi yang diikuti dengan kebijakan kemudahan dalam perijinan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, diarahkan kepada:
 - a. Pemberian beasiswa bagi lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (PT).

- b. Pemberian beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru.
 - c. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sarana prasarana SMA/SMK di setiap kecamatan.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK terakreditasi.
 - e. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan mendorong partisipasi *stakeholders* (BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat) dalam pembangunan SMK sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pasar kerja.
 - f. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan khusus.
 - g. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan mendorong partisipasi *stakeholders* (BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat) dalam peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan diarahkan kepada:
- a. Mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis nasional (KSN Mebidangro, KSPN Danau Toba, KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Pariwisata Kepulauan Nias), Pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Jalur KA Sumatera (*Trans Sumatera Railway*), Pembangunan Bendung Serba Guna Lau Simeme dan Pengembangan transportasi massal di kawasan perkotaan (LRT/MRT).
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Propinsi seperti: kawasan Simalungun-Batubara-Asahan, kawasan pengembangan ekonomi Labuhan Batu dan sekitarnya, kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, kawasan pengembangan ekonomi pantai barat dan sekitarnya, kawasan pengembangan ekonomi kepulauan Nias, kawasan ekosistem Bahorok,

kawasan budaya Bawomataluo, kawasan bersejarah Barus dan situs sejarah Medan-Deli Serdang.

- c. Pembangunan kawasan *sport center* berstandar internasional dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan pembangunan pusat pengembangan IPTEK keolahragaan, peningkatan kualitas pelatih dan pembinaan atlet berprestasi dalam rangka peningkatan prestasi Sumatera Utara di bidang olahraga.
 - d. Mendorong pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, swasta (CSR) dan masyarakat dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar (jalan/jembatan, irigasi, air minum, sanitasi (air limbah dan persampahan), rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan pelayanan dasar lainnya.
 - e. Mendorong pengembangan kota-kota satelit baru pada kawasan cepat tumbuh (Binjai, Percut Sei Tuan, Kualanamu, Batang Kuis, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Parapat).
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, diarahkan kepada:
- a. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan SDM, sarana prasarana, dan kualitas pelayanan kesehatan dan mendorong pengembangan rumah sakit berkelas internasional khususnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
 - b. Peningkatan pembinaan dan koordinasi dalam mendorong kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, balita *stunting*, balita kekurangan gizi dan peningkatan perilaku PHBS.
 - c. Pengembangan siaga kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, diarahkan kepada:
- a. Pengembangan Produk Unggulan Daerah, yaitu: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa, dan mendorong pengembangan sentra produk lokal seperti: gula aren, nilam, akar wangi dan

hasil-hasil perikanan (*One Region One Product*) serta pencapaian swasembada pangan.

- b. Pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, pengembangan kawasan peternakan, *agro technopark* di kawasan Mebidangro, dan pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional dengan potensi alam dan budi daya pertanian.
- c. Mendorong investasi swasta dalam pembangunan dan pengembangan dan sarana prasarana pendukung pariwisata (*convention center*, perhotelan, restoran, sport area, dan lain-lain) untuk mendorong kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) berskala nasional dan internasional di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pengembangan pusat kawasan budaya dan wisata religi melalui pembangunan dan pengembangan *Islamic Centre* dan situs-situs serta cagar budaya.
- e. Meningkatkan SDM pariwisata melalui *benchmarking* (studi pengalaman) dari pusat pariwisata.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen dan angka inflasi diharapkan pada kisaran 2,75 persen plus minus 1 persen. Kemudian, penurunan angka kemiskinan menjadi 7,39 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,32 persen, dan terakhir peningkatan pemerataan pendapatan melalui capaian Indeks Gini menjadi 0,300.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Isu-Isu Strategis Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah :

1. Ketimpangan

Kondisi ketimpangan di Sumatera Utara dapat dilihat dari indikator Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang selama kurun waktu 2013-2017 dan nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara selalu berada di bawah gini ratio nasional. Untuk tahun 2013, nilai gini ratio Provinsi

Sumatera Utara sebesar 0,354 dan terjadi penurunan nilai gini ratio pada tahun 2014 menjadi 0,321. Akan tetapi pada tahun 2015, gini ratio Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,336 dan kondisi ini terjadi juga pada tingkat nasional. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan maka nilai gini ratio Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari 0,319 menjadi 0,315.

2. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih relatif tinggi yakni 9,28 persen terhadap total penduduk. Pola permasalahan kemiskinan yang relatif sama yaitu dimana jumlah penduduk miskin dominan dipengaruhi pada dimensi infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan, namun dimensi kesehatan dan pendidikan juga penting untuk diintervensi karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.

3. Pengangguran

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 6,74 juta jiwa yang terdiri dari 6,37 juta jiwa bekerja dan sebesar 377 ribu jiwa pengangguran. Penduduk yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor pertanian kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan yaitu 37,52 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sebesar 22,16 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor Jasa Kemasyarakatan yaitu sebesar 17,26 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 9,03 persen. Selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan.

Pada Tahun 2017 persentase angkatan kerja di Sumatera Utara dengan pendidikan yang ditamatkan sebagian besar

berpendidikan Diploma dan Sarjana. Persentase golongan ini mencapai 87,77 persen. Selanjutnya, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SD kebawah dan SMP masing-masing sekitar 71,46 persen dan 78,38 persen, sedangkan 78,94 persen berpendidikan SMA. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara hanya 68,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan/skill yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 4.441 orang yang mana didominasi oleh Pencari Kerja tamatan SMA sebanyak 2.889 orang dan Sarjana sebanyak 684 orang. Hal ini mengindikasikan kurangnya penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat maupun informasi terhadap pasar kerja yang belum memadai. Selain penyediaan lapangan pekerjaan, perlu juga terwujudnya kemudahan berbisnis dan upaya pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Sumatera Utara cukup baik pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

4. Kesehatan

Pelayanan kesehatan terdiri dari 4 aspek yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Aspek preventif berarti pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masyarakat yang berisiko tinggi. Aspek kuratif yaitu usaha penyembuhan dari penyakit yang menyerang. Aspek promotif adalah usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, terutama pada masyarakat yang sehat. Aspek rehabilitatif adalah usaha pemulihan dari penyakit dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang sama dengan saat sebelum terkena penyakit.

Beberapa hal yang menjadi isu dalam pembangunan kesehatan masyarakat antara lain perhatian terhadap pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat yang selama ini belum berjalan dengan optimal. Perbaikan terhadap bidang

kesehatan masih harus dilakukan. Perbaikan terhadap sarana dan prasana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, dan lain-lain) harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat.

Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Angka Usia Harapan Hidup Sumatera Utara tahun 2017 adalah 68,37 tahun. Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah kematian Ibu yang masih tinggi, Cakupan Balita Gizi Buruk yang mengalami perawatan juga patut menjadi perhatian karena grafik penanganannya sangat fluktuatif. Selain itu dalam hal menyangkut fasilitas kesehatan yakni rasio posyandu, puskesmas, poliklinik, pustu, Rumah Sakit per satuan penduduk belum mengalami perkembangan yang berarti begitu halnya juga dengan rasio dokter dan tenaga medis persatuan penduduk sehingga pelayanan kesehatan belum optimal.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi landasan pembangunan, dan mengalokasikan dana pembangunan minimal 20% untuk mendukung pendidikan.

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat terus ditingkatkan untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan juga tuntutan kemajuan IPTEK. Berbagai upaya pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama

dengan pelaku pembangunan lainnya, namun tak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Peningkatan kualitas sarana dan prasana pendidikan (sekolah, kompetensi guru, akreditasi, dan lain-lain) masih menjadi agenda pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Provinsi Sumatera Utara. Hal lain lagi yang perlu ditingkatkan yaitu belum meratanya akses dan partisipasi pendidikan terutama di pendidikan menengah dan tinggi di Sumatera Utara.

6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasca telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan regulasi turunan melalui regulasi Rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang . Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki data dasar (baseline) kesesuaian perwujudan RTRW, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa besar pencapaian kinerja penataan ruang terhadap perwujudan RTRW. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Penyediaan regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
- Perwujudan tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penataan ruang Daerah.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Sumatera Utara adalah sebesar 55,02 Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain erupsi gunung Sinabung dan Kebakaran Hutan.

Selanjutnya yang menjadi isu strategis lingkungan hidup adalah terkait dengan sampah, dan menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun saat ini yang menjadi penekanan terhadap pengelolaan sampah adalah bagaimana pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota ditangani dengan baik seperti meminimalisasi timbunan sampah, meningkatkan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Sistem Operasional TPA dan Sarana Pengangkutan Sampah. Pertambahan penduduk, geliat perekonomian yang mulai membaik dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif meningkatkan volume sampah, serta jenis dan karakteristik yang semakin beragam.

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di perkotaan, pemerintah melakukan upaya mengembangkan kualitas layanan dasar permukiman baik perkotaan maupun diperdesaan yang terdapat di wilayah pesisir dan dataran tinggi, berupa sistem pengelolaan air minum dan pembangunan sanitasi, meliputi air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan ruang terbuka hijau.

7. Infrastruktur

Kondisi ekonomi daerah yang produktif sangat sulit dicapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2018, berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Sumatera Utara terus dipacu. Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka pemenuhan infrastruktur semakin besar. Untuk itu pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan untuk menjadi solusi atas masalah-masalah utama yang dihadapi Sumatera Utara berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pelayanan dasar serta pemerataan pembangunan. Beberapa infrastruktur di Sumatera Utara yang perlu diprioritaskan selain transportasi yang

menghubungkan inter dan intra wilayah, yaitu Perumahan dan Permukiman yakni menyangkut Rehabilitasi rumah tidak layak huni, Pembangunan pembangkit listrik, air minum, sanitasi, dan sampah. Selain itu, untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan.

8. Reformasi Birokrasi dan Modal Sosial

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prioritas untuk menghasilkan kinerja yang baik.

Selain itu sistem pemerintahan yang bersih juga dihasilkan dari transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Tuntutan dalam melaksanakan e-government menjadi salah satu hal penting dalam melaksanakan tata pemerintahan yang bersih. Tantangan dalam pengembangan e-government cukup besar mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi Informasi Teknologi (IT) terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4.2.4. Rumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2019-2024.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional Provinsi Sumatera Utara, prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis perencanaan jangka menengah Kabupaten Dairi dalam RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai berikut.

Tabel 4.12.
Isu Strategis Prioritas Pembangunan

No	SASARAN PRIORITAS	ISU STRATEGIS
1	Akses Pendidikan untuk semua (Dairi Cerdas)	1. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan tenaga pendidik dan kependidikan. Berbagai alternatif strategi peningkatan mutu pendidikan termasuk pemanfaatan dukungan teknologi informasi dan internet menjadi pilihan arah kebijakan untuk pemerataan pendidikan menuju sekolah unggul
		2. Mewujudkan metode belajar mengajar PAUD, SD, SMP berbasis internet untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan lulusan.
		3. Mengupayakan berdiri dan beroperasinya perguruan tinggi di Kabupaten Dairi dengan Prodi yang sesuai dengan potensi daerah seperti pertanian, pariwisata dan lain-lain untuk meningkatkan daya saing SDM Dairi
2	Dairi sehat, yang diarahkan pada Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukan.	1. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, SDM kesehatan, tata kelola pelayanan kesehatan dan revitalisasi proses pengoperasian di fasilitas kesehatan dasar (Poskesdes/Pustu/Puskesmas) dan rujukan (rumah sakit). Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi menjadi arah kebijakan pembangunan ke depan
		2. Secara bertahap memperbaiki dan meningkatkan akreditasi pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat terutama RSUD dan Puskesmas

3	AGRI UNGGUL dengan mengembangkan pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi.	1. Peningkatan produksi dan pengolahan produk pertanian khususnya komoditas pertanian unggulan untuk memberikan nilai tambah (<i>value added</i>) yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan serta daya saing Daerah Kabupaten Dairi sebagai bagian dari kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan. Penerapan pertanian berbasis teknologi (<i>smart farming</i>) menjadi salah satu solusi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
		2. Ekstensifikasi perluasan area tanam komoditas unggulan termasuk kopi, jagung dan hortikultura
		3. Pengelolaan tata niaga bahan produksi pertanian Dairi yang efektif termasuk dengan pengadaan pengolahan paska produksi seperti “ <i>Drier</i> ” untuk jagung dan lain-lain, serta mampu bekerjasama dengan pihak swasta
		4. Mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang baik robusta maupun arabika termasuk melalui penetrasi pasar pembeli di tanah air dan mancanegara dengan menggunakan teknik-teknik pemasaran modern
4	Pertumbuhan Ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI)	1. Ketersediaan data dan informasi pembangunan serta statistik sektoral sebagai bahan untuk analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
		2. Penumbuhkembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja. Penumbuhkembangan inkubator bisnis dan <i>start up</i> di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan termasuk pembangunan <i>Dairi Techno Park</i> .

		3. Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat
		4. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja PD Pasar dan meningkatkan cakupan layanan usahanya dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta
5	Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan	1. Optimalisasi pemanfaatan peluang pembangunan kepariwisataan Daerah atas kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba termasuk dengan pola kemitraan dengan pihak swasta
		2. Membangun amenities dan atraksi yang menarik dan berkualitas pada kawasan wisata Dairi khususnya Silahisabungan baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak swasta
6	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	1. Antisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi berupa: gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran pada kawasan permukiman masyarakat
		2. Pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Daerah, meliputi: jalan, jembatan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, pelayanan persampahan, tempat pemakaman umum, pusat perdagangan dan PSU di kawasan permukiman
		3. Peningkatan konektivitas dan kualitas jalan dan jembatan antar kabupaten untuk mendukung sarana dan prasarana logistik dan melayani potensi kunjungan wisatawan ke pusat-pusat wisata Dairi dalam rangka status Dairi sebagai salah satu destinasi strategis wisata nasional

		4. Meningkatkan layanan angkutan umum penumpang dan barang termasuk dalam memanfaatkan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk melayani masyarakat dan sektor usaha
7	Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri	1. Peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan dengan pemusatan penataan dan pengembangan pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Bunturaja, Sumbul, Parongil dan Tigalingga dan Kawasan Strategis Kabupaten untuk pengembangan kepariwisataan di Kecamatan Silahisabungan
8	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur secara menyeluruh sebagai bagian integral dari pengembangan kompetensi dan inovasi daerah 2. Optimalisasi pemanfaatan dukungan teknologi informatika dalam berbagai aspek penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah, pelayanan publik, dan peningkatan daya saing masyarakat dan Daerah menuju terwujudnya <i>e-Government</i> (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai landasan pelaksanaan konsep <i>smart city</i> dan revolusi industri 4.0 3. Peningkatan kualitas layanan dan tata kelola administrasi umum pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi yang mencakup: pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, layanan informasi publik dan administrasi pemerintahan lainnya 4. Pemenuhan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar 100% setiap tahun sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan 5. Memperbaiki tata kelola dan tata administrasi pengelolaan seluruh program bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat guna dengan memanfaatkan teknologi informatika dan profesionalisme aparatur seperti Kartu Tani dan lain-lain

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan visi, misi dan program dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih (Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, SH), disesuaikan dan diintegrasikan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025.

RPJPD merupakan kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Dairi pada tahun 2025 guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun serta modal dasar dan potensi pembangunan yang dimiliki Kabupaten Dairi, maka dirumuskan visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Dairi tahun 2005-2025 yakni: *“Terwujudnya masyarakat Dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan”*.

Visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD ini menjelaskan apa yang menjadi cita-cita bersama Bupati dan Wakil Bupati Dairi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)

pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pentingnya perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu untuk menentukan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang tepat untuk mencapai cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Dairi untuk lima tahun ke depan.

5.1. Visi Pembangunan Daerah.

Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah:

MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN

Perumusan dan pendalaman terhadap makna yang terkandung dalam visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar visi dengan pemahaman sebagai berikut :

DAIRI UNGGUL, adalah suatu kondisi yang mencerminkan suatu semangat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Dairi, yang :

- 1) UNGGUL dalam kualitas dan kuantitas pengelolaan produksi daerah berbasis industri khususnya terhadap komoditas unggulan daerah yang nyata dan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) secara signifikan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 2) UNGGUL dalam standar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang menjadi pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, meliputi: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
- 3) UNGGUL dalam standar dan kualitas pelayanan, administrasi dan manajemen sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT, mengandung arti bahwa keseluruhan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang luas kepada Daerah, yakni diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi secara adil dan merata.

HARMONI KEBERAGAMAN, didasari pemikiran bahwa keanekaragaman kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Dairi dengan berbagai aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup serta keterkaitan multi sektor, multi dimensi dalam pembangunan diperlukan adanya keselarasan dalam penataan dan pengelolaannya.

5.2. Misi Pembangunan Daerah.

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
- 2) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
- 3) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- 4) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

5.2.1. Misi 1.

Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian

dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.

Pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Dairi. Hampir 72% masyarakat Kabupaten Dairi bekerja di sektor pertanian. Analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri bahkan sudah berpotensi untuk di ekspor.

Untuk meningkatkan daya saing kekuatan ekonomi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu mengembangkan sektor pertanian terutama subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memiliki beberapa keunggulan dan juga mensinergikan dengan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi (angkutan) agar dihasilkan *multiplier effect* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dengan tidak mengabaikan sektor-sektor ekonomi lainnya sekaligus untuk menciptakan kondisi ketahanan pangan yang mantap di Kabupaten Dairi.

Konsep pengembangan AGRI UNGGUL menjadi basis pengembangan sektor pertanian yang sinergis dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Dairi. Pengelolaan sistem pertanian terpadu yang cerdas dan modern (*smart farming*) dari hulu ke hilir mencakup: peningkatan kuantitas dan kualitas budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang didukung: SDM petani yang memadai, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna *alsintan* (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian) yang berkualitas, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan

bahan baku pertanian menjadi bahan jadi atau setengah jadi bagi komoditas perdagangan, serta penciptaan iklim pemasaran yang baik sesuai kebutuhan pasar.

Secara operasional, Misi 1 diaplikasikan dalam pembangunan sektor pertanian yang disinergikan dengan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas mencakup budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani sekaligus memantapkan kondisi ketahanan pangan Daerah. Sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk mendukung industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.

5.2.2. Misi 2.

Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.

Keberadaan manusia sebagai sumber daya yang sangat penting akan memberi nilai tambah dalam pembangunan karena dengan kemampuannya dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas memegang peranan penting dalam proses keberhasilan pembangunan daerah. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas pembangunan daerah. Kuantitas SDM tanpa disertai kualitas yang memadai akan menjadi beban bagi pembangunan daerah. Kualitas SDM adalah mutu SDM yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non fisik.

Sejalan dengan defenisi pembangunan daerah yakni pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), maka pembangunan SDM merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan mutu SDM sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Ketersediaan SDM yang unggul merupakan modal utama dalam percepatan pengembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Misi ke-2 merupakan upaya manajemen SDM Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kualitas unggul SDM masyarakatnya untuk mencapai kondisi masyarakat Kabupaten Dairi yang memiliki derajat kesehatan masyarakat yang baik, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudaya serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga memiliki daya saing dalam produktivitas pembangunan Daerah.

Secara operasional Misi 2 diaplikasikan dalam pembangunan sektor kesehatan, pembangunan sektor pendidikan, dan sektor pembangunan lainnya yang terkait dalam upaya penyiapan dan pembentukan SDM masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul, yakni pelayanan perpustakaan, untuk membentuk SDM yang sehat dan cerdas. Selanjutnya untuk mewujudkan SDM yang produktif, memiliki daya saing dan karakter budaya dilakukan melalui pembangunan sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari pengendalian penduduk, pembinaan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan kepemudaan, pembinaan olahraga dan pembinaan kebudayaan. Terhadap kelompok masyarakat marginal dan PMKS dilakukan pembinaan tersendiri dengan meningkatkan cakupan layanan pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat.

5.2.3. Misi 3.

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara

pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

Kondisi geografis Dairi memberikan keuntungan dan peluang bagi Kabupaten Dairi untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan yang diharapkan dapat didayagunakan dengan tetap mempertimbangkan faktor kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tidak semata-mata menjadi sumber daya potensial tetapi menjadi sumber daya riil yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Selain sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan pembangunan daerah, potensi pengembangan kepariwisataan yang didukung penguatan usaha ekonomi kreatif dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu fokus sektor pembangunan yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait dengan peluang yang muncul seiring perkembangan pembangunan kepariwisataan baik secara global maupun nasional. Kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan kepariwisataan melalui kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memberikan peluang dan harapan bagi Kabupaten Dairi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Dairi.

Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Dairi diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional KSPN Danau Toba dengan fokus pengembangan di Tao Silalahi Kecamatan Silahisabungan, sekaligus mengoptimalkan keberadaan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Dairi, yakni: Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo dan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-cike dalam satu kawasan strategis destinasi wisata, meliputi Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, dan Kecamatan Silahisabungan serta wilayah pendukung Kecamatan Sidikalang.

Pengembangan sektor kepariwisataan yang dikembangkan dalam konsep kepariwisataan berbasis keindahan alam (*nature*),

pertanian (agro), dan budaya (*culture*) diharapkan akan memberikan *multiplier effects* yang mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat dengan penempatan sektor pariwisata sebagai “*lokomotif penarik gerbong*” peningkatan produksi dan pemasaran pada sektor pada sektor pembangunan lainnya, seperti: industri kerajinan, pengolahan produk pertanian, kreatifitas seni dan budaya, kuliner/usaha rumah makan, usaha penginapan, usaha transportasi serta usaha ekonomi kreatif lainnya mulai dari level usaha mikro, kecil sampai menengah.

Pembangunan sektor pariwisata juga dikembangkan dalam konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diwujudkan dalam konsep pengembangan Desa Wisata yang mengintegrasikan pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), pariwisata berbasis ekowisata (*eco tourism*), pariwisata berbasis komunitas (*community-based*), pariwisata berbasis budaya (*culture-based*), pariwisata berbasis *good tourism governance*, pariwisata berbasis *supply and demand* serta pengembangan wilayah/kawasan (*regional development*). Untuk mendukung pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dibutuhkan adanya upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat di desa dan peran dari pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Secara operasional, Misi 3 diaplikasikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa, penyiapan SDM ketenagakerjaan dan peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup.

5.2.4. Misi 4.

Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya government menjadi governance yang menekankan kepada kolaborasi, keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*) menjadi pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi titik sentral perhatian segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi.

Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam administrasi dan manajemen pemerintahan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, tata kerja dan pengawasannya. Dalam rangka mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan teknologi informatika untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Setiap instansi pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan keberadaan teknologi informasi yang ada dalam menyampaikan informasi dan melakukan diseminasi kepada warga masyarakat. Disisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memberikan rasa aman dengan situasi ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara dengan baik serta akses yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, mendapatkan informasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan media dan teknologi informatika secara terbuka dan interaktif.

Secara operasional, Misi ke-4 diaplikasikan pada upaya mewujudkan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, organisasi, administrasi umum, fungsi pendukung DPRD, fungsi pengawasan, serta fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, antara lain: perencanaan, kepegawaian,

keuangan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.5. Misi 5.

Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Pelayanan publik mengandung arti kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik berupa pelayanan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan barang/jasa publik diwujudkan dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur daerah, penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik sedangkan pelayanan administratif diwujudkan antara lain dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan perizinan, dan pengurusan dokumen administrasi masyarakat lainnya.

Dalam substansinya, pelayanan publik selalu dikaitkan dengan upaya instansi pemerintahan untuk memberikan bantuan/layanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan, oleh karena itu institusi penyelenggara pelayanan publik yang didalamnya terdapat unsur birokrasi menjadi bagian terpenting untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun dalam penyediaan barang dan jasa yang secara langsung dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat berupa penataan lingkungan yang sehat termasuk penyediaan fasilitas sosial dan ruang publik yang layak.

Pelayanan administrasi publik diarahkan kepada pelayanan yang murah, mudah, cepat, transparan serta memiliki kepastian hukum. Untuk itu pedoman pelayanan berupa mekanisme atau prosedur dan persyaratan yang jelas menjadi modal utama dalam mewujudkan pelayanan administrasi publik yang baik. Selanjutnya kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang dilayani kebutuhannya, secara khusus pelayanan publik yang baik dalam bidang pelayanan penanaman modal dan perijinan dan akan meningkatkan nilai jual dan daya saing daerah dalam tataran persaingan ekonomi regional, nasional maupun global yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investasi atau penanaman modal di daerah.

Disisi lain, peningkatan kualitas infrastuktur daerah khususnya infrastruktur prioritas tidak boleh dikesampingkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya sehingga pembangunan infrastruktur bukan sebatas kegiatan pengalokasian dana untuk bangunan fisik belaka, tetapi harus memperhatikan berbagai aspek seperti daya tahan, daya dukung, daya guna dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur perlu ditempatkan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan dan peluang membuka lapangan kerja, pemerataan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sejak proses perencanaan sampai kepada pengendalian pembangunan infrastruktur daerah perlu dilakukan sesuai NSPK yang mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Menyikapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang pesat, termasuk perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan yang lebih mengarah kepada digitalisasi, maka peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana serta fasilitas pendukung aktivitas pelayanan, termasuk dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun

sebaliknya perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan keberadaan teknologi informatika yang lebih handal.

Secara operasional, Misi ke-5 diaplikasikan pada peningkatan kinerja pembangunan pada sektor pelayanan infrastruktur daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, prasarana perhubungan, prasarana pasar, prasarana penyediaan air baku/air minum serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan modal dan perizinan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan layanan komunikasi dan informatika.

5.3. Tujuan dan Sasaran.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat Daerah. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah

kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.

Tujuan (1.1) : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap.

Sasaran (1.1.1) : Meningkatnya pendapatan masyarakat petani.

Sasaran (1.1.2) : Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan daerah.

Sasaran (1.1.3) : Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan.

2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.

Tujuan (2.1) : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran (2.1.1) : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Sasaran (2.1.2) : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

Sasaran (2.1.3) : Meningkatnya cakupan keluarga berencana.

Sasaran (2.1.4) : Menurunnya tingkat kemiskinan.

Sasaran (2.1.5) : Menurunnya tingkat pengangguran.

3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.

- Tujuan (3.1) : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**
- Sasaran (3.1.1) : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.
- Sasaran (3.1.2) : Meningkatnya pengelolaan pariwisata.
- Sasaran (3.1.3) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Tujuan (4.1) : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).**
- Sasaran (4.1.1) : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Sasaran (4.1.2) : Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- Sasaran (4.1.3) : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana.
- Sasaran (4.1.4) : Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.
- Tujuan (5.1) : Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah.**
- Sasaran (5.1.1) : Meningkatnya infrastruktur dasar.
- Sasaran (5.1.2) : Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh.

Tujuan (5.2) : Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika.

Sasaran (5.2.1) : Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Sasaran (5.2.2) : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Sasaran (5.2.3) : Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik.

Sasaran (5.2.4) : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Selanjutnya keterkaitan elemen-elemen perencanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, indikator, kondisi awal, target capaian tahunan dan kondisi akhir yang diinginkan digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024
 VISI: MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir
					2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.	1.1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap		Pertumbuhan PDRB	%	5,01	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33	5,33	
			Indeks Gini	Indeks	0,238	0,234	0,232	0,230	0,228	0,226	0,226	
		1.1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,39	100,10	100,11	100,12	100,13	100,14	100,14	
		1.1.2 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan Daerah	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,40	92,30	94,30	96,30	98,10	100	100	
		1.1.3 Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.	2.1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,89	70,97	71,05	71,13	71,21	71,29	71,29	
		2.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,4	68,6	68,7	68,8	68,9	69,0	69,0	
		2.1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,15	9,17	9,18	9,19	9,20	9,21	9,21	
		2.1.3 Meningkatnya cakupan keluarga berencana	Menurunnya kelahiran total/ <i>Total fertility rate</i> (TFR)	%	2,86	2,84	2,82	2,80	2,78	2,76	2,76	
		2.1.4 Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Kemiskinan	%	8,20	8,14	8,08	8,02	7,96	7,90	7,90	
		2.1.5 Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,40	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,28	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir
					2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah	3.1 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,31	65,6	66,6	67,6	68,6	69,6	69,6	
		3.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,31	65,6	66,6	67,6	68,6	69,6	69,6	
		3.1.2 Meningkatnya pengelolaan pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	128.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000	
			Kontribusi Retribusi Wisata terhadap PAD	%	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,00	
		3.1.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif	Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51	3,06	3,56	4,01	4,41	4,41	
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>).		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	B	
		4.1.1 Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	B	
			Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	50	60	65	70	75	80	80	
			Persentase penegakan Produk hukum daerah	%	70	75	80	85	90	95	95	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
					2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.	5.1 Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah		Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	49,40	56,75	62,22	68,06	73,10	78,70	78,70
		5.1.1 Meningkatnya infrastrukur dasar	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	49,40	56,75	62,22	68,06	73,10	78,70	78,70
			Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	%	62,80	63,11	63,43	63,75	64,07	64,39	64,39
			Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	55,23	62,86	65,48	68,10	70,72	73,34	73,34
		5.1.2 Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	46,80	58,42	64,26	70,69	77,76	85,53	85,53
	5.2 Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	Poin	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36
		5.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penanaman Modal dan Perizinan	Poin	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36
		5.2.2 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan	%	94,00	96,50	97,50	98,50	99,50	100	100
		5.2.3 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	NA	20,00	50,00	100	100	100	100
		5.2.4 Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Poin	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah Daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1. Strategi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai misi pembangunan Daerah yang ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Pemerintah Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis

pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan Daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah (*strategy focussed-management*), rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah.

Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Uraian dalam subbab ini menjelaskan strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan serta penanganan isu strategis yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang ditetapkan.

Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2020-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Dairi tersebut, tema dan fokus pembangunan pada periode 2020-2024 adalah:

1. *Terwujudnya masyarakat yang semakin mandiri, semakin makmur, sejahtera, berkeadilan dan maju* melalui pembangunan semua bidang yang dilaksanakan dalam RPJMD keempat, serta semakin mantapnya struktur ekonomi yang kokoh yang berlandaskan pada keunggulan kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas meliputi: pendidikan, kesehatan dan perekonomian dan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya.
2. Hasil pembangunan terus diperkuat atau semakin dimantapkan yang diperoleh dari ketiga tahapan RPJMD sebelumnya, meliputi:

ketersediaan pangan yang cukup, masyarakat yang sejahtera, infrastruktur yang memadai untuk menghadapi apabila terjadi perubahan lingkungan eksternal yang tidak terduga dan tidak diharapkan, seperti bencana alam.

3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan ukuran-ukuran yang nyata seperti tersedianya lapangan kerja berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani secara khususnya, peningkatan kemampuan mengonsumsi makanan yang cukup dan sehat, peningkatan pendidikan formal dan nonformal yang berkualitas serta adanya kualitas *education system* yang semakin luas, tercukupinya pasokan air, listrik, bahan pangan bermutu dan bergizi, mantapnya sistem pengelolaan dan tingkat kesehatan masyarakat, dan sistem jaminan sosial masyarakat yang tidak mampu. Pada tahap ini akan dilaksanakan peningkatan volume kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan transportasi darat, pemanfaatan sumber daya air secara optimal dan terpenuhinya tenaga listrik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi dan wilayah secara berkelanjutan.
4. Semakin mantapnya lembaga-lembaga dan pranata ekonomi daerah berupa UKM dan koperasi, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dan petani secara khusus, pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan serta menjalin persatuan dan kesatuan, dan keberagaman suku, etnis, agama, daerah, lapangan pekerjaan dan profesi, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin baik.

Metode analisis yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 adalah metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Metode SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dairi. Faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sedangkan faktor-faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman

(*threats*). Analisis SWOT didasarkan logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Dairi harus mengoptimalkan pendayagunaan kekuatan dan peluang, sekaligus mengatasi/meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Berdasarkan analisis, yang menghasilkan alternatif strategi dengan bobot paling tinggi adalah strategi weaknesses-opportunities (WO), yakni strategi mengatasi/mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Dairi menghadapi peluang pasar yang besar tetapi disisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat mengambil peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi tersebut dapat dilakukan secara simultan sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menghadapi kendala sumber daya (*resources constraints*).

Strategi dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

VISI: MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN.		
Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1.1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap	1.1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat petani	Meningkatkan akses, kapasitas dan ketahanan petani untuk memperoleh informasi teknik budidaya, sarana dan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
		Meningkatkan akses, kapasitas, dan kapabilitas kelembagaan kelompok tani, koperasi tani, dan lembaga lain yang bergerak di sektor pertanian.
	1.1.2 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan Daerah	Memantapkan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah
	1.1.3 Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengolahan produk pertanian
		Menerapkan dukungan teknologi informasi dan kerjasama perdagangan untuk memperluas akses dan jaringan pemasaran
Misi 2: Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
2.1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, SDM tenaga kesehatan, tata kelola pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan.
		Meningkatkan kapabilitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan
		Meningkatkan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlit
	2.1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, SDM pendidikan dan tata kelola pelayanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, SDM perpustakaan
		Meningkatkan cakupan pembinaan dan pengembangan seni, nilai-nilai budaya dan cagar budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2.1.3 Meningkatnya cakupan keluarga berencana	Meningkatkan cakupan pelayanan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan stakeholders terkait terhadap PUG, perlindungan perempuan dan anak.
	2.1.4 Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan cakupan layanan pemberdayaan PMKS dan layanan sosial lainnya.
	2.1.5 Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja tenaga kerja serta pelayanan administrasi ketenagakerjaan
Misi 3: Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
3.1 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	3.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan cakupan pengamatan, pengkajian lingkungan hidup
		Memantapkan sarana prasarana, sumber daya aparatur dan sistem pengelolaan sampah
	3.1.2 Meningkatnya pengelolaan pariwisata	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi, pemasaran dan sumber daya pariwisata.
	3.1.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif.	Meningkatkan akses dan kapabilitas KUKM dan usaha ekonomi kreatif
		Meningkatkan jaringan pemasaran produk KUKM dan ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi informasi
Misi 4 : Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>Good Governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan <i>Clean Government</i> (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
4.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>).	4.1.1 Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasian dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, administrasi umum, organisasi, kepegawaian dan tata kerja perangkat daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
		Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah serta kualitas penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
		Memperkuat kedudukan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Kecamatan, Desa dan Kelurahan
	4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan Asset Daerah.	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	4.1.3 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana	Penyiapan sarana prasarana, SDM aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
	4.1.4 Meningkatnya kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika		
Tujuan	Sasaran	Strategi
5.1 Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	5.1.1 Meningkatnya infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan.
	5.1.2 Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5.2 Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika	5.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah, aparatur, infrastruktur, tata kelola, dan promosi potensi daerah dalam rangka penanaman modal.
		Meningkatkan kualitas kebijakan daerah, aparatur, infrastruktur, dan tata kelola dalam rangka pelayanan perijinan.
	5.2.2 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.
	5.2.3 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan infrastruktur dan kapasitas aparatur dalam pelayanan komunikasi dan informasi publik
	5.2.4 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan, sarana prasarana dan SDM Rumah Sakit Umum Daerah

6.2. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan, sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2020)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), melalui pengembangan layanan umum yang unggul.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia Kabupaten dairi yang unggul serta berdaya saing.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat

pencapaian pembangunan Kabupaten Dairi yang sejahtera, melalui penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui daya saing sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2024)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN				
2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan layanan umum yang unggul	Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.	Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan pelayanan publik yang unggul dan kesejahteraan masyarakat.

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial.

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD tahun 2019-2024. Fungsi RTRW merupakan matra spasial penyusunan perencanaan pembangunan yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Dairi.

Kedudukan RTRW Kabupaten Dairi merupakan penjabaran RTRW Provinsi Sumatera Utara ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara

keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang yang operasional. Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai acuan/pedoman dalam:

- a. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan rencana sektoral lainnya di Kabupaten Dairi;
- b. Pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Perwujudan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Penetapan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- f. Penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten juga harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034.

a. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Dairi yaitu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi meliputi:

- 1) Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah, melalui strategi peningkatan interaksi kawasan

untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.

- 2) Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui strategi:
 - a) Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b) Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
 - c) Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d) Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
- 3) Peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi), melalui strategi:
 - a) Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah.
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal.
 - c) Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi daerah.
- 4) Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya, melalui strategi:
 - a) Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.

- b) Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat.
 - c) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - d) Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung.
 - e) Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk *enclave* dan relokasi.
 - f) Melarang aktivitas penduduk dalam hutan lindung.
- 5) Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui strategi:
- a) Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
 - b) Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c) Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
 - d) Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- 6) Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui strategi:
- 1) Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).

- 2) Peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- 3) Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- 4) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- 5) Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.
- 6) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

b. Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

- 1) Pemantapan sistem pusat perkotaan di Kabupaten Dairi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).
- 2) Pengembangan sistem infrastruktur yang terintegrasi, meliputi : jaringan transportasi darat dan danau, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air baku/bersih dan jaringan prasarana wilayah lainnya yang dikembangkan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan aksesibilitas secara berkesinambungan, sinergis dan berjenjang antar PKLp, PPL, PPK, hingga ke PKW yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.

c. Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

- 1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung dalam RPJMD tahun 2019-2024 diarahkan pada :
 - a) kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan abrasi.
 - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi cekungan air tanah Sidikalang dan sempadan mata air.
- 2) Kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2019-2024.
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya dalam RPJMD tahun 2019-2024 diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan produksi komoditas pertanian unggulan dan ketersediaan pangan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
 - a) pertanian tanaman pangan yang dikembangkan pada lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial yang tersebar di seluruh kecamatan,
 - b) pertanian hortikultura yang dikembangkan pada lahan tersebar meliputi Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Berampu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan Kecamatan Pegagan Hilir.
 - c) tanaman perkebunan dikembangkan dan diarahkan pada lahan yang tersebar di seluruh kecamatan.
 - d) peternakan diarahkan pada pengembangan sentra peternakan besar dan kecil di seluruh Kecamatan.

- e) perikanan diarahkan dan dikembangkan untuk perikanan tangkap dan budidaya perikanan meliputi Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Silima Punga-Punga Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Lae Parira.
 - f) industri diarahkan dan dikembangkan untuk mendukung pengolahan produk pertanian khususnya komoditas pertanian unggulan dalam rangka peningkatan nilai tambah pertanian dengan memperhatikan konektivitas sentra produksi pertanian.
 - g) pariwisata diarahkan dan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam, budaya dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- 4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam RPJMD 2019-2024 diarahkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terintegrasi dalam pengembangan kepariwisataan, pertanian dan perkotaan serta lingkungan hidup.

6.4. Program Pembangunan Daerah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan

berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Dairi juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2020-2024.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Dairi, akan dilaksanakan melalui serangkaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2020-2024 yang akan mendorong terjadinya “lompatan” dalam pembangunan Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut :

1. Akses Pendidikan Untuk Semua (DAIRI CERDAS).

Pemerataan pendidikan lebih diarahkan untuk pemerataan pelayanan pendidikan dan mendorong wilayah kecamatan dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan lainnya yaitu peningkatan mutu layanan pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan. Lebih lanjut, pelayanan pendidikan di Kabupaten Dairi diarahkan untuk mendorong dan melindungi partisipasi kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan untuk mendorong kelompok miskin memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka berpenghasilan sehingga dapat hidup secara layak dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa secara baik.

Sekolah Unggul merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan, antara lain meliputi:

- a. Kelas Pintar; mengembangkan kelas-kelas yang dilengkapi dengan teknologi dan mengembangkan kelas jarak jauh agar bisa mengembangkan pendidikan untuk semua kalangan (SEKOLAH DIGITAL).
- b. Sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas.
- c. Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
- d. Arah pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar.
- e. Pengembangan minat dan bakat melalui ekstra kurikuler sekolah.

2. DAIRI SEHAT.

Pembangunan sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat, mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukan.

3. AGRI UNGGUL.

Pembangunan pertanian AGRI UNGGUL dikembangkan dari konsep pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi (*smart farming*) berdasarkan komoditas pertanian unggulan guna meningkatkan produksi dan nilai tambah produksi dari komoditas pertanian unggulan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dapat diwujudkan sekaligus menciptakan kondisi ketahanan pangan yang mantap.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian menjadi suatu keharusan untuk menguasai teknik budi daya pertanian yang tepat dan didukung dengan penerapan teknologi informasi yang dapat membantu petani dalam prediksi hasil panen, manajemen resiko, keamanan pangan dan pencegahan dan penanggulangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), manajemen operasional sampai kepada pemasaran produk pertanian.

4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI).

Rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas difokuskan kepada penumbuhan kewirausahaan, peluang dan lapangan kerja baru serta sinergisitas dengan sektor pembangunan ekonomi daerah, melalui:

a. Ekonomi digital.

Pengembangan ekonomi digital dilakukan guna meningkatkan nilai kompetitif produk atau komoditas KUKM Kabupaten Dairi di pasar nasional maupun global melalui pemanfaatan teknologi informasi.

b. Inkubator bisnis.

Pengaplikasian inkubator bisnis dilakukan sebagai bentuk pendukungan terhadap wirausaha baru khususnya Koperasi,

Usaha Mikro dan Kecil melalui pembinaan dan pendampingan manajemen usaha, akses modal, serta pemasaran.

c. *Creative/Start-up hub*.

Pengembangan *creative/start-up hub* diterjemahkan kedalam pengembangan sarana dan prasarana kota dan desa kreatif untuk menunjang pengembangan kualitas produk dan pengembangan promosi produk ekonomi kreatif.

d. Reaktivasi *Storage* dan industri kecil di tingkat kecamatan/desa.

Pengembangan gudang (*storage*) pertanian dan perikanan dilakukan melalui penanganan pasca panen terhadap komoditas unggulan pertanian dengan pemanfaatan dan pengembangan gudang (*storage*) yang ada untuk menampung dan menurunkan resiko kerusakan hasil panen, serta mengatur tata niaga untuk mengendalikan harga komoditas pertanian dan perikanan.

5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan.

Rencana pembangunan terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Dairi terbagi menjadi 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

a. Membangun akses ke destinasi yang sudah ada, yang diterjemahkan kedalam rencana:

- 1) Pembangunan akses infrastruktur transportasi, perhubungan, dan telekomunikasi;
- 2) Pembiayaan, *off taker*, dan promosi usaha kreatif sebagai upaya peningkatan kualitas dan peningkatan akses pasar produk ekonomi kreatif;
- 3) Pengembangan fasilitasi *meeting, incentives, conferences and exhibition* (MICE) dan pusat-pusat informasi kepariwisataan (*tourist information center*) yang berperan sebagai *tourism hub*.
- 4) Pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan lembaga, pengembangan *roadmap*, pengembangan sarana dan prasarana kota (SIDIKALANG BERKAT = Bersih, Kreatif, Aman dan Terang) dan desa kreatif, pengembangan kualitas produk dan pengembangan promosi produk ekonomi kreatif.

- 5) Pengembangan destinasi wisata Geopark Kaldera Toba di Kabupaten Dairi melalui peningkatan akses infrastruktur, amenitas, dan atraksi, serta pengajuan ke dalam jaringan geopark nasional dan internasional untuk meningkatkan promosi.
- b. Membangun destinasi wisata baru, yang diterjemahkan kedalam rencana:
 - 1) Pembangunan dan revitalisasi tujuan wisata yang meliputi pengembangan akses infrastruktur, amenitas dan atraksi di destinasi wisata.
 - 2) Pengembangan desa wisata melalui revitalisasi seni budaya lokal, mengemas aktivitas penduduk lokal menjadi atraksi, pengembangan *homestay* dan sarana prasarana amenitas lainnya, internalisasi nilai sapta pesona di masyarakat, pengembangan produk ekonomi kreatif setempat, penyediaan akses infrastruktur, energi dan telekomunikasi.

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah.

Dalam mensukseskan tujuan dari pembangunan daerah, dari sisi infrastruktur konektivitas dapat diprioritaskan beberapa kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Sektor Perhubungan:
 - 1) Penataan terminal di Kecamatan Sitinjo.
 - 2) Penataan terminal di kecamatan yang berfungsi PKLp.
 - 3) Pembangunan dermaga di Kecamatan Silahisabungan.
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana sektor transportasi lainnya.
- b. Sektor Bina Marga:
 - 1) Peningkatan jalan lingkaran dalam Kecamatan Sidikalang.
 - 2) Peningkatan jalan lingkaran luar Kecamatan Sidikalang.
 - 3) Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa.
 - 4) Pembangunan infrastruktur jalan lainnya.
- c. Sektor Perdagangan:
 - 1) Pembangunan Pasar Sidikalang menuju pasar semi modern.

- 2) Reaktivasi dan pengembangan Pasar Sumbul dan pasar lainnya di kecamatan sebagai Pusat Distribusi Wilayah,

7. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri

Rencana pembangunan terkait gerakan bangun desa unggul mandiri, meliputi:

- a. Satu kecamatan satu BUMDes Unggul.

Pengembangan Desa dalam Kecamatan melalui pemetaan dan pengklasifikasian komoditas unggulan desa dengan instansi terkait, pendampingan pengembangan usaha BUMDes Unggul dan kualitas produk, pengembangan akses pasar baik melalui pembangunan sarana prasarana, maupun pengembangan kemitraan dengan badan usaha lainnya.

- b. Desa Kreatif Unggul (DEKU).

Pemberian penghargaan Desa Kreatif Unggul oleh Pemerintah Kabupaten Dairi bagi Desa yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal dengan pemanfaatan APBD desa dan potensi desa sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan desa.

- c. Irigasi pertanian desa.

Pengembangan irigasi pertanian desa melalui pembangunan jaringan irigasi usaha tani (Jitut) dan jaringan irigasi desa (Jides) yang sebelumnya dilakukan penetapan lokasi sumber air dan lahan yang akan dialiri.

- d. Desa Digital.

Desa Digital merupakan upaya pemberdayaan desa melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan aplikasi berbasis web/mobile dan pelatihan sumber daya manusia sebagai aktor utama perubahan di desa yang bertujuan untuk mengolah dan mengoptimalkan potensi desa yang ada melalui media informasi dan komunikasi digital, sehingga sebaran informasi dua arah menjadi lebih luas dan lebih beragam.

e. Desa Wisata.

Banyaknya potensi-potensi wisata di Kabupaten Dairi yang belum tersentuh, perlu dilakukan gerakan untuk meningkatkan pengelolaan daerah wisata sebagai destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan melalui pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat yaitu DESA WISATA.

8. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT)

Dalam rangka mewujudkan birokrasi unggul selama kurun waktu lima tahun akan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang mencakup penerapan aplikasi umum dan aplikasi khusus. Inovasi pelayanan publik mencakup kebijakan pelayanan bidang perizinan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan persampahan dan layanan ketentraman dan ketertiban.

Kebijakan pelayanan bidang perizinan melalui kemudahan perizinan untuk berusaha di Kabupaten Dairi diharapkan memberikan peluang investasi di Kabupaten Dairi dan meningkatkan terserapnya tenaga kerja berskala lokal.

Kebijakan Layanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui jemput bola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari desa, pemberian akta perkawinan bagi masyarakat diharapkan meningkatkan cakupan layanan dokumentasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kebijakan pengelolaan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana sampah untuk melayani permukiman dan areal komersial, pengembangan tempat penampungan sementara di setiap permukiman, pengembangan pengelolaan sampah di setiap kecamatan dan pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah di PKW, PPK dan PPL diharapkan memberikan nilai yang positif dan peningkatan kualitas lingkungan.

Kebijakan ketentraman dan ketertiban dengan menggalakkan kembali sistem keamanan lingkungan, pengembangan desa siaga dan tanggap dalam menghadapi kebencanaan diharapkan memberikan kenyamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang kondusif dalam berusaha dan berinvestasi, desa yang tangguh menghadapi bencana sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan tahan bencana.

Berdasarkan analisis dan perumusan strategi dan arah kebijakan yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 dan arah kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan program pembangunan Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi. Arah kebijakan pembangunan daerah dan nomenklatur program pembangunan daerah yang dirumuskan juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional agar tercipta sinergisitas pembangunan daerah dan pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024
VISI : "MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2020		2021		2022		2023					2024	
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)			
1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.	1.1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap	1.1.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan			4.878.600		5.122.530		5.378.657		5.647.589		5.929.969		26.957.345	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
					- Padi Sawah	kw/ha	59,99	60,59		61,20		61,81		62,43		63,05		63,68		
					- Padi Ladang	kw/ha	34,44	34,78		35,13		35,48		35,84		36,20		36,56		
					- Jagung	kw/ha	62,93	63,56		64,19		64,84		65,49		66,14		66,80		
					Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,39	100,10		100,11		100,12		100,13		100,14		100,14		
					1.1.2 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan Daerah	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,40%	92,30%	1.606.300	94,30%	1.686.615	96,30%	1.770.946	98,10%	1.859.493		100,00%
		Persentase Konsumsi Energi Per kapita	%	91,72%				91,87%		92,02%		92,17%		92,32%		92,47%		92,47%		
		Persentase Konsumsi Protein Per kapita	%	95,00%				95,50%		96,00%		96,50%		97,00%		97,50%		97,50%		
		Ketersediaan pangan utama (produksi/tahun)	ton/ tahun	59.741				60.338		60.935		61.533		62.130		62.728		62.728		
		Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita/ hari	3.897				3.995		4.053		4.111		4.169		4.227		4.227		
		Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita/ hari	93,24				94,64		96,04		97,44		98,84		100,24		100,24		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	9	10		10		10		10		10		10					
		1.1.3 Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Program Percepatan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	8	10	1.876.500	12	1.970.325	14	2.068.841	16	2.172.283	18	2.280.897	18	10.368.847	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	unit	728	733		738		743		748		753		753		
					Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51		3,06		3,56		4,01		4,41		4,41		
					Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	orang	100	100		100		100		100		100		600		
					Jumlah sentra IKM potensial	sentra	0	1		1		1		1		1		5		
					Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40		0,41		0,42		0,43		0,44		0,44		
2 Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	2.1 Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	2.1.1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Program Upaya Kesehatan	Cakupan terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	%	65%	70%	54.816.300	75%	57.557.115	80%	60.434.971	85%	63.456.719	90%	66.629.555	90%	302.894.660	Dinas Kesehatan
					Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	orang	3,0	2,0		2,0		2,0		1,0		1,0		1,0		
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	orang	70	65		60		55		50		45		45		
					Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								2020		2021		2022		2023		2024					
								target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)				
					Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Kesehatan		
					Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		0		100%		100%		85%			
					Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta (/100.000 Penduduk)	orang	< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1			
					Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji (/100.000 Penduduk)	orang	< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1			
					Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue) (/100.000 Penduduk)	orang	55	53		50		48		45		40		40			
					Usia Harapan Hidup	Tahun	69,2	69,3		69,5		69,7		69,9		70,1		70,1			
					Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Keluarga Menjadi Anggota JKN	%	80%	85%		85%		90%		95%		95%		95%			
					Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	12	18		18		18		18		18		18			
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapat perawatan kesehatan	%	85%	87%	3.786.500	90%	3.975.825	93%	4.174.616	97%	4.383.347	100%	4.602.514	100%		20.922.803	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Gizi Buruk	%	0,17%	0,16%		0,15%		0,14%		0,13%		0,12%		0,12%			
					Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,50%	1,40%		1,30%		1,20%		1,10%		1,00%		1,00%			
					Ketersediaan obat di Puskesmas	%	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%			
					Persentase Industry Rumah Tangga Yang Memiliki Izin PIRT	%	80%	85%		85%		90%		90%		100%		100%			

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								2020		2021		2022		2023		2024							
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)		target	Rp (x 1000)			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan RT ber PHBS	%	66%	68%	843.900	70%	886.095	66%	930.400	68%	976.920	70%	1.025.766	70%	4.663.080	Dinas Kesehatan			
					Cakupan Keluarga Mempunyai Akses / Menggunakan Jamban Sehat	%	90%	92%		94%		96%		98%		100%		100%					
					Persentase TTU/TPM Yang memenuhi Syarat kesehatan	%	85%	87%		90%		93%		97%		100%		100%					
					Cakupan desa siaga aktif	%	69%	70%		72%		69%		70%		72%		72%					
					Meningkatnya jumlah posyandu mandiri	posyandu	15	30		45		60		70		80		80					
				Program Kepemudaan	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan	orang	1.439	1.450	651.000	1.450	683.550	1.450	717.728	1.500	753.614	1.500	791.295	1.500	3.597.186	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga			
					Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	OKP	47	50		50		50		50		50		50					
				Program Keolahragaan	Terselenggaranya kompetisi olah raga	cabang olah raga	7	7	734.998	7	771.748	7	810.335	7	850.852	7	893.395	7	4.061.327	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga			
					Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
				2.1.2 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Program Manajemen Pendidikan	APK PAUD	%	29,97%	31,00%	79.724.900	32,00%	83.711.145	33,00%	87.896.702	34,00%	92.291.537	35,00%	96.906.114	35,00%	440.530.399	Dinas Pendidikan
								Jumlah PAUD	Unit	191	205		207		209		211		213		213		
								Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	106,52%	106,82%		107,02%		107,22%		107,42%		107,62%		107,62%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%					95,41%	95,61%		95,71%		95,81%		95,91%		96,01%		96,01%				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%					96,63%	96,73%		96,78%		96,82%		96,88%		96,92%		96,92%				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%					76,59%	76,75%		76,85%		76,95%		77,05%		77,15%		77,15%				
		Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	%					99,17%	99,30%		99,35%		99,40%		99,45%		99,50%		99,50%				
		Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%					99,37%	99,47%		99,52%		99,57%		99,62%		99,67%		99,67%				
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun					9,57	9,58		9,59		9,60		9,61		9,62		9,62				
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%					0,29%	0,21%		0,18%		0,15%		0,11%		0,09%		0,09%				
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%					0,47%	0,43%		0,39%		0,36%		0,31%		0,27%		0,27%				
		Angka Kelulusan SD/MI	%					100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%					100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
		Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	%					100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
		Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	%					100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
		Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%					93,00%	94,00%		95,00%		96,00%		97,00%		98,00%		98,00%				
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	95,50%	96,00%		96,50%		97,00%		97,50%		98,00%		98,00%								
		Angka Melek Huruf Usia 15-44 Tahun	%	99,86%	99,87%		99,88%		99,89%		99,90%		99,91%		99,91%								
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	70,96%	74,19%		75,80%		77,41%		79,03%		80,64%		80,64%								

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2020		2021		2022		2023		2024						
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)					
				Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	25.000	25.500	350.000	26.000	367.500	26.500	385.875	27.000	405.169	27.500	425.427	27.500	1.933.971	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
					Jumlah perpustakaan yang ada	unit	303	305		307		309		311		313		313				
					Jumlah koleksi buku	judul	14.680	15.680		146.680		147.680		18.680		19.680		19.680				
					Jumlah perpustakaan yang dikembangkan/ dibina	unit	57	59		61		63		65		67		67				
		2.1.3	Meningkatnya cakupan keluarga berencana	Menurunnya kelahiran total/ Total fertility rate (TFR)	Program Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	%	3,70%	3,69%	2.508.700	3,68%	2.634.135	3,67%	2.765.842	3,66%	2.904.134	3,65%	3.049.341	3,65%	13.862.151	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
						Menurunnya kebutuhan ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,90%	4,85%		4,80%		4,75%		4,70%		4,65%		4,65%			
						Menurunnya kelahiran total/Total fertility rate (TFR)	%	2,86	2,84		2,82		2,8		2,78		2,76		2,76			
						Rasio Akseptor KB	%	60%	60%		61%		61%		62%		62%		62%			
					Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	4	4		3,8		3,6		3,5		3,1		3,1				
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	0,030%	0,028%	1.288.500	0,026%	1.352.925	0,024%	1.420.571	0,022%	1.491.600	0,020%	1.566.180	0,020%	7.119.776		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
						Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	%	18,18%	36,36%		55%		73%		91%		100%		100%			
						Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	%	18,18%	36,36%		55%		73%		91%		100%		100%			
		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak	%		55%	60%	942.077	63%	989.181	65%	1.038.640	67%	1.090.572	70%	1.145.100	70%	5.205.570	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB			
		2.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM/ PUSKESOS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	5%	5%	1.294.300	5%	1.359.015	5%	1.426.966	5%	1.498.314	5%	1.573.230		5%	7.151.825	Dinas Sosial
						Jumlah panti sosial/ rumah singgah/ rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	unit	1	1		1		1		1		1			1		
						Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	5,20%	5,50%		5,80%		6,00%		6,20%		6,50%			6,50%		
						Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat KAT	%	5%	10%		20%		25%		30%		35%		35%			

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								2020		2021		2022		2023					2024				
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)						
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	NA	100%	344.200	100%	361.410	100%	379.481	100%	398.455	100%	418.377	100%	1.901.922	Dinas Sosial			
					Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
					Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
					Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
					Persentase Kemiskinan	%	8,20	8,14		8,08		8,02		7,96		7,90		7,90					
				Program Perlindungan Jaminan Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	%	NA	100%	1.000.000	100%	1.050.000	100%	1.102.500	100%	1.157.625	100%	1.215.506	100%	5.525.631	Dinas Sosial			
					2.1.5 Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang	48	64	530.250	64	556.763	64	584.601	64	613.831	64	644.522	64	2.929.966	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
								Tingkat pengangguran terbuka	%	1,40	1,36		1,34		1,32		1,30		1,28		1,28		
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	520	520	315.000	520	330.750	520	347.288	520	364.652	520	382.884	520	1.740.574	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
3	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah	3.1 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	3.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Persampahan	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	45%	59%	1.899.100	68%	1.994.055	74%	2.093.758	79%	2.198.446	83%	2.308.368	83%	10.493.726	Dinas Lingkungan Hidup		
						Operasionalisasi TPA di kabupaten	≥ 71 (nilai TPA) ton	71,43	72,12		72,62		73,12		73,62		74,12		74,12				
						Persentase sampah yang tertangani melalui 3R		71,75	78,92		86,82		95,5		105,05		115,55		481,84				
						Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	35,11%	58,61%		70,93%		81,13%		89,08%		97,99%		97,99%				
						Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah B3	unit							1			1						
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	75%	75%	586.200	78%	615.510	80%	646.286	82%	678.600	85%	712.530	85%	3.239.125	Dinas Lingkungan Hidup			
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,31	65,6		66,6		67,6		68,6		69,6		69,6					
					Peningkatan indeks kualitas air	indeks	70	71		72		73		74		75		75					
					Peningkatan indeks kualitas udara	indeks	55,55	81		82		83		84		85		85					
					Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	indeks	46,61	50		51		52		53		54		54					

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2020		2021		2022		2023		2024						
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)					
					Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Lingkungan Hidup			
					Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	150	150		150		150		150		150		150				
					Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	batang	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
					Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	lokasi	7	7		7		7		7		7		7				
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	dokumen	7	4	353.200	3	370.860	4	389.403	3	408.873	3	429.317	21	1.951.653	Dinas Lingkungan Hidup		
			3.1.2 Meningkatkan pengelolaan pariwisata	Jumlah Kunjungan wisata	Program Destinasi Parawisata	Jumlah Objek Wisata	objek	2	2	6.152.400	3	6.460.020	3	6.783.021	3	7.122.172	3	7.478.281	3	33.995.894	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
						Jumlah Kunjungan wisata	orang	128.000	130.000		135.000		140.000		145.000		150.000		150.000			
						Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	1,75	1,80		1,85		1,90		1,95		2,00		2,00			
					Program Pemasaran Parawisata	Jumlah event pariwisata	event	3	3	516.700	3	542.535	3	569.662	3	598.145	3	628.052	3	2.855.094	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
						Program Kebudayaan	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	%	20%	20%	1.222.000	20%	1.283.100	20%	1.347.255	20%	1.414.618	20%	1.485.349	20%	6.752.321	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
							Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	1	1		1		1		1		1		1		
							Cakupan fasilitasi pengkajian seni budaya daerah	kegiatan	3	4		4		4		4		4		4		
	Jumlah grup/ kelompok kesenian	unit	5	5			5		5		5		5		5							
	Cakupan pagelaran seni dan budaya	pagelaran	3	4			4		4		4		4		4							
		Cakupan sarana dan prasarana seni	unit	1	1		1		1		1		1		1							
3.1.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif	Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	unit	1.544	1.594	1.000.000	1.634	1.050.000	1.684	1.102.500	1.744	1.157.625	1.814	1.215.506	1.814	5.525.631	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
				Jumlah UMKM yang terfasilitasi	unit	30	40		50		60		70		80		80					
				Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51		3,06		3,56		4,01		4,41		4,41					

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2020		2021		2022		2023		2024					
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)				
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	unit	25	30	362.700	35	380.835	40	399.877	45	419.871	50	440.864	50	2.004.146	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Jumlah Koperasi Sehat	unit	5 koperasi	10 koperasi		15 koperasi		20 koperasi		25 koperasi		30 koperasi		30 koperasi				
4 Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan <i>Good Governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik) dan <i>Clean Government</i> (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>).	4.1.1 Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, administrasi umum, pengorganisasia n dan tata kerja, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	3	1.120.000	3	1.176.000	3	1.234.800	3	1.296.540	3	1.361.367	3	6.188.707	Sekretariat Daerah	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	%	70,75	71,46		72,17		72,89		73,62		74,36		74,36				
				Persentase analisis kebijakan organisasi	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC		B		B		B		B		B				
				Nilai LPPD	kriteria	Sedang	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang				
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya persidangan di DPRD	%	100%	100%	12.429.883	100%	13.039.526	100%	13.691.502	100%	14.376.077	100%	15.094.881	100%	68.631.869		Sekretariat DPRD
				Rasio pembahasan prolegda	%	15%	15%		15%		15%		15%		15%		15%				
				Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu				
				Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu				
				Jumlah pelaksanaan reses	kali	3	3		3		3		3		3		3				
				Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	kali	15	15		15		15		15		15		15				
				Terciptanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	dokumen	4	4		4		4		4		4		4				
				Terfasilitasinya kesehatan anggota DPRD	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	609	1.376	6.948.450	1.102	7.295.873	1.012	7.660.666	962	8.043.699	1.112	8.445.884	5.564	38.394.572		BKPSDM

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2020		2021		2022		2023		2024				
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)			
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	%	90%	90%	1.060.285	90%	1.113.299	90%	1.168.964	90%	1.227.412	90%	1.288.783	90%	5.858.744	Inspektorat
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Indeks Persepsi	Indeks		60		63		66		69		72		72		
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	3	232.050	3	243.653	3	255.835	3	268.627	4	282.058	4	1.282.223	Inspektorat
				Program Penataan Desa	Jumlah desa cepat berkembang	Desa	27	5	1.700.000	5	1.785.000	5	1.874.250	5	1.967.963	27	2.066.361	52	9.393.573	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa terbentuk	Desa	15	15		15		15		15		15		75		
					Jumlah Pembentukan BUMdes dan BUMdes Bersama	BUMdes	35	25		25		25		25		26		161		
					Persentase Desa yang mempunyai Produk unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	%	10%	10%		10%		10%		10%		10%		60%		
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RPDP	%	100%	100%	2.401.200	100%	2.521.260	100%	2.647.323	100%	2.779.689	100%	2.918.674	100%	13.268.146	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
					Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target	%	NA	75%		76%		77%		78%		79%		79%		
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sidikalang	%	0,00	60,00	704.360	65,00	739.578	70,00	776.557	75,00	815.385	80,00	856.154	80,00	3.892.034	Kec. Sidikalang
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,20	78,40		78,60		78,80		79,00		79,20		79,20		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sumbul	%	0,00	60,00	530.250	65,00	556.763	70,00	584.601	75,00	613.831	80,00	644.522	80,00	2.929.966	Kec. Sumbul
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	77,20	77,40		77,60		77,80		78,00		78,20		78,20		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Silima Pungga-pungga	%	0,00	60,00	372.750	65,00	391.388	70,00	410.957	75,00	431.505	80,00	453.080	80,00	2.059.679	Kec. Silima Pungga-pungga
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Indeks	76,80	77,00		77,20		77,40		77,60		77,80		77,80		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Siempat Nempu	%	0,00	60,00	392.070	65,00	411.674	70,00	432.257	75,00	453.870	80,00	476.564	80,00	2.166.434	Kec. Siempat Nempu
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	76,60	76,80		77,00		77,20		77,40		77,60		77,60		

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2020		2021		2022		2023					2024	
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)			
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Tigalingga</u>	%	0,00	60,00	414.750	65,00	435.488	70,00	457.262	75,00	480.125	80,00	504.131	80,00	2.291.756	Kec. Tigalingga
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Tigalingga</u>	Indeks	77,40	77,60		77,80		78,00		78,20		78,40		78,40		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Tanah Pinem</u>	%	0,00	60,00	441.320	65,00	463.386	70,00	486.555	75,00	510.883	80,00	536.427	80,00	2.438.572	Kec. Tanah Pinem
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Tanah Pinem</u>	Indeks	77,00	77,20		77,40		77,60		77,80		78,00		78,00		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Dumunan Hilir</u>	%	0,00	60,00	380.100	65,00	399.105	70,00	419.060	75,00	440.013	80,00	462.014	80,00	2.100.292	Kec. Pegagan Hilir
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Pegagan Hilir</u>	Indeks	76,00	76,20		76,40		76,60		76,80		77,00		77,00		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Parbuluan</u>	%	0,00	60,00	385.350	65,00	404.618	70,00	424.848	75,00	446.091	80,00	468.395	80,00	2.129.302	Kec. Parbuluan
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Parbuluan</u>	Indeks	76,40	76,60		76,80		77,00		77,20		77,40		77,40		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Siempat Nempu Hilir</u>	%	0,00	60,00	366.700	65,00	385.035	70,00	404.287	75,00	424.501	80,00	445.726	80,00	2.026.249	Kec. Siempat Nempu Hilir
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Siempat Nempu Hilir</u>	Indeks	75,80	76,00		76,20		76,40		76,60		76,80		76,80		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Siempat Nempu Hulu</u>	%	0,00	60,00	396.900	65,00	416.745	70,00	437.582	75,00	459.461	80,00	482.434	80,00	2.193.123	Kec. Siempat Nempu Hulu
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Siempat Nempu Hulu</u>	Indeks	76,20	76,40		76,60		76,80		77,00		77,20		77,20		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Lae Parira</u>	%	0,00	60,00	353.100	65,00	370.755	70,00	389.293	75,00	408.757	80,00	429.195	80,00	1.951.100	Kec. Lae Parira
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Lae Parira</u>	Indeks	74,80	75,00		75,20		75,40		75,60		75,80		75,80		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Gunung Sitember</u>	%	0,00	60,00	365.610	65,00	383.891	70,00	403.085	75,00	423.239	80,00	444.401	80,00	2.020.226	Kec. Gunung Sitember
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Gunung Sitember</u>	Indeks	74,60	74,80		75,00		75,20		75,40		75,60		75,60		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Berampu</u>	%	0,00	60,00	327.600	65,00	343.980	70,00	361.179	75,00	379.238	80,00	398.200	80,00	1.810.197	Kec. Berampu
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Berampu</u>	Indeks	75,00	75,20		75,40		75,60		75,80		76,00		76,00		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Silahisabungan</u>	%	0,00	60,00	304.500	65,00	319.725	70,00	335.711	75,00	352.497	80,00	370.122	80,00	1.682.555	Kec. Silahisabungan
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Silahisabungan</u>	Indeks	75,60	75,80		76,00		76,20		76,40		76,60		76,60		
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan <u>Sitinjo</u>	%	0,00	60,00	187.960	65,00	197.358	70,00	207.226	75,00	217.587	80,00	228.467	80,00	1.038.598	Kec. Sitinjo
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan <u>Sitinjo</u>	Indeks	75,40	75,60		75,80		76,00		76,20		76,40		76,40		

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2020		2021		2022		2023		2024				
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)			
				Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan di Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,20	78,40	2.238.700	78,60	2.350.635	78,80	2.468.167	79,00	2.591.575	79,20	2.721.154	79,20	12.370.231	Kec. Sidikalang
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Juhri I	Indeks	77,20	77,40	345.900	77,60	363.195	77,80	381.355	78,00	400.422	78,20	420.444	78,20	1.911.316	Kec. Sumbul
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Parongli	Indeks	76,80	77,00	259.600	77,20	272.580	77,40	286.209	77,60	300.519	77,80	315.545	77,80	1.434.454	Kec. Silima Punga-punga
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Panji Dibastar	Indeks	75,40	75,60	264.900	75,80	278.145	76,00	292.052	76,20	306.655	76,40	321.988	76,40	1.463.740	Kec. Sitinjo
		4.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan Asset Daerah.	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan APBD tepat waktu (31 Desember)	31-Dec	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.237.900	Tepat Waktu	3.399.795	Tepat Waktu	3.569.785	Tepat Waktu	3.748.274	Tepat Waktu	3.935.688	Tepat Waktu	17.891.441	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Terasistensinya DPA dan Anggaran kas SKPD	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	%	90%	90%	2.528.600	90%	2.655.030	90%	2.787.782	90%	2.927.171	90%	3.073.529	90%	13.972.111	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	%	1,97%	2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		
					Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	%	13,5%	13,5%		13,5%		13,5%		13,5%		13,5%		13,5%		
					Cakupan monitoring dan evaluasi retribusi daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		4.1.3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Program Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB):				1.934.800		2.031.540		2.133.117		2.239.773		2.351.761		10.690.991	BPBD
					- Gempa Bumi	%	0,703%	0,693%		0,683%		0,673%		0,662%		0,651%		0,651%		
					- Longsor	%	0,673%	0,664%		0,655%		0,647%		0,673%		0,627%		0,627%		
					- Kebakaran Hutan dan Lahan	%	0,648%	0,622%		0,614%		0,607%		0,598%		0,589%		0,589%		
					- Cuaca Ekstrim	%	0,580%	0,561%		0,554%		0,549%		0,541%		0,535%		0,535%		
					- Banjir/bandang	%	0,718%	0,708%		0,696%		0,686%		0,673%		0,661%		0,661%		
					- Kekeringan	%	0,684%	0,675%		0,666%		0,657%		0,646%		0,636%		0,636%		
					Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	50	60		65		70		75		80		80		
		4.1.4 Meningkatkan kualitas ketertarikan masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase penegakan Produk hukum daerah	Program Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Cakupan lingkungan yang aman dan nyaman	%	100%	100%	866.250	100%	909.563	100%	955.041	100%	1.002.793	100%	1.052.932	100%	4.786.578	SATPOL PP
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	%	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		
					Persentase penegakan produk hukum daerah	%	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								2020		2021		2022		2023		2024							
								target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)	target	Rp (× 1000)						
				Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	orang	700	500	895.800	500	940.590	500	987.620	500	1.037.000	500	1.088.850	3.200	4.949.860	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
					Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	forum	3	4		4		4		4		4		4					
					Terbentuknya tim kewaspadaan dini di daerah	Kecamatan	0	15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan					
					Tersedianya laporan informasi tentang kemandirian dan ketertiban	Laporan	0	180		180		180		180		180		900					
					Jumlah Parpol/Ormas/LSM/masyarakat yang dibina	Parpol, Ormas/LSM, Orang	9 Parpol, 59 Ormas/LSM, 300 Org	15 Parpol, 59 Ormas/LSM/300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/300 Org					
5 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.	5.1 Terwujudnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	5.1.1 Meningkatnya infrastruktur dasar	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Program Jalan Kabupaten	Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	km	20	20	90.836.000	20	95.377.800	20	100.146.690	20	105.154.025	20	110.411.726	20	501.926.240	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
					Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	58,08%	65,28%		69,94%		74,60%		79,27%		83,93%							
					Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	88,50%	91,21%		92,86%		94,51%		96,15%		97,80%							
					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%							
				Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Angka kecelakaan lalulintas	Jumlah Laka	414	108	1.700.000	98	1.785.000	88	1.874.250	78	1.967.963	68	2.066.361	68	9.393.573	Dinas Perhubungan			
					Cakupan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%							
					Meningkatnya keselamatan lalu lintas	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%							
					Jumlah kendaraan layak jalan	Unit	2.500	2.600		2.650		2.700		2.750		2.800							
				Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih/Air Minum Layak	%	62,80%	63,11%	10.962.700	63,43%	11.510.835	63,75%	12.086.377	64,07%	12.690.696	64,39%	13.325.230	64,39%	60.575.838	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
					Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	59,52%	62,86%		65,48%		68,10%		70,72%		73,34%		73,34%					
					5.1.2 Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,49%	88,67%	6.189.850	89,55%	6.499.343	90,45%	6.824.310	91,35%	7.165.525	92,27%	7.523.801	92,27%	34.202.829	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								Program Kawasan Permukiman	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	km	9,2	8	19.601.800	8	20.581.890	8	21.610.985	8	22.691.534	8	23.826.110	49,2	108.312.319
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%						46,80%	58,42%		64,26%		70,69%		77,76%		85,53%		85,53%			

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2020		2021		2022		2023		2024					
								target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)	target	Rp (x 1000)				
	5.2 Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informatika	5.2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan penanaman modal dan perizinan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	unit	15	112	802.900	123	843.045	138	885.197	154	929.457	174	975.930	174	4.436.529	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
					Jumlah nilai investasi	Milyar (Rp)	3.593,35	4.930,88	5.697,15	6.586,65	7.497,85	8.483,15									
					Pertumbuhan nilai realisasi investasi	Milyar (Rp)	533,27	623,50	766,27	889,50	911,20	985,30									
					Pertumbuhan nilai investasi PMDN	%	20,83%	72,87%	68,55%	52,08%	42,51%	40,67%									
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	izin	79	85	301.895	100	316.990	113	332.839	113	349.481	113	366.955	113	1.668.160		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
					Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (tepat waktu)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	indeks	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36									
					Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	80%	90%	90%	90%	90%	90%									
		5.2.2 Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	91,00%	93,00%	658.800	95,00%	691.740	97,00%	726.327	99,00%	762.643	100,00%	800.776	100,00%	3.640.286	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Persentase pasangan ber akte nikah	%	19%	25%	30%	35%	40%	45%									
					Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	32%	40%	45%	50%	55%	60%									
					Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	%	60%	70%	80%	90%	100%	100%									
					Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	97%	100%	100%	100%	100%	100%									
					Cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil	%	25,76%	32,50%	37,50%	42,50%	47,50%	52,50%									
		5.2.3 Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi publik	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi	Media	5 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7.819.000	7 Media desiminasi informasi	8.209.950	7 Media desiminasi informasi	8.620.448	7 Media desiminasi informasi	9.051.470	7 Media desiminasi informasi	9.504.043	7 Media desiminasi informasi	43.204.911	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	NA	20%	50%	100%	100%	100%									
		5.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Program Upaya Kesehatan	TOI (Turn Over Interval)	hari	1	1	46.191.200	1	48.500.760	1	50.925.798	1	53.472.088	1	56.145.692	1	255.235.538	RSUD Sidikalang	
					Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	kriteria	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama								
					Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	indeks	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36								
					BOR (Bad Occupacy Rate)	%	73,00%	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	79,00%								
					AVLOS (Average Length Of Stay)	hari	3	3	3	3	3	3	3								
					Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit yang baik	%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%								
					GDR (Gross Death Rate)	‰	30	30	29	29	29	28	28								

Tabel 6.4
 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan
 Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Pembangunan Kabupaten
 Dairi sebagaimana termuat Dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun
 2019-2024

No	Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024	Prioritas Provinsi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	Prioritas Kabupaten Dairi dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024
1	2	3	4
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	1. Akses Pendidikan untuk semua (Dairi Cerdas) Sekolah unggul merupakan kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui: - Kelas pintar - Sarana dan Prasarana sekolah yang berkualitas - Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik - Arah pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar - Pengembangan minat dan bakat siswa 2. Dairi sehat, yang diarahkan pada : - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan rujukan 3. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah (DAIRI GERAK CEPAT), melalui : - Kebijakan pelayanan perizinan - Kebijakan layanan

			kependudukan - Kebijakan pengelolaan persampahan - Kebijakan ketentraman dan ketertiban
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	1. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	1. Infrastruktur Konektivitas Wilayah dengan prioritas: - Sektor Perhubungan - Sektor Bina Marga - Sektor Perdagangan
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	1. Peningkatan kesempatan kerja	1. Pertumbuhan Ekonomi umat berbasis inovasi dan kreativitas (DAIRI KREASI), dilaksanakan melalui: - Ekonomi digital - Inkubator bisnis - Creative/Start-up hub - Reaktivasi storage dan industri kecil di tingkat kecamatan/desa 2. Pengembangan destinasi dan infrastruktur kepariwisataan 3. Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata	1. AGRI UNGGUL dengan mengembangkan pengelolaan pertanian yang cerdas dan berbasis teknologi (<i>smart farming</i>) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang membantu petani dalam prediksi hasil panen, manajemen resiko, kemandirian pangan dan pencegahan dan penanggulangan OPT.
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan		

6.5 Arah Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD Kabupaten Dairi memiliki dua fungsi utama, yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat (*social oriented*) dan menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan PAD (*profit oriented*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan dan pengembangan BUMD perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari bagian perekonomian Setda Kabupaten Dairi. Adapun arah pengembangan BUMD di Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Nciho

Arah pengembangan PDAM Tirta Nciho kedepannya adanya sinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi dalam hal pembangunan/penambahan jaringan untuk mencapai target kinerja cakupan masyarakat yang terlayani air bersih layak dapat dipenuhi sebagaimana indikator kinerja PDAM Tirta Nciho dalam hal peningkatan layanan cakupan air bersih sebesar 8% pertahun. Segala sarana air bersih yang merupakan aset daerah yang dibangun oleh Perangkat Daerah terkait diserahkan pengelolaannya kepada PDAM Tirta Nciho dan atau Desa/BUMdes. Dengan adanya pengelolaan yang profesional diharapkan kedepannya akan memberikan kontribusi terhadap PAD.

2. PD PASAR

Arah pengembangan PD PASAR kedepannya adanya sinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam hal pembangunan/penambahan sarana pasar untuk mencapai target kinerja persentase kios yang dikelola PD PASAR yang ditempati pedagang sebesar 100% pada Tahun 2024. Segala sarana pasar yang merupakan aset daerah yang dibangun oleh Perangkat Daerah terkait diserahkan pengelolaannya kepada PD PASAR. Dengan adanya pengelolaan yang profesional oleh PD PASAR diharapkan kedepannya akan memberikan kontribusi terhadap PAD.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Dairi pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu, karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Kepala Daerah. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi

penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Dairi secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	513.817.732.752	523.163.680.885	539.364.086.027	555.514.100.119	575.586.466.648
2.1.2	Belanja bunga	60.422.885	67.401.728	75.186.628	83.870.683	93.557.747
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	26.747.061.475	29.836.347.076	33.282.445.163	37.126.567.579	41.414.686.135
2.1.5	Belanja bantuan sosial	600.707.905	670.089.668	747.485.025	833.819.545	930.125.702
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa *	1.297.183.361	1.447.008.039	1.614.137.468	1.800.570.346	2.008.536.221
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa *	174.941.493.106	194.734.555.184	208.880.239.167	224.328.101.321	237.137.324.693
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.757.249.284	3.075.711.576	3.430.956.263	3.827.231.712	4.269.276.974
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	720.221.850.768	752.994.794.156	787.394.534.814	823.514.261.305	861.439.974.120
2.2	Belanja Langsung		-	-	-	-
2.2.1	Belanja pegawai	42.772.504.707	47.712.729.000	53.223.549.200	59.370.869.132	66.228.204.517
2.2.2	Belanja barang dan jasa	202.123.259.035	204.379.031.323	205.848.803.309	206.381.534.438	205.813.655.712
2.2.3	Belanja modal	291.550.893.258	311.165.378.676	332.347.642.491	355.238.592.430	379.998.684.771
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	536.446.657.000	563.257.139.000	591.419.995.000	620.990.995.000	652.040.545.000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.266.668.507.768	1.326.251.933.156	1.388.814.529.814	1.454.505.256.305	1.523.480.519.120

Sumber : Bappeda Kabupaten Dairi (data diolah)

7.2 Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada tabel 7.1 diatas maka ditetapkanlah pagu indikatif anggaran menurut urusan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi untuk Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada tabel 7.2 dan Tabel 7.3 berikut.

Tabel 7.2
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	URUSAN / PERANGKAT DAERAH		KERANGKA PENDANAAN					Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
			Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		351.814.700	369.405.435	387.875.707	407.269.492	427.632.967	1.943.998.301
1	01	PENDIDIKAN						
	01	01 Dinas Pendidikan	82.712.150	86.847.758	91.190.145	95.749.653	100.537.135	457.036.841
1	02	KESEHATAN						
	02	01 Dinas Kesehatan	61.912.150	65.007.758	68.258.145	71.671.053	75.254.605	342.103.711
	02	02 RSUD Sidikalang	48.814.750	51.255.488	53.818.262	56.509.175	59.334.634	269.732.308
1	03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	03	01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	115.603.150	121.383.308	127.452.473	133.825.097	140.516.351	638.780.378
1	04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.365.850	28.734.143	30.170.850	31.679.392	33.263.362	151.213.596
1	05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	05	01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.787.050	1.876.403	1.970.223	2.068.734	2.172.170	9.874.579
	05	02 Satuan Polisi Pamong Praja	4.521.500	4.747.575	4.984.954	5.234.201	5.495.912	24.984.142
	05	03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.376.150	5.644.958	5.927.205	6.223.566	6.534.744	29.706.622
1	06	SOSIAL						
	06	01 Dinas Sosial	3.721.950	3.908.048	4.103.450	4.308.622	4.524.053	20.566.123
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		46.237.449	48.549.321	50.976.788	53.525.627	56.201.908	255.491.093
2	01	TENAGA KERJA						
		Tenaga Kerja	1.010.550	1.061.078	1.114.131	1.169.838	1.228.330	5.583.927
2	02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	02	01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.495.467	3.670.240	3.853.752	4.046.440	4.248.762	19.314.662

No			URUSAN / PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN					Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	
1			2	3	4	5	6	7	8
2	03		PANGAN						
			Pangan	1.606.300	1.686.615	1.770.946	1.859.493	1.952.468	8.875.821
2	04		PERTANAHAN						
			Pertanahan	851.300	893.865	938.558	985.486	1.034.760	4.703.970
2	05		LINGKUNGAN HIDUP						
	05	01	Dinas Lingkungan Hidup	5.759.950	6.047.948	6.350.345	6.667.862	7.001.255	31.827.360
2	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL						
	06	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.869.450	3.012.923	3.163.569	3.321.747	3.487.834	15.855.523
2	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	07	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.402.450	4.622.573	4.853.701	5.096.386	5.351.205	24.326.315
2	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
			Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	3.585.100	3.764.355	3.952.573	4.150.201	4.357.711	19.809.941
2	09		PERHUBUNGAN						
	09	01	Dinas Perhubungan	4.049.750	4.252.238	4.464.849	4.688.092	4.922.496	22.377.425
2	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	10	01	Dinas Komunikasi dan Informatikan	8.875.000	9.318.750	9.784.688	10.273.922	10.787.618	49.039.977
2	11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.362.700	1.430.835	1.502.377	1.577.496	1.656.370	7.529.778
2	12		PENANAMAN MODAL						
		01	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	2.226.382	2.337.701	2.454.586	2.577.315	2.706.181	12.302.166
2	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
			Kepemudaan dan Olah Raga	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.038.766	13.814.078
2	14		STATISTIK						
			Statistik	406.000	426.300	447.615	469.996	493.496	2.243.406
2	15		PERSANDIAN						
			Persandian	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101	1.105.126
2	16		KEBUDAYAAN						
			Kebudayaan	1.222.000	1.283.100	1.347.255	1.414.618	1.485.349	6.752.321

No			URUSAN / PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN					Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	
1	2			3	4	5	6	7	8
2	17		PERPUSTAKAAN						
	17	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.600.550	1.680.578	1.764.606	1.852.837	1.945.479	8.844.049
2	18		KEARSIPAN						
			Kearsipan	214.500	225.225	236.486	248.311	260.726	1.185.248
3				35.271.550	37.035.128	38.886.884	40.831.228	42.872.789	194.897.579
3	01		PERIKANAN						
			Perikanan	630.000	661.500	694.575	729.304	765.769	3.481.148
3	02		PARIWISATA						
		01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	8.914.250	9.359.963	9.827.961	10.319.359	10.835.327	49.256.858
3	03		PERTANIAN						
		01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.290.850	10.805.393	11.345.662	11.912.945	12.508.592	56.863.442
3	06		PERDAGANGAN						
			Perdagangan	3.399.100	3.569.055	3.747.508	3.934.883	4.131.627	18.782.173
3	07		PERINDUSTRIAN						
		01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.037.350	12.639.218	13.271.178	13.934.737	14.631.474	66.513.957
4				46.324.205	48.640.415	51.072.436	53.626.058	56.307.361	255.970.475
4	01		PERENCANAAN						
		01	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah	5.000.950	5.250.998	5.513.547	5.789.225	6.078.686	27.633.406
4	02		KEUANGAN						
		01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6.810.900	7.151.445	7.509.017	7.884.468	8.278.692	37.634.522
		02	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.563.250	4.791.413	5.030.983	5.282.532	5.546.659	25.214.837
4	03		KEPEGAWAIAN						
		01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.867.200	12.460.560	13.083.588	13.737.767	14.424.656	65.573.771
4	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
			Penelitian dan Pengembangan	700.000	735.000	771.750	810.338	850.854	3.867.942
4	06		PENGAWASAN						
		01	Inspektorat	2.743.585	2.880.764	3.024.802	3.176.043	3.334.845	15.160.039

No			URUSAN / PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN					Akhir Periode RPJMD Tahun 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
				Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	Rp (x 1000)	
1			2	3	4	5	6	7	8
4	08		KEWILAYAHAN						
	08	01	Kecamatan Sidikalang	4.122.260	4.328.373	4.544.792	4.772.031	5.010.633	22.778.089
	08	02	Kecamatan Sumbul	1.330.260	1.396.773	1.466.612	1.539.942	1.616.939	7.350.526
	08	03	Kec. Silima Punga-punga	1.090.250	1.144.763	1.202.001	1.262.101	1.325.206	6.024.319
	08	04	Kecamatan Siempat Nempu	719.670	755.654	793.436	833.108	874.763	3.976.631
	08	05	Kecamatan Tigalingga	750.250	787.763	827.151	868.508	911.934	4.145.605
	08	06	Kecamatan Tanah Pinem	778.120	817.026	857.877	900.771	945.810	4.299.604
	08	07	Kecamatan Pegagan Hilir	637.050	668.903	702.348	737.465	774.338	3.520.103
	08	08	Kecamatan Parbuluan	659.150	692.108	726.713	763.049	801.201	3.642.220
	08	09	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	619.500	650.475	682.999	717.149	753.006	3.423.129
	08	10	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	709.890	745.385	782.654	821.786	862.876	3.922.590
	08	11	Kecamatan Lae Parira	603.550	633.728	665.414	698.685	733.619	3.334.995
	08	12	Kecamatan Gunung Sitember	754.830	792.572	832.200	873.810	917.501	4.170.912
	08	13	Kecamatan Berampu	579.250	608.213	638.623	670.554	704.082	3.200.722
	08	14	Kecamatan Silahisabungan	579.780	608.769	639.207	671.168	704.726	3.203.650
	08	15	Kecamatan Sitinjo	704.510	739.736	776.722	815.558	856.336	3.892.862
5			UNSUR PENDUKUNG	56.798.753	59.638.691	62.620.625	65.751.656	69.039.239	313.848.965
5			PEMERINTAHAN UMUM						
	01		Sekretariat Daerah	38.590.670	40.520.204	42.546.214	44.673.524	46.907.201	213.237.812
	02		Sekretariat DPRD	18.208.083	19.118.487	20.074.412	21.078.132	22.132.039	100.611.152
TOTAL				536.446.657	563.268.990	591.432.439	621.004.061	652.054.264	2.964.206.412

Tabel 7.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020-2024

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	02	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	02	01	KESEHATAN					61.912.150		65.007.758		68.258.145		71.671.053		75.254.605		342.103.711		
1	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.974.400	100%	2.073.120	100%	2.176.776	100%	2.285.615	100%	2.399.896	100%	10.909.806	Dinas Kesehatan
1	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	363.300	100%	381.465	100%	400.538	100%	420.565	100%	441.593	100%	2.007.462	Dinas Kesehatan
1	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	109.900	100%	115.395	100%	121.165	100%	127.223	100%	133.584	100%	607.267	Dinas Kesehatan
1	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Kesehatan
1	02	01	07	Program Upaya Kesehatan	Cakupan terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	%	65%	70%	54.816.300	75%	57.557.115	80%	60.434.971	85%	63.456.719	90%	66.629.555	90%	302.894.660	Dinas Kesehatan
					Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	orang	3	2,0		2		2		1,0		1		1		
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	orang	70	65		60		55		50		45		45		
					Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		85%		
					Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Orang Beresiko Tennesi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta (/100.000 Penduduk)	orang	< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
					Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji (/100.000 Penduduk)	orang	< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
					Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue) (/100.000 Penduduk)	orang	55	53		50		48		45		40		40		
					Usia Harapan Hidup	Tahun	69,2	69,3		69,5		69,7		69,9		70,1		70,1		
					Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan Keluarga Menjadi Anggota JKN	%	80%	85%		85%		90%		95%		95%		95%		
					Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	12	18		18		18		18		18		18		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	02	01	08	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapat perawatan kesehatan	%	85%	87%	3.786.500	90%	3.975.825	93%	4.174.616	97%	4.383.347	100%	4.602.514	100%	20.922.803	Dinas Kesehatan
					Prevalensi Gizi Buruk	%	0,17%	0,16%		0,15%		0,14%		0,13%		0,12%		0,12%		
					Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,50%	1,40%		1,30%		1,20%		1,10%		1,00%		1,00%		
					Ketersediaan obat di Puskesmas	%	75%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		
					Persentase Industry Rumah Tangga Yang Memiliki Izin PIRT	%	80%	85%		85%		90%		90%		100%		100%		
1	02	01	09	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan RT ber PHBS	%	66%	68%	843.900	70%	886.095	66%	930.400	68%	976.920	70%	1.025.766	70%	4.663.080	Dinas Kesehatan
					Cakupan Keluarga Mempunyai Akses / Menggunakan Jamban Sehat	%	90%	92%		94%		96%		98%		100%		100%		
					Persentase TTU/TPM Yang memenuhi Syarat kesehatan	%	85%	87%		90%		93%		97%		100%		100%		
					Cakupan desa siaga aktif	%	69%	70%		72%		69%		70%		72%		72%		
					Meningkatnya jumlah posyandu mandiri	posyandu	15	30		45		60		70		80		80		
1	02	02		RSU Sidikalang					48.814.750		51.255.488		53.818.262		56.509.175		59.334.634		269.732.308	
1	02	02	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.704.700	100%	1.789.935	100%	1.879.432	100%	1.973.403	100%	2.072.074	100%	9.419.544	RSLD Sidikalang
1	02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	155.300	100%	163.065	100%	171.218	100%	179.779	100%	188.768	100%	858.131	RSLD Sidikalang
1	02	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	745.700	100%	782.985	100%	822.134	100%	863.241	100%	906.403	100%	4.120.463	RSLD Sidikalang
1	02	02	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	RSUD Sidikalang
1	02	02	07	Program Upaya Kesehatan	TOI (Turn Over Interval)	hari	1	1	46.191.200	1	48.500.760	1	50.925.798	1	53.472.088	1	56.145.692	1	255.235.538	RSLD Sidikalang
					Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	kriteria	Dasar	Dasar		Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama	Utama			
					BOR (Bad Occupacy Rate)	%	73,00%	73,00%		73,00%		74,00%		74,00%		74,00%		74,00%		
					AVLOS (Average Length Of Stay)	hari	3	3		3		3		3		3		3		
					Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit yang baik	%	65,00%	70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		
					GDR (Gross Death Rate)	%	30	30		29		29		29		28		28		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Poin	70,75	71,46		72,17		72,89		73,62		74,36		74,36		
					NDR (Net Death Rate)	%	13	13		12		12		12		12		12		
1	03	01		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					115.603.150		121.383.308		127.452.473		133.825.097		140.516.351		638.780.378	
1	03	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	2.379.900	100%	2.498.895	100%	2.623.840	100%	2.755.032	100%	2.892.783	100%	13.150.450	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	6.699.400	100%	7.034.370	100%	7.386.089	100%	7.755.393	100%	8.143.163	100%	37.018.414	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	03	01	07	Program Sumber Daya Air	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	%	62,80%	63,11%	10.962.700	63,43%	11.510.835	63,75%	12.086.377	64,07%	12.690.696	64,39%	13.325.230	64,39%	60.575.838	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	59,52%	62,86%		65,48%		68,10%		70,72%		73,34%		73,34%		
1	03	01	08	Program Bangunan Gedung	Capaian ketersediaan bangunan pemerintah	%	100%	100%	1.270.200	100%	1.333.710	100%	1.400.396	100%	1.470.415	100%	1.543.936	100%	7.018.657	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	lokasi	2	2	500.000	2	525.000	2	551.250	2	578.813	2	607.753	2	2.762.816	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Jumlah lampu jalan yang terpelihara	unit	200	300		300		300		300		300		300		
1	03	01	10	Program Jalan	Peningkatan Konstruks Jalan Kabupaten	km	20	20	90.836.000	20	95.377.800	20	100.146.690	20	105.154.025	20	110.411.726	20	501.926.240	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	49,40%	56,75%		62,22%		68,06%		73,10%		78,70%		78,70%		
					Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	88,50%	91,21%		92,86%		94,51%		96,15%		97,80%		97,80%		
					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	03	01	11	Program Jasa Konstruksi	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi	orang	35	100	300.000	100	315.000	100	330.750	100	347.288	100	364.652	100	1.657.689	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	01	12	Program Penataan Ruang	Tersedianya dokumen rencana tata ruang	dokumen	1	2	2.532.100	2	2.658.705	2	2.791.640	2	2.931.222	2	3.077.783	2	13.991.451	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Meningkatnya pencendialian ruang	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Ketersediaan data/informasi urusan pekerjaan umum	dokumen	2	2		2		2		2		2		2		
1	04	01		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					27.365.850		28.734.143		30.170.850		31.679.392		33.263.362		151.213.596	
1	04	01	07	Program Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,49%	88,67%	6.189.850	89,55%	6.499.343	90,45%	6.824.310	91,35%	7.165.525	92,27%	7.523.801	92,27%	34.202.829	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04	01	08	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	km	9,2	8	19.601.800	8	20.581.890	8	21.610.985	8	22.691.534	8	23.826.110	49,2	108.312.319	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	46,80%	58,42%		64,26%		70,69%		77,76%		85,53%		85,53%		
1	04	01	09	Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan	Meter	2.700	3.000	1.574.200	3.000	1.652.910	3.000	1.735.556	3.000	1.822.333	3.000	1.913.450	3.000	8.698.449	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Unit SR	793	800		800		800		800		800		4793		
1	05			KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.787.050		1.876.403		1.970.223		2.068.734		2.172.170		9.874.579	
1	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	658.200	100%	691.110	100%	725.666	100%	761.949	100%	800.046	100%	3.636.970	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	110.200	100%	115.710	100%	121.496	100%	127.570	100%	133.949	100%	608.925	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024		
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	05	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	01	07	Program Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	orang	700	500	895.800	500	940.590	500	987.620	500	1.037.000	500	1.088.850	3.200	4.949.860	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan		forum	3	4		4		4		4		4		4			
			Terbentuknya tim kewaspadaan dini di daerah		Kecamatan	0	15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan			
			Tersedianya laporan informasi tentang keamanan dan keterlibatan		Laporan	0	180		180		180		180		180		900			
			Jumlah Parpol/Ormas/LSM/masyarakat yang dibina		Parpol, Ormas/LSM, Orang	9 Parpol, 59 Ormas/LSM, 300 Org	15 Parpol, 59 Ormas/LSM/ 300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/ 300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/ 300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/ 300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/ 300 Org		15 Parpol, 59 Ormas/LSM/ 300 Org			
1	05	02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4.521.500		4.747.575		4.984.954		5.234.201		5.495.912		24.984.142		
1	05	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	3.405.700	100%	3.575.985	100%	3.754.784	100%	3.942.523	100%	4.139.650	100%	18.818.642	SATPOL PP
1	05	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	126.700	100%	133.035	100%	139.687	100%	146.671	100%	154.005	100%	700.097	SATPOL PP
1	05	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	SATPOL PP
1	05	02	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	SATPOL PP
1	05	02	07	Program Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Cakupan lingkungan yang aman dan nyaman	%	100%	100%	866.250	100%	909.563	100%	955.041	100%	1.002.793	100%	1.052.932	100%	4.786.578	SATPOL PP
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keterlibatan, ketentraman, keindahan)		%	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%			
			Persentase penegakan produk hukum daerah		%	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%			
1	05	03		PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.376.150		5.644.858		5.927.205		6.223.566		6.534.744		29.706.622		
1	05	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.657.700	100%	1.740.585	100%	1.827.614	100%	1.918.995	100%	2.014.945	100%	9.159.839	BPBD
1	05	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	868.100	100%	911.505	100%	957.080	100%	1.004.934	100%	1.055.181	100%	4.796.800	BPBD
1	05	03	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	52.500	100%	55.125	100%	57.881	100%	60.775	100%	63.814	100%	290.096	BPBD
1	05	03	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	BPBD
1	05	03	07	Program Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB):				1.934.800		2.031.540		2.133.117		2.239.773		2.351.761		10.690.991	BPBD
			- Gempa Bumi		%	0.703%	0.693%		0.683%		0.673%		0.662%		0.651%		0.651%			
			- Longsor		%	0.673%	0.664%		0.655%		0.647%		0.637%		0.627%		0.627%			
			- Kebakaran Hutan dan Lahan		%	0.648%	0.622%		0.614%		0.607%		0.598%		0.589%		0.589%			
			- Cuaca Ekstrem		%	0.580%	0.561%		0.554%		0.549%		0.541%		0.535%		0.535%			
			- Banjir/bandang		%	0.718%	0.708%		0.696%		0.686%		0.673%		0.661%		0.661%			
			- Kekeringan		%	0.684%	0.675%		0.666%		0.657%		0.646%		0.636%		0.636%			
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		%	50	60		65		70		75		80		80			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	05	03	08	Program Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	23%	40%	845.200	50%	887.480	60%	931.833	70%	978.425	80%	1.027.346	80%	4.670.264	BPBD
					Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	45%	60%		65%		70%		75%	80%		80%			
1	06	01		SOSIAL					3.721.950		3.908.048		4.103.450		4.308.622		4.524.053		20.566.123	
1	06	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	605.900	100%	636.195	100%	668.005	100%	701.405	100%	736.475	100%	3.347.980	Dinas Sosial
1	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	354.700	100%	372.435	100%	391.057	100%	410.610	100%	431.140	100%	1.959.941	Dinas Sosial
1	06	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Sosial
1	06	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Sosial
1	06	01	07	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM/PUSKESSOS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	5%	5%	1.294.300	5%	1.359.015	5%	1.426.966	5%	1.498.314	5%	1.573.230	5%	7.151.825	Dinas Sosial
					Jumlah panti sosial/rumah singgah/ rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	unit	NA	1		1		1		1		1		1		
					Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	5,20%	5,50%		5,80%		6,00%		6,20%		6,50%		6,50%		
					Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat KAT	%	5%	10%		20%		25%		30%		35%		35%		
1	06	01	08	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	NA	100%	344.200	100%	361.410	100%	379.481	100%	398.455	100%	418.377	100%	1.901.922	Dinas Sosial
					Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase Kemiskinan	%	8,20	8,14		8,08		8,02		7,96		7,90		7,90		
1	06	01	09	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	%	NA	100%	1.000.000	100%	1.050.000	100%	1.102.500	100%	1.157.625	100%	1.215.506	100%	5.525.631	Dinas Sosial
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					46.237.449		48.549.321		50.976.788		53.525.627		56.201.908		255.491.093	
2	01	01		TENAGA KERJA					1.010.550		1.061.078		1.114.131		1.169.838		1.228.330		5.583.927	
2	01	01	07	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang	48	64	530.250	64	556.763	64	584.601	64	613.831	64	644.522	64	2.929.966	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
					Tingkat pengangguran terbuka	%	1,40	1,36		1,34		1,32		1,30		1,28		1,28		

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	01	01	08	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	520	520	315.000	520	330.750	520	347.288	520	364.652	520	382.884	520	1.740.574	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	01	01	09	Program Hubungan Industrial	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	orang	100	100	165.300	100	173.565	100	182.243	100	191.355	100	200.923	100	913.387	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	02	01		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.495.467		3.670.240		3.853.752		4.046.440		4.248.762		19.314.662	
2	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	484.400	100%	508.620	100%	534.051	100%	560.754	100%	588.791	100%	2.676.616	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	538.400	100%	565.320	100%	593.586	100%	623.265	100%	654.429	100%	2.975.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	02	01	07	Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	%	49%	55%	119.240	60%	125.202	65%	131.462	70%	138.035	75%	144.937	75%	658.876	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase perempuan dalam berpolitik	%	36%	36%		36%		36%		36%		45%		45%		
					Persentase perempuan dalam berorganisasi	%	30%	32%		34%		36%		38%		40%		40%		
2	02	01	08	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	0,030%	0,028%	1.288.500	0,026%	1.352.925	0,024%	1.420.571	0,022%	1.491.600	0,020%	1.566.180	0,020%	7.119.776	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	%	18,18%	36,36%		55%		73%		91%		100%		100%		

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2 02 01 09	Program Pemenuhan Hak Anak				Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak	%	55%	60%	942.077	63%	989.181	65%	1.038.640	67%	1.090.572	70%	1.145.100	70%	5.205.570	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 03 01	PANGAN								1.606.300		1.686.615		1.770.946		1.859.493		1.952.468		8.875.821	
2 03 01 07	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,40%	92,30%	1.606.300	94,30%	1.686.615	96,30%	1.770.946	98,10%	1.859.493	100,00%	1.952.468	100,00%	8.875.821	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Persentase Konsumsi Energi Per kapita	%	91,72%	91,87%		92,02%		92,17%		92,32%		92,47%		92,47%		
					Persentase Konsumsi Protein Per kapita	%	95,00%	95,50%		96,00%		96,50%		97,00%		97,50%		97,50%		
					Ketersediaan pangan utama (produksi/tahun)	ton/tahun	59.741	60.338		60.935		61.533		62.130		62.728		62.728		
					Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita/hari	3.897	3.995		4.053		4.111		4.169		4.227		4.227		
					Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita/hari	93,24	94,64		96,04		97,44		98,84		100,24		100,24		
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	9	10		10		10		10		10		10		
2 04 01	PERTANAHAN								851.300		893.865		938.558		985.486		1.034.760		4.703.970	
2 04 01 07	Program Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	%	0%	58%	851.300	58%	893.865	58%	938.558	58%	985.486	58%	1.034.760	58%	4.703.970	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2 05 01	LINGKUNGAN HIDUP								5.759.950		6.047.948		6.350.345		6.667.862		7.001.255		31.827.360	
2 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	2.602.300	100%	2.732.415	100%	2.869.036	100%	3.012.488	100%	3.163.112	100%	14.379.350	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	196.300	100%	206.115	100%	216.421	100%	227.242	100%	238.604	100%	1.084.681	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Lingkungan Hidup
2 05 01 07	Program Persampahan				Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	45%	59%	1.899.100	68%	1.994.055	74%	2.093.758	79%	2.198.446	83%	2.308.368	83%	10.493.726	Dinas Lingkungan Hidup
					Operasionalisasi TPA di kabupaten	≥ 71(nilai TPA)	71,43	72,12		72,62		73,12		73,62		74,12		74,12		
					Persentase sampah yang tertangani melalui 3R	ton	71,75	78,92		86,82		95,5		105,05		115,55		481,84		
					Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	35,11%	58,61%		70,93%		81,13%		89,08%		97,99%		97,99%		
					Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah B3	unit								1			1			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024							
					Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	05	01	08	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	75%	75%	586.200	78%	615.510	80%	646.286	82%	678.600	85%	712.530	85%	3.239.125	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,31	65,6		66,6	67,6		68,6	69,6		69,6		69,6		
					Peningkatan indeks kualitas air	indeks	70	71		72	73		74	75		75		75		
					Peningkatan indeks kualitas udara	indeks	55,55	81		82	83		84	85		85		85		
					Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	indeks	46,61	50		51	52		53	54		54		54		
					Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PLU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	%	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%		100%		
					Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	150	150		150	150		150	150		150		150		
					Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	batang	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		
					Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	lokasi	7	7		7	7		7	7		7		7		
2	05	01	09	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	dokumen	7	4	353.200	3	370.860	4	389.403	3	408.873	3	429.317	21	1.951.653	Dinas Lingkungan Hidup
2	06	01		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.869.450		3.012.923		3.163.569		3.321.747		3.487.834		15.855.523	
2	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.194.200	100%	1.253.910	100%	1.316.606	100%	1.382.436	100%	1.451.558	100%	6.598.709	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	893.600	100%	938.280	100%	985.194	100%	1.034.454	100%	1.086.176	100%	4.937.704	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	06	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	06	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	06	01	07	Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	91,00%	93,00%	658.800	95,00%	691.740	97,00%	726.327	99,00%	762.643	100,00%	800.776	100,00%	3.640.286	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase pasangan ber akte nikah	%	19%	25%		30%	35%		40%	45%		45%		45%		
					Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	32%	40%		45%	50%		55%	60%		60%		60%		
					Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	%	60%	70%		80%	90%		100%	100%		100%		100%		
					Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	97%	100%		100%	100%		100%	100%		100%		100%		
					Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan	%	94,00%	96,50%		97,50%	98,50%		99,50%	100,00%		100,00%		100,00%		
					Cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil	%	25,76%	32,50%		37,50%	42,50%		47,50%	52,50%		52,50%		52,50%		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 07 01	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.402.450		4.622.573		4.853.701		5.096.386		5.351.205		24.326.315	
2 07 01 01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	663.400	100%	696.570	100%	731.399	100%	767.968	100%	806.367	100%	3.665.704	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 07 01 02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	116.200	100%	122.010	100%	128.111	100%	134.516	100%	141.242	100%	642.078	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 07 01 03	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 07 01 04	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 07 01 07	07	Program Penataan Desa	Jumlah desa cepat berkembang	Desa	27	5	1.700.000	5	1.785.000	5	1.874.250	5	1.967.963	27	2.066.361	52	9.393.573	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa terbentuk	Desa	15	15		15		15		15		15		75			
			Jumlah Pembentukan BUMdes dan BUMdes Bersama	BUMdes	35	25		25		25		25		26		161			
			Persentase Desa yang mempunyai Produk unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	%	10%	10%		10%		10%		10%		10%		60%			
2 07 01 08	08	Program Kerjasama Desa	Terlaksananya kerjasama antar desa	%	NA	100%	800.000	100%	840.000	100%	882.000	100%	926.100	100%	972.405	100%	4.420.505	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 07 01 09	09	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Profil Desa sesuai standard	Desa	27	27	600.000	27	630.000	27	661.500	27	694.575	26	729.304	161	3.315.379	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa	%	10%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku	%	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
2 07 01 10	10	Program Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	NA	100%	400.000	100%	420.000	100%	441.000	100%	463.050	100%	486.203	100%	2.210.253	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
						Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 08 01	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.585.100		3.764.355		3.952.573		4.150.201		4.357.711		19.809.941	
2 08 01 07	Program Pengendalian Penduduk	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	%	60%	60,5%	400.700	61%	420.735	62%	441.772	62,0%	463.860	63%	487.053	63%	2.214.120	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	34,5%	34,6%		34,7%		34,8%		34,9%		35,0%		35,0%			
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	20,0%	19,5%		19,0%		18,5%		18,0%		17,5%		17,5%			
2 08 01 08	Program Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	%	3,70%	3,69%	2.508.700	3,68%	2.634.135	3,67%	2.765.842	3,66%	2.904.134	3,65%	3.049.341	3,65%	13.862.151	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Menurunnya kebutuhan ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,90%	4,85%		4,80%		4,75%		4,70%		4,65%		4,65%			
		Menurunnya kelahiran total/Total fertility rate (TFR)	%	2,86	2,84		2,82		2,8		2,78		2,76		2,76			
		Rasio Akseptor KB	%	60%	60%		61%		61%		62%		62%		62%			
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	4	4		3,8		3,6		3,5		3,1		3,1			
2 08 01 09	Program Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	3,46%	3,45%	675.700	3,44%	709.485	3,43%	744.959	3,42%	782.207	3,41%	821.318	3,41%	3.733.669	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	71,00%	71,50%		72,00%		72,50%		73,00%		73,50%		73,50%			
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB	%	3,46%	3,44%		3,43%		3,42%		3,41%		3,40%		3,40%			
2 09 01	PERHUBUNGAN						4.049.750		4.252.238		4.464.849		4.688.092		4.922.496		22.377.425	
2 09 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.127.800	100%	1.184.190	100%	1.243.400	100%	1.305.569	100%	1.370.848	100%	6.231.807	Dinas Perhubungan	
2 09 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	929.100	100%	975.555	100%	1.024.333	100%	1.075.549	100%	1.129.327	100%	5.133.864	Dinas Perhubungan	
2 09 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Perhubungan	
2 09 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Perhubungan	
2 09 01 07	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Angka kecelakaan lalulintas	Jumlah Laka	414	108	1.700.000	98	1.785.000	88	1.874.250	78	1.967.963	68	2.066.361	68	9.393.573	Dinas Perhubungan	
		Cakupan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Jumlah kendaraan layak jalan	Unit	2.500	2.600		2.650		2.700		2.750		2.800		2.800			
2 09 01 08	Program Pelayanan	Jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Unit	4	4	170.000	4	178.500	4	187.425	4	196.796	4	206.636	4	939.357	Dinas Perhubungan	
2 10 01	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.875.000		9.318.750		9.784.688		10.273.922		10.787.618		49.039.977	
2 10 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	600.300	100%	630.315	100%	661.831	100%	694.922	100%	729.668	100%	3.317.036	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 10 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	332.850	100%	349.493	100%	366.967	100%	385.315	100%	404.581	100%	1.839.206	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 10 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Komunikasi dan Informatika	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	10	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	01	07	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi	Media	5 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7.819.000	7 Media desiminasi informasi	8.209.950	7 Media desiminasi informasi	8.620.448	7 Media desiminasi informasi	9.051.470	7 Media desiminasi informasi	9.504.043	7 Media desiminasi informasi	43.204.911	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	NA	20%		50%		100%		100%		100%		100%		
2	11	01		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					1.362.700		1.430.835		1.502.377		1.577.496		1.656.370		7.529.778	
2	11	01	07	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	unit	25	30	362.700	35	380.835	40	399.877	45	419.871	50	440.864	50	2.004.146	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Koperasi Sehat	unit	5 koperasi	10 koperasi		15 koperasi		20 koperasi		25 koperasi		30 koperasi		30 koperasi		
2	11	01	08	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	unit	1.544	1.594	1.000.000	1.634	1.050.000	1.684	1.102.500	1.744	1.157.625	1.814	1.215.506	1.814	5.525.631	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah UMKM yang terfasilitasi	unit	30	40		50		60		70		80		80		
					Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51		3,06		3,56		4,01		4,41		4,41		
2	12	01		PENANAMAN MODAL					2.226.382		2.337.701		2.454.586		2.577.315		2.706.181		12.302.166	
2	12	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	802.900	100%	843.045	100%	885.197	100%	929.457	100%	975.930	100%	4.436.529	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	12	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	195.932	100%	205.729	100%	216.015	100%	226.816	100%	238.157	100%	1.082.648	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	12	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	12	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	12	01	07	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor	unit	15	112	802.900	123	843.045	138	885.197	154	929.457	174	975.930	174	4.436.529	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
					Jumlah nilai investasi	Miliar (Rp)	3.593,35	4.930,88		5.697,15		6.586,65		7.497,85		8.483,15		8.483,15		
					Pertumbuhan nilai realisasi investasi	Miliar (Rp)	533,27	623,50		766,27		889,50		911,20		985,30		985,30		
					Pertumbuhan nilai investasi	%	20,83%	72,87%		68,55%		52,08%		42,51%		40,67%		40,67%		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Target	Rp (x 1000)	
					Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 12 01 08	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	izin	79	85	301.800	100	316.890	113	332.735	113	349.371	113	366.840	113	1.667.636	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
		Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (tepat waktu)	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	indeks	70,75	71,46		72,17		72,89		73,62		74,36		74,36		
		Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	80%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
		Jumlah SDM pada DPMPSTP yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	orang	4	10		13		16		20		21		21		
2 13 01	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					2.500.000		2.625.000		2.756.250		2.894.063		3.038.766		13.814.078	
2 13 01 07	Program Kepemudaan	Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan	orang	1.439	1.450	1.000.000	1.450	1.050.000	1.450	1.102.500	1.500	1.157.625	1.500	1.215.506	1.500	5.525.631	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	OKP	47	50		50		50		50		50		50		
2 13 01 08	Program Keolahragaan	Terselenggaranya kompetisi olah raga	cabang olah raga	7	7	1.500.000	7	1.575.000	7	1.653.750	7	1.736.438	7	1.823.259	7	8.288.447	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2 14 01	STATISTIK					406.000		426.300		447.615		469.996		493.496		2.243.406	
2 14 01 07	Program Statistik Sektoral	Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah	dokumen	0 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	406.000	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	426.300	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	447.615	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	469.996	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	493.496	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	2.243.406	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 15 01	PERSANDIAN					200.000		210.000		220.500		231.525		243.101		1.105.126	
2 15 01 07	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Penerapan pengamanan informasi dan persandian	%	NA	100%	200.000	100%	210.000	100%	220.500	100%	231.525	100%	243.101	100%	1.105.126	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01	KEBUDAYAAN					1.222.000		1.283.100		1.347.255		1.414.618		1.485.349		6.752.321	
2 16 01 07	Program Kebudayaan	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	%	20%	20%	1.222.000	20%	1.283.100	20%	1.347.255	20%	1.414.618	20%	1.485.349	20%	6.752.321	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	1	1		1		1		1		1		1		
		Cakupan fasilitasi pengkajian seni budaya daerah	kegiatan	3	4		4		4		4		4		4		
		Jumlah grup/ kelompok kesenian	unit	5	5		5		5		5		5		5		
		Cakupan pagelaran seni dan budaya	pagelaran	3	4		4		4		4		4		4		
		Cakupan sarana dan prasarana seni	unit	1	1		1		1		1		1		1		
2 17 01	PERPUSTAKAAN					1.600.550		1.680.578		1.764.606		1.852.837		1.945.479		8.844.049	
2 17 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	785.600	100%	824.880	100%	866.124	100%	909.430	100%	954.902	100%	4.340.936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 17 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	342.100	100%	359.205	100%	377.165	100%	396.024	100%	415.825	100%	1.890.318	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 17 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 17 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	17	01	07	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	25.000	25.500	350.000	26.000	367.500	26.500	385.875	27.000	405.169	27.500	425.427	27.500	1.933.971	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah perpustakaan yang ada	unit	303	305		307		309		311		313		313		
					Jumlah koleksi buku	judul	14.680	15.680		146.680		147.680		18.680		19.680		19.680		
					Jumlah perpustakaan yang dikembangkan/ dibina	unit	57	59		61		63		65		67		67		
2	18	01		KEARSIPAN					214.500		225.225		236.486		248.311		260.726		1.185.248	
2	18	01	07	Program Pegelolaan Arsip	Jumlah pengelolaan arsip secara baku	OPD	0	10	214.500	20	225.225	30	236.486	40	248.311	47	260.726	47	1.185.248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Informasi kearsipan yang akurat	arsip	989	215		215		215		215		215		2.064		
					Meningkatnya SDM kearsipan terlatih	orang	200	100		100		100		100		100		700		
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					35.271.550		37.035.128		38.886.884		40.831.228		42.872.789		194.897.579	
3	01	01		PERIKANAN					630.000		661.500		694.575		729.304		765.769		3.481.148	
3	01	01	07	Program Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan	%	47,64%	57,20%	630.000	65,77%	661.500	75,63%	694.575	86,97%	729.304	100%	765.769	100%	3.481.148	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Konsumsi ikan	%	0,84	0,89		0,91		0,94		0,97		1,00		1,00		
3	02	01		PAR/WISATA					8.914.250		9.359.963		9.827.961		10.319.359		10.835.327		49.256.858	
3	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.882.100	100%	1.976.205	100%	2.075.015	100%	2.178.766	100%	2.287.704	100%	10.399.791	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	170.900	100%	179.445	100%	188.417	100%	197.838	100%	207.730	100%	944.330	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	02	01	07	Program Destinasi Parawisata	Jumlah Objek Wisata	objek	2	2	6.152.400	3	6.460.020	3	6.783.021	3	7.122.172	3	7.478.281	3	33.995.894	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Jumlah Kunjungan wisata	orang	128.000	130.000		135.000		140.000		145.000		150.000		150.000		
					Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	1.75	1.80		1.85		1.90		1.95		2.00		2.00		
3	02	01	08	Program Pemasaran Parawisata	Jumlah event pariwisata	event	3	3	516.700	3	542.535	3	569.662	3	598.145	3	628.052	3	2.855.094	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	02	01	09	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sumber daya manusia kepariwisataan	orang	100	100	69.300	100	72.765	100	76.403	100	80.223	100	84.235	500	382.926	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Target	Rp (x 1000)	
					Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 03 01	PERTANIAN					10.290.850		10.805.393		11.345.662		11.912.945		12.508.592		56.863.442	
3 03 01 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.869.400	100%	1.962.870	100%	2.061.014	100%	2.164.064	100%	2.272.267	100%	10.329.615	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	451.500	100%	474.075	100%	497.779	100%	522.668	100%	548.801	100%	2.494.823	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 01 07	Program Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan				4.878.600		5.122.530		5.378.657		5.647.589		5.929.969		26.957.345	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		- Padi Sawah	kw/ha	59,99	60,59		61,20		61,81		62,43		63,05		63,68		
		- Padi Ladang	kw/ha	34,44	34,78		35,13		35,48		35,84		36,20		36,56		
		- Jagung	kw/ha	62,93	63,56		64,19		64,84		65,49		66,14		66,80		
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,39	100,10		100,11		100,12		100,13		100,14		100,14		
		Produksi Hortikultura															
		- Jeruk Manis	Ton	52.577	53.629		54.701		55.795		56.911		58.049		58.049		
		- Kentang	Ton	72.864.600	74.321.892		75.808.330		77.324.496		78.870.986		80.448.406		80.448.410		
		- Wortel	Ton	32.680	33.007		33.337		33.670		34.007		34.347		34.350		
		- Tomat	Ton	1.988.760	2.008.648		2.028.734		2.049.021		2.069.512		2.090.207		2.090.210		
		- Cabe	Ton	71.307.010	73.446.220		75.649.607		77.919.095		80.256.668		82.664.368		82.664.370		
		- Bawang Merah	Ton	2.925.350	3.013.111		3.103.504		3.196.609		3.292.507		3.391.282		3.391.280		
		- Kubis	Ton	3.543.920	3.614.798		3.687.094		3.760.836		3.836.053		3.912.774		3.912.770		
		- Manggis	Ton	545.415	550.869		556.378		561.942		567.561		573.237		573.240		
		- Durian	Ton	16.689.974	17.023.774		17.364.249		17.711.534		18.065.765		18.427.080		18.427.080		
		- Duku	Ton	819.520	827.715		835.992		844.352		852.796		861.324		861.320		
		- Alpukat	Ton	1.940.870	1.960.279		1.979.881		1.999.680		2.019.677		2.039.874		2.039.870		
		Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat															
		- Kopi	Ton	12.086.400	12.448.992		12.697.972		14.000.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		
		- Kakao	Ton	318.890	344.401		375.397		412.937		458.360		513.363		513.363		
		- Gambir	Ton	254.400	274.752		299.480		329.428		365.665		409.544		409.544		
		- Lada	Ton	17.400	17.582		17.765		17.951		18.138		18.327		18.327		
		- Kemiri	Ton	6.674.000	7.207.920		7.856.633		8.642.296		9.592.949		10.744.102		10.744.102		
		- Tembakau	Ton	906.000	915.459		933.768		952.443		971.492		990.922		990.922		
		- Kemenyan	Ton	1.000	1.050		1.100		1.150		1.200		1.250		1.250		
		- Aren	Ton	28.000	32.200		37.000		42.500		48.000		58.000		58.000		
		- Nilam	Ton	21.800	22.300		23.800		24.700		25.300		28.800		28.800		
		Jumlah Populasi Peternakan															
		- Sapi	ekor	3.205	3.260		3.302		3.335		3.368		3.402		3.402		
		- Kerbau	ekor	3.014	3.075		3.110		3.136		3.170		3.198		3.198		
		- Babi	ekor	110.090	111.302		112.316		113.405		114.560		115.860		115.860		
		- Ayam	ekor	1.175.723	1.188.830		1.202.110		1.233.180		1.247.980		1.262.958		1.262.958		
3 03 01 08	Program Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pertanian	unit	41	45	1.237.000	49	1.298.850	53	1.363.793	57	1.431.982	61	1.503.581	61	6.835.206	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 03 01 09	Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalinya organisme pengganggu tanaman	%	100%	100%	400.000	100%	420.000	100%	441.000	100%	463.050	100%	486.203	100%	2.210.253	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024		
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
3	03	01	10	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang di bina	kelompok	453	1.580	600.000	1.600	630.000	1.620	661.500	1.640	694.575	1.660	729.304	1.660	3.315.379	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
				Cakupan penyuluh pertanian	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Terlaksananya Promos Hasil Produksi Pertanian	event	1	3		3		3		3		3		3				
3	03	01	11	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Kesehatan Hewan/ Ternak				731.500		768.075		806.479		846.803		889.143		4.041.999	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
				- Sapi	%	33,00%	33,33%		34,00%		34,68%		35,72%		36,79%		36,79%				
				- Kerbau	%	35,00%	35,70%		36,41%		37,51%		38,63%		39,79%		39,79%				
				- Babi	%	7,10%	7,17%		7,31%		7,46%		7,68%		7,92%		7,92%				
				- Kambing	%	8,08%	8,24%		8,41%		8,57%		8,83%		9,10%		9,10%				
				- Ayam	%	1,10%	1,12%		1,14%		1,18%		1,21%		1,26%		1,26%				
				- Anjing	%	30,60%	30,91%		31,52%		32,15%		33,12%		34,11%		34,11%				
3	06	01		PERDAGANGAN				3.399.100		3.569.055		3.747.508		3.934.883		4.131.627		18.782.173			
3	06	01	07	Program Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pameran/promosi produk daerah	pameran	6	12	400.000	12	420.000	12	441.000	12	463.050	12	486.203	12	2.210.253	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	06	01	08	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah kemitraan antara pedagang Kabupaten Dairi dengan pengusaha diluar Kabupaten Dairi	kemitraan	2	5	2.077.500	5	2.181.375	5	2.290.444	5	2.404.966	5	2.525.214	27	11.479.499		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e-commerce	system	0	1		1		1		1		1		1				
				Jumlah pasar yang representatif	pasar	5	6		7		8		9		10		10				
3	06	01	09	Program Standansasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrolgiani	unit	500	700	921.600	750	967.680	800	1.016.064	850	1.066.867	900	1.120.211	900	5.092.422	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	unit	500	650		700		750		800		850		850				
3	07	01		PERINDUSTRIAN				12.037.350		12.639.218		13.271.178		13.934.737		14.631.474		66.513.957			
3	07	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	970.300	100%	1.018.815	100%	1.069.756	100%	1.123.244	100%	1.179.406	100%	5.361.520	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	830.600	100%	872.130	100%	915.737	100%	961.523	100%	1.009.599	100%	4.589.589		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	07	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	07	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
								Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		Target	Rp (x 1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	07	01	07	Program Percepatan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	8	10	1.876.500	12	1.970.325	14	2.068.841	16	2.172.283	18	2.280.897	10.368.847	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	unit	728	733		738		743		748		753		753			
				Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	orang	100	100		100		100		100		100		600			
				Jumlah sentra IKM potensial	sentra	0	1		1		1		1		1		5			
				Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40		0,41		0,42		0,43		0,44		0,44			
3	07	01	08	Program Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	IKM	7	10	8.237.100	10	8.648.955	10	9.081.403	10	9.535.473	10	10.012.247	57	45.515.177	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4				URUSAN PENUNJANG					46.324.205		48.640.415		51.072.436		53.626.058		56.307.361	255.970.475		
4	01	01		PERENCANAAN					5.000.950		5.250.998		5.513.547		5.789.225		6.078.686	27.633.406		
4	01	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.285.700	100%	1.349.985	100%	1.417.484	100%	1.488.358	100%	1.562.776	100%	7.104.304	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	191.200	100%	200.760	100%	210.798	100%	221.338	100%	232.405	100%	1.056.501	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target	%	NA	75%	1.000.000	76%	1.050.000	77%	1.102.500	78%	1.157.625	79%	1.215.506	79%	5.525.631	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	01	01	08	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100%	100%	2.401.200	100%	2.521.260	100%	2.647.323	100%	2.779.689	100%	2.918.674	100%	13.268.146	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	02			KEUANGAN																
4	02	01		KEUANGAN DAN ASET DAERAH					6.810.900		7.151.445		7.509.017		7.884.468		8.278.692	37.634.522		
4	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12 bulan	12 bulan	1.674.900	12 bulan	1.758.645	12 bulan	1.846.577	12 bulan	1.938.906	12 bulan	2.035.851	100%	9.254.880	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	bulan	12 bulan	12 bulan	485.300	12 bulan	509.565	12 bulan	535.043	12 bulan	561.795	12 bulan	589.885	100%	2.681.589	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	417.600	100%	438.480	100%	460.404	100%	483.424	100%	507.595	100%	2.307.504	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 02 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Ketersediaan dokumen laporan keuangan daerah	31 desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	775.900	Tepat Waktu	814.695	Tepat Waktu	855.430	Tepat Waktu	898.201	Tepat Waktu	943.111	Tepat Waktu	4.287.337	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4 02 01 07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Penyusunan APBD tepat waktu (31 Desember)	31 desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.237.900	Tepat Waktu	3.399.795	Tepat Waktu	3.569.785	Tepat Waktu	3.748.274	Tepat Waktu	3.935.688	Tepat Waktu	17.891.441	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Terasistensinya DPA dan Anggaran kas SKPD	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Opini BPK terhadap laporan kinerja keunagan daerah	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
4 02 01 08	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Terlib administrasi BMD	%	100%	100%	219.300	100%	230.265	100%	241.778	100%	253.867	100%	266.561	100%	1.211.771	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Rasio pemanfaatan Aset	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4 02 02	02	PENDAPATAN DAERAH						4.563.250		4.791.413		5.030.983		5.282.532		5.546.659		25.214.837	
4 02 02 01	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	1.398.300	100%	1.468.215	100%	1.541.626	100%	1.618.707	100%	1.699.642	100%	7.726.490	Badan Pendapatan Daerah
4 02 02 02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	513.500	100%	539.175	100%	566.134	100%	594.440	100%	624.162	100%	2.837.412	Badan Pendapatan Daerah
4 02 02 03	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Badan Pendapatan Daerah
4 02 02 04	02	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Badan Pendapatan Daerah
4 02 02 07	02	07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	%	90%	90%	2.528.600	90%	2.655.030	90%	2.787.782	90%	2.927.171	90%	3.073.529	90%	13.972.111	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	%	1,97%	2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		
				Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	%	13,5%	13,5%		13,5%		13,5%		13,5%		13,5%		13,5%		
				Cakupan monitoring dan evaluasi retribusi daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4 03 01	01	KEPEGAWAIAN DAERAH						11.867.200		12.460.560		13.083.588		13.737.767		14.424.656		65.573.771	
4 03 01 01	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	720.500	100%	756.525	100%	794.351	100%	834.069	100%	875.772	100%	3.981.217	BKPSDM
4 03 01 02	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	121.400	100%	127.470	100%	133.844	100%	140.536	100%	147.562	100%	670.812	BKPSDM
4 03 01 03	03	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	100.000	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	552.563	BKPSDM
4 03 01 04	03	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	BKPSDM
4 03 01 07	03	07	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	609	1.376	6.848.450	1.102	7.190.873	1.012	7.550.416	962	7.927.937	1.112	8.324.334	5.564	37.842.009	BKPSDM
4 03 01 08	03	08	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasar	Orang	17	40	1.000.000	40	1.050.000	40	1.102.500	40	1.157.625	40	1.215.506	200	5.525.631	BKPSDM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
					Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 03 01 09	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	3.145	1.496	2.859.000	1.498	3.001.950	1.331	3.152.048	1.448	3.309.650	1.520	3.475.132	7.293	15.797.780	BKPSDM
		Jumlah Dokumen dan Naskah Kebutuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	dokumen/Naskah	3.251	309		306		305		305		307		1.530		
		Jumlah OPD yang dikunjungi untuk Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	OPD	45	47		47		47		47		47		235		
		Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	kali	17	4		4		4		4		4		20		
4 04 01 10	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi penerbitan SK Pensiun/Purna	orang	385	191	200.000	164	210.000	229	220.500	202	231.525	47	243.101	833	1.105.126	BKPSDM
4 05 01 01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					700.000		735.000		771.750		810.338		850.854		3.867.942	
4 05 01 07	Program Penelitian dan Pengembangan	Penerapan replikasi jejaring inovasi daerah	%	0%	100%	700.000	100%	735.000	100%	771.750	100%	810.338	100%	850.854	100%	3.867.942	Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah
		Terbangunnya penerapan sistem manajemen berbasis e-kelitbangan	%	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Dokumen kajian penelitian dan pengembangan	dokumen	2	5		5		5		5		5		25		
4 06 01 01	INSPEKTORAT					2.743.585		2.880.764		3.024.802		3.176.043		3.334.845		15.160.039	
4 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	908.200	100%	953.610	100%	1.001.291	100%	1.051.355	100%	1.103.923	100%	5.018.378	Inspektorat
4 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	420.200	100%	441.210	100%	463.271	100%	486.434	100%	510.756	100%	2.321.870	Inspektorat
4 06 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	105.000	100%	110.250	100%	115.763	100%	121.551	100%	127.628	100%	580.191	Inspektorat
4 06 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Inspektorat
4 06 01 07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	%	90%	90%	1.060.285	90%	1.113.299	90%	1.168.964	90%	1.227.412	90%	1.288.783	90%	5.858.744	Inspektorat
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks Persepsi Korupsi	Indeks		60		63		66		69		72		72		
4 06 01 08	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	3	232.050	3	243.653	3	255.835	3	268.627	4	282.058	4	1.282.223	Inspektorat
4 08 01 01	KECAMATAN SIDIKALANG					4.122.260		4.328.373		4.544.792		4.772.031		5.010.633		22.778.089	
4 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	965.000	100%	1.013.250	100%	1.063.913	100%	1.117.108		1.172.964	100%	5.332.234	Kec. Sidikalang
4 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	199.200	100%	209.160	100%	219.618	100%	230.599	100%	242.129	100%	1.100.706	Kec. Sidikalang
4 08 01 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Sidikalang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 08 01 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sidikalang	%	0,00	60,00	704.360	65,00	739.578	70,00	776.557	75,00	815.385	80,00	856.154	80,00	3.892.034	Kec. Sidikalang
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,20	78,40		78,60		78,80		79,00		79,20		79,20		
4 08 01 08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan di Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,20	78,40	2.238.700	78,60	2.350.635	78,80	2.468.167	79,00	2.591.575	79,20	2.721.154	79,20	12.370.231	Kec. Sidikalang
4 08 02	KECAMATAN SUMBUL							1.330.260		1.396.773		1.466.612		1.539.942		1.616.939		7.350.526	
4 08 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	329.280	100%	345.744	100%	363.031	100%	381.183	100%	400.242	100%	1.819.480	Kec. Sumbul
4 08 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	109.830	100%	115.322	100%	121.088	100%	127.142	100%	133.499	100%	606.880	Kec. Sumbul
4 08 02 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Sumbul
4 08 02 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Sumbul	%	0,00	60,00	530.250	65,00	556.763	70,00	584.601	75,00	613.831	80,00	644.522	80,00	2.929.966	Kec. Sumbul
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	77,20	77,40		77,60		77,80		78,00		78,20		78,20		
4 08 02 08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Julu I	Indeks	77,20	77,40	345.900	77,60	363.195	77,80	381.355	78,00	400.422	78,20	420.444	78,20	1.911.316	Kec. Sumbul
4 08 03	KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA							1.090.250		1.144.763		1.202.001		1.262.101		1.325.206		6.024.319	
4 08 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	297.500	100%	312.375	100%	327.994	100%	344.393	100%	361.613	100%	1.643.875	Kec. Silima Pungga-pungga
4 08 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	145.400	100%	152.670	100%	160.304	100%	168.319	100%	176.735	100%	803.427	Kec. Silima Pungga-pungga
4 08 03 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Silima Pungga-pungga
4 08 03 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Silima Pungga-pungga	%	0,00	60,00	372.750	65,00	391.388	70,00	410.957	75,00	431.505	80,00	453.080	80,00	2.059.679	Kec. Silima Pungga-pungga
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Indeks	76,80	77,00		77,20		77,40		77,60		77,80		77,80		
4 08 03 08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Parongil	Indeks	76,80	77,00	259.600	77,20	272.580	77,40	286.209	77,60	300.519	77,80	315.545	77,80	1.434.454	Kec. Silima Pungga-pungga
4 08 04	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU							719.670		755.654		793.436		833.108		874.763		3.976.631	
4 08 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	224.800	100%	236.040	100%	247.842	100%	260.234	100%	273.246	100%	1.242.162	Kec. Siempat Nempu
4 08 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	87.800	100%	92.190	100%	96.800	100%	101.639	100%	106.721	100%	485.150	Kec. Siempat Nempu
4 08 04 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Siempat Nempu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
					Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 08 04 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Siempat Nempu	%	0,00	60,00	392.070	65,00	411.674	70,00	432.257	75,00	453.870	80,00	476.564	80,00	2.166.434	Kec. Siempat Nempu
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	76,60	76,80		77,00		77,20		77,40		77,60		77,80		
4 08 05	KECAMATAN TIGALINGGA					750.250		787.763		827.151		868.508		911.934		4.145.605	
4 08 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	194.500	100%	204.225	100%	214.436	100%	225.158	100%	236.416	100%	1.074.735	Kec. Tigalingga
4 08 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	126.000	100%	132.300	100%	138.915	100%	145.861	100%	153.154	100%	696.230	Kec. Tigalingga
4 08 05 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Tigalingga
4 08 05 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Tigalingga	%	0,00	60,00	414.750	65,00	435.488	70,00	457.262	75,00	480.125	80,00	504.131	80,00	2.291.756	Kec. Tigalingga
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Indeks	77,40	77,60		77,80		78,00		78,20		78,40		78,60		
4 08 06	KECAMATAN TANAH PINEM					778.120		817.026		857.877		900.771		945.810		4.299.604	
4 08 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	225.200	100%	236.460	100%	248.283	100%	260.697	100%	273.732	100%	1.244.372	Kec. Tanah Pinem
4 08 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	96.600	100%	101.430	100%	106.502	100%	111.827	100%	117.418	100%	533.776	Kec. Tanah Pinem
4 08 06 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Tanah Pinem
4 08 06 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Tanah Pinem	%	0,00	60,00	441.320	65,00	463.386	70,00	486.555	75,00	510.883	80,00	536.427	80,00	2.438.572	Kec. Tanah Pinem
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Indeks	77,00	77,20		77,40		77,60		77,80		78,00		78,20		
4 08 07	KECAMATAN PEGAGAN HILIR					637.050		668.903		702.348		737.465		774.336		3.520.103	
4 08 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	180.000	100%	189.000	100%	198.450	100%	208.373	100%	218.791	100%	994.614	Kec. Pegagan Hilir
4 08 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	61.950	100%	65.048	100%	68.300	100%	71.715	100%	75.301	100%	342.313	Kec. Pegagan Hilir
4 08 07 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Pegagan Hilir
4 08 07 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Pegagan Hilir	%	0,00	60,00	380.100	65,00	399.105	70,00	419.060	75,00	440.013	80,00	462.014	80,00	2.100.292	Kec. Pegagan Hilir
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	76,00	76,20		76,40		76,60		76,80		77,00		77,20		
4 08 08	KECAMATAN PARBULUAN					659.150		692.108		726.713		763.049		801.201		3.642.220	
4 08 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	176.900	100%	185.745	100%	195.032	100%	204.784	100%	215.023	100%	977.484	Kec. Parbuluan
4 08 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	81.900	100%	85.995	100%	90.295	100%	94.809	100%	99.550	100%	452.549	Kec. Parbuluan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024	
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 08 08 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Parbuluan
4 08 08 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Parbuluan	%	0,00	60,00	385.350	65,00	404.618	70,00	424.848	75,00	446.091	80,00	468.395	80,00	2.129.302	Kec. Parbuluan
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	76,40	76,60		76,80		77,00		77,20		77,40		77,40		
4 08 09	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR							619.500		650.475		682.999		717.149		753.006		3.423.129	
4 08 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	163.000	100%	171.150	100%	179.708	100%	188.693	100%	198.128	100%	900.678	Kec. Siempat Nempu Hilir
4 08 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	74.800	100%	78.540	100%	82.467	100%	86.590	100%	90.920	100%	413.317	Kec. Siempat Nempu Hilir
4 08 09 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Siempat Nempu Hilir
4 08 09 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	%	0,00	60,00	366.700	65,00	385.035	70,00	404.287	75,00	424.501	80,00	445.726	80,00	2.026.249	Kec. Siempat Nempu Hilir
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks	75,80	76,00		76,20		76,40		76,60		76,80		76,80		
4 08 10	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU							709.890		745.385		782.654		821.786		862.876		3.922.590	
4 08 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	197.190	100%	207.050	100%	217.402	100%	228.272	100%	239.686	100%	1.089.599	Kec. Siempat Nempu Hulu
4 08 10 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	100.800	100%	105.840	100%	111.132	100%	116.689	100%	122.523	100%	556.984	Kec. Siempat Nempu Hulu
4 08 10 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Siempat Nempu Hulu
4 08 10 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	%	0,00	60,00	396.900	65,00	416.745	70,00	437.582	75,00	459.461	80,00	482.434	80,00	2.193.123	Kec. Siempat Nempu Hulu
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	76,20	76,40		76,60		76,80		77,00		77,20		77,20		
4 08 11	KECAMATAN LAE PARIRA							603.550		633.728		665.414		698.685		733.619		3.334.995	
4 08 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	167.200	100%	175.560	100%	184.338	100%	193.555	100%	203.233	100%	923.886	Kec. Lae Parira
4 08 11 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	68.250	100%	71.663	100%	75.246	100%	79.008	100%	82.958	100%	377.124	Kec. Lae Parira
4 08 11 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Lae Parira
4 08 11 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Lae Parira	%	0,00	60,00	353.100	65,00	370.755	70,00	389.293	75,00	408.757	80,00	429.195	80,00	1.951.100	Kec. Lae Parira
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Indeks	74,80	75,00		75,20		75,40		75,60		75,80		75,80		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024				
					Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 08 12	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER					754.830		792.572		832.200		873.810		917.501		4.170.912	
4 08 12 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	209.370	100%	219.839	100%	230.830	100%	242.372	100%	254.491	100%	1.156.901	Kec. Gunung Sitember
4 08 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	164.850	100%	173.093	100%	181.747	100%	190.834	100%	200.376	100%	910.900	Kec. Gunung Sitember
4 08 12 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Gunung Sitember
4 08 12 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Gunung Sitember	%	0,00	60,00	365.610	65,00	383.891	70,00	403.085	75,00	423.239	80,00	444.401	80,00	2.020.226	Kec. Gunung Sitember
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Indeks	74,60	74,80		75,00		75,20		75,40		75,60		75,60		
4 08 13	KECAMATAN BERAMPU					579.250		608.213		638.623		670.554		704.082		3.200.722	
4 08 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	153.700	100%	161.385	100%	169.454	100%	177.927	100%	186.823	100%	849.290	Kec. Berampu
4 08 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	82.950	100%	87.098	100%	91.452	100%	96.025	100%	100.826	100%	458.351	Kec. Berampu
4 08 13 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Berampu
4 08 13 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Berampu	%	0,00	60,00	327.600	65,00	343.980	70,00	361.179	75,00	379.238	80,00	398.200	80,00	1.810.197	Kec. Berampu
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Indeks	75,00	75,20		75,40		75,60		75,80		76,00		76,00		
4 08 14	KECAMATAN SILAHISABUNGAN					579.780		608.769		639.207		671.168		704.726		3.203.650	
4 08 14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	174.600	100%	183.330	100%	192.497	100%	202.121	100%	212.227	100%	964.775	Kec. Silahisabungan
4 08 14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	85.680	100%	89.964	100%	94.462	100%	99.185	100%	104.145	100%	473.436	Kec. Silahisabungan
4 08 14 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Silahisabungan
4 08 14 07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Silahisabungan	%	0,00	60,00	304.500	65,00	319.725	70,00	335.711	75,00	352.497	80,00	370.122	80,00	1.682.555	Kec. Silahisabungan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	75,60	75,80		76,00		76,20		76,40		76,60		76,60		
4 08 15	KECAMATAN SITINJO					704.510		739.736		776.722		815.558		856.336		3.892.862	
4 08 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	153.700	100%	161.385	100%	169.454	100%	177.927	100%	186.823	100%	849.290	Kec. Sitinjo
4 08 15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	82.950	100%	87.098	100%	91.452	100%	96.025	100%	100.826	100%	458.351	Kec. Sitinjo
4 08 15 04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	15.000	100%	15.750	100%	16.538	100%	17.364	100%	18.233	100%	82.884	Kec. Sitinjo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	08	15	07	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Silitinjo	%	0,00	60,00	187.960	65,00	197.358	70,00	207.226	75,00	217.587	80,00	228.467	80,00	1.038.598	Kec. Silitinjo
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silitinjo	Indeks	75,40	75,60		75,80		76,00		76,20		76,40		76,40		
4	08	15	08	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Panji Dabutar	Indeks	75,40	75,60	264.900	75,80	278.145	76,00	292.052	76,20	306.655	76,40	321.988	76,40	1.463.740	Kec. Silitinjo
5				URUSAN PENDUKUNG					56.798.753		59.626.840		62.608.181		65.738.590		69.025.520		313.797.884	
5	01	01		SEKRETARIAT DAERAH					38.590.670		40.520.204		42.546.214		44.673.524		46.907.201		213.237.812	
5	01	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	16.757.000	100%	17.594.850	100%	18.474.593	100%	19.398.322	100%	20.368.238	100%	92.593.003	Sekretariat Daerah
5	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	12.468.000	100%	13.091.400	100%	13.745.970	100%	14.433.269	100%	15.154.932	100%	68.893.570	Sekretariat Daerah
5	01	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	551.250	100%	578.813	100%	607.753	100%	638.141	100%	670.048	100%	3.046.004	Sekretariat Daerah
5	01	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	30.000	100%	31.500	100%	33.075	100%	34.729	100%	36.465	100%	165.769	Sekretariat Daerah
5	01	01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase SDA yang memiliki disiplin	%	100%	100%	156.900	100%	164.745	100%	172.982	100%	181.631	100%	190.713	100%	866.972	Sekretariat Daerah
5	01	01	07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Level Matuntas Sistem Pengendalian Intern Pemennintah	Level	2	3	1.120.000	3	1.176.000	3	1.234.800	3	1.296.540	3	1.361.367	3	6.188.707	Sekretariat Daerah
					Persentase SOP perangkat daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase analisis kebijakan organisasi	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC		B		B		B		B		B		
					Nilai LPPD	kriteria	Sedang	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		
5	01	01	08	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	%	100%	100%	1.084.400	100%	1.138.620	100%	1.195.551	100%	1.255.329	100%	1.318.095	100%	5.991.995	Sekretariat Daerah
					Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Efisiensi hasil tender	%	3,15%	3,25%		3,30%		3,4%		3,45%		3,50%		3,50%		
					Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	01	01	09	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan	naskah	24	24	1.419.820	24	1.490.811	24	1.565.352	24	1.643.619	24	1.725.800	24	7.845.402	Sekretariat Daerah
					Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun	kali	4	6		8		8		8		8		8		
					Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	01	01	10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah	Rekomendasi LKPJ	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	3.655.700	Ada	3.838.485	Ada	4.030.409	Ada	4.231.930	Ada	4.443.526	Ada	20.200.050	Sekretariat Daerah
					Terwujudnya pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Cakupan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam wawasan kebangsaan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase penanganan pengaduan pelanggaran HAM	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI AWAL RPJMD 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					TAHUN 2024		
							Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)	Target	Rp (x 1000)				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	01	01	11	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/Rastra	orang	16.525	16.525	381.000	16.525	400.050	16.525	420.053	16.525	441.055	16.525	463.108	16.525	2.105.266	Sekretariat Daerah
				Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
5	01	01	12	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis Produk hukum daerah yang terfasilitasi	jenis	4	4	595.600	4	625.380	4	656.649	4	689.481	4	723.956	4	3.291.066	Sekretariat Daerah
				Cakupan jenis produk hukum yang disosialisasikan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Cakupan Perda yang disosialisasikan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase fasilitasi bantuan hukum	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
5	01	01	13	Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	%	100%	100%	371.000	100%	389.550	100%	409.028	100%	429.479	100%	450.953	100%	2.050.009	Sekretariat Daerah
				Cakupan pengendalian inflasi daerah	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Peningkatan Cakupan layanan PDAM Tirta Nciho menurut wilayah teknis	%	8%	8%		8%		8%		8%		8%		8%			
				Persentase Kios Yang Dikelola PD Pasar yang Ditempati Pedagang	%	90%	92%		94%		96%		98%		100%		100%			
5	02	01		SEKRETARIAT DPRD					18.208.083		19.106.636		20.061.968		21.065.066		22.118.319		100.560.072	
5	02	01	01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	2.632.000	100%	2.763.600	100%	2.901.780	100%	3.046.869	100%	3.199.212	100%	14.543.461	Sekretariat DPRD
5	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur	%	100%	100%	1.705.500	100%	1.790.775	100%	1.880.314	100%	1.974.329	100%	2.073.046	100%	9.423.964	Sekretariat DPRD
5	02	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	239.000	100%	250.950	100%	263.498	100%	276.672	100%	290.506	100%	1.320.626	Sekretariat DPRD
5	02	01	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	17.850	100%	18.743	100%	19.680	100%	20.664	100%	21.697	100%	98.633	Sekretariat DPRD
5	02	01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100%	100%	1.183.850	100%	1.243.043	100%	1.305.195	100%	1.370.454	100%	1.438.977	100%	6.541.519	Sekretariat DPRD
5	02	01	07	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya persidangan di DPRD	%	100%	100%	12.429.883	100%	13.039.526	100%	13.691.502	100%	14.376.077	100%	15.094.881	100%	68.631.869	Sekretariat DPRD
				Rasio pembahasan prolegda	%	15%	15%		15%		15%		15%		15%		15%			
				Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu			
				Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu			
				Jumlah pelaksanaan reses	kali	3	3		3		3		3		3		3			
				Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	kali	15	15		15		15		15		15		15			
				Terciptanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	dokumen	4	4		4		4		4		4		4			
				Terfasilitasinya kesehatan anggota DPRD	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				JUMLAH					536.446.657		563.257.139		591.419.995		620.990.995		652.040.545		2.964.155.331	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur pencapaian tujuan dan/atau sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,01	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33	5,33
2	Indeks Gini	Indeks	0,238	0,234	0,232	0,230	0,228	0,226	0,226
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,39	100,10	100,11	100,12	100,13	100,14	100,14
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,40	92,30	94,30	96,30	98,10	100	100
5	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,89	70,97	71,05	71,13	71,21	71,29	71,29
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,4	68,6	68,7	68,8	68,9	69,0	69,0
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,15	9,17	9,18	9,19	9,20	9,21	9,21
9	Menurunnya kelahiran total/ <i>Total fertility rate</i> (TFR)	%	2,86	2,84	2,82	2,80	2,78	2,76	2,76
10	Persentase Kemiskinan	%	8,20	8,14	8,08	8,02	7,96	7,90	7,90
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,40	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,28
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,15	64,78	65,35	65,91	66,48	67,04	67,04
13	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	128.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000
14	Kontribusi Retribusi Wisata terhadap PAD	%	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,00
15	Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51	3,06	3,56	4,01	4,41	4,41
16	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	B
17	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	50	60	65	70	75	80	80
19	Persentase penegakan Produk hukum daerah	%	70	75	80	85	90	95	95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
20	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	49,40%	56,75%	62,22%	68,06%	73,10%	78,70%	78,70%
21	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	%	62,80	63,11	63,43	63,75	64,07	64,39	64,39
22	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	55,23	62,86	65,48	68,10	70,72	73,34	73,34
23	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	46,80	58,42	64,26	70,69	77,76	85,53	85,53
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	Poin	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penanaman Modal dan Perizinan	Poin	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36
26	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan	%	94,00	96,50	97,50	98,50	99,50	100	100
27	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	NA	20,00	50,00	100	100	100	100
28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Poin	70,75	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,01	5,13	5,18	5,23	5,28	5,33	5,33	Seluruh OPD
2	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	22.131,90	23.524,19	24.307,20	25.090,21	25.873,22	26.656,22	26.656,22	Seluruh OPD
3	Laju Inflasi	%	4,05	3,95	3,90	3,85	3,80	3,75	3,75	Seluruh OPD
4	Indeks Gini	indeks	0,238	0,234	0,232	0,230	0,228	0,226	0,226	Seluruh OPD
5	Persentase Kemiskinan	%	8,20	8,14	8,08	8,02	7,96	7,90	7,90	Dinas Sosial
6	Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	Badan Pendapatan Daerah
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
A.2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	70,89	70,97	71,05	71,13	71,21	71,29	71,29	Seluruh OPD
2	Angka Melek Huruf Usia 15-44 Tahun	%	99,86%	99,87%	99,88%	99,89%	99,90%	99,91%	99,91%	Dinas Pendidikan
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,15	9,17	9,18	9,19	9,20	9,21	9,21	Dinas Kesehatan
4	Usia Harapan Hidup (Tahun)	%	68,4	68,6	68,7	68,8	68,9	69,0	69,0	
5	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	orang	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
6	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,12%	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,40	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,28	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
8	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	B	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga									
1	Jumlah grup/ kelompok kesenian	unit	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	Cakupan pagelaran seni dan budaya	pagelaran	3	4	4	4	4	4	4	
3	Terselenggaranya kompetisi olah raga	cabang olah raga	7	7	7	7	7	7	7	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
B.1	FOKUS URUSAN WAJIB TERKAIT LAYANAN DASAR									
1	Pendidikan									
1.1	APK PAUD	%	29,97%	31,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	35,00%	Dinas Pendidikan
1.2	Jumlah PAUD	Unit	191	205	207	209	211	213	213	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	106,52%	106,82%	107,02%	107,22%	107,42%	107,62%	107,62%	
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	95,41%	95,61%	95,71%	95,81%	95,91%	96,01%	96,01%	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	96,63%	96,73%	96,78%	96,82%	96,88%	96,92%	96,92%	
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	76,59%	76,75%	88,80%	89,30%	90,30%	90,80%	90,80%	
1.7	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	%	99,17%	99,30%	99,35%	99,40%	99,45%	99,50%	99,50%	
1.8	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,37%	99,47%	99,52%	99,57%	99,62%	99,67%	99,67%	
1.9	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,29%	0,21%	0,18%	0,15%	0,11%	0,09%	0,09%	
1.10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,47%	0,43%	0,39%	0,36%	0,31%	0,27%	0,27%	
1.11	Angka Kelulusan SD/MI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.12	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.13	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.14	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.15	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%	
1.16	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	98,00%	
1.17	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	70,96%	74,19%	75,80%	77,41%	79,03%	80,64%	80,64%	
1.18	Persentase Guru PAUD Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	%	27,76%	27,90%	28,00%	28,05%	28,15%	28,45%	28,45%	
1.19	Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	%	64,98%	65,10%	65,60%	65,70%	65,80%	70,00%	70,00%	
1.20	Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	%	87,00%	87,10%	87,20%	87,30%	87,40%	87,55%	87,55%	
1.21	Persentase Guru TK Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	%	0,66%	0,86%	0,96%	1,20%	1,80%	2,30%	2,30%	
1.22	Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	%	36,39%	36,59%	36,69%	36,79%	36,89%	37,00%	37,00%	
1.23	Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	%	46,66%	46,73%	46,78%	46,82%	46,99%	47,00%	47,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kesehatan									
2.1	Cakupan terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	Dinas Kesehatan
2.2	Cakupan Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	orang	70	65	60	55	50	45	45	
2.4	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.5	Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.6	Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.7	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.8	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.9	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.10	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.11	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.13	Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta (/100.000 Penduduk)	orang	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
2.14	Cakupan Angka Kematian Jemaah Haji (/100.000 Penduduk)	orang	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
2.15	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue) (/100.000 Penduduk)	orang	55	53	50	48	45	40	40	
2.16	Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.17	Cakupan Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.18	Cakupan Keluarga Menjadi Anggota JKN	%	80%	85%	85%	90%	95%	95%	95%	
2.19	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	12	18	18	18	18	18	18	
2.20	Cakupan bayi/balita gizi buruk mendapat perawatan kesehatan	%	85%	87%	90%	93%	97%	100%	100%	
2.21	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,00%	1,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22	Ketersediaan obat di Puskesmas	%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.23	Persentase Industry Rumah Tangga Yang Memiliki Izin PIRT	%	80%	85%	85%	90%	90%	100%	100%	
2.24	Cakupan RT ber PHBS	%	66%	68%	70%	66%	68%	70%	70%	
2.25	Cakupan Keluarga Mempunyai Akses / Menggunakan Jamban Sehat	%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	
2.26	Persentase TTU/TPM Yang memenuhi Syarat kesehatan	%	85%	87%	90%	93%	97%	100%	100%	
2.27	Cakupan desa siaga aktif	%	69%	70%	72%	69%	70%	72%	72%	
2.28	Meningkatnya jumlah posyandu mandiri	posyandu	15	30	45	60	70	80	80	
2.29	NDR (Net Death Rate)	‰	13	13	12	12	12	12	12	RSUD
2.30	TOI (Turn Over Interval)	hari	1	1	1	1	1	1	1	
2.31	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	kriteria	Dasar	Dasar	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	
2.32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	Poin	70,5	71,46	72,17	72,89	73,62	74,36	74,36	
2.33	BOR (Bad Occupacy Rate)	%	73,00%	73,00%	73,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	
2.34	AVLOS (Average Length Of Stay)	hari	3	3	3	3	3	3	3	
2.35	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit yang baik	%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	
2.36	GDR (Gross Death Rate)	‰	30	30	29	29	29	28	28	
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
3.1	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	%	62,80%	63,11%	63,43%	63,75%	64,07%	64,39%	64,39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.2	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	55,23%	62,86%	65,48%	68,10%	70,72%	73,34%	73,34%	
3.3	Capaian ketersediaan bangunan pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.4	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	
3.5	Jumlah lampu jalan yang terpelihara	unit	200	300	300	300	300	300	300	
3.6	Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	km	20	20	20	20	20	20	20	
3.7	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	49,40%	56,75%	62,22%	68,06%	73,10%	78,70%	78,70%	
3.8	Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	88,50%	91,21%	92,86%	94,51%	96,15%	97,80%	97,80%	
3.9	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.10	Jumlah sertifikasi tenaga kerja konstruksi	orang	35	100	100	100	100	100	100	
3.11	Tersedianya dokumen rencana tata ruang	dokumen	1	2	2	2	2	2	2	
3.12	Meningkatnya pengendalian ruang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.13	Ketersediaan data/ informasi urusan pekerjaan umum	dokumen	NA	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,49%	88,67%	89,55%	90,45%	91,35%	92,27%	92,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.2	Pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	km	9,2	8	8	8	8	8	49,2	
4.3	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	46,80%	58,42%	64,26%	70,69%	77,76%	85,53%	85,53%	
4.4	Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan	Meter	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4.5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Unit SR	793	800	800	800	800	800	4.793	
5	Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Cakupan lingkungan yang aman dan nyaman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	
5.3	Persentase penegakan Perda, Perbup dan peraturan lainnya	%	NA	60%	70%	80%	90%	100%	100%	
5.4	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	orang	700	500	500	500	500	500	3.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.5	Jumlah Forum Kemitraan Untuk Pengembangan Wawasan Kebangsaan	forum	3	4	4	4	4	4	4	
5.6	Terbentuknya tim kewaspadaan dini di daerah	Kecamatan	NA	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	
5.7	Tersedianya laporan informasi tentang keamanan dan ketertiban	Laporan	NA	180	180	180	180	180	900	
5.8	Jumlah Parpol/Ormas/LSM yang dibina	Parpol, Ormas/LSM	9 Parpol, 59 Ormas/LSM	15 Parpol, 59 Ormas/LSM	15 Parpol, 59 Ormas/LSM	15 Parpol, 59 Ormas/LSM	15 Parpol, 59 Ormas/LSM	15 Parpol, 59 Ormas/LSM	15 Parpol, 59 Ormas/LSM	
5.9	Indeks Resiko Bencana (IRB)									BPBD
	- Gempa Bumi	%	0,703%	0,693%	0,683%	0,673%	0,662%	0,651%	0,651%	
	- Longsor	%	0,673%	0,664%	0,655%	0,647%	0,673%	0,627%	0,627%	
	- Kebakaran Hutan dan Lahan	%	0,648%	0,622%	0,614%	0,607%	0,598%	0,589%	0,589%	
	- Cuaca Ekstrem	%	0,580%	0,561%	0,554%	0,549%	0,541%	0,535%	0,535%	
	- Banjir/bandang	%	0,718%	0,708%	0,696%	0,686%	0,673%	0,661%	0,661%	
	- Kekeringan	%	0,684%	0,675%	0,666%	0,657%	0,646%	0,636%	0,636%	
5.10	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	BPBD
5.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	23%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	BPBD
5.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	45%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sosial									
6.1	Presentase Wahana kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM/PUSKESOS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Dinas Sosial
6.2	Jumlah panti sosial/rumah singgah/ rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	unit	NA	1	1	1	1	1	1	
6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	5,20%	5,50%	5,80%	6,00%	6,20%	6,50%	6,50%	
6.4	Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat KAT	%	5%	10%	20%	25%	30%	35%	35%	
6.5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.6	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.7	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.8	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.9	Persentase Kemiskinan	%	8,20	8,14	8,08	8,02	7,96	7,90	7,90	
6.10	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B.2	FOKUS URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT LAYANAN DASAR									
1	Tenagakerja									
1.1	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang	48	64	64	64	64	64	64	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
1.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,40	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,28	
1.3	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	520	520	520	520	520	520	520	
1.4	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	orang	100	100	100	100	100	100	100	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	%	49%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2	Persentase perempuan dalam berpolitik	%	36%	36%	36%	36%	36%	45%	45%	
2.3	Persentase perempuan dalam berorganisasi	%	30%	32%	34%	36%	38%	40%	40%	
2.4	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	0,030%	0,028%	0,026%	0,024%	0,022%	0,020%	0,020%	
2.5	Persentase OPD yang telah melakukan analisis ARG dalam penyusunan program kegiatan	%	18,18%	36,36%	55%	73%	91%	100%	100%	
2.6	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap anak	%	55%	60%	63%	65%	67%	70%	70%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pangan									
3.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,40%	92,30%	94,30%	96,30%	98,10%	100,00%	100,00%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	%	91,72%	91,87%	92,02%	92,17%	92,32%	92,47%	92,47%	
3.3	Persentase Konsumsi Protein Per kapita	%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	97,50%	
3.4	Ketersediaan pangan utama (produksi/tahun)	ton/tahun	59.741	60.338	60.935	61.533	62.130	62.728	62.728	
3.5	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita/hari	3.897	3.995	4.053	4.111	4.169	4.227	4.227	
3.6	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	93,24	94,64	96,04	97,44	98,84	100,24	100,24	
3.7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	9	10	10	10	10	10	10	
4	Pertanahan									
4.1	Cakupan kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum	%	0%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Lingkungan Hidup									
5.1	Timbulan Sampah Yang Ditangani	%	45%	59%	68%	74%	79%	83%	83%	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Operasionalisasi TPA di kabupaten	≥ 71(nilai TPA)	71,43	72,12	72,62	73,12	73,62	74,12	74,12	
5.3	Persentase sampah yang tertangani melalui 3R	ton	71,75	78,92	86,82	95,5	105,05	115,55	481,84	
5.4	Persentase cakupan area pelayanan sampah	%	35,11%	58,61%	70,93%	81,13%	89,08%	97,99%	97,99%	
5.5	Jumlah tempat penyimpanan sementara limbah B3	unit					1		1	
5.6	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	75%	75%	78%	80%	82%	85%	85%	
5.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	56,31	65,6	66,6	67,6	68,6	69,6	69,6	
5.8	Peningkatan indeks kualitas air	indeks	70	71	72	73	74	75	75	
5.9	Peningkatan indeks kualitas udara	indeks	55,55	81	82	83	84	85	85	
5.10	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	indeks	46,61	50	51	52	53	54	54	
5.11	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.12	Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	150	150	150	150	150	150	150	
5.13	Terlaksananya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	batang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.14	Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dipelihara	lokasi	7	7	7	7	7	7	7	
5.15	Dokumen dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan	dokumen	7	4	3	4	3	3	21	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	91,00%	93,00%	95,00%	97,00%	99,00%	100,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase pasangan ber akte nikah	%	19%	23%	30%	35%	40%	45%	45%	
6.3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	32%	40%	45%	50%	55%	60%	60%	
6.4	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	
6.5	Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.6	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan	%	94,00%	96,50%	97,50%	98,50%	99,50%	100,00%	100,00%	
6.7	Cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil	%	25,76%	32,50%	37,50%	42,50%	47,50%	52,50%	52,50%	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Jumlah desa cepat berkembang	Desa	27	5	5	5	5	27	52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa terbentuk	Desa	15	15	15	15	15	15	75	
7.3	Jumlah Pembentukan BUMdes dan Bumdes Bersama	BUMdes	35	25	25	25	25	26	161	
7.4	Persentase Desa yang mempunyai Produk unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	60%	
7.5	Terlaksenanya kerjasama antar desa	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.6	Jumlah Profil Desa sesuai standard	Desa	27	27	27	27	27	26	161	
7.7	Persentase Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa	%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.8	Persentase Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.	%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.9	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR	%	60%	60,5%	61%	62%	62,0%	63%	63%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	34,5%	34,6%	34,7%	34,8%	34,9%	35,0%	35,0%	
8.3	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	20,0%	19,5%	19,0%	18,5%	18,0%	17,5%	17,5%	
8.4	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang usia istrinya dibawah 20 tahun	%	3,70%	3,69%	3,68%	3,67%	3,66%	3,65%	3,65%	
8.5	Menurunnya kebutuhan ber KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,90%	4,85%	4,80%	4,75%	4,70%	4,65%	4,65%	
8.6	Menurunnya kelahiran total/ Total fertility rate (TFR)	%	2,86	2,84	2,82	2,8	2,78	2,76	2,76	
8.7	Rasio Akseptor KB	%	60%	60%	61%	61%	62%	62%	62%	
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	4	4	3,8	3,6	3,5	3,1	3,1	
8.9	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	3,46%	3,45%	3,44%	3,43%	3,42%	3,41%	3,41%	
8.10	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	71,00%	71,50%	72,00%	72,50%	73,00%	73,50%	73,50%	
8.11	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	3,46%	3,44%	3,43%	3,42%	3,41%	3,40%	3,40%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Perhubungan									
9.1	Angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah Laka	414	108	98	88	78	68	68	Dinas Perhubungan
9.2	Cakupan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.4	Jumlah kendaraan layak jalan	Unit	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800	
9.5	Jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Unit	4	4	4	4	4	4	4	
10	Komunikasi dan Informatika									
10.1	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi	Media	5 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	7 Media desiminasi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	NA	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
11.1	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	unit	25	30	35	40	45	50	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.2	Jumlah Koperasi Sehat	unit	5 koperasi	10 koperasi	15 koperasi	20 koperasi	25 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	
11.3	Jumlah usaha kecil menengah yang bertumbuh	unit	1.544	1.594	1.634	1.684	1.744	1.814	1.814	
11.4	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	unit	30	40	50	60	70	80	80	
11.5	Persentase KUKM yang menghasilkan produk unggulan	%	1,94	2,51	3,06	3,56	4,01	4,41	4,41	
12	Penanaman Modal									
12.1	Jumlah investor	unit	15	112	123	138	154	174	174	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
12.2	Jumlah nilai investasi	Milyar (Rp)	3.593,35	4.930,88	5.697,15	6.586,65	7.497,85	8.483,15	8.483,15	
12.3	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	Milyar (Rp)	533,27	623,50	766,27	889,50	911,20	985,30	985,30	
12.4	Pertumbuhan nilai investasi	%	20,83%	72,87%	68,55%	52,08%	42,51%	40,67%	40,67%	
12.5	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	izin	79	85	100	113	113	113	113	
12.6	Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (tepat waktu)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.7	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	indeks	70,75	71,46	72,17	72,89	73,52	74,36	74,36	
12.8	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
12.9	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Workshop	orang	4	10	13	16	20	21	21	
13	Kepemudaan dan Olah Raga									
13.1	Terfasilitasinya pelayanan kepemudaan	orang	1.439	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
13.2	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan (OKP)	OKP	47	50	50	50	50	50	50	
13.3	Terselenggaranya kompetisi olah raga	cabang olah raga	7	7	7	7	7	7	7	
13.4	Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Statistik									
14.1	Jumlah Ketersedian Data Statistik Daerah	dokumen	0 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	6 dokumen dan 24 data statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian									
15.1	Penerapan pengamanan informasi dan persandian	%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan									
16.1	Situs dan benda cagar budaya yang dilestarikan	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
16.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	1	1	1	1	1	1	1	
16.3	Cakupan fasilitasi pengkajian seni budaya daerah	kegiatan	3	4	4	4	4	4	4	
16.4	Jumlah grup/ kelompok kesenian	unit	5	5	5	5	5	5	5	
16.5	Cakupan pagelaran seni dan budaya	pagelaran	3	4	4	4	4	4	4	
16.6	Cakupan sarana dan prasarana seni	unit	1	1	1	1	1	1	1	
17	Perpustakaan									
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2	Jumlah perpustakaan yang ada	unit	303	305	307	309	311	313	313	
17.3	Jumlah koleksi buku	judul	14.680	15.680	146.680	147.680	18.680	19.680	19.680	
17.4	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan/ dibina	unit	57	59	61	63	65	67	67	
18	Kearsipan									
18.1	Jumlah pengelolaan arsip secara baku	OPD	0	10	20	30	40	47	47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2	Informasi kearsipan yang akurat	arsip	989	215	215	215	215	215	2.064	
18.3	Meningkatnya SDM kearsipan terlatih	orang	200	100	100	100	100	100	700	
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1	Kelautan dan Perikanan									
1.1	Produksi Perikanan	%	47,64%	57,20%	65,77%	75,63%	86,97%	100%	100%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
1.2	Konsumsi ikan	%	0,84	0,89	0,91	0,94	0,97	1,00	1,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pariwisata									
2.1	Jumlah Objek Wisata	objek	2	2	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.2	Jumlah Kunjungan wisata	orang	128.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000	
2.3	Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,00	
2.4	Jumlah event pariwisata	event	3	3	3	3	3	3	3	
2.5	Jumlah sumber daya manusia kepariwisataan	orang	100	100	100	100	100	100	500	
3	Pertanian									
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,39	100,10	100,11	100,12	100,13	100,14	100,14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.2	Produktivitas Tanaman Pangan									
	- Padi Sawah	kw/ha	59,99	60,59	61,20	61,81	62,43	63,05	63,68	
	- Padi Ladang	kw/ha	34,44	34,78	35,13	35,48	35,84	36,20	36,56	
	- Jagung	kw/ha	62,93	63,56	64,19	64,84	65,49	66,14	66,80	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.3	Produksi Hortikultura									
	- Jeruk Manis	Ton	52,577	53,629	54,701	55,795	56,911	58,049	58,049	
	- Kentang	Ton	72.864,600	74.321,892	75.808,330	77.324,496	78.870,986	80.448,406	80.448,410	
	- Wortel	Ton	32,680	33,007	33,337	33,670	34,007	34,347	34,350	
	- Tomat	Ton	1.988,760	2.008,648	2.028,734	2.049,021	2.069,512	2.090,207	2.090,210	
	- Cabe	Ton	71.307,010	73.446,220	75.649,607	77.919,095	80.256,668	82.664,368	82.664,370	
	- Bawang Merah	Ton	2.925,350	3.013,111	3.103,504	3.196,609	3.292,507	3.391,282	3.391,280	
	- Kubis	Ton	3.543,920	3.614,798	3.687,094	3.760,836	3.836,053	3.912,774	3.912,770	
	- Manggis	Ton	545,415	550,869	556,378	561,942	567,561	573,237	573,240	
	- Durian	Ton	16.689,974	17.023,774	17.364,249	17.711,534	18.065,765	18.427,080	18.427,080	
	- Duku	Ton	819,520	827,715	835,992	844,352	852,796	861,324	861,320	
	- Alpukat	Ton	1.940,870	1.960,279	1.979,881	1.999,680	2.019,677	2.039,874	2.039,870	
3.4	Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat									Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	- Kopi	Ton	12.086,400	12.448,992	12.697,972	14.000,000	15.000,000	16.000,000	16.000,000	
	- Kakao	Ton	318,890	344,401	375,397	412,937	458,360	513,363	513,363	
	- Gambir	Ton	254,400	274,752	299,480	329,428	365,665	409,544	409,544	
	- Lada	Ton	17,400	17,582	17,765	17,951	18,138	18,327	18,327	
	- Kemiri	Ton	6.674,000	7.207,920	7.856,633	8.642,296	9.592,949	10.744,102	10.744,102	
	- Tembakau	Ton	906,000	915,459	933,768	952,443	971,492	990,922	990,922	
	- Kemenyan	Ton	0,700	1,050	1,400	1,750	2,100	2,450	2,450	
	- Aren	Ton	28,000	32,200	37,000	42,500	48,000	58,000	58,000	
	- Nilam	Ton	21,800	22,300	23,800	24,700	25,300	28,800	28,800	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.5	Jumlah Populasi Peternakan									Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	- Sapi	ekor	3.205	3.260	3.302	3.335	3.368	3.402	3.402	
	- Kerbau	ekor	3.014	3.075	3.110	3.136	3.170	3.198	3.198	
	- Babi	ekor	110.090	111.302	112.316	113.405	114.560	115.860	115.860	
	- Ayam	ekor	1.175.723	1.188.830	1.202.110	1.233.180	1.247.980	1.262.958	1.262.958	
3.6	Jumlah pembangunan infrastruktur pertanian	unit	41	45	49	53	57	61	61	
3.7	Terkendalnya organisme pengganggu tanaman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.8	Jumlah kelompok tani yang dibina	kelompok	453	1.580	1.600	1.620	1.640	1.660	1.660	
3.9	Cakupan penyuluhan pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.9	Terlaksananya promosi hasil produksi pertanian	event	1	3	3	3	3	3	3	
3.10	Persentase penanganan kesehatan hewan ternak									
	- Sapi	%	33,00%	33,33%	34,00%	34,68%	35,72%	36,79%	36,79%	
	- Kerbau	%	35,00%	35,70%	36,41%	37,51%	38,63%	39,79%	39,79%	
	- Babi	%	7,10%	7,17%	7,31%	7,46%	7,68%	7,92%	7,92%	
	- Kambing	%	8,08%	8,24%	8,41%	8,57%	8,83%	9,10%	9,10%	
	- Ayam	%	1,10%	1,12%	1,14%	1,18%	1,21%	1,26%	1,26%	
	- Anjing	%	30,60%	30,91%	31,52%	32,15%	33,12%	34,11%	34,11%	
4	Perdagangan									
4.1	Jumlah pameran/promosi produk daerah	pameran	6	12	12	12	12	12	12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.2	Jumlah kemitraan antara pedagang Kabupaten Dairi dengan pengusaha diluar Kabupaten Dairi	kemitraan	2	5	5	5	5	5	5	
4.3	pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e-commerce	system	0	1	1	1	1	1	1	
4.4	Jumlah pasar yang representatif	pasar	5	6	7	8	9	10	10	
4.5	Pengawasan penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar kemetrolagian	unit	500	700	750	800	850	900	900	
4.6	Jumlah alat UTTP yang ditera/ tera ulang	unit	500	650	700	750	800	850	850	
5	Perindustrian									
5.1	Jumlah IKM yang tersertifikasi	IKM	8	10	12	14	16	18	18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.2	Jumlah unit usaha industri kecil menengah (IKM)	unit	728	733	738	743	748	753	753	
5.3	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha IKM	orang	100	100	100	100	100	100	600	
5.4	Jumlah sentra IKM potensial	sentra	0	1	1	1	1	1	5	
5.5	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	
5.6	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	IKM	7	10	10	10	10	10	57	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.4	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG									
1	Perencanaan Pembangunan									
1.1	Persentase indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target	%	NA	75%	76%	77%	78%	79%	79%	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
1.2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Keuangan									
2.1	Ketersediaan dokumen laporan keuangan daerah	31 desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.2	Penyusunan APBD tepat waktu (31 Desember)	31 desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2.3	Teraksistensinya DPA dan Anggaran kas SKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.4	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.5	Tertib administrasi BMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.6	Rasio pemanfaatan Asset	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.7	Persentase realisasi pajak daerah	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Badan Pendapatan Daerah
2.8	Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah	%	1,97%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
2.9	Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	
2.10	Cakupan monitoring dan evaluasi retribusi daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan									
3.1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan	Orang	17	40	40	40	40	40	200	BKPSDM
3.2	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	3.145	1.496	1.498	1.331	1.448	1.520	7.293	
3.3	Jumlah Dokumen dan Naskah Kebutuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	dokumen/ Naskah	3.251	309	306	305	305	307	1.530	
3.4	Jumlah OPD yang dikunjungi untuk Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	OPD	45	47	47	47	47	47	235	
3.5	Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	kali	17	4	4	4	4	4	20	
3.6	Jumlah PNS yang difasilitasi penerbitan SK Pensiun/Purna	orang	385	191	164	229	202	47	833	
4	Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Penerapan replikasi jejaring inovasi daerah	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4.2	Terbangunnya penerapan sistem manajemen berbasis e-kelitbangan	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.3	Dokumen kajian penelitian dan pengembangan	dokumen	2	5	5	5	5	5	25	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pengawasan									
5.1	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Inspektorat
5.2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan KKN dan penyalahgunaan kewenangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.3	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	NA	60	63	66	69	72	72	
5.4	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	4	4	
6	Kewilayahan									
6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,20	78,40	78,60	78,80	79,00	79,20	79,20	Kecamatan Sidikalang
6.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kelurahan di Kecamatan Sidikalang	Indeks	78,20	78,40	78,60	78,80	79,00	79,20	79,20	Kecamatan Sidikalang
6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Indeks	77,20	77,40	77,60	77,80	78,00	78,20	78,20	Kecamatan Sumbul
6.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Julu I	Indeks	77,20	77,40	77,60	77,80	78,00	78,20	78,20	Kecamatan Sumbul
6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-pungga	Indeks	76,80	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80	77,80	Kecamatan Silima Pungga-pungga
6.6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Parongil	Indeks	76,80	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80	77,80	Kecamatan Silima Pungga-pungga
6.7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Indeks	76,60	76,80	77,00	77,20	77,40	77,60	77,60	Kecamatan Siempat Nempu
6.8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Indeks	77,40	77,60	77,80	78,00	78,20	78,40	78,40	Kecamatan Tigalingga
6.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Indeks	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80	78,00	78,00	Kecamatan Tanah Pinem
6.10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Indeks	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	77,00	Kecamatan Pegagan Hilir
6.11	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Indeks	76,40	76,60	76,80	77,00	77,20	77,40	77,40	Kecamatan Parbuluan
6.12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Indeks	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80	76,80	Kecamatan Siempat Nempu Hilir
6.13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Indeks	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	77,20	77,20	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
6.14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lac Parira	Indeks	74,80	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	75,80	Kecamatan Lac Parira
6.15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Indeks	74,60	74,80	75,00	75,20	75,40	75,60	75,60	Kecamatan Gunung Sitember
6.16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Indeks	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	76,00	Kecamatan Berampu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Indeks	75,60	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,60	Kecamatan Silahisabungan Kecamatan Sitingjo
6.18	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitingjo	Indeks	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,40	76,40	
6.19	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Panji Dabutar	Indeks	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,40	76,40	
7	Sekretariat Daerah									
7.1	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah
7.2	Persentase SOP perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.3	Persentase analisis kebijakan organisasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.4	Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.5	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	B	
7.6	Nilai LPPD	kriteria	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sekretariat Daerah
7.7	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.8	Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.9	Efisiensi hasil tender	%	3,15%	3,25%	3,30%	3,4%	3,45%	3,50%	3,50%	
7.10	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.11	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
7.12	Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan	naskah	24	24	24	24	24	24	24	
7.13	Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun	kali	4	6	8	8	8	8	8	
7.14	Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.15	Meningkatnya kualitas data/ informasi/ statistik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.16	Rekomendasi LKPJ	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat Daerah
7.17	Terwujudnya pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.18	Cakupan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam wawasan kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.19	Persentase penanganan pengaduan pelanggaran HAM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
7.20	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/Rastra	orang	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525	
7.21	Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggung-jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.22	Jenis Produk hukum daerah yang terfasilitasi	jenis	4	4	4	4	4	4	4	Sekretariat Daerah
7.23	Cakupan jenis produk hukum yang disosialisasikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.24	Cakupan Perda yang disosialisasikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.25	Persentase fasilitasi bantuan hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.26	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
7.27	Cakupan pengendalian inflasi daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.28	Persentase Peningkatan Cakupan layanan PDAM Tirta Nciho menurut wilayah teknis	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
7.29	Persentase Kios Yang Dikelola PD Pasar yang Ditempati Pedagang	%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	
8	Sekretariat DPRD									
8.1	Terfasilitasinya persidangan di DPRD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
8.2	Rasio pembahasan prolegda	%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
8.3	Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
8.4	Ketepatan waktu pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
8.5	Jumlah pelaksanaan reses	kali	3	3	3	3	3	3	3	
8.6	Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	kali	15	15	15	15	15	15	15	
8.7	Terciptanya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.8	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	
8.9	Terfasilitasinya kesehatan anggota DPRD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,02	5,04	5,05	5,06	5,07	5,08	5,08	Seluruh OPD
2	PDRB per kapita	Ribu Rupiah	21.958,18	23.524,19	24.307,20	25.090,21	25.873,22	26.656,22	26.656,22	
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,39	100,10	100,11	100,12	100,13	100,14	100,14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Produktivitas Tanaman Pangan									
	- Padi Sawah	kw/ha	59,99	60,59	61,20	61,81	62,43	63,05	63,68	
	- Padi Ladang	kw/ha	34,44	34,78	35,13	35,48	35,84	36,20	36,56	
	- Jagung	kw/ha	62,93	63,56	64,19	64,84	65,49	66,14	66,80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2024)	OPD Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur									
1	Capaian Tersedianya Akses Air Bersih	%	62,80%	63,11%	63,43%	63,75%	64,07%	64,39%	64,39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	55,23%	62,86%	65,48%	68,10%	70,72%	73,34%	73,34%	
3	Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	km	20	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	49,40%	56,75%	62,22%	68,06%	73,10%	78,70%	78,70%	
5	Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	88,50%	91,21%	92,86%	94,51%	96,15%	97,80%	97,80%	
6	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,49%	88,67%	89,55%	90,45%	91,35%	92,27%	92,27%	
7	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	46,80%	58,42%	64,26%	70,69%	77,76%	85,53%	85,53%	
8	Cakupan ketersediaan drainase untuk mengurangi terjadinya genangan	Meter	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
C.3	Fokus Iklim Berinvestasi									
1	Jumlah investor	unit	15	112	123	138	154	174	174	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2	Jumlah nilai investasi	Miliar (Rp)	3.593,35	4.930,88	5.697,15	6.586,65	7.497,85	8.483,15	8.483,15	
3	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	Miliar (Rp)	533,27	623,50	766,27	889,50	911,20	985,30	985,30	
4	Pertumbuhan nilai investasi	%	20,83%	72,87%	68,55%	52,08%	42,51%	40,67%	40,67%	
C.4	Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	106,52%	106,82%	107,02%	107,22%	107,42%	107,62%	107,62%	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	95,41%	95,61%	95,71%	95,81%	95,91%	96,01%	96,01%	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	96,63%	96,73%	96,78%	96,82%	96,88%	96,92%	96,92%	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	76,59%	76,75%	88,80%	89,30%	90,30%	90,80%	90,80%	Dinas Pendidikan
4	Angka Kelulusan SD/MI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan
5	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan
5	Persentase Guru PAUD Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	%	27,76%	27,90%	28,00%	28,05%	28,15%	28,45%	28,45%	Dinas Pendidikan
6	Persentase Guru SD/MI Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	%	64,98%	65,10%	65,60%	65,70%	65,80%	70,00%	70,00%	Dinas Pendidikan
7	Persentase Guru SMP/MTs Yang Telah Memenuhi Kualifikasi S-1	%	87,00%	87,10%	87,20%	87,30%	87,40%	87,55%	87,55%	Dinas Pendidikan
8	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	3.145	1.496	1.498	1.331	1.448	1.520	7.293	BKPSDM

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019–2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Dairi kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi. Selanjutnya RPJMD ini juga akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode lima tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama periode Tahun 2020–2024.

Dalam rangka terwujudnya pencapaian visi, misi dan program pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD ini, sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun seluruh *stakeholder*, sehingga kerjasama dan koordinasi keseluruhan pemangku kepentingan akan dapat mendukung terwujudnya Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun pertama 2020 hingga tahun akhir 2024. Sedangkan Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD 2005-2025, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan daerah provinsi dan nasional, yang akan memuat visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah berikutnya.

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke depan (2025) setelah periode RPJMD Kabupaten Dairi berakhir tahun 2024, bertujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi landasan bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Dairi periode selanjutnya.

Program transisi sudah barang tertentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dairi, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2019-2024 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2020-2024.
3. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dairi, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah masing-masing, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas/Badan/Unit (Renja Perangkat Daerah).
4. Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDes harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.
5. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dan RPJMDes.
6. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
7. Konsep deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dairi berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 - 2024

RPJMD